



**PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN 2025**

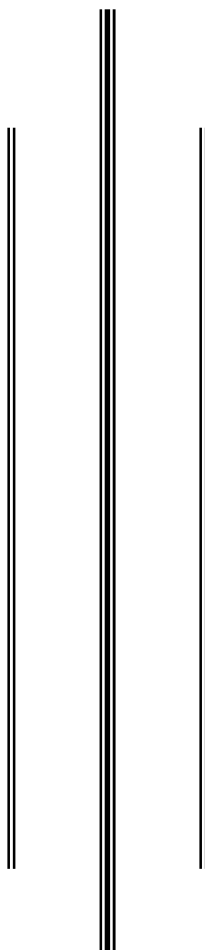


2025

Pemerintah Provinsi Bali
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



**PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2025**



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2025.

Pasal I

Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2024), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

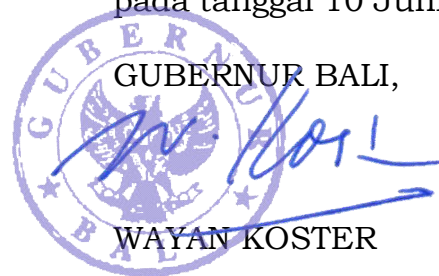
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Juni 2025

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 24

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	5
1.3.1 Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025	7
1.3.2 Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	7
1.3.3 Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, Perubahan Renja Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2025 serta KUPA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025	7
1.3.4 Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota	8
1.4 Maksud dan Tujuan	8
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025	9
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	11
2.1 Hasil Evaluasi RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 Pada Triwulan I Tahun 2025	11
2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Bali	211
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	223
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	244
3.1 Kerangka Ekonomi Daerah	244
3.1.1 Tantangan Perekonomian Bali Tahun 2025 dan Langkah yang ditempuh	245
3.1.2 Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2025	248
3.2 Kerangka Keuangan Daerah	249
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	250
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah	251
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah	254
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	256
4.1 Prioritas Pembangunan	260
4.2 Paradigma Pembangunan Bali	272
4.3 Strategi	274
4.4 Arah Kebijakan	300
4.5 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	307

BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	326
BAB VI	PENUTUP	566

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Masing-Masing Urusan dan Perangkat Daerah	14
Tabel 2.2 IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on year (y-on-y) Provinsi Bali Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Februari 2025	216
Tabel 2.3 Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Februari 2025 Kabupaten/Kota Wilayah Cakupan IHK di Provinsi Bali (2022=100)	218
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2020-2024	218
Tabel 2.5 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2024-Februari 2025	220
Tabel 2.6 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Daerah Untuk Penanganan pada Masing-Masing Urusan Pemerintahan	223
Tabel 3.1 Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2025	248
Tabel 3.2 Perbandingan Pendapatan Daerah APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025	251
Tabel 3.3 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025	253
Tabel 3.4 Rencana Pembiayaan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025	255
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	258
Tabel 4.2 Persandingan Prioritas Pembangunan Dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025	270
Tabel 4.3 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	271
Tabel 4.4 Strategi Pembangunan Dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	275
Tabel 4.5 Arah Kebijakan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	304
Tabel 4.6 Persandingan IKU dalam RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 terhadap IKU dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025	308
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025	310
Tabel 4.8 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025	310
Tabel 5.1 Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025	327

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025	6
Gambar 2.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Secara <i>Year to Year</i> (y to y) 2024-2025	212
Gambar 2.2	Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024 dan Triwulan I-2025 (y-on-y) (persen)	214
Gambar 2.3	Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Bali bulan Januari 2023- Februari 2025 (Persen)	217
Gambar 2.4	Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Februari 2025	221
Gambar 2.5	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2024-Februari 2025	223
Gambar 4.1	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1	261
Gambar 4.2	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2	262
Gambar 4.3	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3	264
Gambar 4.4	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4	266
Gambar 4.5	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5	267
Gambar 4.6	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6	268
Gambar 4.7	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7	269

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih untuk periode jabatan Tahun 2025-2029 maka pada tahun 2025 ini disusun RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. SE Mendagri ini mengamanatkan Pemerintah Daerah menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan, dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur terpilih.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini, kemudian dengan

adanya SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ yang mengamanat untuk mengakomodasi aspirasi dalam pembangunan di daerah tahun 2025, serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025.

Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu RKPD dapat dilakukan revisi. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD dimaksud seperti: (1) penyelarasan tujuan dan sasaran menyesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029; (2) penyesuaian target pendapatan di tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan I tahun 2025; (3) perubahan target kinerja beberapa

program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya; serta (4) perubahan dalam struktur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus disesuaikan.

Sebagaimana pendekatan terhadap rencana pembangunan daerah pada umumnya, perubahan RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *topdown* dan *bottom-up*. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Tahun 2025 yang akan disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Provinsi Bali. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPAS Semesta Berencana Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

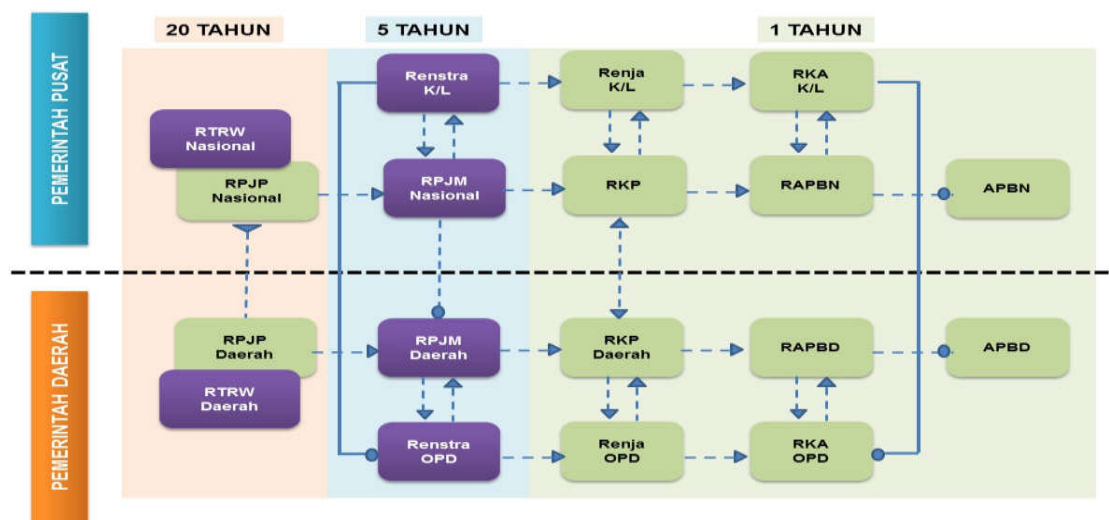
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7); dan
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 12).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagi dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.



Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap Perubahan RKPD
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025

Dalam praktiknya, penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 juga disusun tetap memperhatikan kebijakan tingkat nasional. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses sistematis, Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 juga akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUPA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025. Dokumen KUPA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2025 serta dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

1.3.1. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025

Keterkaitan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 meliputi sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam Renstra Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2025-2029. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.3.2. Perubahan RKPD Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun pertama pelaksanaan dari RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

1.3.3. Perubahan RKPD Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, Perubahan Renja Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2025 serta KUPA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 memuat Perubahan Renja Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2025 dan mengacu pada Rancangan Awal Renstra Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program dan kegiatan sesuai

dengan prioritas pembangunan tahun 2025, hasil penelahan, direktif kepala daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, dan hasil evaluasi sampai triwulan I terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan dasar penyusunan rancangan KUPA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan rancangan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 untuk dibahas dan disepakati antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi Bali. Penyusunan KUPA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali digunakan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali.

1.3.4. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota

Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 di wilayah Provinsi Bali disusun menjadi pedoman bagi Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 agar antara perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota selaras dengan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menyelaraskan tema dan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota. Pemilahan pelaksanaan urusan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan dengan visi dan misi Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Bali;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Bali; serta
6. Menciptakan iklim pemerintahan yang pasrtisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan

Bab ini memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 yang meliputi capaian kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan I tahun 2025, kendala yang dihadapi, solusi yang akan ditempuh. Bab ini juga menguraikan capaian kinerja pembangunan Provinsi Bali yang meliputi

capaian indikator makro ekonomi Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini menerangkan tentang Kerangka Ekonomi Bali untuk Tahun 2025 dan Kerangka Keuangan Daerah tahun 2025.

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang meliputi Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas dan Tema Pembangunan Daerah Tahun Provinsi Bali Tahun 2025. Bab ini juga menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Dalam Bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintah daerah dalam tahun 2025 baik yang mengalami perubahan maupun tidak disertai dengan pendanaannya.

BAB VI : Penutup

Dalam BAB ini menjelaskan harapan dan mengurai prinsip dan kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2025 dan sebagian telah dilaksanakan sampai triwulan I tahun 2025. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Bali. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.

2.1. Hasil Evaluasi RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 Pada Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana pembangunan sampai triwulan I Tahun 2025: dari total 174 program yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 19 program (10,91%) telah mencapai target pada Triwulan I (bulan Maret), sebanyak 155 program (89,08%) belum mencapai target pada Triwulan I (bulan Maret). Untuk level kegiatan, dari jumlah total 462 kegiatan : 57 kegiatan (12,34%) telah mencapai target pada Triwulan I (bulan Maret); dan 405 kegiatan (87,66%) belum mencapai target pada Triwulan I (bulan Maret). Dari 1.157 Sub Kegiatan : sebanyak 135 Sub Kegiatan (11,67%) sudah mencapai target pada Triwulan I (bulan Maret); dan 1.022 Sub Kegiatan (88,33%) belum mencapai target pada Triwulan I (bulan Maret).

Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang target kinerjanya sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan kinerja pada triwulan I dan II, seperti untuk indikator Indeks atau Nilai Manajemen Kinerja dan untuk yang telah mencapai target pada triwulan I tahun 2025 kebanyakan adalah sub kegiatan rutin urusan kerumahtanggaan pada Perangkat Daerah.

Terdapat beberapa perangkat daerah yang telah berkinerja dengan baik namun di samping itu pula terdapat beberapa perangkat daerah yang kinerjanya di dalam pencapaian target masih perlu ditingkatkan baik dari segi capaian kinerja fisik maupun serapan anggaran sehingga perlu dilakukan upaya-upaya serta langkah-langkah strategis dalam setiap pelaksanaan kinerja agar pencapaian target yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat dicapai secara optimal dan memperoleh solusi penanganan yang tepat berpedoman dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diantaranya:

1. Pergeseran anggaran yang berpengaruh terhadap target indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
2. Kegiatan yang bersifat koordinasi dilaksanakan secara daring sehingga menyebabkan berkurang beban konsumsi, perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga target kinerja pada sub kegiatan tersebut tidak akan tercapai.
3. Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang pengukuran target kinerjanya dilakukan sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan capaian kinerja pada triwulan I, seperti indikator Indeks atau Nilai Manajemen Kinerja.
4. Adanya kesalahan uraian belanja pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).
5. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang memang dimulai pada triwulan 3 dan 4, sehingga target belum tercapai pada triwulan 1.
6. Beberapa sub kegiatan terkendala pada proses tender/pengadaan dan menghabiskan waktu lebih panjang dari target sehingga kontrak belum dapat terpenuhi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, berikut langkah-langkah yang diperlukan pada triwulan-triwulan berikutnya, antara lain seperti :

1. Penyesuaian-penyesuaian terhadap RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.
2. Konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas.
3. Koordinasi lintas sektor/lintas kewenangan untuk memenuhi target indikator sasaran
4. Penataan kembali terhadap rancangan APBD 2025 agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien;
5. Dukungan penganggaran non-government dalam meningkatkan efektifitas pencapaian indikator sasaran
6. Koordinasi teknis secara efektif dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan tingkat kewenangan dan dilakukan secara bertahap dengan target yang jelas dan terukur.

Selanjutnya rekapitulasi capaian realisasi kinerja dan keuangan pada masing-masing urusan dan Perangkat Daerah, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut.

Tabel 2.1.
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan
pada Masing-Masing Urusan dan Perangkat Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/ d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																	
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan																
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86	129.898.278.266,00		18.879.031.808,00		0,00		0,00		0,00		15%	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan terhadap penganggaran belanja OPD	100	552.920.020,00		93.597.224,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	335.389.710,00	1	83.206.142,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	217.530.310,00	1	10.391.082,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	14.084.061.598,00		2.055.624.591,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134	13.882.480.678,00	51	2.040.602.427,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	101.166.410,00	3	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12	100.414.510,00	3	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	8.595.466.382,00		799.142.338,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	3	149.002.100,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	439.034.000,00	0	490.000,00	0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	1.734.090.446,00	1	79.937.000,00	0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	137.117.600,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1.075.320.000,00	3	122.700.000,00	0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	5.060.902.236,00	3	596.015.338,00	0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	12.508.990.500,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	12.508.990.500,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas	100	2.543.024.042,00		386.639.836,00	0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia untuk kegiatan surat menyurat	12	15.700.000,00	3	5.000.000,00	0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	850.000.000,00	3	121.796.294,00	0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.677.324.042,00	3	259.843.542,00	0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100	28.798.342.450,00		565.118.620,00	0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	61	3.750.756.238,00	11	422.669.875,00	0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV					
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	24.404.546.212,00	1	142.448.745,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22	643.040.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100	61.568.152.634,00		14.882.863.323,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55	59.732.867.624,00	55	14.797.917.841,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	729	1.579.698.500,00	0	68.794.400,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55	255.586.510,00	0	16.151.082,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100	1.247.320.640,00		96.045.876,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	30	184.444.240,00	0	30.044.328,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48	1.062.876.400,00	12	66.001.548,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2	(tidak ada sasaran)																
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan kepada pemimpin dan anggota DPRD Provinsi Bali	100	94.132.418.522,00		19.660.911.338,00		0,00		0,00		0,00		21%	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD	100	11.868.172.860,00		558.563.132,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1.030.112.520,00	0	187.555.104,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	21	10.196.314.330,00	1	363.496.946,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau	3	641.746.010,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
				Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi													PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terbentuknya Kebijakan Anggaran untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD	100	2.787.061.132,00		37.555.510,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	75.911.892,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	64.867.710,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	895.785.110,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	872.174.410,00	0	7.511.182,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	878.322.010,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100	22.191.813.064,00		3.690.541.262,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	5.347.460.414,00	3	812.986.282,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	5.044.255.800,00	3	791.926.242,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	5.017.200.830,00	3	744.945.454,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	6.051.103.820,00	3	977.626.656,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	731.792.200,00	1	363.056.628,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100	12.328.427.020,00		1.894.261.634,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil	4	2.524.381.230,00	1	1.285.892.978,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pendalaman Tugas DPRD														DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18	4.467.166.400,00	18	405.000.000,00		0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5	670.186.800,00	5	60.000.000,00		0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1.389.943.820,00	0	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60	3.276.748.770,00	15	128.346.492,00		0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terserap dan terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk menunjang tugas dan Fungsi DPRD	100	37.864.757.932,00		12.288.297.070,00		0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	1.968.968.812,00	3	704.888.246,00		0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	676.537.500,00	0	144.296.660,00		0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	35.219.251.620,00	1	11.439.112.164,00		0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase pelaksanaan pengawasan kode etikDPRD dalam rangka menunjang tugas dan Fungsi DPRD	100	588.000.664,00		75.508.436,00		0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3	588.000.664,00	0	75.508.436,00		0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan menunjang tugas dan fungsi DPRD	100	6.504.185.850,00		1.116.184.294,00		0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10	4.960.601.230,00	2	775.742.946,00		0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	180	369.032.820,00	0	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	685.137.840,00	1	30.044.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	2.647.671.358,00	2	177.023.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	7.336.554.462,00	3	613.865.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	10.194.377.134,00	3	1.050.517.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	520.540.874,00	1	82.621.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	18.137.609.788,00	0	2.232.172.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.069.469.360,00	3	392.087.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	10.176.844.128,00	3	720.544.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	106	5.891.296.300,00	25	1.119.540.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	13.172.550.878,00	25	1.162.906.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	136	6.876.182.652,00	30	1.064.329.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	6.296.368.226,00	2	98.576.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	5.372.057.408,00	25	1.375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	5.372.057.408,00	2	1.375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	26.955.707.242,00	25	1.436.075.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47	16.540.186.296,00	12	1.256.907.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	40	10.011.023.848,00	3	145.868.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	yang Disediakan	1	404.497.098,00	01	33.300.000,00		0,00		0,00		0,00			BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	541.115.000,00	25	94.963.070,00		0,00		0,00		0,00			BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	541.115.000,00	3	94.963.070,00		0,00		0,00		0,00			BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksanannya Fasilitasi Keprotokolan	100	2.079.394.124,00	25	383.965.792,00		0,00		0,00		0,00			BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12	2.079.394.124,00	3	383.965.792,00		0,00		0,00		0,00			BIRO UMUM DAN PROTOKOL
BIRO ORGANISASI																	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan																
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	89	692.535.760,00	22	156.021.410,00		0,00		0,00		0,00		23%	BIRO ORGANISASI
		4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	89	222.465.792,00	22	67.478.082,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI
		4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1	54.800.000,00	0	1.720.000,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI
		4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1	55.560.000,00	0	28.275.000,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI
		4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29	112.105.792,00	7	37.483.082,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik	89	470.069.968,00	22	88.543.328,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI
		4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	136.243.892,00	0	27.071.082,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI
		4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3	116.325.392,00	0	30.671.082,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI
		4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	14.997.000,00	0	1.419.000,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI
		4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2	101.993.492,00	0	21.871.082,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI
		4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4	100.510.192,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI
3	(tidak ada sasaran)																
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan baik	58	453.187.944,00	14	55.257.574,00		0,00		0,00		0,00		12%	BIRO ORGANISASI
		2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang Dikelola dengan Baik	12	266.769.168,00	3	35.724.328,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI
		2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan Khusus yang dibina sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan	50	55.666.492,00	10	6.511.082,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V				
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500	100.066.392,00	0	6.511.082,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	
		2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	1	111.036.284,00	0	22.702.164,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	
		2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	39	186.418.776,00	0	19.533.246,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	
		2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	3	63.965.792,00	0	6.511.082,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	
		2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	15	122.452.984,00	0	13.022.164,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali yang Dihimpun	4,2	98.092.984,00	0	14.022.164,00		0,00		0,00		0,00		14%	BIRO ORGANISASI	
		2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	300	98.092.984,00	0	14.022.164,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	
		2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300	98.092.984,00	0	14.022.164,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Managemen Kinerja pada Biro Organisasi	86	1.646.222.780,00	20	89.852.092,00		0,00		0,00		0,00		5%	BIRO ORGANISASI	
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan	1	4.976.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	
		4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	4.976.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100	790.988.728,00	25	40.094.400,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	
		4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	16.460.400,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	
		4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	614.052.328,00	3	9.640.200,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	
		4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	160.476.000,00	0	30.454.200,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik	1	850.258.052,00	0	49.757.692,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	
		4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13	769.808.052,00	4	49.757.692,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	
		4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	117	80.450.000,00	20	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO ORGANISASI	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SEKRETARIAT DAERAH																	
4	(tidak ada sasaran)																
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	83	81.731.654.004,00	0	13.624.539.436,00		0,00		0,00		0,00		17%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	78.743.344.494,00	25	13.373.302.116,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	262	78.743.344.494,00	262	13.373.302.116,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	2.988.309.510,00	25	251.237.320,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2.988.309.510,00	2	251.237.320,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM																	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan																
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Biro Hukum	81	2.182.593.118,00	0	503.109.998,00		0,00		0,00		0,00		23%	BIRO HUKUM
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	5	887.126.934,00	1	42.486.076,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	13.740.700,00	0,5	6.209.000,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	10.990.900,00	0,5	2.170.000,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	774.135.334,00	0	9.018.000,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	88.260.000,00	0	25.089.076,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	130	1.295.466.184,00	3	460.623.922,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	468.823.394,00	0	325.164.646,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	766.752.790,00	3	135.459.276,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20	1.600.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95	58.290.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
6	(tidak ada sasaran)																
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang	100	4.170.928.210,00	35	260.137.299,00		0,00		0,00		0,00		6%	BIRO HUKUM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV		(%)			
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	1220	1.664.241.474,00	446	170.642.722,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum	45	855.050.722,00	9	31.464.328,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000	161.709.540,00	365	30.444.328,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50	263.058.042,00	20	45.266.492,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	125	384.423.170,00	52	63.467.574,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan	57	2.506.686.736,00	3	89.494.577,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	33	2.246.823.296,00	3	53.260.249,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
		4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	24	259.863.440,00	0	36.234.328,00		0,00		0,00		0,00			BIRO HUKUM
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																	
7	(tidak ada sasaran)																
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	2.140.544.774,00	0	125.653.300,00		0,00		0,00		0,00		6%	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	332.213.362,00	25	61.978.656,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	332.213.362,00	1	61.978.656,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	803.414.920,00	25	42.047.762,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15.976.600,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	416.282.320,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	1	31.727.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-11				
						-7		-8		-9		-10		-11				
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				disediakan													DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	339.429.000,00	0	42.047.762,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertata	100	1.004.916.492,00	25	21.626.882,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15	905.956.492,00	2	21.626.882,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	124	86.160.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	160	12.800.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	75	2.474.593.012,00	0	407.062.312,00		0,00		0,00		0,00		16%	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	100	636.020.590,00	25	84.228.656,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	3	451.157.990,00	0	79.288.656,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2	184.862.600,00	0	4.940.000,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100	549.992.800,00	25	98.668.848,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan	2	399.993.300,00	0	75.968.848,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PEMERINTAHAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
				DPRD													DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang dilaksanakan	1	149.999.500,00	0	22.700.000,00	0,00		0,00		0,00				BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama daerah yang difasilitasi	100	1.288.579.622,00	25	224.164.808,00	0,00		0,00		0,00				BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2	339.909.422,00	0	58.069.568,00	0,00		0,00		0,00				BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1	948.670.200,00	0	166.095.240,00	0,00		0,00		0,00				BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tindaklanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	100	29.340.774.424,00	25	3.908.323.628,00	0,00		0,00		0,00			13%	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual	100	3.475.162.748,00	25	1.090.023.082,00	0,00		0,00		0,00				BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang dikelola	100	2.834.763.996,00	25	1.033.666.830,00	0,00		0,00		0,00				BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	6	640.398.752,00	1	56.356.252,00	0,00		0,00		0,00				BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100	25.865.611.676,00	25	2.818.300.546,00	0,00		0,00		0,00				BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	25.865.611.676,00	0	2.818.300.546,00	0,00		0,00		0,00				BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN																	
8	(tidak ada sasaran)																

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		V					
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	82,5	3.033.297.836,00	0	473.096.978,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16%	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	13.950.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00					BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	13.950.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00					BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	2.345.917.836,00	3	226.635.878,00		0,00		0,00		0,00					BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	2.015.493.836,00	2	222.575.378,00		0,00		0,00		0,00					BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	45.464.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00					BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	284.960.000,00	1	4.060.500,00		0,00		0,00		0,00					BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	12	673.430.000,00	3	246.461.100,00		0,00		0,00		0,00					BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37	543.480.000,00	6	246.461.100,00		0,00		0,00		0,00					BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	185	129.950.000,00	18	0,00		0,00		0,00		0,00					BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100	796.859.800,00	25	35.184.050,00		0,00		0,00		0,00			4%		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	2	369.987.000,00	0	26.295.050,00		0,00		0,00		0,00					BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2	369.987.000,00	0	26.295.050,00		0,00		0,00		0,00					BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2	251.865.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00					BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2	251.865.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00					BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi	1	175.007.800,00	0	8.889.000,00		0,00		0,00		0,00					BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1	175.007.800,00	0	8.889.000,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.07	PROGRAM KEBLIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	85	31.369.793.175,00	15	18.692.870,00		0,00		0,00		0,00		0%	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	31.067.261.175,00	3	7.161.060,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	12	29.970.000,00	3	1.470.000,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	30.959.306.175,00	0	5.691.060,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	77.985.000,00	3	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	12	139.981.000,00	3	10.856.810,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12	69.981.000,00	3	8.936.810,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	70.000.000,00	3	1.920.000,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	162.551.000,00	3	675.000,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	90	99.996.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	19.995.000,00	0	675.000,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1	42.560.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.08	PROGRAM KEBLIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	87	88.800.000,00	15	2.163.350,00		0,00		0,00		0,00		2%	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	1	44.400.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV				V	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1	44.400.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	44.400.000,00	0	2.163.350,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	44.400.000,00	0	2.163.350,00		0,00		0,00		0,00			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
DINAS KEBUDAYAAN																	
DINAS KEBUDAYAAN																	
1	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali																
		2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	66.179.154.733,00	8,46	4.611.137.439,00		0,00		0,00		0,00		7%	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10	159.476.840,00	9	34.444.328,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	155.302.340,00	3	34.444.328,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4.174.500,00	6			0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan perangkat daerah	100	59.971.149.617,00	0	3.631.352.768,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	849	59.409.471.111,00		3.517.046.538,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000	559.678.506,00		113.836.230,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48	2.000.000,00		470.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100	1.656.467.460,00	6,43	18.058.454,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26	27.085.500,00	0			0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	1.442.876.760,00	0			0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	105.000.000,00	0	10.081.650,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	5.600.000,00	0			0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	22.915.200,00	3	3.071.604,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV					
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	6.750.000,00	0			0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	46.240.000,00	1	4.905.200,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	1.872.532.568,00	35,42	367.146.213,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.495.000,00	1	5.490.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	720.000.000,00	9	118.885.082,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	24.950.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.122.087.568,00	2	242.771.131,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.519.528.248,00	0	560.135.676,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14	871.787.460,00		462.491.610,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	14.950.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1.632.790.788,00		97.644.066,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5	52.648.227.592,00	0	5.360.287.776,00		0,00		0,00		0,00		10%	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi	2500	26.360.666.816,00	0	5.103.827.890,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	20	1.495.511.752,00	10	55.277.574,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2000	24.865.155.064,00	0	5.048.550.316,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5	16.207.030.676,00	0	175.859.066,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	320	14.816.685.970,00	2	128.912.574,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang	Jumlah Orang/Lembaga yang	23	1.390.344.706,00	0	46.946.492,00		0,00		0,00		0,00			DINAS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							I		II		III		IV				
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan													KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi	85	10.080.530.100,00	25	80.600.820,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	85	10.080.530.100,00	25	80.600.820,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5	815.059.070,00	0	45.606.492,00		0,00		0,00		0,00		6%	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	353	815.059.070,00	0	45.606.492,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Ditingkatkan Kompetensinya	153	467.186.700,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	200	347.872.370,00	0	45.606.492,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5	144.883.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0%	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sejarah dan Tradisi	2	144.883.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	2	144.883.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	0,2	10.747.226.006,00	0	108.061.492,00		0,00		0,00		0,00		1%	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terinventarisasi dan ditetapkan Cagar Budaya Tingkat Provinsi	3	216.157.230,00	0	24.883.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3	216.157.230,00		24.883.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Dikelolanya Cagar Budaya Peringkat Provinsi	245	10.531.068.776,00	29	83.178.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	11	10.274.241.876,00	1	38.533.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3	52.108.700,00	3	43.865.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	6	114.107.300,00				0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	225	90.610.900,00	25	780.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEBUDAYAAN
UPTD TAMAN BUDAYA																	
2	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali																
		2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	8.062.106.550,00	11,81	519.924.494,00		0,00		0,00		0,00		6%	UPTD TAMAN BUDAYA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV					
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100	158.829.700,00	25	5.144.620,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	69.997.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	49.998.700,00	2	4.494.420,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	5.500.000,00	1	175.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	8.340.000,00	1	475.200,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	24.994.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	42.470.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	42.470.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	2.147.898.058,00	16,67	326.334.724,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	985.600.000,00	3	85.980.100,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	14.930.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.147.368.058,00	3	240.354.624,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	5.712.908.792,00	5,56	188.445.150,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	65.000.000,00	1	668.100,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	3.519.480.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	2.128.428.792,00		187.777.050,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Taman Budaya	75	2.687.762.600,00	0	26.100.000,00		0,00		0,00		0,00		1%	UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang memadai	2000	2.687.762.600,00	100	26.100.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		(%)			
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2000	2.317.246.600,00	100	26.100.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
		2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	4	370.516.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD TAMAN BUDAYA
UPTD MUSEUM BALI																	
3	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali																
		2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	67.495.400.589,00	43,45	518.065.856,00		0,00		0,00		0,00		1%	UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100	185.395.500,00	75	74.652.300,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	61.517.500,00	1	42.879.100,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	105.000.000,00	3	27.727.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	8.301.000,00	1	2.250.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	5.402.000,00	3	696.200,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	5.175.000,00	1	1.100.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	21.086.300,00	50	1.030.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	21.086.300,00	2	1.030.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	1.230.291.376,00	37,5	245.935.236,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.386.400,00	1	1.520.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	206.000.000,00	0	35.688.494,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	19.264.840,00	1	5.927.528,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.002.640.136,00	3	202.799.214,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	66.058.627.413,00	14,44	196.448.320,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	3	101.600.000,00	1	60.542.500,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		K	Rp		
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.22.01.1.09.0006	Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	38.080.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	65.918.947.413,00	1	135.905.820,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali	75	2.511.307.000,00		1.400.000,00		0,00		0,00		0,00		0%	UPTD MUSEUM BALI
		2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali	25000	2.511.307.000,00		1.400.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	700	879.170.300,00	1	1.400.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10	1.463.387.400,00				0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
		2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	6	168.749.300,00				0,00		0,00		0,00			UPTD MUSEUM BALI
UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI																	
4	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali																
		2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	3.663.410.148,00	4,51	589.238.524,00		0,00		0,00		0,00		16%	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100	145.862.800,00	5,56	5.102.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	29.995.300,00				0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	53.057.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	51.593.100,00	1	4.432.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	6.777.400,00				0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	4.440.000,00		670.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0,00				0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	35.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	35.000.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Terlaksananya penyediaan jasa	100	1.341.274.324,00	12,5	229.782.790,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV				V	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
			Pemerintahan Daerah	penunjang urusan Pemerintahan Daerah													PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.491.500,00		950.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	350.000.000,00	3	40.255.740,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	42.930.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	946.852.824,00	3	188.577.050,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.141.273.024,00		354.353.734,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	123.975.000,00		44.003.700,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	14.970.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2.002.328.024,00		310.350.034,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	78,5	3.059.503.000,00		5.736.515,00		0,00		0,00		0,00		0%	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi yang memadai	51	3.059.503.000,00		5.736.515,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	33	756.260.200,00				0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10	2.038.410.200,00				0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	8	264.832.600,00		5.736.515,00		0,00		0,00		0,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
Rata-rata capaian kinerja (%)					38.79%	11.785.558.588,00	21.03%	0.48	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan																
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,15	22.805.921.183,00	25	3.319.114.319,00		0,00		0,00		0,00		15%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-11				
						-7		-8		-9		-10		-11				
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28	231.698.014,00	7	39.684.660,00		0,00		0,00		0,00			DAERAH	
		5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah	11	203.909.114,00	3	38.519.160,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	11.474.400,00	1	1.065.500,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	11.444.900,00	0	100.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	4.869.600,00	3	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	16.671.010.143,00	0	2.923.473.074,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123	16.365.850.481,00	123	2.858.369.418,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000	176.934.150,00	197	42.570.410,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14	128.225.512,00	4	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	51	1.506.678.486,00	9	82.667.114,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	64.000.810,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	730.788.232,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	129.063.004,00	0	10.661.082,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	56.483.210,00	0	11.527.982,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	63.183.410,00	3	9.572.082,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	59.805.410,00	3	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	403.354.410,00	3	28.372.722,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	3	411.144.692,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	361.989.600,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	49.155.092,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8	960.658.584,00	1	185.167.442,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	36.616.910,00	0	9.461.082,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	197.266.492,00	1	48.017.966,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	726.775.182,00	0	127.688.394,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	227	3.024.731.264,00	1	80.610.947,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31	771.388.362,00	1	65.588.783,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190	192.660.410,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-11				
						-7		-8		-9		-10		-11				
-1	-2	-3	-4	-5	-6		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-12	
																		DAERAH
		5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	2.060.682.492,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	100	2.544.619.206,00	25	276.659.083,00		0,00		0,00		0,00		11%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	3	1.305.487.542,00	0	193.648.263,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	73.047.500,00	2	11.050.000,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2	142.467.400,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan RPJPD/RPJMD/RKPD	3	1.089.972.642,00	0	182.598.263,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	7	447.561.132,00	0	45.455.410,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah semua perencanaan pembangunan daerah	6	420.614.132,00	0	45.305.410,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	1	26.947.000,00	0	150.000,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	41	735.504.132,00	5	37.555.410,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8	73.387.700,00	2	0,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6	486.249.632,00	3	37.555.410,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	27	175.866.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Data SIPD	1	56.066.400,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				BADAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah															PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1	56.066.400,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	1.998.814.538,00	25	250.559.902,00		0,00		0,00		0,00			13%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	673.332.564,00	0	76.550.820,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	102.227.320,00	0	15.322.164,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	101.187.310,00	0	7.761.082,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	260.580.422,00	0	30.544.328,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	209.337.512,00	0	22.923.246,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Sumber Daya Alam	4	671.759.564,00	0	82.894.700,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	220.637.022,00	0	30.344.328,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	202.925.812,00	0	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	82.993.110,00	0	7.611.082,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	165.203.620,00	0	22.406.044,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratraktur dan Kewilayahan	1	653.722.410,00	0	91.114.382,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	295.770.960,00	0	51.288.972,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	50.477.700,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	256.286.150,00	0	37.805.410,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	51.187.600,00	0	2.020.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)					19%	3.846.333.304,00	25%	0,39	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
DINAS KESEHATAN																	
DINAS KESEHATAN																	
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kepesertaan JKN	98,3	29.667.885.890,00	99,87	4.249.780.676,00		0,00		0,00		0,00		14%	DINAS KESEHATAN
				Persentase desa Uci	97		0										DINAS KESEHATAN
				Persentase Faskes yang Terakreditasi	100		100										DINAS KESEHATAN
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	89		87,72										DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96		12,03										DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	29.264.305.560,00	25	4.220.985.074,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	140.026.492,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	4380824	267.525.580,00	1095206	19.751.360,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan	130000	141.542.800,00	32500	17.586.560,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			(KLB)	Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar														
		1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	288.757.730,00	0	22.533.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	270.631.520,00	0	19.101.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1	138.072.600,00	0	8.793.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3	2.536.062.498,00	0	928.996.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	24.665.908.700,00	2	3.138.131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	112.280.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1	322.771.520,00	0	19.101.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1	115.867.600,00	0	19.125.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	150	37.500.000,00	5	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	174.231.520,00	0	19.101.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang degan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa ODMK	1	53.127.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan e-kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi	77	105.464.110,00	0	10.101.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	105.464.110,00	0	10.101.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100	298.116.220,00	25	18.694.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan,	25	150.356.540,00	5	9.901.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KESEHATAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
				Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya													
		1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu INM pelayanan kesehatan	196	147.759.680,00	196	8.793.280,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	76	386.037.860,00	82,5	28.370.300,00		0,00		0,00		0,00		7%	DINAS KESEHATAN
		1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi	90	184.589.400,00	0	1.557.500,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	200	84.590.000,00	0			0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	99.999.400,00	0	1.557.500,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan	100	201.448.460,00	0	26.812.800,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes	290000	201.448.460,00	0	26.812.800,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	86	389.259.970,00	50	36.055.722,00		0,00		0,00		0,00		9%	DINAS KESEHATAN
		1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	100	250.153.570,00	0	27.262.442,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	40	250.153.570,00	0	27.262.442,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	100	139.106.400,00	0	8.793.280,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	20	139.106.400,00	0	8.793.280,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	66,67	685.451.330,00	0	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00		3%	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan	Meningkatnya Dukungan Kerjasama Mitra Potensial /	1	535.451.330,00	0	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
			Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Lintas Sektor													
		1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	535.451.330,00	0	22.533.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 80% posyandu aktif	77,78	50.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	50.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang 80% Rumah Tangganya melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7	100.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	100.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
2	(tidak ada sasaran)																
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	308.757.072.622,00	0	60.584.259.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	7	336.035.010,00	3	7.511.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	205.158.900,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	130.876.110,00	1	7.511.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100	298.910.916.172,00	25	59.362.301.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	194.282.014,00	3	37.555.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	1705	298.716.634.158,00	1702	59.324.746.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	6.379.058.346,00	12,5	1.131.997.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	484.500.000,00	3	52.223.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5.894.558.346,00	0	1.079.774.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP	100	1.490.771.500,00	10	26.899.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44	515.400.000,00	0	25.667.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	81.769.500,00	0	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						-7	-8	-9	-10	-11	-12						
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	893.602.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	1.640.291.594,00	20	55.549.950,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	77.170.300,00	2	42.440.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	1.069.751.200,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	273.968.394,00	0	6.720.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	22.500.000,00	0	645.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	188.318.000,00	0	5.744.950,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	8.583.700,00	0			0,00		0,00		0,00			DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA																	
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	89	16.677.094.270,00	87,72	8.640.000,00		0,00		0,00		0,00		0%	RUMAH SAKIT JIWA
		1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sarana dan prasarana di rumah sakit	1	16.677.094.270,00	0	8.640.000,00		0,00		0,00		0,00			RUMAH SAKIT JIWA
		1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka pen	1	16.677.094.270,00	0	8.640.000,00		0,00		0,00		0,00			RUMAH SAKIT JIWA
4	(tidak ada sasaran)																
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	37.904.398.608,00	0	3.879.479.144,00		0,00		0,00		0,00		10%	RUMAH SAKIT JIWA
		1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	11.904.398.608,00	25	2.307.439.031,00		0,00		0,00		0,00			RUMAH SAKIT JIWA
		1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.114.110.402,00	3	226.425.509,00		0,00		0,00		0,00			RUMAH SAKIT JIWA
		1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	10.790.288.206,00	3	2.081.013.522,00		0,00		0,00		0,00			RUMAH SAKIT JIWA
		1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa	82	26.000.000.000,00	89,97	1.572.040.113,00		0,00		0,00		0,00			RUMAH SAKIT JIWA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	26.000.000.000,00	1	1.572.040.113,00		0,00		0,00		0,00			RUMAH SAKIT JIWA
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA																	
5	(tidak ada sasaran)																
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	90.000.000.000,00	0	12.527.067.650,00		0,00		0,00		0,00		14%	RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
		1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Mata Bali Mandara	82	90.000.000.000,00	85,7	12.527.067.650,00		0,00		0,00		0,00			RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
		1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	90.000.000.000,00	0	12.527.067.650,00		0,00		0,00		0,00			RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN																	
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	89	292.517.120,00	87,72	18.019.520,00		0,00		0,00		0,00		6%	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase tersedianya pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar	70	292.517.120,00	20	18.019.520,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		1.02.02.1.01.0007	"Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center"	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	1	292.517.120,00	0	18.019.520,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
7	(tidak ada sasaran)																
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	9.541.224.569,00	0	561.674.671,00		0,00		0,00		0,00		6%	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	492.940.500,00	25	178.948.050,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	82.895.200,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	410.045.300,00	6	178.948.050,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	1.746.835.086,00	25	336.252.121,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	644.000.000,00	9	125.635.907,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	1.102.835.086,00	15	210.616.214,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP	100	345.370.000,00	25	1.843.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	108.100.000,00	3	1.843.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	93.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89	144.270.000,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Laboratorium Kesehatan	82	6.956.078.983,00	84	44.631.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	6.956.078.983,00	1	44.631.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT																	
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100	369.183.034,00	25	55.277.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15%			UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peserta pelatihan yang lulus sesuai standar	100	369.183.034,00	25	55.277.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	150	369.183.034,00	150	55.277.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
9	(tidak ada sasaran)																
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	4.639.631.012,00	0	347.646.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7%			UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	319.350.500,00	25	14.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	128.584.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	155.458.100,00	0	12.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	17.924.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	6.134.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	11.250.000,00	1	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV					
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	1.174.585.512,00	25	203.667.936,00		0,00		0,00		0,00			MASYARAKAT
		1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	363.900.000,00	3	51.586.296,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	810.685.512,00	1	152.081.640,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP	100	1.145.695.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	39.175.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42	56.520.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Dirhabilitasi	1	1.050.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas	82	2.000.000.000,00	79,11	129.673.500,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.000.000.000,00	1	129.673.500,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL																	
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	89	3.092.844.820,00	87,72	593.215.688,00		0,00		0,00		0,00		19%	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
		1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga	3	3.092.844.820,00	0	593.215.688,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
		1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	1.017.847.192,00	0	254.269.870,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
		1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	122.080.400,00	0	18.866.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
		1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi	1	158.690.210,00	0	28.582.442,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGOBATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kesehatan Jumlah Public Safety Center PSC 119 Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu SPGDT	1	1.794.227.018,00	1	291.497.376,00		0,00		0,00		0,00			TRADISIONAL
11	(tidak ada sasaran)																
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	3.476.110.570,00	0	352.018.750,00		0,00		0,00		0,00		10%	UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
		1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	915.140.120,00	25	150.518.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
		1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	651.780.020,00	1	18.250.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
		1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	202.695.800,00	1	128.175.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
		1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5.015.500,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
		1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	19.790.800,00	1	3.448.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
		1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1.500.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
		1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	34.358.000,00	1	645.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
		1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan SOP	100	1.086.875.510,00	25	191.077.650,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
		1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	98.500.000,00	3	15.218.304,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
		1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	988.375.510,00	3	175.859.346,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
		1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP	100	1.474.094.940,00	25	10.423.100,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
		1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7	263.900.000,00	3	6.033.100,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
		1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	50.690.000,00	3	4.390.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
		1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1.159.504.940,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		(%)		
						-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat															
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	89	54.255.586.205,00	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0%			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
		1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sarana dan prasarana di rumah sakit	1	54.255.586.205,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
		1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	8.277.374.205,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
		1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	3	45.978.212.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
13	(tidak ada sasaran)															
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	210.686.107.309,00	0	48.189.645.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23%			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
		1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	30.686.107.309,00	3	5.470.812.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
		1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	30.686.107.309,00	3	5.470.812.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
		1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara	82	180.000.000.000,00	88,3	42.718.832.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
		1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	180.000.000.000,00	1	42.718.832.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN																
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat															
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	89	6.030.049.754,00	87,72	184.745.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sediaan farmasi, bahan laboratorium, dan alkes yang diadakan	1	4.851.273.960,00	0	71.314.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00				UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas	1	360.783.000,00	0	26.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Kesehatan													PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5	4.490.490.960,00	0	45.066.492,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi	9	1.178.775.794,00	2	113.430.806,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2	1.178.775.794,00	0	113.430.806,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
15	(tidak ada sasaran)																
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	4.669.046.112,00	0	547.606.797,00		0,00		0,00		0,00		12%	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	742.157.200,00	57,14	204.517.100,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	252.289.300,00	2	6.295.500,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	408.786.200,00	5	184.948.600,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	11.575.400,00	1	9.768.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3.970.300,00	1	2.065.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	11.700.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			KESEHATAN
		1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	53.836.000,00	1	1.440.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai sop	100	1.898.521.612,00	25	306.197.697,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	780.000.000,00	1	85.401.319,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	1.113.439.612,00	1	218.196.378,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.082.000,00	1	2.600.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP	100	906.126.200,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	56.126.200,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	850.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang	100	1.122.241.100,00	76,19	36.892.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN,

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						I		II		III		IV		(%)				
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7			-8		-9
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah sesuai SOP														PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	40.800.000,00	1	3.887.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108	532.441.100,00	13	18.300.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	492.000.000,00	1	14.705.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	59	57.000.000,00	0			0,00		0,00		0,00				UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
DINAS PARIWISATA																		
DINAS PARIWISATA																		
1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali																	
		3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja DISPAR	85	16.159.354.154,00	0	3.084.518.810,00		0,00		0,00		0,00		19%		DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	23	122.996.812,00	11	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	122.996.812,00	7	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	86	13.168.970.608,00	17	2.357.833.477,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77	13.168.970.608,00	49	2.357.833.477,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	508.041.654,00	0	31.898.750,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	7.216.600,00	0	5.346.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	327.697.960,00	0	1.000.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV					
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	69.617.494,00	0	6.456.200,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	9.882.600,00	1	4.279.850,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	93.627.000,00	0	14.816.700,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	3	1.494.728.080,00	0	268.387.137,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	182.008.200,00		32.116.231,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	1.312.719.880,00		236.270.906,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3	864.617.000,00	0	403.866.200,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	551.217.000,00		403.866.200,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	313.400.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	16,67	4.992.241.136,00		81.867.988,00		0,00		0,00		0,00		2%	DINAS PARIWISATA
		3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Informasi Pariwisata	23	4.992.241.136,00	5	81.867.988,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	276.946.020,00	0	26.662.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	322.393.804,00	0	30.244.328,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	4.392.901.312,00	0	24.961.496,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
2	(tidak ada sasaran)																
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang berkualitas dan Berdaya Saing	14	763.520.156,00		101.055.692,00		0,00		0,00		0,00		13%	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berdaya saing	90	348.735.516,00	0	58.637.574,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1	348.735.516,00	0	58.637.574,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 laporan	1	149.195.900,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.03.0002	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	10	149.195.900,00	05	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar	30	265.588.740,00	12	42.418.118,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tingkat Menengah Tinggi	10	71.872.510,00	12	13.974.872,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.04.0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	9	193.716.230,00	2	28.443.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	3	140.088.084,00	1	40.636.734,00		0,00		0,00		0,00	29%		DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pembinaan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	9	97.601.384,00	4	15.142.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	24	97.601.384,00	8	15.142.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	42.486.700,00	1	25.494.570,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	1	42.486.700,00	1	25.494.570,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	47	894.950.698,00	0	79.587.834,00		0,00		0,00		0,00	9%		DINAS PARIWISATA
		3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan	235	894.950.698,00	0	79.587.834,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	95	267.634.092,00	0	11.138.252,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	220	250.391.504,00	0	43.427.328,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA
		3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20	376.925.102,00	0	25.022.254,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV		(%)					
						-7		-8		-9		-10		-11					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-12
Rata-rata capaian kinerja (%)					23,00%	3.387.667.058,00		33.3%	0,72		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi														
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																			
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																			
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																			
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																			
1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali																		
		2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang difasilitasi IUSP	11,3	308.686.594,00	1,68	26.036.846,00		0,00		0,00		0,00		8%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
		2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang diterbitkan	15	288.686.994,00	3	25.084.846,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
		2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Satu Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	15	288.686.994,00	3	25.084.846,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
		2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang diterbitkan	3	19.999.600,00	0	952.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
		2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Satu Daerah Provinsi	3	19.999.600,00	0	952.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	21	183.432.810,00	1,94	12.079.082,00		0,00		0,00		0,00		7%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
		2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	100	49.934.000,00	0	2.292.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
		2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100	49.934.000,00	0	2.292.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
		2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	80	133.498.810,00	73	9.787.082,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	80	133.498.810,00	73	9.787.082,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	3,35	192.110.220,00	0,56	17.667.164,00		0,00		0,00		0,00		9%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi	175	192.110.220,00	21	17.667.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	90	142.110.620,00	21	16.318.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang diberdayakan	85	49.999.600,00	0	1.349.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha	18	635.576.002,00	0	104.942.484,00		0,00		0,00		0,00		17%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	615	635.576.002,00	0	104.942.484,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	615	559.176.002,00	0	100.333.984,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	300	76.400.000,00	0	4.608.500,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	9	415.843.504,00	0	38.695.728,00		0,00		0,00		0,00		9%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	145	415.843.504,00	0	38.695.728,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	330	215.843.804,00	0	33.486.228,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	105	50.000.000,00	0	1.869.500,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi	100	99.999.700,00	0	1.504.000,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	10	50.000.000,00	0	1.836.000,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2	(tidak ada sasaran)																
		2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja DISKOPUKM	82,47	19.978.688.908,00	0	2.971.308.172,00	0,00		0,00		0,00		15%		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	1.304.123.812,00	0	405.307.820,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	797.265.444,00	0	382.774.574,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76	49.920.000,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	456.938.368,00	0	22.533.246,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3	152.362.212,00	1	35.557.076,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	142.177.312,00	0	32.476.276,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	10.184.900,00	1	3.080.800,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	16.437.269.734,00	0	2.273.380.268,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	16.437.269.734,00	67	2.273.380.268,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	20.000.000,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	20.000.000,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	221.227.794,00	0	43.059.860,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	59.753.000,00	0	15.182.960,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	1	10.997.800,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KOPERASI,

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	48.405.800,00	0	11.948.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	76.071.194,00	0	10.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	21.500.000,00	0	5.378.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	4.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	700.452.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	700.452.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	1.143.253.156,00	0	214.003.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.993.900,00	0	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	246.000.000,00	0	46.489.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	895.259.256,00	0	166.243.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH																	
3	Meningkatnya perekonomian Krama Bali																
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	75	2.615.568.416,00	0	48.612.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2%	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH			
		2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1230	2.615.568.416,00	0	48.612.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH				
		2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	1230	2.615.568.416,00	0	48.612.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH				
		2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja DISKOPUKM	82,47	477.808.994,00	0	107.479.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22%	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	193.394.476,00	0	58.588.746,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	101.191.492,00	0	43.566.582,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	2.070.000,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	90.132.984,00	0	15.022.164,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	74.659.450,00	0	14.782.750,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	699.600,00	1	616.050,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	13.146.100,00	0	8.050.000,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	56.904.050,00	0	5.817.000,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	999.700,00	0	299.700,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	990.000,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1.920.000,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V				
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	588.087.400,00	0	2.930.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	67.483.394,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	14.840.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	6.424.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	316.901.000,00	5	15.321.700,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	100	1.143.326.050,00	25	140.566.484,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	340.000.000,00	4	39.697.418,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	576.131.150,00	4	100.869.066,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	227.194.900,00	4	0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100	15.665.986.223,00	25	3.010.260.785,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81	15.665.986.223,00	81	3.010.260.785,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100	66.082.800,00	25	18.800.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	66.082.800,00	1	18.800.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	985.596.444,00	25	50.786.592,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17	834.042.460,00	0	35.764.428,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	151.553.984,00	0	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100	75.000.000,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	3	75.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERINDUSTRIAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
				Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	82	302.955.644,00	0	66.808.656,00		0,00		0,00		0,00		22%	DAN PERDAGANGAN
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM													DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000	302.955.644,00	4362	66.808.656,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000	302.955.644,00	4362	66.808.656,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	1	24.968.600,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Toko Swalayan yang dibina	18	24.968.600,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah pasar	18		6										
		3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	36	24.968.600,00	6	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	55	99.999.600,00	0	17.234.000,00		0,00		0,00		0,00		17%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran	4	99.999.600,00	6	17.234.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	50	99.999.600,00	38	17.234.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,72	465.992.200,00	0	480.142.164,00		0,00		0,00		0,00		103%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses	100	465.992.200,00	100	460.320.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK yang Aktif	1	456.000.000,00	1	456.000.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM yang Aktif	3	9.992.200,00	3	4.320.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga	100	0,00	25	19.822.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan	100		25										
		3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil	100		33	19.822.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V				
						-7	-8	-9	-10	-11	-12							
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi													PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	30	300.832.962,00	0	52.577.574,00		0,00		0,00		0,00		17%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal Bali	35	300.832.962,00	0	52.577.574,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	5	300.832.962,00	0	52.577.574,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5	1.838.308.786,00	0	385.894.066,00		0,00		0,00		0,00		21%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1,5	1.838.308.786,00	0	385.894.066,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6	1.700.626.786,00	1	385.894.066,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	9	137.682.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	100	49.999.900,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Industri yang terkumpul	100	49.999.900,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	150	49.999.900,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
3	Meningkatnya perekonomian Krama Bali																	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,72	244.401.176,00	0	24.693.246,00		0,00		0,00		0,00		10%	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	
		3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan	45	244.401.176,00	5	24.693.246,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						I		II		III		IV		(%)					
						-7		-8		-9		-10		-11					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-12
		3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	45	244.401.176,00	5	24.693.246,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	340.005.070,00	0	39.163.046,00		0,00		0,00		0,00			12%		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100	47.761.140,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1.455.700,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	16.038.040,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	21.887.400,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	2.100.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	6.280.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	171.274.886,00	25	31.651.964,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12.000.000,00	0	1.607.636,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	159.274.886,00	0	30.044.328,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	120.969.044,00	25	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	120.969.044,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
UPTD RUMAH KREATIF																			
4	Meningkatnya perekonomian Krama Bali																		
		3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen	82,5	217.384.462,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			3%		UPTD RUMAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV		(%)			
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.30.01.1.06	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100	68.777.560,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00			KREATIF UPTD RUMAH KREATIF
		3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	33.435.060,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD RUMAH KREATIF
		3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	24.450.500,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD RUMAH KREATIF
		3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	7.680.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD RUMAH KREATIF
		3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	3.212.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD RUMAH KREATIF
		3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	100	44.555.410,00	25	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			UPTD RUMAH KREATIF
		3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	44.555.410,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			UPTD RUMAH KREATIF
		3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	104.051.492,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD RUMAH KREATIF
		3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	104.051.492,00				0,00		0,00		0,00			UPTD RUMAH KREATIF
		3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5	827.213.500,00	0	123.360.000,00		0,00		0,00		0,00		15%	UPTD RUMAH KREATIF
		3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1,5	827.213.500,00	0	123.360.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD RUMAH KREATIF
		3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	827.213.500,00	0	123.360.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD RUMAH KREATIF
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.33%	4.447.365.395,00	0%	2,42	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																	
1	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat																
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 ketertiban, ketenteraman, keindahan yang ditindaklanjuti	100	26.906.001.735,00	100	4.653.860.817,00		0,00		0,00		0,00		17%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	170	25.171.533.677,00	45	4.259.697.275,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan	Jumlah Dokumen Hasil	1	58.998.610,00	0	10.011.082,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-11				
						-7		-8		-9		-10		-11				
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan													PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	29.999.900,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	50	20.450.348.273,00	50	3.411.518.116,00	0,00		0,00		0,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1	81.949.400,00	1	22.122.150,00	0,00		0,00		0,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2	19.993.200,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14	103.555.110,00	3	16.151.082,00	0,00		0,00		0,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	36	4.207.317.872,00	9	755.733.299,00	0,00		0,00		0,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	192	219.371.312,00	40	44.161.546,00	0,00		0,00		0,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	195	1.734.468.058,00	27	394.163.542,00	0,00		0,00		0,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4	12.181.200,00	0	12.000.000,00	0,00		0,00		0,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12	1.419.622.038,00	3	310.461.378,00	0,00		0,00		0,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4	302.664.820,00	1	71.702.164,00	0,00		0,00		0,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Laporan Hasil	0	0,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				SATUAN POLISI	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			(PPNS) Provinsi	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda													PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2	(tidak ada sasaran)																
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,6	30.165.536.233,00	0	5.521.472.898,00		0,00		0,00		0,00		18%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	21.000.000,00	14	9.724.100,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	16.000.000,00	9	5.819.000,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	5.000.000,00	5	3.905.100,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	24.998.328.311,00	100	3.804.754.692,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	24.998.328.311,00	100	3.804.754.692,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	795.582.690,00	2	65.704.090,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	40.706.800,00	1	18.485.750,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	551.436.600,00	1	27.284.390,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	106.033.390,00	0	10.947.000,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	12.301.900,00	0	1.681.750,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	85.104.000,00	0	7.305.200,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	1	103.985.300,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	103.985.300,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	1.140.116.342,00	3	261.039.034,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.998.700,00	1	1.910.000,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12	165.000.000,00	3	32.071.794,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	48.720.000,00	1	22.030.824,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	923.397.642,00	0	205.026.416,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12	3.106.523.590,00	3	1.380.250.982,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	49	2.841.523.590,00	0	1.380.250.982,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5	75.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1	190.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Rata-rata capaian kinerja (%)					32%	10.175.333.715,00	100%	0,35	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali																
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	82	30.915.912.819,00	0	4.871.660.281,00		0,00		0,00		0,00		16%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	82		0										DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	82		0										DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	82		0										DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	76.748.000,00	25	7.680.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	76.748.000,00	1	7.680.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	60	25.447.615.889,00	8	4.029.104.201,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1610	25.447.615.889,00	355	4.029.104.201,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	1.107.803.300,00	25	181.485.200,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						-7	-8	-9	-10	-11	-12						
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	7.459.500,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	728.957.900,00	7	124.400.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	189.642.400,00	2	35.860.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	18.923.500,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	162.820.000,00	3	21.225.200,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	100	279.565.620,00	25	106.080.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	279.565.620,00	3	106.080.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100	134.661.000,00	25	41.116.322,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.611.000,00	12	2.300.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	131.050.000,00	3	38.816.322,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100	3.869.519.010,00	25	506.194.558,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9	950.364.936,00	0	423.572.656,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	2.828.924.074,00	1	82.621.902,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	90.230.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	46	104.596.492,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00		7%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	102575,33	34.495.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung ekonomi biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dala	12	34.495.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	5	70.101.492,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	40	70.101.492,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2	424.573.902,00	0	28.462.164,00		0,00		0,00		0,00		7%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2		0										DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	105770,02	390.850.902,00	0	22.702.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1	390.850.902,00	0	22.702.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2	33.723.000,00	0	5.760.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	30	33.723.000,00	22	5.760.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2	199.047.500,00	0	6.735.000,00		0,00		0,00		0,00		3%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	33297,9	199.047.500,00	0	6.735.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	171.427.500,00	1	1.920.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12	27.620.000,00	3	4.815.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	3	181.509.884,00	0	15.322.164,00		0,00		0,00		0,00		8%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	32	181.509.884,00	6	15.322.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30	31.268.900,00	2	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	40	150.240.984,00	3	15.322.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi olahan hasil perikanan	2	323.958.502,00	0	30.012.164,00		0,00		0,00		0,00		9%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	30	323.958.502,00	12	30.012.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam	30	323.958.502,00	12	30.012.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		(%) -11	-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
				rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko													
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN																	
2	(tidak ada sasaran)																
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	82	653.494.768,00	0	121.966.120,00		0,00		0,00		0,00		19%	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	41.933.000,00	66,66	6.948.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	8.433.000,00	3	5.810.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	32.500.000,00	1	1.138.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100	37.072.080,00	100	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	37.072.080,00	4	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100	118.020.500,00	30,77	20.544.928,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.020.500,00	1	650.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	117.000.000,00	3	19.894.928,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100	456.469.188,00	8	94.473.192,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	92.232.000,00	1	43.615.200,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-11				
						-7		-8		-9		-10		-11				
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	349.457.188,00	1	50.857.992,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22	14.780.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2	494.761.800,00	0	3.000.000,00		0,00		0,00		0,00		1%	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
				Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2		0			0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	2600	494.761.800,00	1381	3.000.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0003	- Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	7	53.241.000,00	1	1.500.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	7	441.520.800,00	46	1.500.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
UPTD PELABUHAN PERIKANAN																		
3	Meningkatnya perekonomian Krama Bali																	
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	82	285.732.430,00	0	110.497.397,00		0,00		0,00		0,00		39%	UPTD PELABUHAN PERIKANAN	
		3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	86.085.900,00	14,57	12.546.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN	
		3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	26.835.900,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN	
		3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	32.500.000,00	1	12.546.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	26.750.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
		3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100	20.445.200,00	50	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
		3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	20.445.200,00	1	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
		3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100	12.000.000,00	9,42	952.015,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
		3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12.000.000,00	3	952.015,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
		3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100	167.201.330,00	58,01	96.999.382,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
		3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	127.800.000,00	1	89.488.300,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
		3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	39.401.330,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
4	(tidak ada sasaran)																
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2	47.699.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0%	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	8500	47.699.000,00	882,5	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
		3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1	47.699.000,00	1	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI																	
5	Meningkatnya perekonomian Krama Bali																
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	82	1.023.004.792,00	0	179.051.494,00		0,00		0,00		0,00		18%	UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI
		3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	66.348.100,00	50	860.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI
		3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	24.848.100,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI
		3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	41.500.000,00	1	860.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI
		3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100	956.656.692,00	32	178.191.494,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI
		3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	172.510.000,00	1	50.503.100,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI
		3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan	1	784.146.692,00	1	127.688.394,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KAWASAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		V					
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															KONSERVASI PROVINSI BALI
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	73	50.000.000,00	0	5.900.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12%	UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI
		3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	5	50.000.000,00	5	5.900.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI
		3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	46838,1	50.000.000,00	46838,1	5.900.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI
UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA																			
6	Meningkatnya perekonomian Krama Bali																		
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2	824.870.604,00	0	298.322.328,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36%	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	1300000	824.870.604,00	646000	298.322.328,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	824.870.604,00	3	298.322.328,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	82	645.746.060,00	0	128.714.841,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20%	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	46.277.200,00	25	13.598.520,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4.664.000,00	1	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	7.117.200,00	3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	32.500.000,00	1	12.361.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1.996.000,00	1	1.237.520,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100	38.554.200,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	38.554.200,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100	129.070.200,00	25	15.460.411,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	471.000,00	3	300.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PRODUKSI PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV				V	
						-7		-8		-9		-10				-11	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	128.599.200,00	3	15.160.411,00		0,00		0,00		0,00			BUDIDAYA
		3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100	431.844.460,00	25	99.655.910,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	166.497.984,00	0	61.312.064,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	265.346.476,00	0	38.343.846,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
Rata-rata capaian kinerja (%)					37.20%	5.807.155.035,00	0%	1,95	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
INSPEKTORAT DAERAH																	
INSPEKTORAT DAERAH																	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan																
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	3.579.009.588,00	25	561.616.878,00		0,00		0,00		0,00		16%	INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal	100	2.551.448.128,00	25	465.843.158,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9	204.768.384,00	2	24.622.164,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15	254.791.784,00	4	53.562.164,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	45	79.999.500,00	10	5.443.900,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	252.391.492,00	1	38.360.832,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	58	904.768.184,00	15	206.911.464,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	449.960.300,00	1	65.760.500,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	55	404.768.484,00	15	71.182.134,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu	100	1.027.561.460,00	25	95.773.720,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian	Jumlah Laporan Penyelesaian	1	114.768.684,00	0	29.640.974,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V				
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Negara/Daerah	Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani														DAERAH
		6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	34	912.792.776,00	10	66.132.746,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	100	3.105.243.004,00	25	358.344.524,00		0,00		0,00		0,00		12%		INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	100	2.058.751.228,00	25	226.542.078,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	54	394.509.276,00	18	93.104.946,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	1.664.241.952,00	0	133.437.132,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	100	1.046.491.776,00	25	131.802.446,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12	282.141.676,00	2	64.096.246,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33	169.988.800,00	8	2.498.200,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3	494.364.900,00	1	63.360.000,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1	99.996.400,00	0	1.848.000,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,5	31.979.995.651,00	20	5.288.823.231,00		0,00		0,00		0,00		17%		INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100	89.999.800,00	25	29.109.850,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	49.999.800,00	2	11.966.450,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	40.000.000,00	0	17.143.400,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	26.324.679.033,00	25	4.473.292.804,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	163	26.324.679.033,00	163 (Orang/Bulan)	4.473.292.804,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	100	1.282.274.694,00	25	126.003.790,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	1	49.999.400,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				INSPEKTORAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DAERAH
		6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	99.999.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	158.109.394,00	1	59.086.000,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	40.070.300,00	0	15.468.600,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	44.140.800,00	0	5.992.800,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	39.960.000,00	0	10.827.750,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	849.995.000,00	0	34.628.640,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit sarana dan praarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	193	1.709.720.040,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	193	1.709.720.040,00	30	0,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	100	595.153.460,00	25	102.336.743,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.092.900,00	0	1.970.000,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	280.500.000,00	0	60.111.333,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	309.560.560,00	0	40.255.410,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	1.978.168.624,00	25	558.080.044,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	1.621.453.428,00	8	525.741.338,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	131.952.212,00	1	17.316.542,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
		6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	224.762.984,00	2	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00			INSPEKTORAT DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)					24%	6.208.784.633,00	24,3%	0,45	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan																
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	23.428.774.250,00	21,2	4.101.404.835,00		0,00		0,00		0,00		18%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100	419.589.624,00		23.189.010,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9.982.800,00	1	7.141.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	116.047.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	86.229.424,00	0	7.118.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	20.258.600,00	0	4.687.510,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	6.000.000,00	0	1.382.500,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	181.071.000,00	2	2.860.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100	88.922.000,00		14.160.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	34.621.000,00	0	14.160.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	54.301.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100	15.676.945.478,00		2.600.948.889,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	15.676.945.478,00	80	2.600.948.889,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	1	168.104.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	168.104.200,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1	868.666.700,00		5.740.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29	868.666.700,00	0	5.740.000,00		0,00		0,00		0,00			BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100	1.444.386.448,00		257.952.436,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	258.000.000,00	2	36.412.140,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.186.386.448,00	2	221.540.296,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1	4.762.159.800,00		1.199.414.500,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38	2.287.969.800,00	21	1.197.758.500,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	22.380.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	2.372.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	15.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	79	64.810.000,00	0	1.656.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat																
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase penurunan indeks risiko bencana	3	3.125.667.400,00	0,75	84.320.000,00		0,00		0,00		0,00		3%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase penanganan darurat bencana	100		25										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	100		25										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	9	109.275.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi.	600	109.275.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						-7	-8	-9	-10	-11	-12						
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana per jenis ancaman lintas Kabupaten/Kota													
		1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	5	598.568.600,00		35.520.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana JITU PASNA dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana R3P yang Disusun	2	154.667.000,00	0	34.560.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	jumlah dokumen yang dilegalkan	1	208.097.500,00	0	960.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan pra, saat dan pascabencana	1	13.590.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 satu tahun	9	89.756.100,00	0			0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	4	28.980.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provins	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana JITU PASNA dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana R3P	30	103.478.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100	1.417.754.600,00		16.640.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana per jenis ancaman bencana	2	380.586.200,00	0	13.700.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						I		II		III		IV							
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana															
		1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana	70	8.175.000,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal Per Jenis Ancaman Bencana Prioritas	1	21.450.000,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	160	380.257.800,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	80	283.594.200,00	0	2.940.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	145	339.191.400,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalikan	1	4.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran	9	1.000.069.200,00		32.160.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	900	752.027.200,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1	248.042.000,00	0	32.160.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH																			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan																		
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	3.643.105.604,00	21,3	248.938.108,00		0,00		0,00		0,00			7%		UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12						
		1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100	66.839.100,00	25	5.175.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	16.846.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	25.992.300,00	0	4.297.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	24.000.000,00	0	877.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1	1.648.730.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	106	1.648.730.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100	1.364.078.904,00	25	241.228.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	240.000.000,00	0	25.104.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.124.078.904,00	0	216.123.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1	563.457.600,00	0,1	2.534.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	140.800.000,00	2	2.534.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	110.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH	
		1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	118	312.657.600,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH	
4	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat																
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase penurunan indeks risiko bencana	3	4.336.201.969,00	0,75	114.707.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH		
				Persentase penanganan darurat bencana	100		25								UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH		
		1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	100	960.581.900,00		86.387.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		UPTD PENGENDALIAN		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
				Daerah	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	POLITIK
		8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	402.759.000,00	2	7.539.200,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	4.996.100,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	35.880.500,00	0	950.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	77.229.424,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	240.117.300,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	14.921.500,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	3	606.324.240,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	189.401.500,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	416.922.740,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah	3	1.058.014.344,00	0	166.110.383,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	11.994.800,00	1	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	130.000.000,00	3	26.563.989,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	916.019.544,00	3	139.546.394,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah terpelihara	5	1.008.921.800,00	0	580.987.900,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23	790.100.000,00	6	580.987.900,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	19.960.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2	181.981.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13	16.880.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	92	4.732.046.394,00	0	42.103.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	4.732.046.394,00	20	42.103.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500	1.196.846.794,00	50	24.533.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	72	3.535.199.600,00	0	17.570.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	85	24.374.767.294,00	0	35.913.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100	24.374.767.294,00	20	35.913.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1200	24.374.767.294,00	50	35.913.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terdata	85	681.089.000,00	0	340.786.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	681.089.000,00	25	340.786.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang	500	681.089.000,00	100	340.786.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
			Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	POLITIK
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	85	1.049.045.322,00	0	538.925.128,00		0,00		0,00		0,00		51%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	1.049.045.322,00	20	538.925.128,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	1.049.045.322,00	25	538.925.128,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	95	1.676.175.912,00	0	79.462.164,00		0,00		0,00		0,00		5%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	1.676.175.912,00	20	79.462.164,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40	676.176.212,00	10	78.962.164,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12	999.999.700,00	3	500.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata capaian kinerja (%)					24%	3.609.870.588,00	0%	1,26	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
DINAS PERHUBUNGAN																	
DINAS PERHUBUNGAN																	
1	Meningkatnya konektivitas transportasi publik																
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat	0,88	792.120.912,00		105.899.067,00		0,00		0,00		0,00		13%	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan							0,00		0,00		0,00			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		(-11)				
						-7	-8	-9	-10	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jalan															
		2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan							0,00		0,00		0,00				
		2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan provinsi	1	320.283.542,00		43.386.492,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERHUBUNGAN	
				Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi	1												DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1	297.783.542,00		43.386.492,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	22.500.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	73.926.000,00		4.800.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERHUBUNGAN	
				Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1												DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3	66.726.000,00		4.800.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	3	7.200.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							0,00		0,00		0,00				
		2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							0,00		0,00		0,00				
		2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	1	70.876.000,00		3.600.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.10.0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	70.876.000,00		3.600.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	380	327.035.370,00		54.112.575,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan	380	327.035.370,00	77	54.112.575,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERHUBUNGAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan														
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	80	454.226.050,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0%		DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Sangsit	1	454.226.050,00		0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja DLKR/Daerah Lingkungan Kepentingan DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	1	454.226.050,00				0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional							0,00		0,00		0,00				
		2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional							0,00		0,00		0,00				
		2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase lintasan kereta api yang terbangun	35	598.942.460,00		52.401.259,00		0,00		0,00		0,00		9%		DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Pra Studi Kelayakan Angkutan Umum Massal Berbasis Kereta Api Lintasan Cangu-Mengwi	1	598.942.460,00		52.401.259,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1	598.942.460,00		52.401.259,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
2	(tidak ada sasaran)																	
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,9	29.789.702.004,00		4.789.097.060,00		0,00		0,00		0,00		16%		DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8	38.167.000,00		4.730.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	12.200.000,00	1	4.730.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	25.967.000,00				0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	24.634.739.316,00		4.180.816.854,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210	24.619.225.316,00	0	4.172.871.854,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	15.514.000,00	0	7.945.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1	1.284.919.500,00		66.482.367,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	6.993.800,00	1	6.779.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						I		II		III		IV		(%)					
						-7		-8		-9		-10		-11					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		K		Rp		K		Rp		K		Rp		-12
				Bangunan Kantor yang Disediakan															
		2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	731.986.000,00	0		17.862.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	75.600.000,00			9.200.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	9.253.700,00			2.590.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	461.086.000,00			30.051.367,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi perkantoran	1	1.080.478.600,00			0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	1.000.000.000,00					0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	80.478.600,00					0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1	642.485.436,00			119.812.589,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	4.710.000,00	1		3.000.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	295.000.000,00			56.723.933,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	342.775.436,00			60.088.656,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1	2.108.912.152,00			417.255.250,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	904.767.984,00			244.500.364,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63	73.770.000,00					0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	1.130.374.168,00			172.754.886,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PERHUBUNGAN
UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA																			
3	Meningkatnya konektivitas transportasi publik																		
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,9	641.633.972,00			116.916.494,00		0,00		0,00		0,00		18%		UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
		2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen instalasi Listrik yang tersedia • Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia • Jumlah makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas yang tersedia • Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia • Jumlah Bahan Bacaan	1	211.338.948,00			9.192.100,00		0,00		0,00		0,00				UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
				dan Peraturan perundang undangan yang tersedia • Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia														
		2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	915.400,00	1	880.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	
		2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	148.589.960,00		2.855.500,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	
		2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	20.324.588,00		1.616.600,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	
		2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	9.876.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	
		2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	31.633.000,00		3.840.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	
		2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah mebel yang tersedia	3	23.685.000,00	1	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	
				Jumlah gedung kantor yang tersedia	2												UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	
		2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	23.685.000,00	1			0,00		0,00		0,00			UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	
		2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor jasa kebersihan yang tersedia • Jumlah jasa surat menyurat berupa materai yang tersedia • Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	1	74.681.892,00		12.448.484,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	
		2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	471.000,00	1	300.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	
		2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	33.300.000,00		5.247.402,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	
		2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	40.910.892,00		6.901.082,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	
		2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Laptop, PC dan printer yang tersedia • Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas, tenaga administrasi, tenaga supir, pajak kendaraan yang tersedia	1	331.928.132,00		95.275.910,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	
		2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	313.788.132,00		95.275.910,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7			-8		-9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	18.140.000,00				0,00		0,00		0,00				UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	83	65.439.656.356,00		158.885.370,00		0,00		0,00		0,00			0%	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
		2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA	7332	65.439.656.356,00	1898	158.885.370,00		0,00		0,00		0,00				UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
		2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu Daerah Provinsi	85	65.439.656.356,00	10	158.885.370,00		0,00		0,00		0,00				UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN																		
4	Meningkatnya konektivitas transportasi publik																	
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,9	481.052.204,00		126.821.755,00		0,00		0,00		0,00			26%	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
		2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia • Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Tersedia	1	354.181.504,00		65.886.755,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
				Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1													UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
		2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	37.460.060,00		1.780.099,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
		2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	2.320.000,00	1	1.438.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
		2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	314.401.444,00		62.668.656,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
		2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel yang Tersedia • Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia	1	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
		2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0,00				0,00		0,00		0,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
		2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan	1	486.700,00	1	310.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
		2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	486.700,00	1	310.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
		2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara, Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia	1	126.384.000,00		60.625.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
				Jumlah Sarana Prasarana	1													UPTD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
				Pendukung yang Tersedia	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	120.984.000,00	2	60.625.000,00		0,00		0,00		0,00				PENYELENGGARAAN PELABUHAN
		2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	5.400.000,00				0,00		0,00		0,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
5	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik																	
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50	70.684.200,00		15.171.000,00		0,00		0,00		0,00		21%		UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
		2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersedia	19	70.684.200,00	4	15.171.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
		2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	19	70.684.200,00	4	15.171.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN																		
6	Meningkatnya konektivitas transportasi publik																	
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,9	477.976.692,00		25.527.282,00		0,00		0,00		0,00		5%		UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
		2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	190.378.100,00		15.856.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1													UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1													UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1													UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
		2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4.244.400,00				0,00		0,00		0,00				UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
		2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	70.987.700,00				0,00		0,00		0,00				UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
		2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	800.000,00		496.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	114.346.000,00		15.360.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
		2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	101.818.992,00		7.849.282,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1												UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1												UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
		2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.193.200,00		760.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
		2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	57.860.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
		2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	42.765.792,00		7.089.282,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
		2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	185.779.600,00		1.822.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12												UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
		2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	167.299.600,00		1.822.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
		2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	18.480.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	66	2.195.951.218,00		188.821.378,00		0,00		0,00		0,00		9%	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
		2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14	596.800.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
		2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14	596.800.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	1.599.151.218,00		188.821.378,00		0,00		0,00		0,00			ANGKUTAN JALAN
		2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	1.599.151.218,00		188.821.378,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
UPTD PERLENGKAPAN JALAN																	
7	Meningkatnya konektivitas transportasi publik																
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,9	243.243.292,00		21.836.207,00		0,00		0,00		0,00		9%	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
		2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	22.243.200,00	1	10.259.225,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PERLENGKAPAN JALAN
				• Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15												UPTD PERLENGKAPAN JALAN
		2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	5.276.800,00	1	3.779.225,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PERLENGKAPAN JALAN
		2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	16.966.400,00	3	6.480.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PERLENGKAPAN JALAN
		2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	61.295.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PERLENGKAPAN JALAN
		2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	61.295.600,00				0,00		0,00		0,00			UPTD PERLENGKAPAN JALAN
		2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya	2	159.704.492,00		11.576.982,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PERLENGKAPAN JALAN
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16												UPTD PERLENGKAPAN JALAN
		2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	9.050.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD PERLENGKAPAN JALAN
		2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	150.654.492,00	3	11.576.982,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PERLENGKAPAN JALAN
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik	43,75	3.360.260.260,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0%	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
		2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah perlengkapan jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	700	3.360.260.260,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PERLENGKAPAN JALAN
				Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang tersedia	450												UPTD PERLENGKAPAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						I		II		III		IV		(%)					
						-7		-8		-9		-10		-11					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		K		Rp		K		Rp		K	Rp	K	Rp	-12
		2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	300	2.454.737.020,00				0,00		0,00		0,00					JALAN UPTD PERLENGKAPAN JALAN
		2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	246	905.523.240,00				0,00		0,00		0,00					UPTD PERLENGKAPAN JALAN
Rata-rata capaian kinerja (%)					8.20%	5.601.376.872,00	0%	1,26	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00					
Predikat kinerja					Sedang														
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																			
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																			
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH																			
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH																			
1	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali																		
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	100	1.034.019.810.984,00	25	4.536.202.282,00		0,00		0,00		0,00		0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	100	1.694.665.340,00	16,66	260.344.228,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	42.069.100,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	41.892.300,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	32	40.764.500,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	32	20.456.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	949.618.740,00	0	260.344.228,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	599.864.700,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu	100	514.026.700,00	20	81.071.200,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala	9	109.226.700,00	0	19.831.200,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
				Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota													
		5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	9	80.274.200,00	0	5.700.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	9	63.616.900,00	0	20.100.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	9	194.972.400,00	2	31.840.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	9	65.936.500,00		3.600.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase laporan perbendaharaan disusun tepat waktu	100	461.059.800,00	25	136.183.862,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK	12	461.059.800,00	3	136.183.862,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu	100	620.858.706,00	0	80.602.992,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2	547.806.306,00	0	80.452.992,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan	Jumlah Rancangan Peraturan	2	73.052.400,00	0	150.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi													KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	100	1.030.663.670.938,00	0	3.978.000.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1	2.026.843.633,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	205.265.185.944,00	0	2.600.000.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	136.183.624.677,00	0	1.378.000.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1	687.188.016.684,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan implementasi SIPD	100	65.529.500,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12	65.529.500,00	3	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset	Baik	1.251.801.112,00	0	115.137.246,00		0,00		0,00		0,00		9%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	100	1.251.801.112,00	0	115.137.246,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	118.872.300,00	0	240.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	22.166.000,00	0	4.320.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	180.280.000,00	0	9.000.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	930.482.812,00	0	101.577.246,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	(tidak ada sasaran)																
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen	82	32.675.711.168,00	0,2	4.491.777.152,00		0,00		0,00		0,00		14%	BADAN PENGELOLA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kinerja													KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	100	1.631.573.730,00	25	97.687.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	17.099.400,00	0	9.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	232.541.840,00	0	44.052.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	11.930.200,00	0	3.513.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	7.999.900,00	1	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	127.305.410,00	0	14.638.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	185.083.000,00	3	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1.049.613.980,00	0	15.022.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	100	290.010.000,00	25	61.109.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	4.710.000,00	1	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	285.300.000,00	3	58.109.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	100	1.991.691.854,00	25	166.609.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	844.089.830,00	2	35.512.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	6.400.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	168.204.710,00	10	17.031.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	972.997.314,00	0	114.066.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan,	100	44.390.200,00	25	4.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu													ASET DAERAH
		5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	44.390.200,00	2	4.660.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100	28.718.045.384,00	25	4.161.711.239,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2200	8.565.723.402,00	400	151.708.914,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119	20.152.321.982,00	119	4.010.002.325,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH																	
3	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali																
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset	Baik	2.102.504.000,00	0	22.657.800,00		0,00		0,00		0,00		1%	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	47	2.102.504.000,00	1,5	22.657.800,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6	2.102.504.000,00	0	22.657.800,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
4	(tidak ada sasaran)																
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	972.539.044,00	0,2	161.617.533,00		0,00		0,00		0,00		17%	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	100	799.475.444,00	25	158.902.574,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	154.525.000,00	2	106.325.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	15.260.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	629.690.444,00	0	52.577.574,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	100	114.863.600,00		1.378.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	43.748.500,00	0	1.028.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	9.449.100,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	4.200.000,00	1	350.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	10.485.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	46.981.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	100	58.200.000,00	25	1.336.959,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.200.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	57.000.000,00	3	1.336.959,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)					15.50%	9.327.392.013,00	8.47%	0,41	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
1	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali																
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88	155.001.768.678,00	0	36.547.325.074,00		0,00		0,00		0,00		24%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100	47.662.300,00	25	7.715.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	22.721.100,00	1	5.870.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	24.941.200,00	2	1.845.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian	100	140.831.740.151,00	25	35.901.476.534,00		0,00		0,00		0,00			BADAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV					
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan													PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340	140.831.740.151,00	311	35.901.476.534,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	50.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	50.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	611.850.494,00	25	67.835.068,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	7.039.000,00	1	6.895.800,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	318.006.500,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	101.575.894,00	3	41.647.200,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	54.960.300,00	1	907.370,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2.428.800,00	2	331.200,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	13.500.000,00	3	490.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	114.340.000,00	3	17.563.498,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	7.752.675.449,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9	226.733.625,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90	970.874.300,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	6.555.067.524,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	811.035.177,00	25	132.524.068,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan	1	3.148.700,00	1	1.910.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			BADAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jasa Surat Menyurat													PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	387.433.104,00	3	71.592.812,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	420.453.373,00	3	59.021.256,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	4.896.805.107,00	25	437.774.404,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	124.469.592,00	1	1.581.600,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	1.434.609.652,00	8	59.421.492,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	839.934.430,00	11	179.457.386,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	1.284.252.460,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43	1.213.538.973,00	0	197.313.926,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	27.008.900,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan pendapatan di Kab/Kota yang terbina	100	27.008.900,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1	27.008.900,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23	695.911.900,00	62,73	37.605.360,00		0,00		0,00		0,00		5%	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian PAD terhadap target PAD	100	695.911.900,00	28,91	37.605.360,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	162.026.400,00	0	12.566.050,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	98.164.600,00	0	8.912.100,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	143.625.200,00	3	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V				
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	257.135.700,00	0	12.145.000,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	34.960.000,00	3	3.982.210,00		0,00		0,00		0,00				BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG																		
2	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali																	
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	1.686.180.546,00	0	284.417.090,00		0,00		0,00		0,00		17%		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	249.419.140,00	25	25.250.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	5.259.300,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22	134.216.140,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
		5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	25.000.000,00	1	14.333.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	10.239.200,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	4.854.500,00	2	1.017.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
		5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	6.850.000,00	3	620.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	63.000.000,00	3	9.280.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	532.789.800,00	25	95.215.012,00		0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG	
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.789.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG	
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	261.000.000,00	3	54.827.116,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG	
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	270.000.000,00	3	40.387.896,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG	
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	903.971.606,00	25	163.952.078,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG	
		5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	47.000.000,00	1	12.277.400,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG	
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	175.714.492,00	3	26.941.082,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG	
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	21.180.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG	
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	643.353.314,00	0	124.733.596,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG	
		5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21	16.723.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23	3.428.837.458,00	62,73	790.939.052,00		0,00		0,00		0,00		23%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG	
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD UPTD 1	100	3.428.837.458,00	27,84	790.939.052,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						I		II		III		IV		(%)					
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																			RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12	1.741.959.942,00	3	458.645.444,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	5000	1.686.877.516,00	1200	332.293.608,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM																			
3	(tidak ada sasaran)																		
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	1.146.555.814,00	0	257.314.922,00		0,00		0,00		0,00		22%			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	202.972.980,00	25	107.377.400,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	3.827.100,00	4	3.687.500,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	122.245.980,00	15	92.585.900,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	27.837.000,00	4	2.936.000,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	5.182.900,00	1	282.000,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	2.175.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	3.575.000,00	3	506.000,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	38.130.000,00	3	7.380.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	403.193.200,00	25	71.851.492,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.193.200,00	1	760.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	165.000.000,00	3	36.431.780,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	237.000.000,00	3	34.659.712,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	540.389.634,00	25	78.086.030,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	52.490.000,00	1	8.178.600,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	123.835.592,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	14.200.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	333.843.542,00	1	62.396.348,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
		5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	16	16.020.500,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-11				
						-7		-8		-9		-10		-11				
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-12	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23	918.326.594,00	62,73	182.640.886,00	0,00		0,00		0,00			20%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD UPTD	100	918.326.594,00	26,5	182.640.886,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12	478.506.002,00	3	97.538.984,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	13155	439.820.592,00	3210	85.101.902,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG																		
4	(tidak ada sasaran)	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	1.528.457.634,00	0	317.491.218,00	0,00		0,00		0,00			21%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	180.023.800,00	25	89.910.800,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2.660.400,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	110.050.400,00	0	78.899.800,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	30.280.000,00	1	4.250.000,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	3.674.000,00	0	900.000,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	2.580.000,00	1	596.000,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
																	DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	4.325.000,00	3	840.000,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	26.454.000,00	3	4.425.000,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	411.193.200,00	25	67.356.850,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.193.200,00	1	760.000,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	210.000.000,00	3	31.937.138,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	200.000.000,00	3	34.659.712,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	937.240.634,00	25	160.223.568,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	42.835.000,00	1	4.489.400,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	152.991.500,00	4	13.752.000,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23	16.390.000,00	10	1.755.000,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1	707.464.134,00	1	137.507.168,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DI KABUPATEN KLUNGKUNG
		5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19	17.560.000,00	4	2.720.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23	881.626.348,00	62,73	196.871.804,00		0,00		0,00		0,00		22%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD UPTD	100	881.626.348,00	25,8	196.871.804,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12	433.280.592,00	3	96.929.902,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	10963	448.345.756,00	2741	99.941.902,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI																	
5	(tidak ada sasaran)																
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88	1.233.451.689,00	0	141.552.708,00		0,00		0,00		0,00		11%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	171.923.500,00	25	9.011.600,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	7.009.700,00	1	3.940.600,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	116.788.300,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI
		5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	29.500.000,00	1	4.035.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan	1	3.399.700,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-11				
						-7		-8		-9		-10		-11				
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan													PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3.250.800,00	1	396.000,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	2.975.000,00	1	640.000,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	9.000.000,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	481.639.287,00	25	52.875.870,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.789.800,00	1	1.140.000,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	120.000.000,00	1	25.741.086,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	359.849.487,00	1	25.994.784,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	579.888.902,00	25	79.665.238,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	47.995.000,00	1	5.972.900,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	104.518.700,00	0	6.092.600,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	10	7.100.000,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PELAYANAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-11				
						-7		-8		-9		-10		-11				
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Lainnya yang Dipelihara													PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	412.176.002,00	1	67.599.738,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	8.099.200,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23	1.070.409.054,00	62,73	230.291.378,00		0,00		0,00		0,00		22%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD UPTD	100	1.070.409.054,00	27,4	230.291.378,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12	492.786.822,00	3	105.155.148,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	10000	577.622.232,00	1190	125.136.230,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR																		
6	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali																	
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	1.665.662.226,00	0	355.979.731,00		0,00		0,00		0,00		21%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	280.787.314,00	25	129.317.060,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	16.931.000,00	1	9.402.600,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	145.966.580,00	1	110.037.460,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-12
					K	Rp											GIANYAR
		5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	56.718.634,00	1	4.596.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	22.463.600,00	1	1.975.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	8.212.500,00	3	936.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12.375.000,00	3	2.080.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	18.120.000,00	3	290.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	562.826.000,00	25	77.894.917,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.826.000,00	1	1.800.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik yang Disediakan	12	250.000.000,00	3	49.037.407,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	310.000.000,00	3	27.057.510,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	822.048.912,00	25	148.767.754,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	49.500.000,00	1	12.900.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		(%)			
						-7	-8	-9	-10	-11							
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	147.497.500,00	1	36.715.600,00		0,00		0,00		0,00			GIANYAR UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41	38.300.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	551.731.412,00	1	99.152.154,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29	35.020.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23	1.724.459.794,00	62,73	511.466.526,00		0,00		0,00		0,00		30%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase capaian PAD terhadap target PAD UPTD 6	100	1.724.459.794,00	25,72	511.466.526,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12	1.153.253.644,00	3	386.260.296,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	13119	571.206.150,00	8842	125.206.230,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA																	
7	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali																
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	1.247.854.176,00	0	179.516.626,00		0,00		0,00		0,00		14%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	181.920.020,00	25	25.520.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3	3.664.700,00	3	3.267.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-11				
						-7		-8		-9		-10		-11				
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Bangunan Kantor yang Disediakan													RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA	
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	122.248.420,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA	
		5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	25.000.000,00	4	16.135.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA	
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	4.691.900,00	1	514.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA	
		5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	4.775.000,00	3	984.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA	
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	21.540.000,00	3	4.620.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA	
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	372.491.500,00	25	51.775.940,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA	
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.491.500,00	1	950.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA	
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	181.000.000,00	3	37.834.518,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA	
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	190.000.000,00	3	12.991.422,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA	
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	693.442.656,00	25	102.220.686,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA	
		5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1	46.703.000,00	1	22.375.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							I		II		III		IV		V		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya													RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	154.708.392,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58	41.020.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	430.385.464,00	0	68.749.604,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23	20.625.800,00	6	3.585.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23	965.545.774,00	62,73	164.772.222,00		0,00		0,00		0,00		17%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD UPTD 2	100	965.545.774,00	26,79	164.772.222,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12	355.159.772,00	3	72.159.738,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	14518	610.386.002,00	3352	92.612.484,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN																	
8	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali																
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	1.517.960.010,00	0	211.844.001,00		0,00		0,00		0,00		14%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	199.380.390,00	25	25.980.500,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						I		II		III		IV		(%)					
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7			-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6.949.800,00	1	5.832.500,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	136.866.890,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	27.000.000,00	3	15.690.000,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	6.783.700,00	1	594.000,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	3.375.000,00	3	759.000,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	18.405.000,00	3	3.105.000,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	475.978.200,00	25	80.497.199,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.978.200,00	1	1.260.000,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	180.000.000,00	3	34.380.769,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	294.000.000,00	3	44.856.430,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	842.601.420,00	25	105.366.302,00		0,00		0,00		0,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	45.855.000,00	1	22.268.400,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	225.937.992,00	12	7.987.082,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28	21.460.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	533.098.428,00	1	75.110.820,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17	16.250.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23	912.576.594,00	62,73	172.754.886,00		0,00		0,00		0,00		19%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD UPTD 3	100	912.576.594,00	27,39	172.754.886,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12	432.900.592,00	3	82.621.902,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	12620	479.676.002,00	28	90.132.984,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG																	
9	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali																
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	1.968.519.476,00	0	308.908.405,00		0,00		0,00		0,00		16%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	214.752.040,00	25	23.820.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5.037.600,00	3	2.538.000,00		0,00		0,00		0,00			DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	133.993.390,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	25.000.000,00	1	12.834.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	17.186.050,00	1	942.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	4.840.000,00	2	918.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	10.575.000,00	3	2.100.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	18.120.000,00	3	4.488.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	817.209.147,00	25	134.470.703,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.978.200,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	378.000.000,00	9	62.868.599,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	437.230.947,00	3	71.602.104,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7	-8	-9	-10	-11							
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100	936.558.289,00	25	150.617.702,00		0,00		0,00		0,00			DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	36.265.000,00	1	5.650.300,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	188.338.992,00	3	29.583.382,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28	19.920.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	664.194.297,00	0	115.384.020,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	27.840.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23	2.749.998.928,00	62,73	498.639.838,00		0,00		0,00		0,00		18%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase capaian PAD terhadap target PAD UPTD 4	100	2.749.998.928,00	25,13	498.639.838,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12	2.125.525.352,00	3	357.669.772,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	288	624.473.576,00	72	140.970.066,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR																	
10	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali																
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	2.289.503.655,00	0	312.781.769,00		0,00		0,00		0,00		14%	UPTD PELAYANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-11				
						-7		-8		-9		-10						
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	367.679.564,00	25	14.558.900,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4.435.800,00	1	1.423.400,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	199.920.870,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
		5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	57.122.194,00	1	8.464.100,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	65.536.700,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	6.424.000,00	1	394.400,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
		5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	20.875.000,00	1	2.772.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	13.365.000,00	2	1.505.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100	867.965.394,00	25	136.357.117,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.491.500,00	1	950.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	474.550.000,00	3	78.185.861,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	391.923.894,00	1	57.221.256,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai	100	1.053.858.697,00	25	161.865.752,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV				V	
						-7		-8		-9		-10				-11	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	47.895.800,00	1	5.289.000,00		0,00		0,00		0,00			DI KOTA DENPASAR
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	203.989.104,00	0	28.296.264,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	17.040.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	751.906.893,00	1	128.280.488,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
		5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21	33.026.900,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23	3.091.687.162,00	62,73	701.558.052,00		0,00		0,00		0,00		23%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase capaian PAD terhadap target PAD UPTD 5	100	3.091.687.162,00	26,42	701.558.052,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2	2.609.200.078,00	0	613.131.150,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	154572	482.487.084,00	119	88.426.902,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
Rata-rata capaian kinerja (%)					24.50%	42.404.671.548,00	111.6%	3,73	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK																	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK																	
1	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat																
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi yang disebarluaskan	94,1	10.858.076.172,00	0	2.814.083.873,00		0,00		0,00		0,00		26%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	83	10.858.076.172,00	0	2.814.083.873,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	120	1.056.490.780,00	36	170.989.886,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	90	1.002.349.282,00	0	191.004.100,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	1.687.524.460,00	0	152.353.410,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	6	2.309.613.170,00	6	2.052.777.574,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	225	1.288.405.032,00	75	50.501.410,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12	304.234.420,00	3	41.885.164,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	100	3.209.459.028,00	100	154.572.329,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
2	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi																	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	82,07	343.386.228.648,00	0	2.393.422.658,00		0,00		0,00		0,00			1%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100	343.386.228.648,00	73,33	2.393.422.658,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	2	2.588.763.600,00	0	8.511.500,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	2	297.259.578.322,00	0	346.432.012,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	29	18.230.838.192,00	29	65.667.600,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	25	4.099.398.250,00	5	383.877.900,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2	3.644.422.240,00	0	331.556.950,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang	9	11.325.241.894,00	0	1.246.296.696,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						I		II		III		IV				V		
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7			-8		-9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas umlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	9	6.237.986.150,00	9	11.080.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
3	(tidak ada sasaran)																	
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik SEKTORAL	4,2	346.958.640,00	0	60.973.228,00		0,00		0,00		0,00		18%		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi	11	346.958.640,00	0	60.973.228,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50	108.715.510,00	0	24.008.582,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100	114.495.110,00		15.896.982,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2	123.748.020,00	0	21.067.664,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan	76	384.906.320,00	0	104.962.688,00		0,00		0,00		0,00		27%		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	29	281.525.110,00	29	86.696.706,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2	34.024.900,00	0	716.500,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1	172.677.410,00	0	85.655.706,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	10.312.800,00	0	324.500,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29	64.510.000,00	29	0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	29	103.381.210,00	29	18.265.982,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	29	103.381.210,00	29	18.265.982,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DISKOMINFOS	82,8	32.504.603.065,00	0	4.541.655.410,00		0,00		0,00		0,00		14%		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan	15	50.368.000,00	4	1.760.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS KOMUNIKASI,

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV				K	Rp
						-7	-8	-9	-10								
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kinerja Perangkat Daerah	dan Evaluasi yang tersedia													INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	36.477.700,00	1	1.760.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	13.890.300,00	3	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang tersedia	75	26.969.708.217,00	9	3.524.381.769,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216	25.526.326.517,00	121	3.511.097.769,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11	1.443.381.700,00	0	13.284.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang tersedia	12	509.814.800,00	3	59.297.806,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15.443.000,00	1	7.425.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	42.914.800,00	8	16.037.250,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45	87.500.000,00	7	4.305.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	13.670.400,00	0	5.280.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7649	31.522.600,00	1911	2.707.600,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12.630.000,00	2	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	306.134.000,00	10	23.542.956,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3	897.741.340,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	199.761.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29	697.980.340,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah layanan jasa penunjang	12	567.998.700,00	3	92.470.191,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KOMUNIKASI,

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
				sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik													TERPADU SATU PINTU	
		2.18.04.1.01.008	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	10	141.421.640,00	57	30.044.328,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	Meningkatnya perekonomian Krama Bali																	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	12650	189.266.230,00	0	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00		12%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	2	189.266.230,00	0	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen peta potensi investasi Provinsi	2	189.266.230,00	0	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	33,5	136.193.520,00	8	17.902.164,00		0,00		0,00		0,00		13%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	2	136.193.520,00	0	17.902.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1	136.193.520,00	0	17.902.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	12,3	182.326.230,00	0	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00		12%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	92	182.326.230,00	0	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah di analisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan	18	17.280.000,00	0			0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-11				
						-7		-8		-9		-10		-11				
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha														
		2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	13	126.146.230,00	0	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis /sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	40	38.900.000,00	0			0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100	70.950.820,00	100	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00		21%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	2	70.950.820,00	0	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	70.950.820,00	0	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3	(tidak ada sasaran)																	
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	70	18.575.024.900,00	0	3.274.358.553,00		0,00		0,00		0,00		18%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	40	15.130.595.620,00	0	2.711.577.160,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105	15.130.595.620,00	58	2.711.577.160,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	388.864.400,00	40	46.779.300,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang	1	5.073.400,00	1	4.131.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				disediakan													TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	73.134.300,00	1			0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	70.000.000,00	1	6.750.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	24.133.700,00	1	8.491.280,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	216.523.000,00	2	27.407.020,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1.475.820.930,00	1	301.963.083,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3.846.500,00	1	2.450.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	152.000.000,00	2	35.290.197,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.319.974.430,00	1	264.222.886,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	20	1.579.743.950,00	12	214.039.010,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	1.336.436.050,00	7	214.039.010,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	243.307.900,00	5			0,00		0,00		0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.07.01.1.06.0009	Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penggandaan yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	62.171.000,00		6.065.780,00		0,00		0,00		0,00			PENGHUBUNG
		5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100	229.503.420,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGHUBUNG
		5.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27	229.503.420,00		0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGHUBUNG
		5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1.474.896.236,00	25	233.082.159,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGHUBUNG
		5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	8.989.100,00		1.655.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGHUBUNG
		5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	306.800.000,00		39.609.303,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGHUBUNG
		5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.159.107.136,00		191.817.856,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGHUBUNG
		5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100	1.869.650.064,00	25	328.960.974,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGHUBUNG
		5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13	1.332.537.868,00		181.257.428,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGHUBUNG
		5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	395.343.000,00		130.023.680,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGHUBUNG
		5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	141.769.196,00		17.679.866,00		0,00		0,00		0,00			BADAN PENGHUBUNG
Rata-rata capaian kinerja (%)					51%	1.590.442.693,00	103.4%	0,32	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA																	
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN																	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	1.034.872.366,00	230.238.673,00	0,00		0,00		0,00		22%	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
		1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100	170.880.100,00	25	20.448.115,00	0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
		1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	140.162.500,00		2.100.000,00	0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-12
		1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	3.499.600,00				0,00		0,00		0,00			PENDIDIKAN
		1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	27.218.000,00		18.348.115,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100	755.752.266,00	25	142.710.558,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	755.752.266,00	3	142.710.558,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100	108.240.000,00	25	67.080.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	98.400.000,00		67.080.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	1.440.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54	8.400.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
2	Meningkatnya kualitas pendidikan																
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK	82,5	1.163.362.000,00		78.975.164,00		0,00		0,00		0,00		7%	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	92	685.647.000,00		38.531.082,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	2100	94.290.000,00	160	10.936.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	570	31.636.000,00	149	16.505.286,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	540	14.040.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	273	545.681.000,00		11.089.796,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	60	477.715.000,00		40.444.082,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	1140	77.760.000,00	160	12.826.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	480	13.950.000,00				0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	540	31.374.000,00	105	16.510.286,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	174	354.631.000,00		11.107.796,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA																	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan																
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	1.334.195.333.095,00		163.292.998.906,00		0,00		0,00		0,00		12%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	24	193.750.900,00	3	27.048.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21	85.979.500,00	2	25.068.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	107.771.400,00	1	1.980.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	177	1.319.132.887.513,00	14	161.154.276.596,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28317	1.317.702.881.213,00	10680	161.135.676.596,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4500	1.284.575.800,00	1			0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan	96	145.430.500,00	2	18.600.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Akuntansi SKPD														OLAHA RAGA
		1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	12	766.145.000,00	1	27.620.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	9	766.145.000,00	1	27.620.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik	100	68.193.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	36	68.193.400,00				0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	986.579.810,00	25	44.308.651,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	167	459.411.560,00	17	12.402.451,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	95.000.000,00	1	8.650.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	10.840.000,00				0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	31.526.250,00		4.392.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	389.802.000,00	3	18.864.200,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100	9.847.361.472,00	25	1.753.245.759,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	978.222.150,00	3	207.973.949,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	8.869.139.322,00	3	1.545.271.810,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100	3.200.415.000,00	25	286.499.900,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	72	954.685.000,00	7	286.499.900,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	1.977.200.000,00				0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA
		1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	268.530.000,00				0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHA RAGA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							I		II		III		IV				
							-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali																
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	72,5	1.255.080.400,00	10	38.417.620,00		0,00		0,00		0,00		3%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi	273	1.255.080.400,00		38.417.620,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	3	148.051.900,00		11.788.040,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	200	193.722.000,00		300.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	180	775.739.500,00		24.754.580,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	90	101.177.000,00		1.575.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	75	36.390.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	51	81.967.430.900,00		54.645.332.700,00		0,00		0,00		0,00		67%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	15	21.650.590.900,00		5.968.350.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	500	13.526.517.500,00		5.965.100.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	10	8.124.073.400,00		3.250.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional	360	316.840.000,00		500.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	2	316.840.000,00		500.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan	59	60.000.000.000,00	59	48.676.482.700,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi	3	60.000.000.000,00	1	48.676.482.700,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	dengan Lembaga Terkait Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan	53,5	1.500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka	53,5	1.500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	3	1.500.000.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
5	Meningkatnya kualitas pendidikan																
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah APS Penduduk Usia 16 - 18 tahun	100	627.419.858.522,00		103.758.333.838,00		0,00		0,00		0,00		17%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di Dunia Usaha/ Dunia Industri	50,75												DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Angka Partisipasi Sekolah APS Penduduk Disabilitas Usia 4 - 18 tahun	100												DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA	94	294.740.595.118,00		41.101.775.272,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Iklim Kebinekaan SMA	99												DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Inklusivitas SMA	89												DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	75,5												DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	61,25												DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	24	68.000.000.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	20	1.980.000.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	8	382.366.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	600	4.704.150.000,00		81.364.255,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	1202	2.768.179.000,00		1.500.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1501	31.956.434.118,00	839	5.355.399.370,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga	200	77.120.000,00		11.062.040,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN,

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi													KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	407	125.380.000,00		36.960.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	489	161.691.130.000,00		35.613.539.607,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	342	57.409.900,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	44.690.000,00		300.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	66	8.871.116.400,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1800	86.942.800,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	180	10.919.377.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1	3.000.000.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	76.299.900,00		1.650.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK	93,5	307.220.573.724,00		59.783.336.338,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Iklim Kebinekaan SMK	97,5										DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
				Indeks Inklusivitas SMK	85,55										DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
				Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69,75										DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
				Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56,9										DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,55										DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
				Tingkat Penverapan Lulusan	91										DINAS PENDIDIKAN,		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV				(%)	
						-7		-8		-9		-10				-11	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
				SMK	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	9	22.212.384.000,00				0,00		0,00		0,00			KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10	11.150.616.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10	3.914.925.900,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1650	5.338.581.500,00		268.309.611,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	870	2.418.875.000,00		3.740.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4150	20.272.868.244,00	449	3.165.654.178,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200	88.862.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	337	460.992.000,00		12.360.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	525	180.529.850.000,00		55.468.452.549,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	344	45.760.000,00		620.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	68.960.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	4.012.000.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	116	9.211.539.880,00		864.200.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1500	86.574.200,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0038	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	64	47.370.185.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7			-8		-9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	37.600.000,00				0,00		0,00		0,00				OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB	94	25.458.689.680,00		2.873.222.228,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Iklim Keamanan SMALB	94													DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Iklim Keamanan SMPLB	94													DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	99													DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	93,75													DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	89,5													DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Inklusivitas SDLB	93													DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Inklusivitas SMALB	99													DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Inklusivitas SMPLB	90													DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	73,75													DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	78													DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	78													DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	62,5													DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	70,5													DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	67,5													DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	1.880.000.000,00				0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya	4674	3.523.966.200,00		1.500.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						I		II		III		IV		(%)				
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7			-8		-9
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Personil Peserta Didik Jumlah siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	1000	1.431.464.000,00		9.449.500,00		0,00		0,00		0,00				OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	447	4.649.915.980,00	108	790.952.397,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	38	761.324.300,00		54.223.862,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	42	10.808.510.000,00		1.994.525.569,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	150	15.547.600,00	60	402.850,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	42	16.171.600,00		999.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	1.918.000.000,00				0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	28	362.880.000,00				0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14	90.910.000,00		21.169.050,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Nilai Prestasi Kinerja NPK Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal baik	100	60.319.100,00		1.780.000,00		0,00		0,00		0,00		3%		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal	67	60.319.100,00		1.780.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5	26.079.400,00		110.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	9	34.239.700,00		1.670.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN																		
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan																	
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	664.648.242,00		134.142.266,00		0,00		0,00		0,00		20%		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						I		II		III		IV							
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100	32.440.600,00	75	5.285.400,00		0,00		0,00		0,00					KEJURUAN
		1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	8.613.000,00	10	3.550.400,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
		1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	6.547.600,00	1	1.735.000,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
		1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	17.280.000,00				0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
		1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100	541.397.642,00	17	97.644.066,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
		1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	541.397.642,00	2	97.644.066,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
		1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100	90.810.000,00	25	31.212.800,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
		1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	90.810.000,00	1	31.212.800,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
7	Meningkatnya kualitas pendidikan																		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	60,5	87.742.100,00		9.394.800,00		0,00		0,00		0,00			11%		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
		1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	3	60.376.800,00		5.759.900,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
		1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan	600	60.376.800,00		5.759.900,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						I		II		III		IV		(%)					
						-7		-8		-9		-10		-11					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		K		Rp		K		Rp		K		Rp		-12
				Kompetensinya	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	KETERAMPILAN KEJURUAN		
		1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan	3	27.365.300,00		3.634.900,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN		
		1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	240	27.365.300,00		3.634.900,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN		
		1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	70,8	59.140.000,00		1.988.800,00		0,00		0,00		0,00		3%	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN		
		1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali	87,4	59.140.000,00		1.988.800,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN		
		1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	675	59.140.000,00		1.988.800,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)					14%	322.191.602.767,00	13.9%	1,65	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00					
Predikat kinerja					Sedang														
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																			
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																			
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH																			
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH																			
1	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah																		
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan Kepada Pemangku Kepentingan/ Stakeholder dalam perumusan Kebijakan Daerah	0	7.428.959.900,00		133.155.740,00		0,00		0,00		0,00		2%	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
				Persentase Kekayaan Intelektual Daerah yang Terfasilitasi Pendaftarannya	0												BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
		5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	0	5.209.594.000,00	25	68.817.060,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
		5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	0	4.270.000.000,00	1	57.812.060,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
		5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,	0	325.000.000,00	0	6.930.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		(%)			
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Ketatalaksanaan Desa	Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa													
		5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	0	386.742.000,00	0	4.075.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	0	227.852.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan	0	1.725.000.000,00	25	25.045.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	250.000.000,00	1	7.075.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	0	975.000.000,00	0	12.300.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	0	266.000.000,00	0	3.750.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	234.000.000,00	0	1.920.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	0	494.365.900,00	25	39.293.680,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0	185.000.000,00	0	33.228.680,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0	139.365.900,00	0	100.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0	170.000.000,00	0	5.965.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0	15.856.330.579,00		3.065.714.108,00		0,00		0,00		0,00		19%	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	105.000.000,00	25	17.716.900,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	55.000.000,00	3	17.716.900,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	50.000.000,00	2	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	11.284.006.527,00	25	2.030.563.138,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	11.284.006.527,00	25	2.030.563.138,00		0,00		0,00		0,00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	0	935.482.800,00		179.526.800,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	21.938.000,00	6	13.457.000,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	198.905.500,00	28	125.021.000,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	107.436.400,00	0	4.000.000,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	24.180.200,00	6	10.926.000,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	14.998.700,00	0	2.017.600,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	568.024.000,00	0	24.105.200,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang Diadakan	0	884.819.840,00		266.000.000,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	419.204.600,00	29	266.000.000,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	465.615.240,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	0	513.699.044,00		125.837.746,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	167.200.000,00	0	27.045.172,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	4.992.600,00	1	3.180.000,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	341.506.444,00	1	95.612.574,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	0	2.133.322.368,00		446.069.524,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	795.794.806,00	0	242.750.310,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1.337.527.562,00	0	203.319.214,00	0,00		0,00		0,00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)					15%	3.198.869.848,00	0%	0,21	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Tinggi												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V		
						-7		-8		-9		-10		-11		
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-12	
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK																
UPTD PELAYANAN SOSIAL																
1	(tidak ada sasaran)															
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	5.780.028.658,00		493.388.437,00		0,00		0,00		0,00	9%	UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	100	172.770.200,00	100	106.121.800,00		0,00		0,00		0,00		UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9.813.400,00	1	9.813.400,00		0,00		0,00		0,00		UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	159.941.800,00	3	95.648.400,00		0,00		0,00		0,00		UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	3.015.000,00	1	660.000,00		0,00		0,00		0,00		UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	100	538.321.344,00	100	120.668.267,00		0,00		0,00		0,00		UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	201.100.000,00	3	47.605.693,00		0,00		0,00		0,00		UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	337.221.344,00	2	73.062.574,00		0,00		0,00		0,00		UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	100	5.068.937.114,00	50	266.598.370,00		0,00		0,00		0,00		UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	278.322.984,00	3	17.972.664,00		0,00		0,00		0,00		UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	3.654.397.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1.136.217.130,00	1	248.625.706,00		0,00		0,00		0,00		UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	19,65	3.234.118.200,00		150.239.670,00		0,00		0,00		0,00	5%	UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	837	1.915.961.200,00	52	65.619.670,00		0,00		0,00		0,00		UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	45	91.401.500,00	45	50.844.670,00		0,00		0,00		0,00		UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	45	1.478.250.000,00	45	0,00		0,00		0,00		0,00		UPTD PELAYANAN SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Kewenangan Provinsi" Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	45	89.750.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	45	21.680.300,00	45	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	45	125.759.400,00	45	14.775.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	45	100.000.000,00	45	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15	9.120.000,00	7	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	371	1.318.157.000,00	90	84.620.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi"	70	996.450.000,00	85	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	70	70.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	70	20.000.000,00	85	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	70	164.987.000,00	85	84.620.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10	6.720.000,00	5	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN SOSIAL
		1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20	60.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PELAYANAN SOSIAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
2	Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan																
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100	341.811.800,00	100	0,00		0,00		0,00		0,00		0%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah korban bencana yang	720	341.811.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL,

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
			dan Sosial Provinsi	terfasilitasi													PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	2	3.240.000,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100	3.240.000,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	595	335.331.800,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
3	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat																	
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG	100	44.128.800,00	100	260.000,00	0,00		0,00		0,00			1%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender PUG termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender PPRG	40	37.085.800,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	100	37.085.800,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	47	7.043.000,00	0	260.000,00	0,00		0,00		0,00				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	"Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi"	250	7.043.000,00	0	260.000,00	0,00		0,00		0,00				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah	35	2.732.700,00	0	260.000,00	0,00		0,00		0,00			10%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
		2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan	2	2.732.700,00	0	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1	2.732.700,00	0	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
4	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat																	
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	11,89	127.906.100,00	1,32	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan	4	27.906.100,00	1	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi "	2	27.906.100,00	1	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga	1	100.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	"Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota"	1	100.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	1,28	13.743.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga	1	13.743.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	3	13.743.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
5	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali																	
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA	Persentase warga negara migran	100	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				DINAS SOSIAL,	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
			MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	korban tindak kekerasan yang tertangani													PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	15	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	"Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota "	2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	73,14	9.958.600,00	83,17	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan	5	9.958.600,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	"Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas"	45	9.958.600,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
6	Meningkatnya perekonomian Krama Bali																	
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS yang aktif dalam penanganan PMKS	5,45	106.183.100,00	5,45	1.440.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial	100	3.484.600,00	240	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang"	20	3.484.600,00	48	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial	57	102.698.500,00	52	1.440.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	57	102.698.500,00	52	1.440.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		-11			
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	0,04	47.448.600,00	0,01	8.640.000,00		0,00		0,00		0,00		18%	ANAK
		1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur	20	12.816.600,00	8	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	20	12.816.600,00	8	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	292	34.632.000,00	52	8.640.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	"Jumlah Keluarga Penerima Manfaat KPM yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi"	192	31.392.000,00	52	8.640.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100	3.240.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
7	(tidak ada sasaran)																
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	23.944.307.307,00	A	3.950.874.497,00		0,00		0,00		0,00		17%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	100	229.582.700,00	50	14.220.200,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	7.508.200,00	1	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.01.1.06.0002	Penediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	79.649.600,00	1	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	96.022.700,00	1	6.500.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	5.647.200,00	1	0,00		0,00		0,00		0,00			PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	3.660.000,00	0	725.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	37.095.000,00	1	6.995.200,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	100	668.462.484,00	100	116.537.369,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	180.000.000,00	3	29.304.795,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	488.462.484,00	1	87.232.574,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100	2.330.888.402,00	50	576.137.572,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	1.175.080.364,00	5	358.316.194,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	1.155.808.038,00	30	217.821.378,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase layanan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100	33.464.600,00	50	4.062.750,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	12.827.600,00	1	1.320.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	4.952.200,00	1	1.702.050,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	15.684.800,00	0	1.040.700,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	20.681.909.121,00	100	3.239.916.606,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148	20.681.909.121,00	148	3.239.916.606,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	19,65	4.027.514.100,00	8,54	599.465.753,00		0,00		0,00		0,00		15%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	837	642.163.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi"	722	402.342.600,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40	226.861.200,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30	12.960.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	731	456.825.400,00	1	2.782.350,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai	321	151.012.500,00	1	2.782.350,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV						
						-7		-8		-9		-10		-11				
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi"													PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	260	14.352.200,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50	30.570.600,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	30	260.890.100,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar di dalam Pant	Jumlah penyandang disabilitas dalam pant yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	685	2.749.685.500,00	0	575.083.403,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi"	55	25.744.600,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	20	30.024.300,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	30	2.500.000.000,00	0	575.083.403,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	580	193.916.600,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	Jumlah gelandangan dan pengemis dalam pant yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	430	178.839.400,00	68	21.600.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi"	430	19.999.400,00	68	1.360.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/ Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal	430	158.840.000,00	79	20.240.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV				V	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
				Kewenangan Provinsi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Penanganan TMP sesuai standar	100	304.938.400,00	100	9.350.000,00		0,00		0,00		0,00		3%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1	304.938.400,00	1	9.350.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	898	304.938.400,00	898	9.350.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks pemenuhan Hak Anak IPHA	76,2	770.564.900,00	75,95	108.240.000,00		0,00		0,00		0,00		14%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA	20	30.925.700,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	"Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi"	20	30.925.700,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	2	739.639.200,00	0	108.240.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	200	648.691.600,00	0	108.240.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	"Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota "	4	90.947.600,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK																	
8	(tidak ada sasaran)																
		2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemem Kinerja	A	1.359.422.014,00		57.334.402,00		0,00		0,00		0,00		4%	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
		2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional	100	47.727.700,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				perkantoran yang tersedia													PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
		2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	1.528.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
		2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	26.266.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
		2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	19.932.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
		2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	100	5.000.000,00	100	1.204.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
		2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	5.000.000,00	1	1.204.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
		2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100	1.306.694.314,00	0	56.130.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
		2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	129.131.492,00	0	48.158.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
		2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	41.345.692,00	0	7.511.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
		2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1.136.217.130,00	0	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	11,89	4.492.579.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0%		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
		2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan	18	127.407.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
		2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	18	127.407.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
		2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang	Jumlah tahun layanan pengaduan dan rujukan lanjutan	1	4.365.172.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					UPTD PERLINDUNGAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV		(%)			
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.08.03.1.02.0001	memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar	80	3.360.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			PEREMPUAN DAN ANAK
		2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	80	4.361.812.000,00	29	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	1,28	71.117.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0%	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
		2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga	4	71.117.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
		2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1	2.099.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
		2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	100	69.018.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Rata-rata capaian kinerja (%)					36%	5.380.112.759,00	168.27%	0,97	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL																	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL																	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan																
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,85	15.572.756.285,00	0	4.588.121.198,00		0,00		0,00		0,00		29%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	0,12	351.660.012,00	0	61.099.869,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	88.455.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			SIPIL
		2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	263.205.012,00	1	61.099.869,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100	12.951.889.701,00	25	4.026.997.366,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	95	12.823.823.571,00	50	3.992.697.497,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	128.066.130,00	3	34.299.869,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12	373.902.950,00	3	52.070.976,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	1	5.992.400,00	1	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	25.523.100,00	0	2.000.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7			-8		-9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	75.738.750,00	3	7.416.000,00		0,00		0,00		0,00				SIPIL
		2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	6.048.100,00	1	157.850,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	4.626.600,00	2	645.700,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	1.350.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	254.624.000,00	1	41.851.426,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terselasaikan	100	6.439.600,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	6.439.600,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terselasaikan	100	690.670.594,00	25	151.596.049,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		-			
						-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10		-11
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-12
		2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	174.800.000,00	1	32.890.465,00		0,00		0,00		0,00			SIPIL
		2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	515.870.594,00	1	118.705.584,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terselesaikan	100	1.198.193.428,00	25	296.356.938,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan	17	1.098.383.428,00	0	296.356.938,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51	99.810.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
2	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali																
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cepat Berkembang	93,87	666.251.370,00	88,04	65.527.574,00		0,00		0,00		0,00		10%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Mampu Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Desa	93,87	666.251.370,00	88,04	65.527.574,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1	187.162.830,00	0	35.373.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN,

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	441.492.840,00	0	30.154.328,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	37.595.700,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Desa yang Mengalami Peningkatan PADes	29	135.878.612,00	27	22.880.046,00		0,00		0,00		0,00		17%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa dan Kemitraan	4,56	135.878.612,00	4,25	22.880.046,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1	135.878.612,00	0	22.880.046,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	99,69	5.341.186.660,00	7,94	194.243.412,00		0,00		0,00		0,00		4%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100	5.341.186.660,00	7,94	194.243.412,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	1500	141.746.520,00	823	17.047.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN,

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V				
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Adat	Taruna, Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2	189.354.940,00	0	30.680.928,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	585.557.120,00	0	52.285.664,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	4.424.528.080,00	0	94.229.656,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Instansi Pelaksana yang Menerbitkan KTP El Mencapai Target.	100	353.619.030,00	25	71.253.636,00		0,00		0,00		0,00		20%		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	100	353.619.030,00	25	71.253.636,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1	353.619.030,00	0	71.253.636,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100	236.063.720,00	25	17.022.164,00		0,00		0,00		0,00		7%		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	81	236.063.720,00	20,25	17.022.164,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						I		II		III		IV		(%)					
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7			-8		-9	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																			KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1	236.063.720,00	0	17.022.164,00		0,00		0,00		0,00					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor perangkat daerah dan mitra kerja yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	4	678.793.860,00	1	60.246.492,00		0,00		0,00		0,00			9%		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	1351	678.793.860,00	0	60.246.492,00		0,00		0,00		0,00					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Bangga Kencana	9	199.955.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan	1	478.838.860,00	0	60.246.492,00		0,00		0,00		0,00					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)					31%	5.019.294.522,00	44.98%	0,96	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00					
Predikat kinerja					Sangat Tinggi														
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																			
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																			
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																			
UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN																			
1	(tidak ada sasaran)																		
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,6	588.038.530,00	0	143.233.669,00		0,00		0,00		0,00			24%		UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	69.007.660,00	0	7.655.000,00		0,00		0,00		0,00					UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	3.927.800,00	0	3.901.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	32.579.860,00	0	2.520.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	32.500.000,00	0	1.234.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	1	231.951.230,00	0	49.314.841,00		0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	127.230.000,00	3	22.849.595,00		0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	104.721.230,00	4	26.465.246,00		0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	287.079.640,00	0	86.263.828,00		0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7	172.908.820,00	3	68.861.664,00		0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	72.110.820,00	0	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38	42.060.000,00	3	2.380.000,00		0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Produk Bersertifikat Organik	1,1	443.499.872,00	0	73.843.738,00		0,00		0,00		0,00		17%		UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
				Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	95,9		0											UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang Bersertifikat Organik	3	443.499.872,00	1	73.843.738,00		0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	5	298.322.760,00	1	49.870.492,00		0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	12	145.177.112,00	2	23.973.246,00		0,00		0,00		0,00			PANGAN UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5	532.326.060,00	0	171.402.442,00		0,00		0,00		0,00		32%	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha PAH yang Diuji	1000	532.326.060,00	274	171.402.442,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
				Jumlah PSAT yang Diuji	75		27								UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN		
		3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1000	233.221.240,00	0	63.913.228,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	75	299.104.820,00	0	107.489.214,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit							0,00		0,00		0,00			
		3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							0,00		0,00		0,00			
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																	
2	(tidak ada sasaran)																
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2680	1.280.702.010,00	0	83.677.902,00		0,00		0,00		0,00		7%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Pola Pangan Harapan	91		0								DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Dokumen Ketersediaan Pangan	1	122.605.830,00	0	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1	122.605.830,00	0	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina	9	1.158.096.180,00	0	61.144.656,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	166		0								DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 Satu Daerah	1	1.158.096.180,00	0	61.144.656,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPД Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		V					
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Informasi Harga Pangan yang Terpublikasi	92	458.286.192,00	0	82.621.092,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kelompok yang Menerapkan SOP Mutu Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	18	458.286.192,00	0	82.621.092,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3	458.286.192,00	0	82.621.092,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	95,9	133.368.130,00	0	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji	1	133.368.130,00	0	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1	133.368.130,00	0	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,6	64.103.209.504,00	0	10.697.434.347,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	696.731.314,00	2	116.003.730,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	410.577.162,00	2	63.426.156,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	286.154.152,00	0	52.577.574,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							0,00		0,00		0,00		0,00			
		3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0,00		0,00		0,00		0,00			
		3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	59.539.397.002,00	0	9.726.178.776,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	293	59.247.337.822,00	0	9.666.090.120,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	292.059.180,00	0	60.088.656,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							0,00		0,00		0,00		0,00			
		3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							0,00		0,00		0,00		0,00			
		3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	385.218.340,00	0	26.446.750,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	19.263.000,00	0	13.068.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	212.818.940,00	0	2.250.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	67.003.400,00	0	3.513.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	19.125.000,00	2	2.794.750,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	67.008.000,00	0	4.821.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	713.109.662,00	0	153.555.503,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	417.000.000,00	2	91.066.847,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	296.109.662,00	2	62.488.656,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	2.768.753.186,00	0	675.249.588,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	58	1.845.842.822,00	16	516.177.948,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	742.110.364,00	1	150.221.640,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	314	180.800.000,00	16	8.850.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian	90	17.568.987.596,00	0	415.089.474,00		0,00		0,00		0,00		2%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	0,7		0										DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	0,7		0										DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	0,7		0										DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,82		0										DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3	10.166.151.720,00	0	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida,	Jumlah Pengawasan	3	10.166.151.720,00	0	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
			Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian													DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						0,00		0,00		0,00				
		3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian	80	4.077.550.104,00	0	332.467.572,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Benih Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Yang Terawasi, Tersedia Dan Beredar Yang Memenuhi Standar Mutu yang Ditetapkan Sesuai Sasaran 6 Tepat, Yaitu Tepat Jenis/Varietas, Mutu, Jumlah, Waktu, Tempat Dan Harga	3	4.077.550.104,00	1	332.467.572,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Angka Kelahiran Ternak Unggulan Daerah	6000	3.325.285.772,00	150	67.599.738,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3	3.325.285.772,00	1	67.599.738,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	15	1.111.128.892,00	0	232.953.542,00		0,00		0,00		0,00		21%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian	1	1.111.128.892,00	0	232.953.542,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1	967.168.752,00	0	202.799.214,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	143.960.140,00	0	30.154.328,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5	9.027.321.012,00	0	309.142.071,00		0,00		0,00		0,00		3%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah HPR yang Mendapatkan Pelayanan Vaksinasi	200720	8.968.467.602,00	8000	301.557.864,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Jumlah Kontrol Populasi HPR	30000		1200										DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 satu Daerah Provinsi	2	8.968.467.602,00	0	301.557.864,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							0,00		0,00		0,00			
		3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pengawasan Ante	8	58.853.410,00	2	7.584.207,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
				Mortem dan Post Mortem													DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	3	58.853.410,00	0	7.584.207,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya							0,00		0,00		0,00				
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan dan Produk Unggulan	60	120.113.630,00	15	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00		19%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP dan Kelompok Tani yang Terbina	102	120.113.630,00	20	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	102	120.113.630,00	20	22.533.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK																		
3	(tidak ada sasaran)																	
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,6	898.477.436,00	0	158.195.848,00		0,00		0,00		0,00		18%	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	49.721.700,00	0	1.839.900,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	
		2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6.095.200,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	
		2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	11.126.500,00	0	1.267.500,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	
		2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	32.500.000,00	0	572.400,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	328.970.816,00	0	66.222.964,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI INSEMINASI	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						-7	-8	-9	-10	-11	-12						
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-12
																	BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
		2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	66.000.000,00	3	11.545.390,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
		2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	262.970.816,00	3	54.677.574,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	519.784.920,00	0	90.132.984,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
		2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	238.971.640,00	2	30.044.328,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
		2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	275.943.280,00	0	60.088.656,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
		2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	4.870.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,81	2.357.702.810,00	0	220.832.722,00		0,00		0,00		0,00		9%	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
		3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan	3	2.357.702.810,00	0	220.832.722,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI INSEMINASI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		(%)			
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
			Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pakan Ternak		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HLJAUAN PAKAN TERNAK
		3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3	2.357.702.810,00	0	220.832.722,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HLJAUAN PAKAN TERNAK
UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN																	
UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN																	
4	(tidak ada sasaran)																
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,6	1.253.871.186,00	0	298.978.594,00		0,00		0,00		0,00		24%	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	55.655.900,00	0	1.059.500,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	599.900,00	0	531.500,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	5.056.000,00	0	528.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	50.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	398.840.332,00	0	86.335.436,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	220.520.000,00	3	45.381.526,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	178.320.332,00	3	40.953.910,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	799.374.954,00	0	211.583.658,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	78	232.277.312,00	31	91.406.346,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	561.897.642,00	2	120.177.312,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	148	5.200.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman OPT dan Dampak Perubahan Iklim DPI	82,91	1.330.406.594,00	0	236.099.083,00		0,00		0,00		0,00		18%	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim DPI dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT	9	1.330.406.594,00	0	236.099.083,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	4	505.720.500,00	1	75.110.820,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2	490.482.740,00	0	97.644.066,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		3.27.05.1.01.005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1	334.203.354,00	0	63.344.197,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Rata-rata capaian kinerja (%)					4%	13.168.571.016,00	25%	2,46	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Rendah												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL																	
UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA																	
1	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali																
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN		Persentase Calon Tenaga Kerja	75	250.590.000,00	2,23	2.880.000,00	0,00		0,00		0,00			1%	UPTD BALAI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Bersertifikat Kompetensi													LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
		2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	32	250.590.000,00	0	2.880.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
		2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	32	250.590.000,00	0	2.880.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
2	(tidak ada sasaran)																	
		2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	86,82	672.916.461,00	85,16	132.978.932,00		0,00		0,00		0,00		20%	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
		2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100	30.736.194,00	25	2.340.800,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
		2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	3.252.600,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
		2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	6.117.700,00	1	500.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
		2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12.899.394,00	3	1.840.800,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
		2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	986.500,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
		2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	1.200.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
		2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	6.280.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
		2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100	224.728.560,00	25	38.070.558,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
		2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24.000.000,00	3	5.309.926,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
		2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	200.728.560,00	3	32.760.632,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100	389.451.707,00	25	92.567.574,00		0,00		0,00		0,00			PARIWISATA
		2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	80.770.000,00	1	39.990.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
		2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	35.131.673,00	2	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
		2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	273.550.034,00	4	52.577.574,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
		2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100	28.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
		2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	28.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA																	
3	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali																
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3	100	406.250.050,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0%	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	90	406.250.050,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	90	406.250.050,00		0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
4	(tidak ada sasaran)																
		2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	86,82	559.761.698,00	85,16	68.195.335,00		0,00		0,00		0,00		12%	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100	30.704.974,00	25	2.336.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	7.896.400,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan	1	2.884.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV		(%)			
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
			Penggandaan	dan Peggandaan yang Disediakan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4.980.300,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	14.944.274,00	1	2.336.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100	115.797.596,00	25	19.366.643,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	102.839.896,00	1	16.380.316,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12.000.000,00	1	2.376.327,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	957.700,00	1	610.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100	413.259.128,00	25	46.492.692,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	129.566.492,00	1	8.937.282,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	15.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27	268.692.636,00	3	37.555.410,00		0,00		0,00		0,00			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL																	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan																
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD	100	24.884.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0%	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target	100	24.884.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1	24.884.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
6	Meningkatnya penggunaan energi bersih																
		3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	75	51.825.500,00	20,5	6.720.000,00		0,00		0,00		0,00		13%	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah	4,8	51.825.500,00	2,45	6.720.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1	51.825.500,00	0	6.720.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan																
		3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65	4.160.000,00	62,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0%	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65	4.160.000,00	62,59	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	4.160.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	61	10.100.000,00	59,5	0,00		0,00		0,00		0,00		0%	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	15	10.100.000,00	3	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri	15	10.100.000,00	3	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		(-)				
						-7		-8		-9		-10		-11				
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali																	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	34	30.997.600,00	0	450.000,00		0,00		0,00		0,00		1%	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	30	30.997.600,00	0	450.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	30	30.997.600,00	0	450.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	11,97	6.831.921.000,00	10,82	4.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0%	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100	5.566.000,00	50	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	9	5.566.000,00	4	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan	2	6.826.355.000,00	0	4.500.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Jumlah rohaniwan yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan	32273		0								DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
		2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1	25.775.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah Penetapan UMK	1	1.800.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						I		II		III		IV		(%)					
						-7		-8		-9		-10		-11					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-12
		2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	32273	6.798.780.000,00	0	4.500.000,00	0,00		0,00		0,00						MINERAL
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	100	20.300.000,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00			0%			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja	40	20.300.000,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA	40	20.300.000,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
9	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali																		
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	34	99.137.100,00	21,33	2.273.180,00	0,00		0,00		0,00			2%			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitas bekerja/ berwirausaha	20	65.223.300,00	0	150.000,00	0,00		0,00		0,00						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20	65.223.300,00	0	150.000,00	0,00		0,00		0,00						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI Pra dan Purna Penempatan yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	270	33.913.800,00	30	2.123.180,00	0,00		0,00		0,00						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	270	33.913.800,00	30	2.123.180,00	0,00		0,00		0,00						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
10	(tidak ada sasaran)																		
		2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,82	34.137.906.437,00	85,16	7.213.237.264,00	0,00		0,00		0,00			21%			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	100	201.853.294,00	25	17.772.220,00	0,00		0,00		0,00						DINAS KETENAGAKERJAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
				Sesuai Kebutuhan													DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	14.992.900,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	41.179.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	65.133.994,00	1	5.665.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	15.124.600,00	1	1.647.120,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	8.614.000,00	1	1.392.400,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	10.050.000,00	1	1.050.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD	1	46.758.000,00	1	8.017.700,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100	1.013.444.423,00	25	197.086.737,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.873.100,00	1	1.830.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	384.000.000,00	3	79.994.525,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	626.571.323,00	1	115.262.212,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
				yang Disediakan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100	1.889.155.218,00	25	607.723.070,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	741.917.508,00	4	377.474.092,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	213.265.968,00	1	34.960.846,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	82	933.971.742,00	22	195.288.132,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	100	30.917.389.502,00	25	6.390.655.237,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	30.917.389.502,00	128	6.390.655.237,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100	116.064.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	116.064.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Rata-rata capaian kinerja (%)					19.67%	7.431.234.711,00	48.03%	0,70	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT																	
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT																	
1	Meningkatnya Kemandirian Desa Adat																
		2.22.09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Indeks Membangun Desa Adat	0,8	466.686.498.824,00	0	115.757.905.964,00		0,00		0,00		0,00		25%	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.09.8.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata	85	465.927.285.188,00	21,25	115.657.763.726,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7	-8	-9	-10	-11							
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.22.09.8.01.0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Kelola Pemerintahaanya baik Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	300	465.670.107.876,00	75	115.630.925.280,00		0,00		0,00		0,00			MASYARAKAT ADAT
		2.22.09.8.01.0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	300	257.177.312,00	75	26.838.446,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.09.8.02	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	11,05	370.865.706,00	2,5	70.452.992,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.09.8.02.0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya	30	100.000.000,00	7	21.331.500,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.09.8.02.0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya	45	270.865.706,00	10	49.121.492,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.09.8.03	Penyelenggaraan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik	82,78	388.347.930,00	20,7	29.689.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.09.8.03.0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan hasil koordinasi Palemahan	6	388.347.930,00	1	29.689.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
2	(tidak ada sasaran)																
		2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,85	15.777.621.884,00	0	2.486.504.939,00		0,00		0,00		0,00		16%	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	100	37.000.000,00	25	7.785.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	25.000.000,00	2	6.735.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	12.000.000,00	0	1.050.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	12.131.795.722,00	25	1.948.214.906,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	12.131.795.722,00	11	1.948.214.906,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	480.753.100,00	25	34.889.200,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.934.200,00	1	8.443.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	36.145.200,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720	19.243.700,00	80	2.707.500,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	414.430.000,00	30	23.738.700,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik	100	267.604.080,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	267.604.080,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase tersedianya Jasa	100	548.179.734,00	25	152.718.225,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35	548.179.734,00	10	152.718.225,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	100	2.312.289.248,00	25	342.897.608,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9	566.441.852,00	3	57.476.492,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	1.745.847.396,00	3	285.421.116,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
Rata-rata capaian kinerja (%)					25%	118.244.410.903,00	0%	0,41	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																	
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP																	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan																
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	135.687.360,00	0	15.222.164,00		0,00		0,00		0,00		11%	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100	5.802.000,00	25	200.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - UPTD Lab LH	1	4.866.500,00	1	200.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan -UPTD Lab LH	1	935.500,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH	100	31.914.540,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - UPTD Lab LH	1	31.914.540,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH	100	97.970.820,00	25	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - UPTD Lab LH	1	97.970.820,00	1	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium	94,85	252.757.125,00	0	5.000.000,00		0,00		0,00		0,00		2%	UPTD LABORATORIUM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV				V	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
			HIDUP	lingkungan													LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi	73,07	252.757.125,00	0	5.000.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1	252.757.125,00	0	5.000.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH																	
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan																
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	514.298.274,00	0	105.987.410,00		0,00		0,00		0,00		21%	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
		2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100	65.097.300,00	25	9.472.100,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
		2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - UPTD PS	1	5.229.000,00	1	4.550.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
		2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - UPTD PS	1	11.701.300,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
		2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - UPTD PS	1	42.000.000,00	1	3.932.100,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
		2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - UPTD PS	1	3.917.000,00	1	990.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
		2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - UPTD PS	1	2.250.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
		2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah	100	449.200.974,00	25	96.515.310,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
		2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi - UPTD PS	27	118.270.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
		2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - UPTD PS	4	330.930.974,00	1	96.515.310,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100	11.068.408.590,00	25	1.809.981.538,00		0,00		0,00		0,00		16%	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
		2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana	100	11.068.408.590,00		1.809.981.538,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
		2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1	11.068.408.590,00		1.809.981.538,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
UPTD TAHURA NGURAH RAI																	
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan																

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	1.602.637.965,00	0	238.526.526,00		0,00		0,00		0,00		15%	UPTD TAHURA NGURAH RAI
		3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai	100	27.050.000,00	25	5.229.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAHURA NGURAH RAI
		3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - UPTD Tahura	1	2.530.500,00	1	1.802.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAHURA NGURAH RAI
		3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - UPTD Tahura	1	6.920.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAHURA NGURAH RAI
		3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - UPTD Tahura	1	15.000.000,00	1	3.427.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAHURA NGURAH RAI
		3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - UPTD Tahura	1	2.598.700,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAHURA NGURAH RAI
		3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai	100	567.354.292,00	25	87.203.130,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAHURA NGURAH RAI
		3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - UPTD Tahura	1	324.000.000,00	1	47.016.800,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAHURA NGURAH RAI
		3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - UPTD Tahura	1	243.354.292,00	1	40.186.330,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAHURA NGURAH RAI
		3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai	100	1.008.233.673,00	25	146.094.396,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAHURA NGURAH RAI
		3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - UPTD Tahura	7	112.130.000,00	1	53.472.700,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAHURA NGURAH RAI
		3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	884.133.673,00	1	92.621.696,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAHURA NGURAH RAI
		3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	17	11.970.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD TAHURA NGURAH RAI
UPTD KPH BALI UTARA																	
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan																
		3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	943.845.756,00	0	210.071.034,00		0,00		0,00		0,00		22%	UPTD KPH BALI UTARA
		3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara	100	61.801.800,00	25	7.756.800,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI UTARA
		3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	3.205.900,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI UTARA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BU Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BU	1	10.025.900,00	1	6.188.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI UTARA
		3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BU	1	34.650.000,00	1	1.568.800,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI UTARA
		3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPTD KPH BU	1	13.920.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI UTARA
		3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara	100	75.253.592,00	25	13.788.858,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI UTARA
		3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - UPTD KPH BU	1	31.500.000,00	1	6.277.776,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI UTARA
		3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BU	1	43.753.592,00	1	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI UTARA
		3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara	100	806.790.364,00	25	188.525.376,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI UTARA
		3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - UPTD KPH BU	8	149.705.410,00	1	60.836.982,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI UTARA
		3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	11	657.084.954,00	1	127.688.394,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI UTARA
UPTD KPH BALI TIMUR																	
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan																
		3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	615.450.489,00	0	190.784.493,00		0,00		0,00		0,00		31%	UPTD KPH BALI TIMUR
		3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur	100	57.271.800,00	25	2.354.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI TIMUR
		3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BT	1	3.129.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI TIMUR
		3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BT	1	13.443.900,00	1	400.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI TIMUR
		3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BT	1	37.000.000,00	1	1.954.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI TIMUR
		3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	1	3.698.100,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI TIMUR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disediakan - UPTD KPH BT Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan - UPTD KPH Bali Timur	100	62.484.092,00	25	11.634.437,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI TIMUR
		3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - UPTD KPH BT	1	18.050.000,00	1	4.123.355,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI TIMUR
		3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BT	1	44.434.092,00	1	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI TIMUR
		3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100	495.694.597,00	25	176.796.056,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI TIMUR
		3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - UPTD KPH BT	18	488.554.597,00	1	176.796.056,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI TIMUR
		3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	7.140.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI TIMUR
UPTD KPH BALI SELATAN																	
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan																
		3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	401.538.504,00	0	168.373.558,00		0,00		0,00		0,00		42%	UPTD KPH BALI SELATAN
		3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan	100	49.996.700,00	25	13.734.200,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI SELATAN
		3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BS	1	1.373.700,00	1	1.059.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI SELATAN
		3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BS	1	11.355.700,00	1	8.835.200,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI SELATAN
		3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BS	1	25.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI SELATAN
		3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - UPTD KPH BS	1	1.707.300,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI SELATAN
		3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPTD KPH BS	1	10.560.000,00	1	3.840.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI SELATAN
		3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	100	118.397.312,00	25	26.590.876,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI SELATAN
		3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan -	1	8.000.000,00	1	1.428.630,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI SELATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		-			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD KPH BS Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BS	1	110.397.312,00	1	25.162.246,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI SELATAN
		3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	100	233.144.492,00	25	128.048.482,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI SELATAN
		3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - UPTD KPH BS	20	223.154.492,00	1	125.788.482,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI SELATAN
		3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15	9.990.000,00	1	2.260.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI SELATAN
UPTD KPH BALI BARAT																	
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan																
		3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	341.539.476,00	0	33.056.686,00		0,00		0,00		0,00		10%	UPTD KPH BALI BARAT
		3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat	100	63.411.700,00	25	4.927.500,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI BARAT
		3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BB	1	3.137.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI BARAT
		3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BB	1	10.811.900,00	1	750.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI BARAT
		3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BB	1	34.000.000,00	1	2.257.500,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI BARAT
		3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - UPTD KPH BB	1	2.502.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI BARAT
		3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPTD KPH BB	1	12.960.000,00	1	1.920.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI BARAT
		3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat	100	68.319.792,00	25	13.107.022,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI BARAT
		3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - UPTD KPH BB	1	23.940.000,00	1	5.595.940,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI BARAT
		3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - UPTD KPH BB	1	44.379.792,00	1	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI BARAT
		3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat	100	209.807.984,00	25	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI BARAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - UPTD KPH BB	12	123.425.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI BARAT
		3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9	86.382.984,00	1	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00			UPTD KPH BALI BARAT
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																	
8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan																
		2.2.11	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ijin pengumpulan limbah B3	100	58.058.300,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00		0%	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.2.11.101	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang dilaksanakan	100	58.058.300,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.2.11.101.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	58.058.300,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik	100	217.110.620,00	25	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00		7%	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Provinsi yang dilaksanakan	100	104.999.800,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1	104.999.800,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Provinsi yang dilaksanakan	100	112.110.820,00	25	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1	112.110.820,00	0	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	63,1	267.453.600,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0%	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Udara	88,65		0										DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Air Laut	69,95		0										DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase Penurunan Emisi	13,26		0										DINAS KEHUTANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV					
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9
				GRK	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	100	267.453.600,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00			DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	157.493.600,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1	109.960.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100	73.261.000,00	0	300.000,00		0,00		0,00		0,00		0%	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dilaksanakan	100	73.261.000,00	25	300.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1	73.261.000,00	0	300.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan	70	19.999.700,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0%	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	100	19.999.700,00	25	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10	19.999.700,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	30	1.117.590.230,00	0	24.173.246,00		0,00		0,00		0,00		2%	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	70		0										DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Adat/Desa/Kelurahan yang dibina dan dimonitoring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan dalam tata laksana Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Adat/Desa/Kelurahan yang dibina dan dimonitoring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber	9	1.117.590.230,00	0	24.173.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan	Jumlah Pendampingan	1	1.117.590.230,00	0	24.173.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS KEHUTANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						I		II		III		IV				V			
						-7		-8		-9		-10				-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		K		Rp		K		Rp		K		Rp		-12
			Hidup	Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan															DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	35	57.999.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembaga/pendidikan dalam PPLH	100	57.999.700,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20	57.999.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	100	19.994.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi	100	19.994.300,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	2	19.994.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	42.958.559.998,00	0	8.505.902.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20%					DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100	37.694.200,00	25	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	37.694.200,00	1	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100	40.212.598.846,00	25	7.939.428.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194	40.168.919.046,00	177	7.936.918.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	43.679.800,00	1	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100	785.844.000,00	25	29.794.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	17.097.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	47.975.000,00	1	2.382.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	97.000.000,00	1	8.431.900,00	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	10.350.000,00	1	4.500.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	19.500.000,00	1	1.050.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	593.922.000,00	1	13.430.150,00	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	100	609.843.344,00	25	124.621.035,00	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	196.560.000,00	1	46.231.625,00	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	413.283.344,00	1	78.389.410,00	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100	1.312.579.608,00	25	402.358.894,00	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46	840.290.360,00	3	312.225.910,00	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	44	472.289.248,00	8	90.132.984,00	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,16	198.400.230,00	0	28.653.240,00	0,00	0,00		0,00		0,00		14%		DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	100	198.400.230,00	25	28.653.240,00	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1	198.400.230,00	1	28.653.240,00	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kelas kelompok	4,23	30.000.500,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0%		DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100	30.000.500,00	25	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	25	30.000.500,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	6,82	89.554.810,00	0	11.831.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13%	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 Satu Daerah Provinsi	100	89.554.810,00	25	11.831.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1	89.554.810,00	0	11.831.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00				DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Rata-rata capaian kinerja (%)					23.13%	11.362.885.557,00	25%	2,26	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN																	
1	(tidak ada sasaran)																
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	85	1.134.933.330,00		183.962.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16%	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
		1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	12	93.556.900,00	3	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN				
		1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	11.782.000,00			0,00	0,00	0,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN					
		1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	20.930.200,00			0,00	0,00	0,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN					
		1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	32.500.000,00			0,00	0,00	0,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN					
		1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	4.638.700,00			0,00	0,00	0,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN					
		1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	4.446.000,00		648.000,00	0,00	0,00	0,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN					
		1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	13.500.000,00			0,00	0,00	0,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN					
		1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	5.760.000,00			0,00	0,00	0,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN					
		1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	12	221.193.200,00	3	10.550.079,00	0,00	0,00	0,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN					
		1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.193.200,00	1	760.000,00	0,00	0,00	0,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN					
		1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan	12	80.000.000,00	3	9.790.079,00	0,00	0,00	0,00	UPTD BALAI					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV				V	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
			Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	140.000.000,00			0,00		0,00		0,00				PERALATAN DAN PENGUJIAN
		1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	702.556.930,00	3	172.764.238,00	0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
		1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	6	329.075.880,00	1	135.208.828,00	0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
		1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	23.960.000,00			0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
		1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	349.521.050,00	2	37.555.410,00	0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
		1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	117.626.300,00		0,00	0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
		1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	65	70.010.800,00			0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
		1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	47.615.500,00			0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
		1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25,9	2.785.872.610,00		82.621.902,00	0,00		0,00		0,00		3%		UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	4	2.785.872.610,00	1	82.621.902,00	0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
		1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	12	2.785.872.610,00	3	82.621.902,00	0,00		0,00		0,00				UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
		1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan													
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM																	
2	(tidak ada sasaran)																
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	95,5	41.269.710.452,00	95,5	6.800.299.191,00	0,00		0,00		0,00		16%		UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
		1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD Regional yang dikelola dengan baik UPTDPAL	1	41.269.710.452,00	1	6.800.299.191,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
		1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum SPAM yang dioperasikan dan dipelihara	5	41.269.710.452,00	5	6.800.299.191,00	0,00		0,00		0,00				UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH																	
3	(tidak ada sasaran)																
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	100	14.436.373.000,00		1.836.196.315,00	0,00		0,00		0,00		13%		UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD Regional yang dikelola dengan baik UPTDPAL	1	14.436.373.000,00		1.836.196.315,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
		1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	1	14.436.373.000,00	1	1.836.196.315,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
4	(tidak ada sasaran)																
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	48,74	27.368.323.054,00	48,74	691.853.952,00		0,00		0,00		0,00		3%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik	48,74	12.603.641.220,00	48,74	60.305.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2	210.236.200,00	1	2.100.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	5	572.778.220,00	2	5.100.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,16	11.293.200.000,00		2.745.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	310.353.300,00		48.720.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,22	217.073.500,00		1.640.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah	Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas	14	14.764.681.834,00	14	631.548.952,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
			Kabupaten/Kota														KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	7	1.389.537.870,00	6	58.587.574,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4981	9.575.918.330,00		24.453.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	172972	3.799.225.634,00		548.508.132,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	95,5	31.402.440.709,00	95,5	210.948.132,00		0,00		0,00		0,00		1%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas layanan SPAM	95,5	31.402.440.709,00	95,5	210.948.132,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	3	1.859.117.454,00		210.648.132,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum SPAMLintas Kabupaten/Kota yang dibangun	15	29.543.323.255,00		300.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan pelayanan Air Limbah Layak	92	3.425.956.952,00	92	2.120.000,00		0,00		0,00		0,00		0%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani	92	3.425.956.952,00	92	2.120.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	300	3.167.010.552,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	2	258.946.400,00		1.920.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan air minum layak	75	2.762.994.300,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00		0%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	75	2.762.994.300,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	285	2.762.994.300,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	76	131.546.142.300,00		24.290.000,00		0,00		0,00		0,00		0%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	76	131.546.142.300,00		24.290.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2	5.876.786.500,00		5.280.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	6	125.669.355.800,00		19.010.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam	82,65	146.052.544.485,00		1.690.657.522,00		0,00		0,00		0,00		1%		DINAS PEKERJAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		V			
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				kondisi mantap													UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	82,65	146.052.544.485,00		1.690.657.522,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	11	6.309.202.000,00		2.420.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1	100.000.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	805,5	1.720.715.608,00		60.088.656,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	6,23	15.246.134.607,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	805,5	79.206.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2,68	21.962.734.461,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	789,32	25.538.155.276,00		1.628.148.866,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,6	16.726.643.413,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-				
						-7	-8	-9	-10	-11	-12							
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-12	
																	PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	11,35	58.369.753.120,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat	25,9	1.251.891.912,00	15,73	214.247.984,00		0,00		0,00		0,00		17%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat	25,9	819.430.222,00	15,73	142.824.328,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	270	819.430.222,00	60	142.824.328,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi jasa konstruksi	5	432.461.690,00	2	71.423.656,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	16	240.946.150,00	11	41.480.410,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	15	191.515.540,00		29.943.246,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	94,34	1.488.214.952,00		157.648.194,00		0,00		0,00		0,00		11%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	94,34	59.292.100,00	93,8	5.860.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1	59.292.100,00		5.860.000,00		0,00		0,00		0,00				PERMUKIMAN
		1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	94,34	702.511.870,00	93,79	57.827.574,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	9	702.511.870,00	2	57.827.574,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	94,34	335.639.550,00	93,71	47.345.410,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1	296.306.950,00		47.245.410,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	39.332.600,00		100.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	94,34	390.771.432,00	93,7	46.615.210,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1	250.550.632,00		45.545.210,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1	140.220.800,00		1.070.000,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan rumah	100	1.838.837.380,00	100	48.833.115,00		0,00		0,00		0,00		3%		DINAS PEKERJAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi Provinsi														UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi Provinsi	100	281.619.450,00	100	16.277.705,00		0,00		0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1	111.749.700,00				0,00		0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	169.869.750,00		16.277.705,00		0,00		0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi Provinsi	100	1.557.217.930,00	100	32.555.410,00		0,00		0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1	1.557.217.930,00		32.555.410,00		0,00		0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi Provinsi	6,77	2.571.114.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi Provinsi	6,77	2.571.114.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah 15 Lima Belas Ha yang Diperbaiki	30	1.579.678.300,00				0,00		0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah 15	1,98	991.436.000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			(Lima Belas) Ha	Lima Belas Ha yang Dipugar													PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Pada Kawasan Permukiman Provinsi	71	1.305.760.750,00		32.555.410,00		0,00		0,00		0,00			2%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	1	1.305.760.750,00		32.555.410,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1	8.518.400,00				0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1	1.255.283.350,00		32.555.410,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1	41.959.000,00				0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan	1,23	5.882.758.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Bali	1,23	5.882.758.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1	5.882.758.000,00				0,00		0,00		0,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi	100	31.221.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV		(%)			
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi	100	31.221.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00			PERMUKIMAN
		2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	1	31.221.700,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase data informasi pertanahan yang handal	50	207.200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase data informasi pertanahan yang handal	50	207.200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 Satu Provinsi	1	207.200.000,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	55.311.398.128,00		5.831.853.285,00		0,00		0,00		0,00		11%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100	646.726.604,00		116.420.348,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	373.006.372,00		69.079.738,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	273.720.232,00		47.340.610,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan	100	50.066.016.070,00	100	5.480.165.867,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12						
				administrasi keuangan												UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178	50.066.016.070,00	178	5.480.165.867,00		0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	494.280.720,00		46.463.000,00		0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	57.485.000,00				0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	50.820.120,00		1.585.000,00		0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	15.816.000,00		1.318.000,00		0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	229.003.000,00				0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	22.172.600,00	1	18.177.000,00		0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	66.734.000,00		23.208.000,00		0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	52.250.000,00		2.175.000,00		0,00		0,00		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
																	PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	544.881.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	462.242.500,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	82.638.800,00				0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	1.042.456.040,00		79.801.427,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	7.190.600,00	1	4.580.000,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	548.895.440,00	3	39.943.990,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	436.600.000,00	3	35.277.437,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	49.770.000,00	2			0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	2.517.037.394,00		109.002.643,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		V			
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	1.568.132.460,00		19.621.823,00		0,00		0,00		0,00			PERMUKIMAN
		1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	756.208.704,00		72.344.197,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119	192.696.230,00		17.036.623,00		0,00		0,00		0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rata-rata capaian kinerja (%)					41.50%	17.808.287.319,00	93.45%	0.97	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI																	
1	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN																
		5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,5	383.965.252,00	0	106.150.674,00		0,00		0,00		0,00		28%	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
		5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	2	28.699.800,00	2	1.405.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
		5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	5.361.800,00	2	1.405.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
		5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	23.338.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
		5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana	1	25.550.000,00	1	19.250.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
		5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	25.550.000,00	7	19.250.000,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
		5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	1	241.398.952,00	1	52.577.574,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
		5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	241.398.952,00	5	52.577.574,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
		5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang	2	88.316.500,00	2	32.918.100,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENILAIAN KOMPETENSI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV				V	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
		5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	78.656.500,00	0	32.918.100,00		0,00		0,00		0,00			PEGAWAI
		5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	9.660.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	60	1.451.247.300,00	0	11.292.600,00		0,00		0,00		0,00		1%	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
		5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN	1	1.451.247.300,00	1	11.292.600,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
		5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	1.451.247.300,00	0	11.292.600,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
2	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN																
		5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,5	34.904.503.485,00	0	6.738.266.821,00		0,00		0,00		0,00		19%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	4	102.382.600,00	4	16.800.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	10.200.000,00	3	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	3.600.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	37.042.600,00	1	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	51.540.000,00	3	16.800.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	31.401.080.353,00	3	5.885.970.961,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV		(%)			
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-12
		5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137	31.401.080.353,00	126	5.885.970.961,00		0,00		0,00		0,00			MANUSIA
		5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	6	469.012.234,00	6	134.041.200,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	17.762.400,00	1	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	153.768.400,00	4	115.455.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	85.079.034,00	2	12.898.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	10.280.400,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720	4.137.000,00	180	783.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	197.985.000,00	1	4.905.200,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana	1	575.833.000,00	1	3.000.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	575.833.000,00	1	3.000.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	3	1.123.115.978,00	3	229.805.840,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		-11				
						-7		-8		-9		-10		-11				
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.386.400,00	1	380.000,00		0,00		0,00		0,00			MANUSIA	
		5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	253.600.000,00	2	55.620.954,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	867.129.578,00	6	173.804.886,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana	4	1.233.079.320,00	4	468.648.820,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	996.648.320,00	10	468.648.820,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	118.731.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	117.700.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansial	60	3.980.109.552,00	0	627.886.174,00		0,00		0,00		0,00		16%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana	6	1.335.444.922,00	6	125.315.328,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	41.856.000,00	0	100.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	820.474.000,00	0	71.521.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							I		II		III		IV				
							-7	-8	-9	-10	-11	-12					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	39.368.000,00	0	7.400.000,00		0,00		0,00		0,00			MANUSIA
		5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	113.663.410,00	0	16.301.082,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	154.596.500,00	0	150.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	165.487.012,00	0	29.843.246,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik	3	338.628.930,00	3	23.566.836,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1	50.375.110,00	0	8.344.672,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12	137.791.410,00	3	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	150.462.410,00	0	7.711.082,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan	5	1.879.721.394,00	5	430.848.268,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1	73.996.492,00	0	15.628.582,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1	1.492.206.492,00	0	324.131.082,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10		-11			
-1	-2	-3	-4	-5	-6		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-12
					K	Rp											MANUSIA
		5.03.02.1.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1	18.608.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1	216.266.000,00	0	77.851.272,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	12	78.644.410,00	3	13.237.332,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana	4	426.314.306,00	4	48.155.742,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5	110.273.902,00	1	15.222.164,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3	59.545.100,00	0	2.116.750,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400	139.094.702,00	0	15.262.164,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1500	100.333.902,00	1162	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2	17.066.700,00	1	532.500,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	100	1.160.814.394,00	25	33.518.946,00		0,00		0,00		0,00		3%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah jenis kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang dilaksanakan	6	1.160.814.394,00	6	33.518.946,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	2	202.709.492,00	0	11.332.232,00		0,00		0,00		0,00			MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1	245.776.000,00	0	2.649.000,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	120	466.439.492,00	0	8.105.582,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2	116.684.500,00	1	2.554.070,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	3	85.838.910,00	1	8.012.542,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6	43.366.000,00	0	865.520,00		0,00		0,00		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA																	
3	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN																
		5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manaemen Kinerja	86,5	8.000.000.000,00	0	892.417.135,00		0,00		0,00		0,00		11%	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	88	8.000.000.000,00	0	892.417.135,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
		5.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1	8.000.000.000,00		892.417.135,00		0,00		0,00		0,00			UPTD PENGEMBANGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV				V	
						-7		-8		-9		-10				-11	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
				Pelayanan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
Rata-rata capaian kinerja (%)					75%	8.409.532.350,00	25%	78,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%			
Predikat kinerja					Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																	

Sumber : Dokumen Evaluasi RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 Triwulan I

2.2. Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Bali

Capaian ekonomi makro Provinsi Bali diukur berdasarkan parameter pertumbuhan ekonomi dengan melihat pertumbuhan PDRB, perkembangan inflasi di Kota Denpasar dan Kota Singaraja, perkembangan tingkat kemiskinan, serta perkembangan kondisi ketenagakerjaan. Keseluruhan parameter tersebut ditelaah perkembangannya hingga triwulan I tahun 2025 sehingga data yang digunakan dalam perubahan RKPD Semesta Berencana tahun 2025 ini data yang termutakhirkan hingga waktu terakhir.

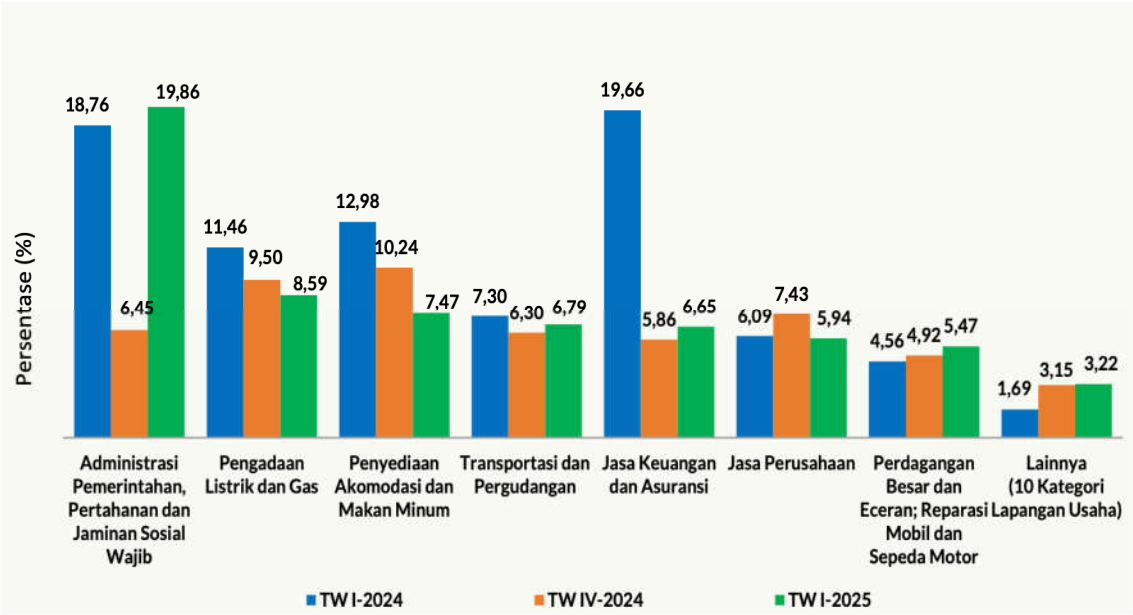
a. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2025

Perekonomian Bali pada triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp75,47 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK 2010=100) sebesar Rp41,91 triliun.

Ekonomi Bali selama periode triwulan I-2025 berkontraksi sedalam 4,38 persen jika dibandingkan dengan triwulan IV-2024 (q-to-q). Ditinjau dari sisi produksi, kontraksi paling dalam dicatatkan oleh Lapangan Usaha Konstruksi sedalam 8,83 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) berkontraksi sedalam 40,90 persen.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada triwulan I-2025 tumbuh sebesar 5,52 persen. Dikaji dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,86 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh sebesar 13,47 persen.

Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan I-2025 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 21,23 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 54,75 persen.



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025

Gambar 2.1.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali
Secara *Year To Year* (y to y) 2024-2025

Ekonomi Bali pada triwulan I-2025 tetap konsisten tumbuh di atas 5 persen, yaitu sebesar 5,52 persen secara y-on-y, meskipun melambat dibandingkan triwulan I-2024. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas pariwisata tersebut menjadi pemacu bagi lapangan usaha terkait, untuk dapat meningkatkan penciptaan nilai tambah yang lebih besar. Selain itu, peningkatan kinerja keuangan dan transaksi finansial, naiknya realisasi belanja pemerintah terutama untuk belanja pegawai, serta meningkatnya konsumsi listrik pada segmen bisnis dan industri, turut mencerminkan geliat perekonomian Bali yang masih terus bertumbuh pada triwulan I-2025.

Hampir seluruh lapangan usaha penyusun PDRB Provinsi Bali pada triwulan I-2025 mencatat pertumbuhan positif secara y-on-y, kecuali Industri Pengolahan. Nilai ekspor luar negeri untuk komoditas Industri Pengolahan tercatat turun hingga 15,31 persen secara y-on-y. Sementara, peningkatan nilai tambah tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,86 persen. Pertumbuhan yang cukup tinggi juga tercatat pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas (8,59 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,47 persen), Transportasi dan Pergudangan (6,79 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (6,65 persen).

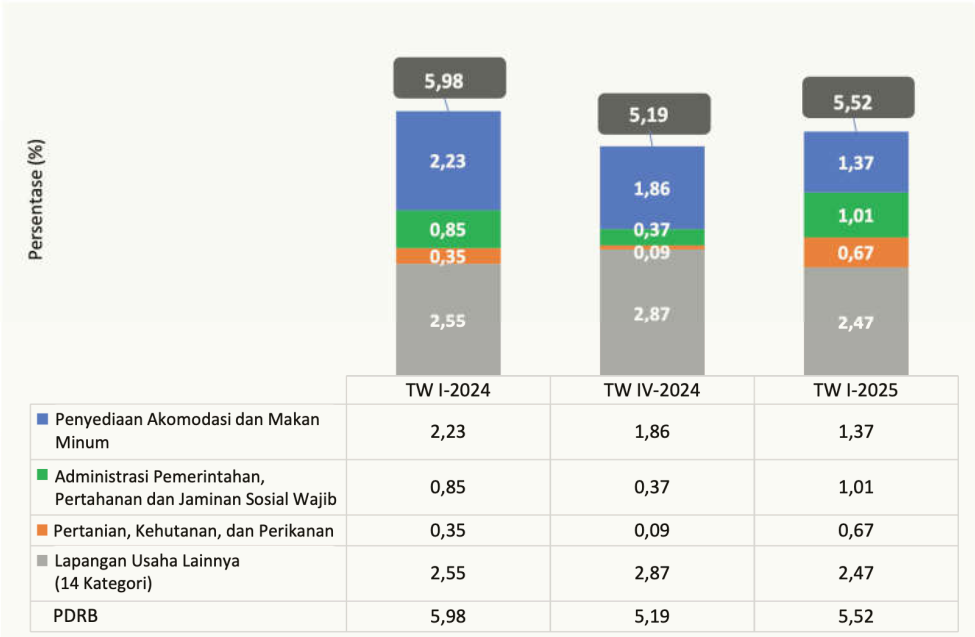
Nilai tambah pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang diukur melalui komponen belanja pegawai dan penyusutan dari belanja modal mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada triwulan I-2025 secara y-on-y. Peningkatan ini terutama didorong oleh naiknya realisasi belanja pemerintah, khususnya pada komponen belanja pegawai. Pada triwulan I-2025, belanja pegawai tercatat meningkat sekitar 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini salah satunya dipicu oleh pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan yang dilaksanakan pada triwulan I-2025.

Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh tinggi sebesar 8,59 persen secara y-on-y pada triwulan I-2025. Data dari PT PLN UID Bali mencatat peningkatan total penjualan listrik pada kisaran 9 persen selama periode tersebut, dengan kenaikan konsumsi hampir di seluruh segmen konsumen. Segmen residensial mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 16 persen, disusul segmen sosial yang tumbuh pada kisaran 10 persen. Sementara itu, segmen bisnis dan industri masing-masing mengalami peningkatan konsumsi listrik sebesar 4 persen dan 3 persen secara y-on-y. Peningkatan ini kiranya mengindikasikan semakin meningkatnya kebutuhan listrik di Bali seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata.

Peningkatan aktivitas pariwisata di Bali turut mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan Pergudangan, sehingga keduanya mampu mencatat pertumbuhan yang kuat pada triwulan I-2025 secara y-on-y. Pertumbuhan nilai tambah pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ditopang oleh meningkatnya pengeluaran wisatawan untuk berbagai jenis jasa akomodasi dan penyediaan makan minum selama berada di Bali. Sementara itu, pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan tidak hanya didorong oleh tingginya mobilitas wisatawan, tetapi juga meningkatnya mobilitas penduduk dalam rangka arus mudik Lebaran yang berlangsung pada triwulan I-2025. Peningkatan aktivitas transportasi terutama tercatat pada jalur udara dan ASDP. Berdasarkan data dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, jumlah keberangkatan penumpang rute internasional naik sebesar 11 persen secara y-on-y. Pada jalur ASDP, arus penumpang juga tercatat tumbuh hingga 48 persen pada triwulan I-2025 dibandingkan triwulan I-2024.

Pada triwulan I-2025, struktur PDRB Bali masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dengan nilai tambah sebesar Rp16,03 triliun atau 21,23 persen dari total PDRB. Kontributor terbesar kedua adalah Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang menyumbang Rp10,28 triliun atau 13,62 persen. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan berada di posisi ketiga dengan nilai tambah Rp7,66 triliun atau 10,15 persen dari total perekonomian Bali.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan pada triwulan I-2025 (y-on-y), ekonomi Bali yang tumbuh sebesar 5,52 persen bersumber dari Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan sumbangan sebesar 1,37 persen, kemudian disusul oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,01 persen. Kontributor terbesar berikutnya yaitu dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan andil 0,67 persen. Sedangkan gabungan dari 14 lapangan usaha lainnya memberi sumbangan sebesar 2,47 persen



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025

Gambar 2.2.

Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024 dan Triwulan I-2025 (y-on-y) (persen)

b. Perkembangan Tingkat Inflasi Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2025

Pada bulan Februari 2025 secara year on year (y-on-y), Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 1,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2022=100) sebesar 107,23. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 1,70 persen dengan IHK sebesar 107,73 dan inflasi terendah tercatat di Singaraja sebesar 0,27 persen dengan IHK sebesar 106,26.

Inflasi tahunan (y-on-y) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sembilan kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 5,41 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,43 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,34 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,18 persen; kelompok transportasi sebesar 1,42 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,88 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,00 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,43 persen. Sementara itu, dua kelompok tercatat mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun sebesar 13,24 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sedalam 0,38 persen.

Secara bulanan (month to month / m-t-m), Provinsi Bali tercatat mengalami deflasi sebesar 0,57 persen. Sementara secara year to date (y-to-d), tercatat deflasi sebesar 0,59 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2025 di Provinsi Bali yang diwakili Kota Denpasar, Singaraja, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan secara tahunan menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Bali di empat kabupaten/kota tersebut, pada Februari 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,21 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,95 pada Februari 2024 menjadi 107,23 pada Februari 2025. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date/ y-to-d) Februari 2025 tercatat deflasi sebesar 0,59 persen, begitu pula secara bulanan (m-to-m) tercatat deflasi sebesar 0,57 persen.

Tabel 2.2.

IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month* (m-to-m), *Year to Date* (y-to-d), dan *Year on year* (y-on-y) Provinsi Bali Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Februari 2025

No.	Kelompok Pengeluaran	IHK Februari 2024	IHK Februari 2025	Tingkat Inflasi M-to-M Februari 2025 ¹ (%)	Tingkat Inflasi Y-to-D Februari 2025 ² (%)	Tingkat Inflasi Y-on-Y Februari 2025 ³ (%)	Andli Inflasi M-to-M Februari 2025 (%)	Andli Inflasi Y-on-Y Februari 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Umum (Headline)	105,95	107,23	-0,57	-0,59	1,21	-0,57	1,21
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	110,08	116,03	-0,91	2,88	5,41	-0,28	1,68
2	Pakaian dan Alas Kaki	103,33	104,81	0,03	0,36	1,43	–0	0,06
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,61	89,02	-3,66	-13,51	-13,24	-0,45	-1,83
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,27	103,64	0,43	0,66	1,34	0,02	0,06
5	Kesehatan	102,02	104,24	0,92	1,86	2,18	0,02	0,06
6	Transportasi	109,84	111,40	0,41	0,60	1,42	0,04	0,16
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,59	99,21	-0,03	-0,05	-0,38	–0	-0,02
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	107,93	109,96	0,13	0,61	1,88	–0	0,03
9	Pendidikan	104,06	107,23	–0	0,06	3,05	–0	0,21
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	103,10	108,25	0,32	1,20	5,00	0,03	0,48
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	105,37	108,98	0,55	0,66	3,43	0,05	0,32

Keterangan

¹) Persentase perubahan IHK Februari 2025 terhadap IHK bulan Januari 2025

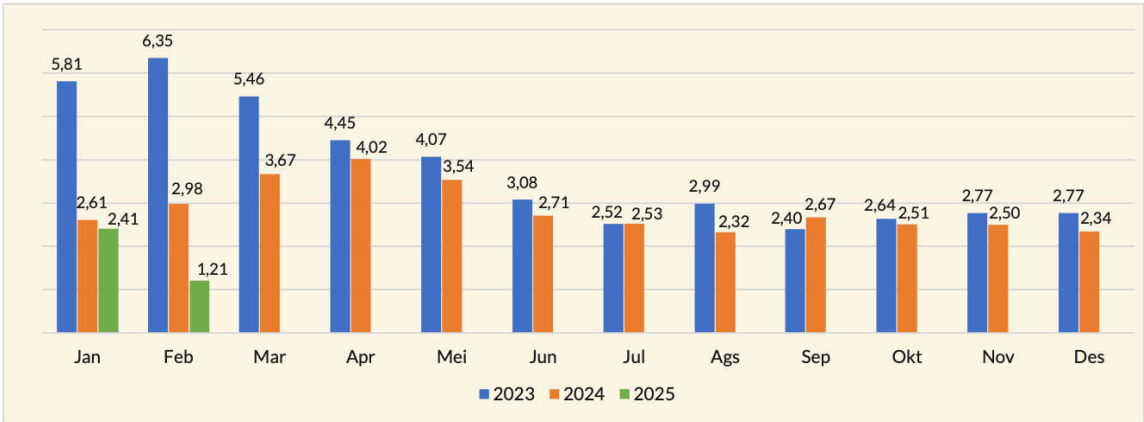
²) Persentase perubahan IHK Februari 2025 terhadap IHK bulan Desember 2024

³) Persentase perubahan IHK Februari 2025 terhadap IHK bulan Februari 2024

–0 Data sangat kecil/mendekati 0

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025

Inflasi tahunan (y-on-y) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sembilan kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 5,41 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,43 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,34 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,18 persen; kelompok transportasi sebesar 1,42 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,88 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,00 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,43 persen. Sementara itu, dua kelompok tercatat mengalami penurunan indeks (deflasi), yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun sebesar 13,24 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,38 persen.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025

Gambar 2.3.

Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Bali
bulan Januari 2023- Februari 2025 (Persen)

Pada Februari 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,68 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen; kelompok transportasi sebesar 0,16 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,21 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,48 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,32 persen. Sedangkan kelompok yang menahan menahan laju inflasi dengan memberikan sumbangan negatif, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -1,83 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sedalam -0,02 persen.

Tabel 2.3.

Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Februari 2025
Kabupaten/ Kota Wilayah Cakupan IHK di Provinsi Bali (2022=100)

Kabupaten/Kota		Februari 2025	
		IHK	Inflasi y-on-y (%) Inflasi m-t-m (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Tabanan ¹⁾	109,56	1,23 -1,05
2	Kab. Badung ¹⁾	105,57	0,98 -0,89
3	Singaraja ³⁾	106,26	0,27 -0,81
4	Kota Denpasar ²⁾	107,73	1,70 -0,13

Keterangan:
1) Sampel baru SBH2022, penamaan wilayah administrasi kabupaten IHK dan inflasi menggunakan nama kabupaten.
2) Sampel lanjutan dari SBH2018, penamaan wilayah administrasi kota IHK dan inflasi menggunakan nama kota.
3) Sampel lanjutan dari SBH2018, penamaan wilayah administrasi kabupaten IHK dan inflasi menggunakan nama ibu kota kabupaten.

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025

c. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Hingga Triwulan I Tahun 2025

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati begitu, masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi problema kependudukan yang berkepanjangan. Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Bali pada tahun 2024 sebesar 3,80% atau turun 0,45 poin dari tahun 2023. Jumlah penduduk miskin di Bali pada periode September tahun 2024 adalah 176,21 ribu jiwa, turun 17,57 ribu jiwa dari tahun 2023. Penurunan yang terjadi pada jumlah penduduk miskin tahun 2022 cukup signifikan meskipun belum dapat menyamai jumlah penduduk miskin sebelum pandemi (tahun 2019).

Tabel 2.4.

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

No	Penduduk Miskin	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah (Ribu Jiwa)	196,92	211,46	205,36	193,78	176,21
2	Persentase (%)	3,78	4,53	4,57	4,25	3,80

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025

d. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bali

Jumlah angkatan kerja di Bali pada Februari 2025 tercatat sebesar 2,74 juta orang, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 77,40%, meningkat 0,03 persen poin dibandingkan periode Februari 2024.

Pada Februari 2025, jumlah penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 2,69 juta orang, meningkat 31,22 ribu orang dibandingkan kondisi Februari 2024. Lapangan usaha Pengangkutan & Pergudangan, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran merupakan lapangan usaha dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja tertinggi, masing-masing tercatat sekitar 7,93 ribu orang, 7,83 ribu orang, dan 5,30 ribu orang.

Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan pada periode Agustus 2024–Februari 2025, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Pekerja berpendidikan SD ke bawah masih mendominasi pasar kerja Bali pada Februari 2025, dengan persentase mencapai 28,75% (774,46 ribu orang).

Dibandingkan Februari 2024, persentase setengah pengangguran meningkat 0,16 persen poin menjadi 2,26%, sementara pekerja paruh waktu tercatat 23,87%, turun 2,98 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Februari 2025 tercatat sebesar 1,58%, turun 0,21 persen poin dibandingkan Agustus 2024 dan turun 0,29 persen poin dibandingkan Februari 2024.

1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Februari 2025 tercatat sebanyak 3,54 juta orang, yang sebagian besar termasuk dalam kategori angkatan kerja sebesar 2,74 juta orang atau setara dengan 77,40% dari total penduduk usia kerja. Sisanya, sebanyak 0,80 juta orang, termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau mereka yang tidak sedang mencari pekerjaan. Jika dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 23,67 ribu orang (0,87%), yang mengindikasikan adanya pertumbuhan partisipasi dalam pasar tenaga kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2025 terdiri dari 2,69 juta orang penduduk yang bekerja dan 43,13 ribu orang pengangguran. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 31,22 ribu orang (1,17%) dan pengangguran berkurang sebanyak 7,55 ribu orang (-14,90%) dibandingkan Februari 2024. Jika dibandingkan Agustus 2024, angkatan kerja meningkat 23,06 ribu orang (0,85%) dan jumlah penduduk bekerja naik sebesar 28,60 ribu orang (1,07%). Di sisi lain, jumlah pengangguran turun sebesar 5,55 ribu orang (-11,40%), menandakan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.5.

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2024 – Februari 2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2024	Agustus 2024	Februari 2025	Perubahan Feb. 2024-Feb. 2025		Perubahan Ags. 2024-Feb. 2025	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	3.506,93	3.519,89	3.536,19	29,26	0,83	16,30	0,46
Angkatan Kerja	2.713,49	2.714,10	2.737,16	23,67	0,87	23,06	0,85
- Bekerja	2.662,80	2.665,42	2.694,02	31,22	1,17	28,60	1,07
- Pengangguran	50,68	48,68	43,13	-7,55	-14,90	-5,55	-11,40
Bukan Angkatan Kerja	793,45	805,79	799,04	5,59	0,70	-6,75	-0,84
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77,37	77,11	77,40	0,03		0,29	
- Laki-laki	84,09	83,77	83,45	-0,64		-0,32	
- Perempuan	70,69	70,49	71,39	0,70		0,90	

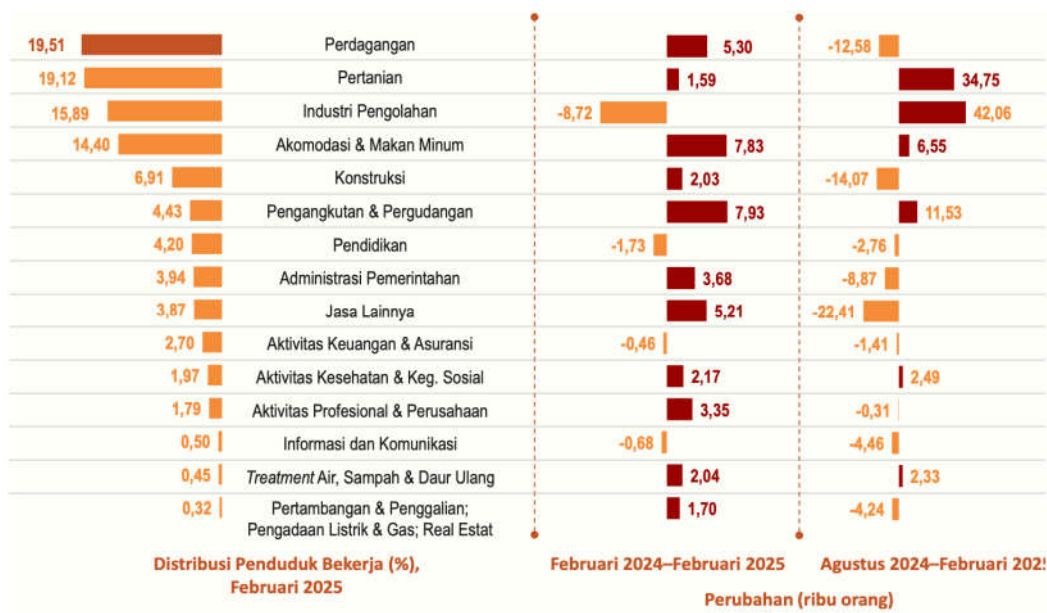
Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja dan mencerminkan seberapa besar penduduk usia produktif yang aktif secara ekonomi. Pada Februari 2025, TPAK Provinsi Bali tercatat sebesar 77,40%, mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,03 persen poin dibandingkan Februari 2024.

2. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2025, tiga lapangan usaha dengan jumlah penyerapan tenaga kerja paling banyak di Provinsi Bali adalah Perdagangan Besar dan Eceran

sebesar 19,51%, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,12%, serta Industri Pengolahan sebesar 15,89%. Ketiga lapangan usaha ini menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung perekonomian dan penyediaan lapangan kerja



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025

Gambar 2.4.

Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
Utama Februari 2025

Jika dibandingkan dengan Februari 2024, lapangan usaha Pengangkutan dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Perdagangan Besar dan Eceran mengalami peningkatan jumlah pekerja terbesar, yaitu masing-masing sekitar 7,93 ribu orang, 7,83 ribu orang, dan 5,30 ribu orang. Sementara lapangan pekerjaan dengan penurunan jumlah pekerja terbanyak adalah pada Industri Pengolahan yang berkurang sebanyak 8,72 ribu orang, selanjutnya Pendidikan turun sebanyak 1,73 ribu orang, serta Informasi dan Komunikasi dengan jumlah pekerja yang berkurang sebanyak 0,68 ribu orang.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja tertinggi adalah Industri Pengolahan (42,06 ribu orang), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (34,75 ribu orang), serta Pengangkutan dan Pergudangan (11,53 ribu orang).

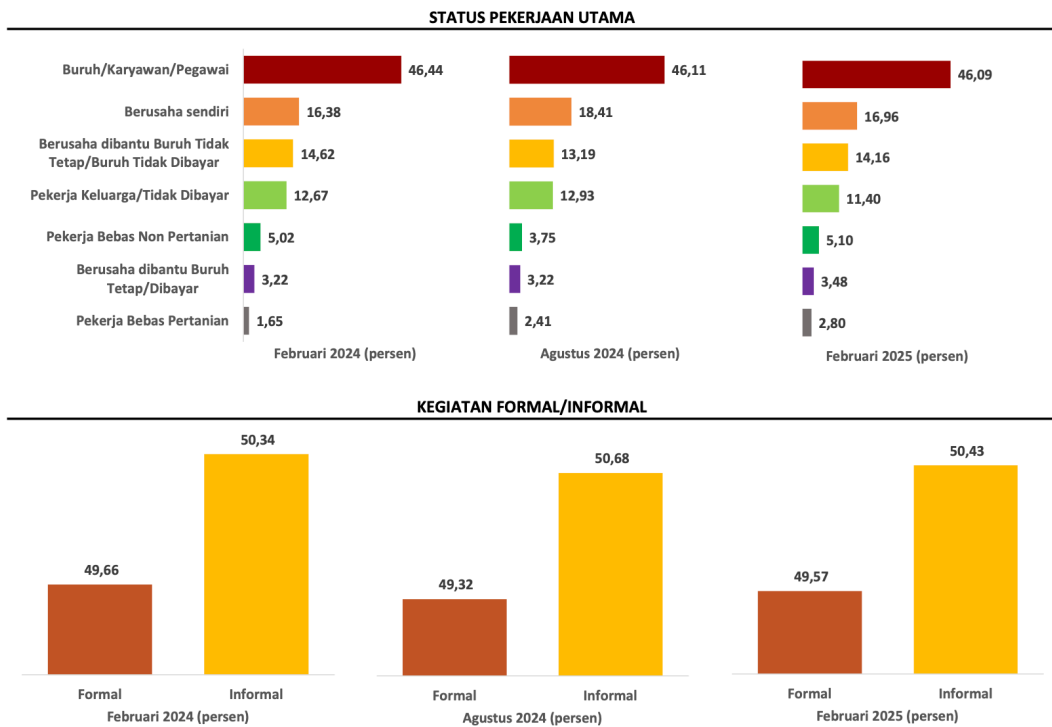
3. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Mayoritas pekerja di Bali bertatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, seperti yang tercatat dalam Gambar 2. Berdasarkan data Sakernas Februari 2025, persentase pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai mencapai 46,09%. Sementara itu, status pekerja bebas pertanian tercatat dengan persentase terendah sebesar 2,80%.

Dibandingkan dengan Februari 2024, sejumlah kelompok pekerja mengalami peningkatan, antara lain Pekerja Bebas Pertanian, Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar, dan Pekerja Bebas Non-Pertanian, yang masing-masing mencatatkan kenaikan sebesar 1,15 persen poin, 0,58 persen poin, 0,26 persen poin, dan 0,08 persen poin. Di sisi lain, status Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar, serta Buruh/Karyawan/Pegawai mengalami penurunan dengan masing-masing persentase sebesar 1,27 persen poin, 0,46 persen poin, dan 0,35 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni kegiatan formal dan informal. Pekerja yang terlibat dalam kegiatan formal meliputi mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar serta buruh/karyawan/pegawai. Sementara itu, kelompok lainnya, seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar dikategorikan dalam kegiatan informal.

Pada Februari 2025, jumlah penduduk yang bekerja dalam kegiatan formal tercatat sebanyak 1,34 juta orang (49,57%), sementara yang bekerja dalam kegiatan informal sebanyak 1,36 juta orang (50,43%). Jika dibandingkan dengan Februari 2024, persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,09 persen poin. Namun, dibandingkan dengan Agustus 2024, terdapat kenaikan sebesar 0,25 persen poin.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025

Gambar 2.5.

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2024 – Februari 2025

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali selama implementasi RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I ini beserta rekomendasi penanganannya pada masing-masing urusan pemerintahan dapat dilihat pada **tabel 2.6** sebagai berikut.

Tabel 2.6.

Identifikasi Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Daerah Untuk Penanganangan Pada Masing-Masing Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	a. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi guru dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung Pendidikan. c. Belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi. d. Belum optimalnya peran	a. Mendorong pelatihan TIK bagi guru secara berkelanjutan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan penyedia teknologi. b. Mempercepat pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan secara terpadu dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dan pemenuhan kebutuhan

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		organisasi kepemudaan dan pemuda yang mandiri dan kreatif. e. Belum optimalnya budaya gerak dan berolahraga di masyarakat. f. Belum optimalnya sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga. g. Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.	daerah. c. Memperkuat kemitraan antara lembaga pendidikan vokasi dengan dunia industri dan dunia kerja untuk mewujudkan link and match yang relevan dengan kebutuhan pasar. d. Mendorong peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan melalui program pelatihan kewirausahaan, kepemimpinan, dan penguatan jejaring kolaboratif. e. Mendorong gerakan masyarakat gemar olahraga melalui kampanye dan penyediaan sarana olahraga yang mudah diakses oleh masyarakat di ruang-ruang publik. f. Mengintegrasikan sistem pembinaan olahraga prestasi sejak usia dini secara berjenjang dan berkelanjutan melalui sinergi antar lembaga pendidikan, organisasi olahraga, dan pelatih. g. Meningkatkan pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga sesuai standar nasional untuk mendukung pengembangan bakat dan minat generasi muda.
2	Kesehatan	a. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi di pelayanan rujukan. b. Belum semua kab/kota berhasil menurunkan kasus stunting sebesar 7% atau lebih. c. Masih tingginya kasus penyakit menular, termasuk meningkatnya kasus DBD di Tahun 2024. d. Kasus penyakit tidak menular cenderung semakin meningkat, kesadaran masyarakat untuk deteksi dini masih kurang. Sistem pencatatan dan pelaporan masih lemah. e. Distribusi tenaga kesehatan belum sesuai standar. f. Produksi, pemasaran, pemanfaatan hasil industri kesehatan obat bahan alam (obat tradisional) masih rendah. Pelayanan kesehatan tradisional	a. Memperkuat sistem rujukan maternal dan neonatal melalui penguatan jejaring fasyankes, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta optimalisasi penggunaan teknologi telemedisin untuk kasus kegawatdaruratan. b. Mendorong percepatan penurunan stunting melalui penguatan konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif, serta peningkatan kualitas pelaksanaan audit kasus stunting di seluruh kabupaten/kota. c. Memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular melalui peningkatan cakupan imunisasi, penguatan surveilans berbasis masyarakat, dan penguatan program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang berbasis komunitas. d. Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui kampanye gaya hidup sehat, memperluas layanan deteksi

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		terintegrasi belum berkembang optimal.	dini di tingkat primer, serta memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan berbasis digital. e. Melakukan perencanaan kebutuhan dan redistribusi tenaga kesehatan berbasis Peta Jalan Ketahanan SDM Kesehatan Provinsi Bali, serta memperkuat insentif dan dukungan bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan. f. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan obat bahan alam dan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi melalui penguatan riset, peningkatan kapasitas SDM, serta fasilitasi sertifikasi produk dan promosi pasar domestik.
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Potensi sumber air yang tidak merata antar wilayah; b. Makin menurunnya potensi sumber air dan makin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan sehingga sering terjadi konflik; c. Beberapa Sungai dalam kondisi rusak akibat longsor, erosi dan alur sempit; d. Abrasi pantai di Bali cukup tinggi; e. Masih rendahnya kapasitas dan daya dukung jalan provinsi; f. Pembangunan jalan baru tidak seimbang dengan jumlah kendaraan; g. Pemanfaatan bagian-bagian jalan yang tidak sesuai fungsinya; h. Pelayanan air minum baik di perkotaan dan di perdesaan masih terbatas, mengingat keterbatasan ketersediaan air baku; i. Pengelolaan air limbah domestik/ rumah tangga belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal; j. Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi; k. Belum lengkapnya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penerapan; l. Belum optimalnya pembinaan penataan	a. Mengembangkan sistem pengelolaan sumber air terpadu dan interkoneksi antar wilayah berbasis konservasi dan pemetaan potensi sumber air. b. Mendorong konservasi sumber daya air, optimalisasi pemanfaatan air secara berkelanjutan, serta penguatan kelembagaan pengelolaan air berbasis kolaboratif lintas sektor. c. Melaksanakan rehabilitasi dan normalisasi sungai secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis ekosistem dan penguatan pengawasan pemanfaatan sempadan sungai. d. Memperkuat program pengendalian abrasi pantai melalui pembangunan infrastruktur proteksi pantai ramah lingkungan dan penguatan vegetasi pantai. e. Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan konektivitas jaringan jalan provinsi secara bertahap sesuai dengan prioritas wilayah dan kebutuhan pelayanan logistik. f. Mengembangkan kebijakan manajemen permintaan lalu lintas (demand management), optimalisasi penggunaan transportasi publik, serta pengaturan pengendalian pertumbuhan kendaraan bermotor. g. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang jalan serta penataan ulang fungsi bagian jalan sesuai peruntukan. h. Meningkatkan efisiensi

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		ruang; m. Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang	penggunaan air baku, pengembangan alternatif sumber air, serta optimalisasi sistem distribusi dan pelayanan air minum. i. Memperluas cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik dengan pengembangan infrastruktur pengolahan air limbah terdesentralisasi dan peningkatan peran masyarakat. j. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku jasa konstruksi melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan kemitraan dengan sektor swasta. k. Mempercepat penyusunan dan pemutakhiran perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan sistem informasi geospasial. l. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan penataan ruang melalui penguatan peran pemerintah daerah dan pelibatan masyarakat secara partisipatif. m. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta mempercepat penanganan kasus pelanggaran secara transparan dan akuntabel.
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai; b. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU); c. Keterbatasan penyediaan rumah karena pesatnya pertumbuhan penduduk;	a. Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana permukiman melalui perencanaan terpadu dan penguatan kolaborasi lintas sektor. b. Mendorong percepatan program perbaikan rumah tidak layak huni berbasis kolaborasi dengan CSR dan masyarakat. c. Mendorong percepatan penyediaan hunian layak melalui penguatan perencanaan tata ruang dan insentif bagi pengembang rumah rakyat.
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	a. Adanya perubahan (Tarik ulur) kewenangan Pusat dan Daerah b. Masih adanya persaingan tidak sehat di berbagai sektor usaha jasa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat c. Sensitivitas Trantibumas terhadap kunjungan wisata	a. Melakukan advokasi kebijakan dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat untuk kejelasan pembagian kewenangan. b. Memperkuat pengawasan pasar dan penegakan aturan persaingan usaha di sektor jasa. c. Meningkatkan kapasitas aparat Trantibumas dan sinergi pengamanan pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata.
6	Sosial	a. Masih adanya masyarakat miskin.	a. Memperkuat konvergensi program pengurangan

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		b. Masih adanya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang belum mendapat penanganan rehabilitasi sosial secara maksimal. c. Perlu adanya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan tali kasih bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Taruna Siaga Bencana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). d. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal.	kemiskinan lintas sektor dan pelibatan masyarakat. b. Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial melalui penguatan kelembagaan dan SDM. c. Meningkatkan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas Taruna Siaga Bencana dan TKSK. d. Mendorong penyediaan sarana prasarana sosial secara bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan layanan.
7	Bencana	a. Masih terjadinya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis akibat bencana. b. Kurang optimalnya kesadaran Pengurangan Risiko Bencana dari aparat, masyarakat dan dunia usaha secara terpadu. c. Belum optimalnya Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam perencanaan pembangunan. d. Belum optimalnya layanan akses peringatan dini bencana untuk seluruh masyarakat dan wisatawan. e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengurangan Risiko Bencana.	a. Meningkatkan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat. b. Meningkatkan edukasi dan pelibatan masyarakat, dunia usaha, dan aparat dalam pengurangan risiko bencana. c. Mendorong integrasi PRB ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. d. Memperluas cakupan dan integrasi sistem peringatan dini bencana yang mudah diakses masyarakat dan wisatawan. e. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam sistem PRB di semua tingkatan wilayah.
B Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar			
1	Tenaga Kerja	a. Pandemi Covid-19 serta pertumbuhan ekonomi yang berkonstraksi minus 9 --> meningkatnya jumlah pengangguran b. Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi --> meningkatkan daya saing tenaga kerja. c. Terbatasnya sertifikasi	a. Mempercepat pemulihan kesempatan kerja melalui penguatan program pelatihan kerja dan peningkatan investasi padat karya. b. Mendorong perluasan sertifikasi kompetensi tenaga kerja lintas sektor melalui kerjasama dengan LSP dan dunia usaha. c. Mendorong fasilitasi percepatan pembentukan lembaga sertifikasi profesi di luar sektor

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		profesi selain Sektor Pariwisata. d. Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri, terhadap perlindungan dan hak-haknya --> penempatan PMI tidak sesuai ketentuan. e. Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja dan Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja.	pariwisata. d. Memperkuat sosialisasi prosedur penempatan kerja ke luar negeri serta perlindungan dan hak-hak PMI. e. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja melalui sinergi lintas sektor.
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. IDG Provinsi Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 73,77% masih lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 76,90% (Data BPS, 2024). b. Keterlibatan Perempuan di lembaga Legislatif, Provinsi Bali Tahun 2023 mencapai 18,88%. Perempuan yang menduduki jabatan struktural Tahun 2023 sebanyak 1.353 (34,75%) dari total 3.893 pejabat struktural. c. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tahun 2023 sebesar 70,63% mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 69,62%, namun masih lebih rendah dari laki-laki yaitu sebesar 83,55% (Data BPS, 2024). d. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 383 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan wilayah kejadian, meningkat dari tahun 2023 yakni sebanyak 340 kasus.	a. Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. b. Meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif dan jabatan struktural melalui afirmasi dan pelatihan kepemimpinan perempuan. c. Mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam pasar kerja formal dan informal melalui program pelatihan dan akses permodalan. d. Memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan perlindungan yang responsif.
3	Pangan	a. Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong sebagai sumber pangan belum Optimal b. Adanya Alih Fungsi Lahan dan pemilikan lahan petani sempit c. Keterbatasan Air Irigasi dan kualitas jaringan irigasi d. Akses Pemasaran dan Permodalan Petani Lemah	a. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan melalui program KRPL dan edukasi masyarakat. b. Memperkuat pengendalian alih fungsi lahan dan mendorong skema pertanian skala ekonomi. c. Meningkatkan rehabilitasi jaringan irigasi dan pengelolaan air irigasi berbasis partisipatif. d. Memperkuat akses petani

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		e. Penguasaan teknologi bagi petani lemah f. Masih adanya cemaran pada pangan segar yang dapat membahayakan kesehatan. g. Koordinasi lintas sektor belum berjalan maksimal.	terhadap permodalan dan memperkuat jaringan pemasaran hasil pertanian. e. Meningkatkan kapasitas petani dalam penguasaan teknologi pertanian modern. f. Memperkuat pengawasan keamanan pangan segar melalui penguatan sistem pengawasan berbasis risiko. g. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah.
4	Pertanahan	Belum optimalnya pelaksanaan urusan pertanahan di daerah.	Mendorong optimalisasi pelaksanaan urusan pertanahan melalui penguatan koordinasi, penataan administrasi, dan pelayanan berbasis digital.
5	Lingkungan Hidup	a. TPA regional sudah overload. b. Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis sumber. c. Belum semua Desa/Kelurahan dan Desa Adat memiliki TPS 3R dan TPST. d. Masih adanya pencemaran air (air sungai, danau dan laut). e. Belum optimalnya penurunan emisi gas rumah kaca. f. Belum terakreditasinya UPTD Laboratorium LH	a. Mempercepat pengembangan dan penataan TPA regional yang ramah lingkungan. b. Mendorong percepatan penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber di tingkat rumah tangga. c. Mendorong penyediaan dan peningkatan fungsi TPS 3R dan TPST di seluruh desa/kelurahan dan desa adat. d. Memperkuat upaya pengendalian pencemaran air melalui pengawasan ketat terhadap sumber pencemar dan peningkatan IPAL. e. Memperkuat strategi penurunan emisi gas rumah kaca melalui pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi. f. Mempercepat akreditasi UPTD Laboratorium LH agar memenuhi standar pelayanan laboratorium lingkungan.
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan dan dokumen atas peristiwa penting	Memperkuat percepatan perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan dan peristiwa penting dengan pemanfaatan layanan digital dan jemput bola.
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Masih lemahnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui penguatan kapasitas aparatur desa dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pertumbuhan Penduduk Krama Bali yang belum seimbang	Meningkatkan penguatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui edukasi keluarga berencana yang berkesinambungan dan berbasis budaya lokal.
9	Perhubungan	a. Terjadi Kemacetan lalu lintas terutama di daerah kawasan Sarbagita dan dan pusat-pusat kegiatan wisata; b. Masih tingginya kecelakaan lalu lintas	a. Mendorong pengembangan sistem transportasi terintegrasi dan penguatan angkutan umum massal di kawasan Sarbagita dan destinasi wisata. b. Meningkatkan upaya penegakan aturan keselamatan lalu lintas

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		dengan korban meninggal dunia di Provinsi Bali; c. Rendahnya penggunaan angkutan umum; d. Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (bandara, pelabuhan, jalan, dan terminal); e. Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.	dan edukasi publik untuk menekan angka kecelakaan. c. Memperkuat kebijakan dan insentif untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum. d. Mempercepat pengembangan kapasitas layanan prasarana transportasi darat, laut, dan udara. e. Mendorong pengembangan sistem jaringan transportasi antar wilayah yang terintegrasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
10	Komunikasi dan Informatika	a. Belum Maksimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; b. Kurangnya Infrastruktur TIK dalam Pelayanan Publik; dan c. Belum Maksimalnya Pengembangan, Inovasi dan Interoperabilitas Layanan Digital.	a. Memperkuat pengelolaan informasi dan komunikasi publik berbasis data yang akurat dan narasi yang positif. b. Mempercepat pembangunan infrastruktur TIK di seluruh wilayah, khususnya di daerah blankspot. c. Mendorong percepatan integrasi layanan digital antar sektor melalui penguatan interoperabilitas dan pengembangan inovasi layanan.
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a. Belum optimalnya jaringan kemitraan Koperasi dan UMKM b. Sebagian besar pelaku UMKM merupakan Usaha Mikro c. Rendahnya kompetensi SDM pengelola koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM d. Rendahnya daya saing, produktivitas, dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM e. Belum ada peta data perkembangan usaha Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan terkini	a. Memperkuat jejaring kemitraan koperasi dan UMKM dengan dunia usaha dan lembaga keuangan. b. Mendorong peningkatan skala usaha UMKM dari mikro ke kecil/menengah melalui akses pembiayaan dan pendampingan usaha. c. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola koperasi dan kewirausahaan pelaku UMKM melalui pelatihan yang terstruktur. d. Memperkuat daya saing, produktivitas, dan pemasaran produk koperasi dan UMKM berbasis teknologi digital. e. Mempercepat penyusunan peta data perkembangan usaha koperasi dan UMKM yang akurat dan terkini.
12	Penanaman Modal	a. Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor. b. Belum memadainya infrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat. c. Masalah penyediaan	a. Mendorong penyebaran investasi yang lebih merata antar wilayah dan antar sektor melalui insentif dan fasilitasi investasi. b. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Bali Utara, Timur, dan Barat untuk mendukung daya tarik investasi.

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal. d. Belum memadainya informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota. e. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.	c. Memperkuat fasilitasi penyediaan lahan dan pemberian insentif daerah bagi investasi prioritas. d. Meningkatkan ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi daerah yang terintegrasi dan mudah diakses. e. Mendorong pelaksanaan promosi investasi secara terpadu dan berkelanjutan antar kabupaten/kota dan provinsi.
13	Kepemudaan dan Olah Raga	a. Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dan pemuda yang mandiri dan kreatif. b. Belum optimalnya budaya gerak dan berolahraga di masyarakat. c. Belum optimalnya sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga. d. Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.	a. Meningkatkan penguatan kapasitas organisasi kepemudaan dan mendorong kreativitas pemuda dalam berbagai bidang. b. Mendorong gerakan masyarakat gemar olahraga dan pengembangan budaya olahraga sejak dini. c. Memperkuat sistem pembinaan prestasi olahraga berbasis sekolah, klub, dan komunitas olahraga. d. Meningkatkan pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana kepemudaan dan olahraga sesuai standar.
14	Statistik	Kurangnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Memperkuat pengelolaan data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi dengan sistem informasi daerah
15	Persandian	Belum Maksimalnya Pengamanan Informasi Pemerintah	Meningkatkan pengamanan informasi pemerintah melalui penguatan infrastruktur persandian dan peningkatan kapasitas SDM.
16	Kebudayaan	a. Perlunya pengoptimalan Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman. b. Perlunya pengoptimalan Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi. c. Perlunya pengoptimalan Pemajuan Kesenian. d. Perlunya pengoptimalan Pemberdayaan Tenaga Kebudayaan. e. Perlunya pengoptimalan Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali. f. Perlunya pengoptimalan Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali. g. Perlunya pengoptimalan sistem informasi dan database mengenai kekayaan seni dan budaya Bali. h. Perlunya adanya optimalisasi/perbaikan terhadap Sarana Prasarana Kebudayaan.	a. Mendorong penguatan pemajuan cagar budaya dan pengembangan permuseuman berbasis partisipasi masyarakat. b. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai sejarah dan tradisi melalui penguatan edukasi budaya. c. Memperkuat ekosistem pengembangan kesenian melalui fasilitasi pelaku seni dan ruang-ruang kreatif. d. Meningkatkan pemberdayaan tenaga kebudayaan melalui pelatihan, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi jejaring kerja. e. Memperkuat perlindungan hasil karya budaya Bali melalui sistem pencatatan, pengarsipan, dan perlindungan hukum. f. Memperkuat pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali melalui edukasi, pelatihan, dan promosi. g. Mempercepat pengembangan

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		i. Kapasitas prajuru desa adat dalam pemerintahan desa adat belum optimal j. Pengembangan sektor riil sebagai rintisan BUPDA di desa adat belum maksimal k. Pendataan subak dan subak abian belum maksimal	sistem informasi dan database kekayaan seni dan budaya Bali yang terintegrasi. h. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kebudayaan yang representatif. i. Meningkatkan kapasitas prajuru desa adat dalam tata kelola pemerintahan desa adat. j. Memperkuat pengembangan sektor riil sebagai rintisan BUPDA di desa adat melalui fasilitasi dan pendampingan usaha. k. Memperkuat pendataan subak dan subak abian sebagai bagian penting pelestarian budaya agraris Bali.
17	Perpustakaan	a. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat b. Terbatasnya SDM Perpustakaan yang profesional c. Terbatasnya jumlah Koleksi Perpustakaan d. Belum maksimalnya penyediaan Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan Perpustakaan E-Library e. Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi pendukung penyelenggaraan Perpustakaan	a. Meningkatkan promosi budaya baca masyarakat melalui gerakan literasi yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. b. Memperkuat kompetensi SDM perpustakaan melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. c. Memperbanyak dan memperbaharui koleksi perpustakaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. d. Memperkuat penyediaan koleksi digital dan pengembangan layanan e-library. e. Memperkuat pengembangan sarana dan prasarana teknologi pendukung layanan perpustakaan modern.
18	Kearsipan	a. Belum Memadai Kuantitas dan Kualitas SDM di Bidang IT Pengampu dan Pengelola Sistem Kantor Virtual, Keuangan, BMD/Aset dan Kearsipan, b. Masih Kurangnya Sarana Prasarana dan Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bagian Keuangan, BMD/Aset dan Kearsipan, c. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemahaman Terhadap Arsip.	a. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang IT pengampu dan pengelola sistem perkantoran dan kearsipan. b. Memperkuat penyediaan sarana prasarana kearsipan dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan arsip. c. Memperkuat pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip di seluruh perangkat daerah.
C	Urusan Pilihan		
1	Kelautan dan Perikanan	a. Perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi; b. Terbatasnya modal usaha sektor kelautan dan perikanan; c. Pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam pengelolaan	a. Memperkuat ketahanan usaha sektor kelautan dan perikanan terhadap perubahan iklim melalui penerapan teknologi adaptif. b. Meningkatkan akses pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap permodalan.

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		produksi hasil kelautan dan perikanan belum optimal; d. Ketersediaan stok ikan yang semakin menurun; e. Ketersediaan induk unggul dan benih ikan masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya; f. Lahan budidaya dan komoditas ikannya belum berbentuk cluster; g. Adanya degradasi kualitas lingkungan budidaya; h. Jaringan dan informasi pasar belum terkelola dengan baik; i. Tingkat kegemaran konsumsi ikan masih rendah; j. Pendapatan asli daerah sektor kelautan dan perikanan belum optimal; k. Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan belum optimal. l. Kawasan konservasi yang telah ditetapkan belum dikelola secara optimal	c. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam pengelolaan produksi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. d. Mendorong pengelolaan perikanan berbasis stok yang berkelanjutan. e. Memperkuat produksi induk unggul dan benih ikan secara kuantitas dan kualitas. f. Mendorong pengembangan klaster budidaya perikanan berbasis komoditas unggulan. g. Memperkuat pengelolaan kualitas lingkungan budidaya perikanan. h. Memperkuat jaringan dan sistem informasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan. i. Meningkatkan edukasi konsumsi ikan kepada masyarakat. j. Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PAD melalui penguatan tata kelola usaha. k. Memperkuat pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. l. Memperkuat pengelolaan kawasan konservasi kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan.
2	Pariwisata	a. Belum optimalnya tata kelola destinasi pariwisata Bali b. Belum optimalnya SDM yang memiliki kualifikasi sesuai bidangnya c. Belum optimalnya pemasaran pariwisata d. Belum optimalnya standar penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali e. Adanya ketimpangan pembangunan kepariwisataan (Bali Utara dan Bali Selatan)	a. Memperkuat tata kelola destinasi pariwisata berbasis pariwisata berkelanjutan. b. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi. c. Meningkatkan efektivitas pemasaran pariwisata melalui platform digital dan kemitraan internasional. d. Memperkuat penerapan standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. e. Mendorong pemerataan pembangunan pariwisata antara Bali Selatan dan Bali Utara/Timur/Barat.
3	Pertanian	a. Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong sebagai sumber pangan belum Optimal b. Adanya Alih Fungsi Lahan dan kepemilikan lahan petani sempit c. Menurunnya kesuburan lahan d. Keterbatasan Air Irigasi dan kualitas jaringan irigasi e. Akses Pemasaran dan Permodalan Petani belum	a. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. b. Memperkuat pengendalian alih fungsi lahan dan peningkatan skala usaha pertanian. c. Meningkatkan konservasi dan perbaikan kesuburan lahan pertanian. d. Mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi dan pengelolaan air irigasi yang efisien. e. Memperkuat akses petani

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		optimal f. Penguasaan teknologi bagi petani belum optimal g. Masih adanya cemaran pada pangan segar yang dapat membahayakan Kesehatan manusia. h. Koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal. i. Keterbatasan sarana produksi (pupuk dan bibit), infrastruktur dan alat mesin pertanian. j. Untuk tanaman keras/tahunan sebagian besar sudah tidak produktif k. Adanya gangguan iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan l. Belum berkembangnya unit/ kelompok pengolah dan pemasaran m. Masih adanya pengeluaran sapi antar pulau secara illegal n. Masih adanya penyakit hewan menular strategis dan zoonosis o. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak	terhadap permodalan dan penguatan jejaring pemasaran. f. Meningkatkan penguasaan teknologi pertanian modern di kalangan petani. g. Memperkuat pengawasan dan pengendalian keamanan pangan segar. h. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. i. Memperkuat ketersediaan sarana produksi, infrastruktur, dan alat mesin pertanian. j. Mendorong regenerasi tanaman keras/tahunan agar lebih produktif. k. Meningkatkan upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim. l. Memperkuat pengembangan kelompok pengolah dan pemasaran hasil pertanian. m. Memperketat pengawasan dan pengendalian pengeluaran sapi antar pulau secara ilegal. n. Meningkatkan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis. o. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pakan ternak lokal
4	Kehutanan	a. Masih adanya perambahan kawasan, illegal logging, kebakaran hutan. b. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. c. Masih terdapat permasalahan tata batas hutan dengan masyarakat. d. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan. e. Masih adanya konflik pemanfaatan sumber daya hutan.	a. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk mengurangi perambahan kawasan, illegal logging, dan kebakaran hutan. b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. c. Mempercepat penyelesaian tata batas hutan dengan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. d. Mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara berkelanjutan. e. Memperkuat pengelolaan konflik pemanfaatan sumber daya hutan melalui mediasi dan penguatan kelembagaan.
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	a. Pengembangan energi terbarukan belum optimal --> risiko tinggi dan perlu investasi awal yang cukup tinggi serta kejelasan regulasi untuk jaminan berinvestasi. b. Terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. c. Pengambilan dan	a. Mempercepat pengembangan energi terbarukan dengan penyediaan insentif investasi dan penyempurnaan regulasi yang mendukung. b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM sektor energi dan sumber daya mineral melalui pelatihan teknis berkelanjutan. c. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pengambilan sumber daya mineral untuk

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		pemanfaatan sumber daya mineral (air tanah dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan) secara berlebihan dan tidak terkendali --> potensi intrusi/pencemaran air laut, penurunan kualitas dan muka air tanah serta resiko kerusakan lingkungan di areal/kawasan tambang. d. Belum optimalnya Ketahanan Energi dan Lingkungan --> penurunan kualitas hidup dan Lingkungan.	mencegah dampak lingkungan negatif. d. Memperkuat ketahanan energi daerah melalui diversifikasi sumber energi dan penguatan pengelolaan lingkungan energi.
6	Perdagangan	a. Masih banyak pasar yang terkesan kumuh b. Kurangnya pelayanan dengan pemanfaatan teknologi c. Belum optimalnya akses dan pemasaran digital d. Masih bervariasinya harga antar pedagang dengan produk yang sama e. Masih rendahnya kecintaan masyarakat akan produk produk lokal f. Kurangnya promosi baik dalam negeri maupun luar negeri g. Kurangnya kemampuan pelaku usaha menganalisa pasar h. Kurangnya kemampuan mengakses informasi pasar luar negeri i. Kurangnya kemampuan Eksportir/Importir memanfaatkan hasil perundingan perdagangan j. Kebijakan/Regulasi di bidang perdagangan yang terlalu sering mengalami perubahan k. Belum optimalnya kelembagaan ekspor/impor l. Kurangnya sarana pengujian mutu barang m. Kurangnya jumlah SDM dan kemampuan Penguji Mutu Barang n. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mentaati peraturan o. Masih rendahnya edukasi konsumen tentang	a. Mempercepat penataan dan revitalisasi pasar tradisional agar lebih layak, bersih, dan menarik. b. Memperkuat pelayanan perdagangan berbasis teknologi dan digitalisasi layanan pasar. c. Memperkuat akses dan pemasaran produk lokal melalui platform digital dan kerja sama lintas sektor. d. Mendorong harmonisasi harga antar pedagang melalui penguatan sistem informasi harga. e. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal melalui kampanye Bangga Buatan Bali. f. Memperkuat promosi produk lokal di tingkat nasional dan internasional. g. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam analisis pasar dan penguasaan strategi pemasaran. h. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam mengakses informasi pasar luar negeri. i. Meningkatkan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan bagi pelaku ekspor/impor. j. Mendorong penyederhanaan dan stabilisasi regulasi di bidang perdagangan. k. Memperkuat kelembagaan ekspor/impor di daerah. l. Memperkuat kapasitas sarana pengujian mutu barang. m. Meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM penguji mutu barang. n. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam ketaatan terhadap regulasi perdagangan. o. Meningkatkan edukasi konsumen terkait hak-haknya sebagai konsumen.

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		haknya. p. Belum optimalnya penyaluran distribusi produk lokal yang terintegrasi dari hulu sampai hilir q. Semakin tingginya impor barang dari luar Bali	p. Memperkuat distribusi produk lokal yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. q. Meningkatkan upaya pengendalian impor barang dari luar Bali.
7	Perindustrian	a. Keterbatasan bahan baku industri b. Belum optimalnya pengolahan industri hasil produk pertanian c. Belum optimalnya perkembangan industri kreatif d. Belum optimalnya hilirisasi produk industri. e. Kurangnya kesadaran Pelaku Usaha (IKM) tentang HKI f. Kurangnya Inovasi desain produk g. Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun h. Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing i. Penguasaan teknologi produksi masih rendah j. Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah k. Masih banyaknya produk lokal belum memiliki sertifikat mutu produk l. Kemasan produk masih belum sesuai standar	a. Memperkuat penyediaan bahan baku industri melalui penguatan sinergi dengan sektor pertanian dan perikanan. b. Mendorong pengembangan industri pengolahan hasil produk pertanian yang berorientasi ekspor. c. Memperkuat ekosistem pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal. d. Mendorong pengembangan hilirisasi produk industri melalui dukungan inovasi dan fasilitasi investasi. e. Meningkatkan kesadaran pelaku IKM terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). f. Mendorong inovasi desain produk lokal yang kompetitif di pasar global. g. Mendorong generasi muda untuk berwirausaha di sektor industri tradisional seperti tenun. h. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal agar mampu bersaing di pasar. i. Meningkatkan penguasaan teknologi produksi oleh pelaku IKM. j. Memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk industri lokal. k. Mendorong percepatan sertifikasi mutu produk lokal. l. Memperkuat kualitas kemasan produk lokal agar sesuai standar pasar.
8	Penanaman Modal	a. Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor b. Belum memadainya infrastruktur di masing-masing kabupaten, khususnya wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat c. Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal d. Belum memadainya informasi tentang peluang	a. Mendorong penyebaran investasi yang lebih merata antar wilayah dan antar sektor. b. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Bali Utara, Timur, dan Barat. c. Memperkuat fasilitasi penyediaan lahan dan pemberian insentif daerah bagi investasi prioritas. d. Meningkatkan ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi daerah yang terintegrasi dan mudah diakses. e. Mendorong pelaksanaan

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		dan potensi investasi daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota e. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota	promosi investasi secara terpadu dan berkelanjutan antar kabupaten/kota dan provinsi.
D	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
1	Sekretariat Daerah		
a	Biro Hukum	a. Pendokumentasian Naskah Hukum Melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Belum Optimal; b. Kaderisasi/Jenjang Karier Analis Hukum tidak Optimal; c. Belum memiliki SDM dengan Kualifikasi JF Perancang Peraturan Perundang-undangan indikator Indeks Reformasi Hukum; d. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan kategori Baik namun masih di angka 65 (dalam artian perlu ditingkatkan); e. Hasil fasilitasi dari Biro Hukum terkait produk hukum Kabupaten/Kota tidak diterapkan; f. Kenyamanan Kerja berpengaruh terhadap pelayanan publik; g. Perkara yang masuk sulit diprediksi berpengaruh terhadap realisasi fisik dan keuangan; dan h. Nomenklatur komponen belanja perkara belum sepenuhnya terakomodir pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI	a. Memperkuat pengelolaan JDIH secara terintegrasi dan user-friendly. b. Mendorong penguatan jenjang karier analis hukum melalui peningkatan pelatihan dan manajemen SDM. c. Mempercepat pengadaan SDM dengan kualifikasi JF Perancang Peraturan Perundang-undangan. d. Meningkatkan kualitas kebijakan melalui penguatan proses analisis dampak regulasi dan perbaikan proses fasilitasi. e. Memperkuat pemantauan dan evaluasi implementasi fasilitasi produk hukum kabupaten/kota. f. Meningkatkan kenyamanan kerja untuk mendukung pelayanan publik yang optimal. g. Meningkatkan fleksibilitas pengelolaan perkara dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. h. Mendorong penyesuaian nomenklatur belanja perkara di SIPD.
b	Biro Organisasi	a. Belum Optimalnya Penerapan SOP dan proses bisnis dalam tata kelola Pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Bali; b. Belum Optimalnya Kualitas pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Bali yang belum sesuai dengan harapan masyarakat; c. Terdapat Perangkat Daerah yang Belum tepat fungsi dan tepat ukuran;	a. Mendorong penerapan SOP dan proses bisnis yang konsisten di seluruh perangkat daerah. b. Meningkatkan kualitas layanan publik dengan mengadopsi inovasi layanan berbasis digital. c. Mendorong penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. d. Meningkatkan respons kebijakan Anjab/ABK, EVJab, dan SKJ terhadap dinamika regulasi nasional. e. Memperkuat pelaksanaan

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		d. Sering berubahnya regulasi pengaturan tentang kebijakan Anjab/ABK, EVJab dan SKJ untuk mendukung pembinaan SDM Aparatur; e. Belum optimalnya pengelolaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Bali;	reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
c	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	a. Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya, dan layanan) b. Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan c. Pengadaan Barang/Jasa pemerintah menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%-sd 40% dari total APBD) d. Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap pendapatan asli daerah. e. Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah terkait pengendalian inflasi dan penguatan akses keuangan daerah. f. Belum optimalnya pengendalian administrasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Meningkatkan kinerja PBJ dalam mendukung pencapaian target strategis pembangunan daerah. b. Memperkuat pemanfaatan sistem pengadaan elektronik secara optimal dan transparan. c. Memperkuat sistem pencegahan korupsi dalam PBJ melalui penguatan pengawasan dan pengendalian internal. d. Memperkuat pengelolaan BUMD dan BLUD untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD. e. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perekonomian daerah dalam pengendalian inflasi dan akses keuangan. f. Memperkuat pengendalian administrasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
d	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	a. Belum optimalnya penerapan SPM pada perangkat daerah pengampu. b. Terdapat potensi sengketa batas wilayah c. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah. d. Belum optimalnya pelaksanaan sradha bhakti di kalangan krama Bali.	a. Memperkuat penerapan SPM di seluruh perangkat daerah pengampu. b. Mempercepat penyelesaian sengketa batas wilayah secara partisipatif. c. Memperkuat implementasi dan monitoring pelaksanaan kerja sama daerah. d. Memperkuat fasilitasi pelaksanaan sradha bhakti di kalangan Krama Bali.
e	Biro Umum dan Protokol	a. Tingginya Dinamika Pekerjaan yang Butuh Atensi Cepat dan Tepat,	a. Memperkuat manajemen kerja Biro Umum & Protokol untuk mengantisipasi dinamika

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		b. Belum Memadai Kuantitas dan Kualitas SDM di Bidang IT Pengampu dan Pengelola Sistem Kantor Virtual, Keuangan, BMD/Aset dan Kearsipan, c. Masih Kurangnya Sarana Prasarana dan Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bagian Keuangan, BMD/Aset dan Kearsipan, d. Belum Memadainya Tenaga Keprotokolan yang Mampu Berbahasa Bali dan Asing, e. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemahaman Terhadap Arsip.	- pekerjaan yang cepat. b. Meningkatkan kapasitas SDM bidang IT untuk mendukung sistem kantor virtual dan pengelolaan kearsipan. c. Memperkuat sarana prasarana dan optimalisasi TI untuk mendukung layanan keuangan, BMD/Aset, dan kearsipan. d. Meningkatkan ketersediaan SDM keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan asing. e. Meningkatkan pemahaman pengelolaan arsip di seluruh lingkungan kerja.
2	Sekretariat DPRD	a. Belum optimalnya fasilitasi Anggota DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD; b. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait Tupoksi DPRD dalam kerangka representasi rakyat; c. Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD Provinsi Bali pada setiap Masa Persidangan sering berubah – ubah, karena dinamika Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali maupun aspirasi masyarakat yang terus berkembang sesuai keadaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat; d. Kurang terpublikasinya setiap pembahasan Raperda dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sehingga partisipasi masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik; dan e. Sumber daya manusia yang ada saat ini belum memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, yang meliputi : 1. Belum ada pegawai	a. Memperkuat fasilitasi tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD secara optimal. b. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat terkait fungsi representasi DPRD. c. Memperkuat manajemen jadwal kegiatan DPRD agar lebih fleksibel dan responsif. d. Meningkatkan publikasi proses pembahasan Raperda dan kegiatan DPRD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. e. Memperkuat kapasitas SDM Sekretariat DPRD, khususnya di bidang pengadaan, perencanaan, dan pengelolaan gedung. f. Mendorong optimalisasi tindak lanjut hasil reses dan pokok pikiran DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran.

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan karena sampai saat ini masih minta bantuan ke SKPD lain; 2. Belum ada pegawai yang mempunyai keahlian khusus sebagai perencanaan/konsultansi terutama dalam persiapan pemeliharaan gedung, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor f. Hasil reses dan pokok pikiran DPRD agar ditindaklanjuti dalam pembahasan RAPBD	
E	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
1	Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset	a. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah b. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah	a. Memperkuat pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntabilitas dan transparansi. b. Memperkuat pengelolaan barang milik daerah melalui digitalisasi pencatatan dan pengawasan.
2	Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan	a. Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; b. Belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Bali baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah; c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam peningkatan pelayanan pembayaran pajak; d. Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah; e. Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan SDM; f. Masyarakat belum optimal memanfaatkan Teknologi Berbasis Online;	a. Memperkuat sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 dan implementasi pajak & retribusi daerah berbasis UU HKPD. b. Memperkuat pengembangan potensi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan. c. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan pembayaran pajak yang mudah diakses masyarakat. d. Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan pengawasan. e. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah. f. Mendorong pemanfaatan teknologi berbasis online untuk pembayaran dan pengawasan pajak. g. Mendorong pengkajian penyesuaian kebijakan tarif kendaraan listrik agar tetap mendukung PAD.

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		g. Kendaraan listrik ditetapkan dengan tarif 0%.	
3	Kepegawaian	a. Big Data dan Digitalisasi Layanan Kepegawaian b. Penguatan Integritas dan Netralitas ASN c. Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai d. Percepatan dan Peningkatan Mutu layanan Kepegawaian	a. Mempercepat implementasi Big Data dan digitalisasi layanan kepegawaian. b. Memperkuat integritas dan netralitas ASN melalui penguatan etika profesi dan pengawasan internal. c. Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai berbasis sistem merit dan kinerja. d. Mempercepat penyediaan layanan kepegawaian yang responsif, efisien, dan berbasis teknologi.
4	Pendidikan dan Pelatihan	a. Percepatan Penerapan Manajemen Talenta b. Pengembangan Kompetensi ASN Terintegrasi (<i>Corporate University</i>)	a. Mempercepat penerapan manajemen talenta ASN yang berbasis kompetensi. b. Memperkuat pengembangan kompetensi ASN secara terintegrasi melalui model <i>Corporate University</i> .
5	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	a. Belum memadainya sarana dan prasarana seperti bangunan dan fasilitas penginapan/wisma yang representative serta alat transportasi untuk mendukung pelayanan prima baik kepada pimpinan maupun untuk operasional hubungan antar lembaga b. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM untuk teknis pelaksanaan koordinasi antar lembaga dan teknis promosi seni budaya c. Kurangnya kegiatan-kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya Bali di Jakarta d. Pemanfaatan anjungan daerah Bali sebagai <i>Show Window</i> penyebaran informasi dan potensi daerah Bali belum maksimal.	a. Memperkuat penyediaan sarana prasarana pendukung pelayanan koordinasi antar lembaga secara representatif. b. Memperkuat kapasitas SDM pelaksana teknis koordinasi dan promosi seni budaya di tingkat pusat. c. Meningkatkan intensitas kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya Bali di tingkat nasional. d. Memperkuat pemanfaatan Anjungan Daerah Bali sebagai media promosi dan penyebaran informasi daerah.
F	Unsur Pengawas		
1	Inspektorat Daerah	a. Belum efektifnya penerapan SPIP/MRI di lingkungan Pemprov Bali; b. Penguatan APIP yang belum optimal; c. Optimalisasi pelayanan publik yang prima dalam hal penanganan pengaduan masyarakat; d. Pencegahan korupsi melalui MCP, Stranas PK, dan SPI yang lebih	a. Mempercepat penerapan SPIP/MRI secara efektif dan menyeluruh di seluruh perangkat daerah. b. Memperkuat kapasitas APIP dalam pengawasan berbasis risiko dan deteksi dini. c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat yang cepat dan transparan.

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		optimal; e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal	d. Memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui optimalisasi MCP, Stranas PK, dan SPI. e. Memperkuat efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
G	Unsur Pemerintahan Umum		
1	Kesejahteraan Bangsa	a. Perkembangan Globalisasi yang dapat meningkatkan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang menimbulkan ketidakstabilan keamanan di daerah; b. Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2024 sebesar 72% dengan target 75%; c. Pemahaman masyarakat terhadap 4 (Empat) Konsensus Dasar Nasional yang semakin luntur akibat perkembangan globalisasi dan teknologi; d. Meningkatnya Peredaran Gelap Narkotika; e. Meningkatnya jumlah Ormas yang berpotensi meningkatkan ancaman terhadap ATHG jika tidak dibina dan diawasi sesuai peraturan yang berlaku.	a. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi ATHG dan menjaga stabilitas keamanan daerah. b. Meningkatkan partisipasi pemilih melalui edukasi politik yang berkelanjutan. c. Memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Empat Konsensus Dasar Nasional melalui pendidikan kewarganegaraan. d. Memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika. e. Memperkuat pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Perencanaan	a. Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah sering mengalami perubahan/penyempurnaan. b. Belum tercapainya target perencanaan pembangunan daerah, yang disebabkan karena Penentuan target kinerja yang terlalu optimis dan terdapat kondisi diluar kendali yang mempengaruhi realisasi. c. Kurang pemahaman dan beragamnya interpretasi SDM penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam menterjemahkan arah kebijakan pembangunan, mekanisme dan regulasi	a. Meningkatkan koordinasi dan pemahaman terhadap dinamika regulasi perencanaan pembangunan. b. Memperkuat keakuratan penetapan target perencanaan pembangunan yang realistis dan terukur. c. Memperkuat kapasitas SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. d. Memperkuat kualitas data perencanaan melalui penguatan analisis dan pengembangan sistem informasi pembangunan. e. Meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan di seluruh tingkatan. f. Memperkuat pemanfaatan sumber pendanaan alternatif dalam mendukung capaian pembangunan daerah. g. Memperkuat kualitas evaluasi kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Rekomendasi Daerah
		penyusunan dokumen perencanaan. d. Data pendukung perencanaan belum sepenuhnya disertai analisis dan Belum maksimalnya dukungan sistem Informasi Pembangunan. e. Masih terdapat inkonsistensi dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya. f. Perlu optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan lainnya dalam mendukung capaian pembangunan. g. Evaluasi kinerja masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan.	pembangunan berikutnya.
3	Riset dan Inovasi Daerah	a. Tema riset yang dilaksanakan oleh lembaga riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah b. Hasil-hasil riset berupa inovasi sebagian besar belum terimplementasikan di dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat c. Banyak kekayaan intelektual komunal dan personal yang belum terlindungi d. Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dunia usaha dan industri	a. Mendorong penyelarasan tema riset dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah. b. Memperkuat implementasi hasil riset dan inovasi ke dunia usaha, industri, dan masyarakat. c. Mempercepat upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal dan personal di Bali. d. Mempercepat pengembangan pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Urgensi dari perencanaan pembangunan daerah, diantaranya berupa informasi mengenai kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan adanya informasi tersebut, maka suatu daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka ekonomi makro daerah dan Kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Provinsi Bali sebagai bagian holistik dari perekonomian regional, nasional maupun global. Di samping itu, estimasi perkiraan sumber-sumber pendapatan dari sektor dan subsektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

Pada prinsipnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mendistribusikan pendapatan yang lebih merata antar golongan dan wilayah, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah serta mengelola terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier.

Provinsi Bali memiliki corak perekonomian yang sedikit berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Daya dukung kebudayaan dan kesenian serta panorama dan keindahan alam, sehingga menjadikan Bali sebagai daerah yang memiliki ciri khas tersendiri.

Dua prinsip dasar pembangunan ekonomi Bali yang perlu diperhatikan adalah mengenali potensi wilayah Bali itu sendiri, dan merumuskan manajemen pembangunan daerah yang *pro growth*, *pro job*, dan *pro poor* dengan tidak melupakan konsep *Tri Hita Karana* sebagai perwujudan dari hubungan Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia, dan Manusia dengan Alam. Terkait dengan itu, beragam potensi unggulan yang dimiliki Provinsi Bali merupakan aset berharga yang perlu digali dan dikembangkan dalam pencapaian pembangunan.

Keberlanjutan pembangunan di Bali harus ditopang dengan keterpaduan antar tiga pilar, yakni keberlanjutan pembangunan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, Kebijakan makro ekonomi daerah Bali tahun 2025 tetap diarahkan pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan tetap mengedepankan lingkungan (*pro-environment*) dalam segala aspek pembangunan serta tersebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali terutama dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai upaya mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah (kabupaten/kota).

Disamping itu juga diupayakan peningkatan peranan sektor-sektor unggulan dan kontribusi sektor-sektor ekonomi daerah serta peningkatan investasi swasta/swadaya masyarakat, sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk merealisasikan capaian pembangunan tersebut, sangat ditentukan oleh perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas, agar menjamin pembangunan yang dilaksanakan dapat tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini akan cenderung dapat memaksimalkan alokasi sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial sebagai dasar kebijakan anggaran yang efektif dan efisien melalui perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1.1 Tantangan Perekonomian Bali Tahun 2025 dan Langkah yang ditempuh

Tantangan dan prospek perekonomian Bali, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri.

Berdasarkan hasil pemaparan Perkembangan dan Outlook Perekonomian Bali pada bulan Februari 2025 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, situasi ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2024 dapat dikatakan dalam kondisi cukup baik. Pondasi ekonomi Provinsi Bali tetap kuat dengan stabilitas harga yang terjaga. Perekonomian Bali tetap tumbuh kuat sebesar 5,48% (yoy) pada keseluruhan tahun 2024, lebih tinggi dari perekonomian Nasional (5,03%). Capaian tersebut diiringi dengan inflasi Bali yang terkendali pada rentang sasaran inflasi 2,5%+1%, yaitu 2,34% (yoy) pada Desember 2024 dan 2,41% (yoy) pada Januari 2025.

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga Didukung Akselerasi Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD). Pada akhir 2024, penyaluran kredit di Bali tumbuh 8,91% (yoy) atau lebih tinggi dari 6,11% (yoy) pada 2023, diiringi dengan Non-Performing Loan yang terjaga di tingkat 1,38%. Nominal transaksi dan merchant QRIS juga tumbuh signifikan, disertai peningkatan penggunaan Kartu Kredit Indonesia oleh pemda di Bali.

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bali pada Tahun 2025 adalah sebesar 5,0% sampai 5,8%. Perkiraan ini didukung oleh pemulihan produksi pertanian, optimisme investasi dan perdagangan, kebijakan moneter pro-growth, dan pariwisata berkualitas. Pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2025 tentu memiliki atau menghadapi tantangan tertentu yang harus dipahami betul oleh Pemerintah. Tantangan ini merupakan input besar dalam penyusunan kebijakan strategis pengelolaan ekonomi Bali dalam jangka pendek dan menengah. Tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Provinsi Bali di tahun 2025 adalah:

a. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan ekonomi dan infrastruktur antara wilayah Sarbagita dan Non Sarbagita. Wilayah Sarbagita menyumbang share 65,96% terhadap ekonomi Bali pada tahun 2023, sedangkan Non Sarbagita hanya 34,04%. Dalam menghitung tingkat ketimpangan antara wilayah Sarbagita dan Non Sarbagita, disamping menggunakan data share terhadap perekonomian, juga menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson (Williamson Index) adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi ekonomi atau pembangunan antarwilayah dalam suatu daerah atau negara. Indeks ini sering digunakan dalam analisis ekonomi regional untuk menilai sejauh mana suatu wilayah mengalami ketimpangan pembangunan dibandingkan dengan wilayah lain.

Indeks Williamson memiliki rentang nilai 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 maka distribusi ekonomi semakin sempurna (ketimpangan antar wilayah semakin rendah/tidak ada), sebaliknya semakin mendekati 1 maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. Jika Indeks $<0,3$ maka wilayah tersebut memiliki ketimpangan rendah; jika Indeks $>0,3$ dan $<0,5$ maka wilayah tersebut memiliki ketimpangan sedang; dan jika indeks $>0,5$ maka wilayah tersebut memiliki ketimpangan tinggi. Hasil analisis yang dilakukan oleh BI, Indeks Williamson antara Kawasan Sarbagita dengan

Kawasan Non Sarbagita adalah 0,52. Ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi ekonomi yang tinggi diantara kedua kawasan tersebut.

b. Ketergantungan Pada Sektor Pariwisata

Perekonomian Bali bergantung pada sektor pariwisata sehingga rentan terhadap shock eksternal. Sektor pariwisata menyumbang pangsa pasar tertinggi terhadap Perekonomi Bali selama tahun 2022-2024. Sektor Pariwisata menyumbang rata-rata sebesar 20%, angka ini jauh di atas sektor pertanian, sebagai sektor dengan pangsa pasar tertinggi kedua, yang menyumbang pangsa pasar sebesar 14%. Sektor lainnya hanya menyumbang 10% ke bawah.

c. Gap Antara Akseptansi dan Literasi Digitalisasi Sistem Pembayaran

Pemanfaatan digitalisasi sistem pembayaran telah berkembang pesat namun belum diiringi literasi digital yang kuat. Sektor pariwisata merupakan sektor yang memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini terlihat dari Persentase tenaga kerja pada Lapangan Usaha Akomodasi Makan dan Minum yang menggunakan teknologi mencapai 86,83%, tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

d. Integrasi Rantai Pasok Pangan yang Belum Optimal

Integrasi rantai pasok pangan yang belum optimal tercermin dari Margin Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) dan volatilitas harga yang relatif tinggi. MPP adalah selisih antara harga suatu barang di tingkat produsen dan harga yang diterima oleh konsumen akhir, yang disebabkan oleh biaya pengangkutan, distribusi, dan perdagangan. MPP Bali adalah sebesar 15,25% yang apabila dibandingkan dengan Nasional dengan MPP 11,31% menjadikan Bali memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dalam distribusi dan perdagangan pangan dalam skala nasional. Terdapat selisih (margin) antara harga produsen dengan harga yang diterima konsumen sebesar 15,25% sedangkan rata-rata nasional hanya 11,31%.

Tingkat Volatilitas di Provinsi Bali juga lebih tinggi dibandingkan nasional. Bali memiliki volatilitas 1,15 sedangkan nasional hanya 0,76. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat fluktuasi harga komoditas di Provinsi Bali jauh lebih tinggi dibandingkan nasional sehingga tingkat kepastian stabilitas harga pangan khususnya pangan pokok menjadi tidak

terjamin. Volatilitas tinggi pada harga pangan dapat berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.

Rekomendasi oleh BI untuk Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut adalah penguatan sektor padat karya, pengendalian inflasi, perluasan pembiayaan, dan perluasan digitalisasi.

3.1.2 Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2025

Berdasarkan pada kondisi sebagaimana diatas dan melihat kondisi riil perkembangan ekonomi Bali, maka perlu dilakukan perubahan target makro ekonomi tahun 2025 pada beberapa indikator makro ekonomi sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.
Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2025

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET TAHUN 2025 PADA RANCANGAN AKHIR RPJMD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029	TARGET PROVINSI SESUAI RKP	TARGET RKPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2025 (INDUK)	TARGET PERUBAHAN RKPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,50 - 6,00	5,30 – 6,30	5,75 (5,25-6,25)	5,50 - 6,00
2	Persentase Kemiskinan	3,57 – 3,93	3,57 – 3,93	4,06	3,57 – 3,93
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,78 – 2,35	1,87 – 2,35	2,01	1,78 – 2,35
4	Indeks Modal Manusia	N/A	0,59	N/A	N/A
5	Indeks Pembangunan Manusia	78,78	N/A	76,58	78,78
6	Gini Ratio	0,343-0,347	0,355 – 0,359	0,364	0,343-0,347
7	Intensitas Emisi GRK (%)	7,77	5,36	5,36	5,36
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	14	N/A	13,26	14

Pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025, dari 8 indikator makro ekonomi Bali terdapat 6 indikator makro ekonomi mengalami perubahan target. Target yang ditetapkan dalam perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 lebih optimis dibandingkan dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 (induk). Terdapat 2 indikator makro ekonomi Provini Bali yang ditetapkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah)

yaitu Indeks Modal Manusia dan Intensitas Emisi GRK yang tidak dapat ditetapkan targetnya baik dalam dalam RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 (induk) maupun Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 ini. Hal ini karena kedua indikator tersebut merupakan indikator baru yang belum pernah diukur maupun diinventarisasi datanya di Provinsi Bali. Namun, kedua indikator tersebut memiliki indikator proxy yang dapat digunakan sebagai indikator yang setara dalam mengukur kualitas sumber daya manusia dan intensitas emisi GRK yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Penurunan Intensitas Emisi GRK.

3.2 Kerangka Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Struktur keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah

- b. Belanja Daerah
- c. Pembiayaan Daerah

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan maka pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan untuk pembangunan daerah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

Berdasarkan hasil evaluasi penerimaan pendapatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 serta memperhatikan capaian makro ekonomi Bali sampai dengan Triwulan I, disusun proyeksi perubahan pendapatan sampai akhir tahun 2025. Optimalisasi penerimaan pendapatan dilakukan untuk pendapatan yang sudah memenuhi target, maupun yang masih belum mencapai target tengah tahun. Jika dibandingkan dengan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, total pendapatan daerah pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 meningkat sebesar Rp473.203.745.554,00 atau meningkat 7,85%. Secara lengkap proyeksi perubahan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Perbandingan Pendapatan Daerah APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025

KODE	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TRIWULAN I 2025	PROYEKSI ANGGARAN		MENINGKAT/(MENURUN)	
			APBD INDUK TAHUN 2025	APBD PERUBAHAN TAHUN 2025	NILAI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7
4	PENDAPATAN DAERAH	1.676.542.267.111,65	6.027.724.313.823,00	6.500.928.059.377,00	473.203.745.554,00	7,85%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.062.055.814.336,65	3.581.371.604.823,00	4.056.560.689.008,00	475.189.084.185,00	13,27%
4.1.1	Pajak Daerah	588.697.913.299,00	2.611.036.410.791	2.860.573.081.691,00	249.536.670.900,00	9,56%
4.1.2	Retribusi Daerah	78.624.989.439,32	337.336.008.147,00	361.186.203.997,00	23.850.195.850,00	7,07%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	226.382.756.694,43	193.896.695.885,00	226.603.839.112,00	32.707.143.227,00	16,87%
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	168.350.154.903,90	439.102.490.000,00	608.197.564.208,00	169.095.074.208,00	38,51%
4.2	Pendapatan Transfer	614.482.412.775,00	2.440.644.709.000,00	2.438.603.330.369,00	-2.041.378.631,00	-0,08%
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	614.482.412.775,00	2.440.644.709.000,00	2.403.777.640.000,00	-36.867.069.000,00	-1,51%
4.2.1.6	Insentif Fiskal	0,00	12.978.586.000,00	12.978.586.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.7	Dana Bagi Hasil (DBH)	24.496.822.800,00	244.948.196.000,00	244.948.196.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.8	Dana Alokasi Umum (DAU)	408.940.976.000,00	1.401.748.162.000,00	1.401.748.162.000,00	0,00	0,00%
4.2.1.9	Dana Alokasi Khusus (DAK)	181.044.613.975,00	780.969.765.000,00	744.102.696.000,00	-36.867.069.000,00	-4,72%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.040.000,00	5.708.000.000,00	5.764.040.000,00	56.040.000,00	0,98%
4.3.1	Hibah	4.040.000,00	5.708.000.000,00	5.760.000.000,00	52.000.000,00	0,91%
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	4.040.000,00	4.040.000,00	
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sumber: Ringkasan APBD Provinsi Bali 2025-SIPD

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Secara umum, pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dibandingkan dengan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 diperkirakan terdapat peningkatan Belanja Daerah sebesar Rp338.522.483.062,80 atau 4,96%.

Secara lengkap proyeksi perubahan belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025

KODE	URAIAN	REALISASI BELANJA DAERAH TRIWULAN I 2025	PROYEKSI ANGGARAN		MENINGKAT/(MENURUN)	
			APBD INDUK TAHUN 2025	APBD PERUBAHAN TAHUN 2025	NILAI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7
5	BELANJA DAERAH	845.792.657.124,78	6.827.385.005.313,20	7.165.907.488.376,00	338.522.483.062,80	4,96%
5.1	Belanja Operasi	837.884.991.419,78	4.880.783.654.845,20	5.067.807.431.375,00	187.023.776.529,80	3,83%
5.1.1	Belanja Pegawai	450.027.451.488,00	2.614.645.674.805,20			
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	169.397.198.364,78	1.447.603.014.904,00			
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00			
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	5.090.000.000,00			
5.1.5	Belanja Hibah	218.460.341.567,00	813.294.965.136,00			
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	150.000.000,00			
5.2	Belanja Modal	2.365.553.625,00	1.007.960.216.627,00	828.716.906.244,00	-179.243.310.383,00	-17,78%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	25.418.325.760,00			
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.484.210.600,00	250.200.970.942,00			
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	881.343.025,00	531.631.164.379,00			
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	178.268.021.666,00			
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	22.265.084.280,00			
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	176.649.600,00			
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.378.000.000,00	151.187.931.213,00	55.464.624.677,00	-95.723.306.536,00	-63,31%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.378.000.000,00	151.187.931.213,00			
5.4	Belanja Transfer	4.164.112.080,00	787.453.202.628,00	1.213.918.526.080,00	426.465.323.452,00	54,16%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	582.188.016.684,00			
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	4.164.112.080,00	205.265.185.944,00			

Sumber: Ringkasan APBD Provinsi Bali 2025-SIPD

Perubahan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Perubahan Tahun 2025 disebabkan karena terdapat perubahan prioritas pendanaan untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta dukungan terhadap prioritas nasional. Perubahan Belanja Transfer didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dari proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan diatas, pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 diperkirakan terdapat penurunan defisit anggaran semula sebesar Rp799.660.691.490,20 menjadi sebesar Rp664.979.428.999,00, menurun sebesar Rp134.681.262.491,20 atau 3,04% karena penerimaan pendapatan daerah lebih besar dari rencana belanja daerah. Defisit anggaran tersebut direncanakan akan ditutupi dari pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercatat sebesar Rp623.732.459.203,32. Pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 terdapat Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp243.464.808.088,00 yang merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dan Rp.158.000.000.000,00 untuk penyertaan modal.

Secara lengkap rencana pembiayaan pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.

Rencana Pembiayaan pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025

KODE	URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TRIWULAN I 2025	PROYEKSI ANGGARAN		MENINGKAT/(MENURUN)	
			APBD INDUK TAHUN 2025	APBD PERUBAHAN TAHUN 2025	NILAI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7
6	PEMBIAYAAN DAERAH	384.577.526.507,32	799.660.691.490,20	664.979.428.999,00	-134.681.262.491,20	-16,84%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	623.732.459.203,32	1.201.125.499.578,20	1.066.444.237.087,00	-134.681.262.491,20	-11,21%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	623.732.459.203,32	1.201.125.499.578,20	623.732.459.203,32	-577.393.040.374,88	-48,07%
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	442.711.777.883,68	442.711.777.883,68	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	239.154.932.696,00	401.464.808.088,00	401.464.808.088,00	0,00	0,00%
6.2.2	Penyertaan Modal	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00	0,00	0,00%
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	81.154.932.696,00	243.464.808.088,00	243.464.808.088,00	0,00	0,00%
6.2.4	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.5	Pemberian Dana Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	384.577.526.507,32	799.660.691.490,20	664.979.428.999,00	-134.681.262.491,20	-16,84%
	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenaan	1.215.327.136.494,19	0,00	0,00	0,00	

Sumber: Ringkasan APBD Provinsi Bali 2025-SIPD

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu pada sasaran Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2029.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2025.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran

pembangunan Provinsi Bali tahun 2025 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2025-2029. Adapun Prioritas Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Kemanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Prioritas Nasional 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial, dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Prioritas Nasional 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Prioritas pembangunan tahunan di Provinsi Bali harus memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai kinerja pembangunan Provinsi Bali. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi

Bali sudah mengalami perubahan berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Perumusan tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan dapat diukur dalam jangka waktu perencanaan. Dalam mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dalam menyusun tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu perencanaan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN
Tujuan 1 : Terwujudnya kemandirian masyarakat Bali dan pelestarian kebudayaan Bali	Sasaran 1 : Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional
	Sasaran 2 : Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat
Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan
	Sasaran 3 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja
	Sasaran 5 : Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan
	Sasaran 6 : Tercapainya Peningkatan Prestasi Olahraga Provinsi Bali Pada Level Nasional dan Internasional
	Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Dasar yang Layak Krama Bali
Tujuan 3 : Meningkatnya Laju Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi <i>Kerthi</i> Bali.	Sasaran 1 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali
	Sasaran 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Bali

TUJUAN	SASARAN
	Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi Daerah
	Sasaran 4 : Terbentuknya Pusat-Pusat Perekonomian Baru Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal di Desa-deso Setiap Kabupaten/Kota di Bali.
	Sasaran 5 : Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM
	Sasaran 6 : Meningkatnya Daya Saing, Kualitas, dan Jangkauan Pasar Produk Industri Lokal Bali Melalui Standarisasi, Sertifikasi, serta Ekspansi Ke Pasar Nasional dan Internasional.
	Sasaran 7 : Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali
	Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepariwisataa
Tujuan 4 : Meningkatnya Infrastruktur digital Berkualitas yang Inklusif di Seluruh Wilayah Provinsi Bali	Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Efektif dan Efisien
Tujuan 5 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi, terkoneksi, dan ramah lingkungan mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Sasaran 1 : Terwujudnya Transportasi yang Handal, Berkeselamatan, dan Ramah Lingkungan
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum
Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Bali Mandiri Energi Bersih	Sasaran 1 : Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan yang berkelanjutan
	Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Mineral yang Berwawasan Lingkungan
	Sasaran 3 : Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Berkelanjutan
Tujuan 7 : Terwujudnya Stabilitas Keamanan Masyarakat, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Sasaran 1 : Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Terpadu
Tujuan 8 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN
	Sasaran 2 : Meningkatnya Manajemen Sektor Publik
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
	Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum

TUJUAN	SASARAN
	Sasaran 6 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

4.1. Prioritas Pembangunan

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

- Prioritas 1 : Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal
- Prioritas 2 : Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan
- Prioritas 3 : Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata
- Prioritas 4 : Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi
- Prioritas 5 : Lingkungan, Kehutanan, dan Energi
- Prioritas 6 : Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
- Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Selaras dengan tema pembangunan RKP tahun 2025, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut:

“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH”

Dalam upaya mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan, selain memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, juga sangat dibutuhkan landasan perencanaan yang *SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Timely)* yang ditempuh melalui pendekatan secara Tematik sesuai agenda pembangunan, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* (lintas sektor), dan *Spatial* (titik koordinat) lokasi

kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian program pembangunan yang dirancang harus memperhatikan :

1. Keterkaitan antara penganggaran dan sasaran yang dituju;
2. Memperhatikan kemanfaatan kegiatan, efektifitas dan efisiensi dalam anggaran; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang tertib.

PRIORITAS 1: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, Serta Kearifan Lokal



Gambar 4.1.

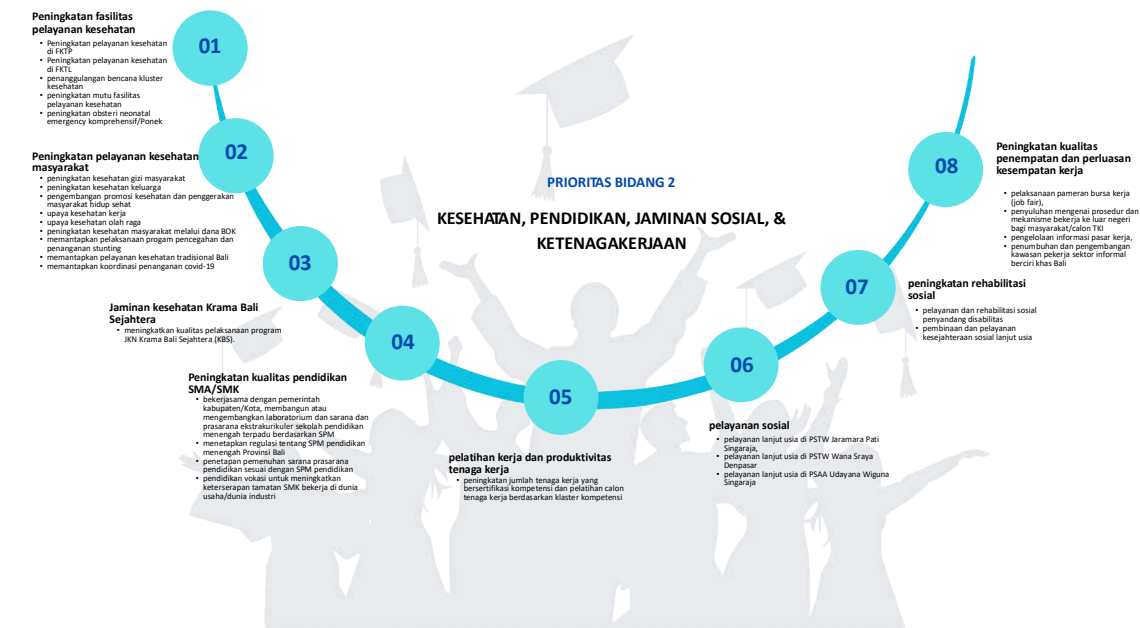
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1

Berdasarkan gambar 4.1 yang menempatkan bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, Serta Kearifan Lokal sebagai prioritas 1 daerah Provinsi Bali. Untuk mewujudkan prioritas tersebut maka arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

1. Pemajuan nilai sejarah dan tradisi melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Penyusunan peristiwa sejarah; (2) Pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda; (3) Utsawa Dharma Gita; (4) Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali; dan (5) Perlindungan tari sakral.
2. Penguatan desa adat melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Pembinaan desa adat; dan (2) Pendidikan dan pelatihan prajuru desa adat.

3. Penguatan Subak melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Pembinaan subak dan subak abian; dan (2) Pembinaan penyusunan awig-awig/perarem subak dan subak abian.
4. Pemajuan bahasa, aksara dan sastra melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Alih aksara dan alih bahasa naskah kuno atau lontar; serta (2) perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra.
5. Pemajuan cagar budaya dan permuseuman melalui kegiatan prioritas: (1) Penyusunan Purana Pura; (2) Pembinaan permuseuman; dan (3) Perlindungan Kawasan Suci Besakih.
6. Pemajuan seni dan tenaga kebudayaan melalui kegiatan prioritas: (1) Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali/PKB; (2) Penyelenggaraan festival seni Bali Jani; (3) Diplomasi kebudayaan; (4) Pembinaan SDM tenaga kebudayaan; (5) Festival seni masa kini; (6) Penghargaan seni; (7) Pameran standarisasi dan sertifikasi lembaga seni (sanggar, yayasan dan sekaa); dan (8) Memantapkan pembinaan lembaga seni.

PRIORITAS 2: Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan.



Gambar 4.2.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2

Berdasarkan Gambar 4.2 yang menggambarkan prioritas Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan dengan menggunakan

pendekatan secara *Tematik, Holistik* (menyeluruh), *Integrated* dan *Spasial* ditentukan 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, melalui kegiatan prioritas dalam rangka: (1) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP, (2) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTL, (3) penanggulangan bencana kluster kesehatan, (4) peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, (5) peningkatan obsteri neonatal emergency komprehensif/Ponek.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) peningkatan kesehatan gizi masyarakat, (2) peningkatan Kesejahteraan keluarga, (3) pengembangan promosi kesehatan dan penggerak masyarakat hidup sehat, (4) upaya kesehatan kerja, (5) peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana BOK, (6) memantapkan pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting, dan (7) memantapkan pelayanan kesehatan tradisional Bali.
3. Jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera, dilakukan melalui meningkatkan kualitas pelaksanaan program JKN Krama Bali Sejahtera (KBS).
4. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) Mengembangkan labotarium dan sarana prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2) Menetapkan SPM pendidikan menengah Provinsi Bali, (3) Pemetaan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan, dan (4) Pendidikan Vokasi untuk meningkatkan keterserapan tamatan SMK bekerja di dunia usaha/industri.
5. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. merupakan kegiatan prioritas melalui: (1) tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi, dan (2) pelatihan calon tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi.
6. Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas melalui: (1) pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, dan (3) Pelayanan anak di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.

- Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui: (1) Pelayanan dan rehabilitasi sosial Gelandangan dan Pengemis, (2) Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, dan (3) Perlindungan sosial bencana alam dan sosial.
- Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), (2) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (3) pengelolaan informasi pasar kerja, (4) penumbuhan dan pengembangan kawasan pekerja sektor informal berciri khas Bali.

PRIORITAS 3: Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan, & Perikanan; Perindustrian & Perdagangan: UMKM & Koperasi; Ekonomi Kreatif & Digital; Serta Pariwisata

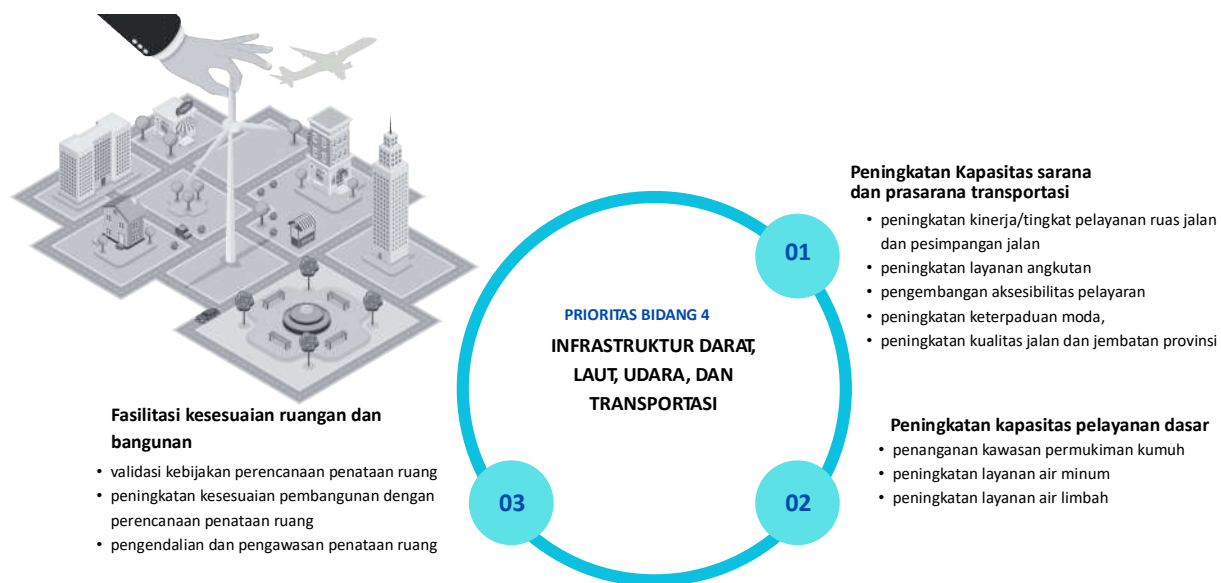


Gambar 4.3.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3

Berdasarkan Gambar 4.3 yang menguraikan tentang prioritas 3 yaitu Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan, & Perikanan; Perindustrian & Perdagangan: UMKM & Koperasi; Ekonomi Kreatif & Digital; Serta Pariwisata ditentukan oleh dimensi/Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) penanganan rentan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.
2. Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
3. Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Peningkatan Pemasaran Produk Lokal, (2) Pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar, dan (3) Pelaksanaan IKM Bali Bangkit.
4. Peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, dan (3) promosi panganekaragaman pangan.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil pangan melalui kegiatan prioritas pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.
6. Pengembangan koperasi pengerajin tenun merupakan industri kerajinan rakyat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa, tradisi menenun masih ada dan terus dikembangkan dalam menjaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan koperasi tenun.
7. Pariwisata melalui kegiatan prioritas dalam rangka: (1) Peningkatan Pemasaran Pariwisata, (2) Pengembangan SDM Pariwisata, dan (3) Pengembangan Produk Pariwisata.

PRIORITAS 4: Infrastruktur Darat, Laut, Udara, Dan Transportasi



Gambar 4.4.

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4

Berdasarkan Gambar 4.4 yang menguraikan tentang prioritas 4: Infrastruktur Darat, Laut, Udara, Dan Transportasi ditentukan dimensi/Prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan: (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan aksesibilitas pelayaran, (4) peningkatan keterpaduan moda, dan (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi.
2. Fasilitasi kesesuaian ruangan dan bangunan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan: (1) validasi kebijakan perencanaan penataan ruang, (2) peningkatan kesesuaian pembangunan dengan perencanaan penataan ruang, dan (3) pengendalian dan pengawasan penataan ruang.
3. Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan: (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, dan (3) peningkatan layanan air limbah.

PRIORITAS 5: Lingkungan, Kehutanan, Dan Energi

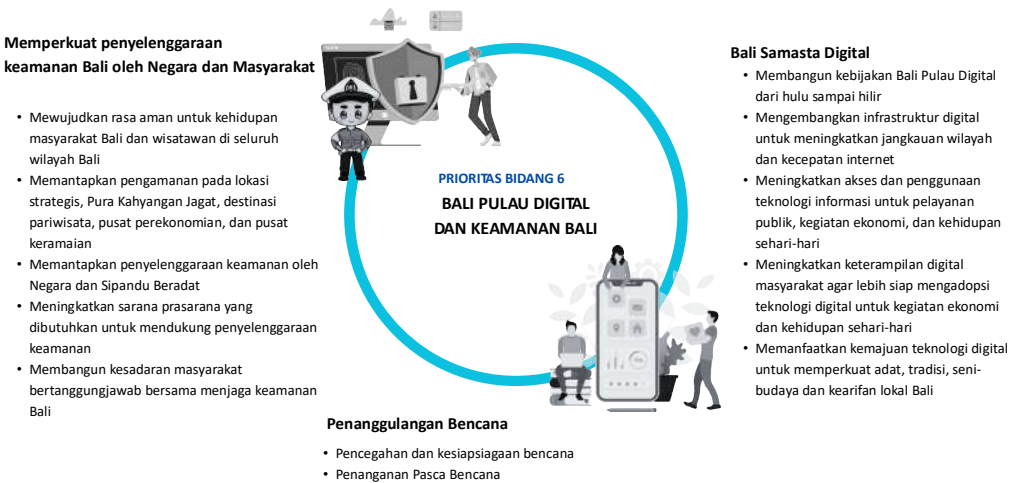


Gambar 4.5.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5

Berdasarkan Gambar 4.5 yang menguraikan tentang prioritas 5, yaitu Lingkungan, Kehutanan, Dan Energi ditentukan dimensi/Prioritas sebagai berikut:

1. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, (2) pengelolaan, perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam, dan (3) pengendalian/pengamanan pantai.
2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilakukan melalui kegiatan : (1) pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan.
3. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pengelolaan konservasi energi.

PRIORITAS 6: Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali



Gambar 4.6.

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6

Berdasarkan Gambar 4.6 yang menggambarkan Prioritas Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali akan dilaksanakan melalui Program Prioritas sebagai berikut:

1. Bali Samasta Digital, melalui kegiatan: (1) Membangun kebijakan Bali Pulau Digital dari hulu sampai hilir; (2) Mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan jangkauan wilayah dan kecepatan internet; (3) Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari; (4) Meningkatkan keterampilan digital masyarakat agar lebih siap mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari; (5) Memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali.
2. Memperkuat penyelenggaraan Keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat, dengan arah kebijakan: (1) Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh wilayah Bali; (2) Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, pusat perekonomian, dan pusat keramaian; (3) Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat; (4) Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan; dan (5) Membangun kesadaran masyarakat bertanggungjawab bersama menjaga keamanan Bali.

3. Penanggulangan Bencana, dengan arah kebijakan: (1) Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; serta (2) Penanganan Pasca Bencana

PRIORITAS 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi



Gambar 4.7.

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7

Berdasarkan Gambar 4.7 yang menguraikan Prioritas 7, tentang Tata Kelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah birokrasi bersih melayani (WBBK), ditentukan oleh 6 (enam) dimensi/Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan melalui kegiatan: (1) penerapan atau implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan (2) penyusunan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah/KDH tentang penjabaran APBD.
2. Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, program prioritas ini dilaksanakan melalui pelatihan, pendidikan dan melalui pemberian bantuan pendidikan.
3. Efektifitas, efisiensi dan transparansi, kegiatan ini dilaksanakan melalui: (1) pengawasan program prioritas, (2) pengembangan potensi pembiayaan daerah, dan (3) perumusan kebijakan daerah.

4. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, dilakukan melalui kegiatan: (1) penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah, dan (2) penyusunan peraturan dokumen NJKB.
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan pengembangan pemerintahan.
6. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik, program ini dilaksanakan dalam upaya: (1) untuk mengetahui tingkat indeks kepuasan masyarakat/IKM, (2) meningkatkan pelayanan publik, dan (3) peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam mendorong bertumbuhnya investasi dan pergerakan ekonomi daerah.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali mengalami perubahan pada tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta prioritas dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Adapun perubahan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
 Persandingan Prioritas Pembangunan Dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025

Prioritas Pembangunan dalam RPKD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025	
Prioritas 1	Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Prioritas 1	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal
Prioritas 2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Prioritas 2	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan
Prioritas 3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Prioritas 3	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata
Prioritas 4	Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya	Prioritas 4	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi
Prioritas 5	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Prioritas 5	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi
Prioritas 6	Infrastruktur	Prioritas 6	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
Prioritas 7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Prioritas 7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Sumber : RKPD SB Provinsi Bali Tahun 2025 dan Rancangan Akhir RPJMD SB Provinsi Bali tahun 2025-2029

Tabel 4.3.
Kesesuaian Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 terhadap
Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025
Prioritas 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	▪ Bidang Prioritas 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.
Prioritas 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	▪ Bidang Prioritas 3 Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata
	▪ Bidang Prioritas 5 Lingkungan, Kehutanan, dan Energi.
	▪ Bidang Prioritas 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.
Prioritas 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	▪ Bidang Prioritas 4 Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi
	▪ Bidang Prioritas 2 Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan
Prioritas 4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millennial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.	▪ Bidang Prioritas 2 Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan
Prioritas 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	▪ Bidang Prioritas 3 Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata
Prioritas 6. Membangun dari desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	▪ Bidang Prioritas 2 Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan
	▪ Bidang Prioritas 3 Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata
Prioritas 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	▪ Bidang Prioritas 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.
Prioritas 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	▪ Bidang Prioritas 5 Lingkungan, Kehutanan, dan Energi.
	▪ Bidang Prioritas 1 Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.

4.2. Paradigma Pembangunan Bali

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara *Genuine Bali*; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama Bali* dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi *Krama Bali*. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/ pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi *Sakala Niskala*

Pembangunan yang mengandung dimensi *sakala* dan *niskala* yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan *Hyang Widhi Wasa* sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.

2) Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3) Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan.

Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarnya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

4) Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, *lascarya*, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam *nindihin Gumi Bali*, guna menjaga dan memelihara *Genuine Bali*; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

4.3. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.4.
Strategi Pembangunan Dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
Tujuan 1 : Terwujudnya kemandirian masyarakat Bali dan pelestarian kebudayaan Bali	Sasaran 1 : Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional	Penguatan Identitas Budaya dan Kearifan Lokal	Pelestarian dan pengembangan seni, tradisi, dan adat istiadat	Digitalisasi dan modernisasi dalam pengelolaan kebudayaan	Pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis budaya	Penguatan tata kelola kebudayaan yang berkelanjutan
	Sasaran 2 : Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat	Mendata Kelembagaan Desa Adat dan Tata Kelola Desa Adat	Sosialisasi Tata Kelola Desa Adat	Bimbingan Teknis Tata Kelola Desa Adat	Pengawasan dan Evaluasi Tata Kelola Desa Adat	Pengembangan Sistem Tata Kelola Desa Adat
Tujuan 2 : Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Sasaran 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Penguatan pelaksanaan regulasi pelayanan dasar	Pemetaan dan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar.	Ekspansi Akses & Pemerataan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Peningkatan Mutu & SDM kesehatan	Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi
		Peningkatan sarana dan prasarana di semua fasilitas kesehatan	Peningkatan Mutu dan SDM kesehatan	Standarisasi dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan paripurna	Peningkatan manajemen layanan berbasis teknologi informasi	Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi
		Meningkatkan <i>event</i> /festival dan pameran produk/layanan kesehatan herbal tradisional Bali.	Kolaborasi dengan tokoh adat/masyarakat lokal melalui peningkatan peran <i>gotra pangusada</i> se-Bali	Program edukasi berbasis komunitas dan sekolah.	Penguatan kelembagaan dan kader pendidik masyarakat.	Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi
		Percepatan pengembangan industri herbal tradisional Bali.	Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali melalui produk herbal tradisional Bali	Memperluas layanan pengobatan tradisional Bali pada fasilitas layanan kesehatan	Integrasi layanan tradisional dan modern secara legal dan terstandar	Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi
	Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/SMK 2. Penambahan Ruang Kelas Baru 3. Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu 4. Penyediaan dana pendamping BOS 5. Pengawasan dan Evaluasi	1. Penambahan Ruang Kelas Baru 2. Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu 3. Penyediaan dana pendamping BOS 4. Pengawasan dan Evaluasi	1. Penambahan Ruang Kelas Baru 2. Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu 3. Penyediaan dana pendamping BOS 4. Pengawasan dan Evaluasi	1. Penambahan Ruang Kelas Baru 2. Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu 3. Penyediaan dana pendamping BOS 4. Pengawasan dan Evaluasi	1. Penambahan Ruang Kelas Baru 2. Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu 3. Penyediaan dana pendamping BOS 4. Pengawasan dan Evaluasi
		1. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional	1. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional	1. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional	1. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional	1. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier 3. Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman 4. Pengembangan pendidikan vokasi SMK <i>link and match</i> Dunia usaha dan dunia industri 5. Pengawasan dan evaluasi	2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier 3. Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman 4. Pengembangan pendidikan vokasi SMK <i>link and match</i> Dunia usaha dan dunia industri 5. Pengawasan dan evaluasi	2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier 3. Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman 4. Pengembangan pendidikan vokasi SMK <i>link and match</i> Dunia usaha dan dunia industri 5. Pengawasan dan evaluasi	2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier 3. Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman 4. Pengembangan pendidikan vokasi SMK <i>link and match</i> Dunia usaha dan dunia industri 5. Pengawasan dan evaluasi	2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimtek dan pelatihan serta pengembangan karier 3. Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman 4. Pengembangan pendidikan vokasi SMK <i>link and match</i> Dunia usaha dan dunia industri 5. Pengawasan dan evaluasi
		1. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal 2. Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan 3. Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada satuan pendidikan 4. Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan 5. Pengawasan dan evaluasi	1. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal 2. Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan 3. Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada satuan pendidikan 4. Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan 5. Pengawasan dan evaluasi	1. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal 2. Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan 3. Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada satuan pendidikan 4. Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan 5. Pengawasan dan evaluasi	1. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal 2. Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan 3. Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada satuan pendidikan 4. Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan 5. Pengawasan dan evaluasi	1. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal 2. Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan 3. Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada satuan pendidikan 4. Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan 5. Pengawasan dan evaluasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
	Sasaran 3 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	Penguatan pemahaman dan kompetensi melalui Bimbingan Teknis penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)	Pemantauan pelaksanaan PPRG di setiap perangkat daerah	Evaluasi dan penguatan terhadap penyusunan dokumen PPRG daerah	Mengakomodasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam dokumen perencanaan daerah	Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam perencanaan kinerja daerah dan seluruh perangkat daerah
		Sosialisasi SK Pokja dan <i>Focal Point</i> serta Perda PUG di provinsi dan kabupaten/ kota	Bimbingan teknis penguatan peran Pokja dan <i>Focal Point</i> serta Perda PUG di provinsi dan kabupaten/ kota	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tahunan dan Lima Tahunan Pokja PUG	Mengakomodasi Rencana Aksi Daerah Pokja dan <i>Focal Point</i> PUG pada Peraturan Gubernur terkait Pelaksanaan Perda PUG	Laporan pelaksanaan penguatan peran Pokja PUG dan <i>Focal Point</i> PUG
		Pendataan kelompok perempuan dan kelompok rentan	Sinergi bersama jejaring dan instansi terkait untuk analisis kebutuhan fasilitasi dan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan	Penyusunan kegiatan dan program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan	Sosialisasi dan <i>workshop</i> peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok rentan di lingkungan provinsi dan kabupaten/ kota	Fasilitasi sarana dan prasarana untuk peningkatan akses perempuan dan kelompok rentan
		Pemetaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terdapat di lembaga adat dan desa	Sosialisasi terkait regulasi dan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada lembaga adat dan masyarakat sipil di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota	Pemetaan terhadap desa dinas dan desa adat terkait Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta Ruang Bersama Indonesia (RBI)	Peningkatan peran Forum PUSPA Provinsi dan kabupaten/kota dan sinergi bersama lembaga adat	Terwujudnya DRPPA dan RBI di setiap desa di seluruh kabupaten/ kota
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global) 2. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja 3. Pelatihan pemagangan dalam negeri 4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 5. Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global) 2. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja 3. Pelatihan pemagangan dalam negeri 4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 5. Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global) 2. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja 3. Pelatihan pemagangan dalam negeri 4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 5. Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global) 2. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja 3. Pelatihan pemagangan dalam negeri 4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 5. Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global) 2. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja 3. Pelatihan pemagangan dalam negeri 4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 5. Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 2. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja 3. Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman 4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan 5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 2. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja 3. Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman 4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan 5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 2. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja 3. Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman 4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan 5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 2. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja 3. Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman 4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan 5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 2. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja 3. Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman 4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan 5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi
		1. <i>Job Fair</i> /Bursa Kerja 2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 6. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan	1. <i>Job Fair</i> /Bursa Kerja 2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	1. <i>Job Fair</i> /Bursa Kerja 2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 6. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	1. <i>Job Fair</i> /Bursa Kerja 2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 6. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan	1. <i>Job Fair</i> /Bursa Kerja 2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 6. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA	6. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA	(PMI) terintegrasi secara elektronik 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA	Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA	elektronik 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA
	Sasaran 5 : Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Pendataan kuantitas generasi muda yang aktif	Sosialisasi pengembangan SDM pada generasi muda	Pengembangan kompetensi pemuda	Pemberdayaan generasi muda sebagai pelaku utama penentu peradaban masa depan Bali	Pengawasan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan pemuda
		Pendataan Sarana, Prasarana, dan organisasi kepemudaan	1. Menyiapkan fasilitasi sarana dan prasarana 2. Sinergitas dengan <i>stakeholder</i> terkait	Memberikan layanan kepemudaan terkait pengembangan potensi generasi muda	Pengawasan dan evaluasi pengembangan potensi generasi muda	Pengembangan terhadap hasil Pengawasan dan evaluasi dalam pelayanan kepemudaan
		Pendataan potensi peluang kerja bagi pemuda	Memfasilitasi kerja sama dalam peluang kerja dengan <i>stakeholder</i> terkait	1. Melaksanakan bursa kerja melalui kerja sama dengan <i>stakeholder</i> terkait 2. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan wirausaha muda	Pengawasan dan evaluasi kesempatan kerja yang inklusif bagi generasi muda	Pengawasan dan evaluasi kesempatan kerja yang inklusif bagi generasi muda
	Sasaran 6 : Tercapainya Peningkatan Prestasi Olahraga Provinsi Bali Pada Level Nasional dan Internasional	Penyusunan regulasi tentang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Perda tentang keolahragaan)	Penyusunan regulasi tentang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Gubernur tentang keolahragaan)	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan perundang-undangan tentang keolahragaan	Pembinaan organisasi keolahragaan	Pengawasan dan evaluasi implementasi Perda dan pergub Keolahragaan
		Penyusunan pedoman sistem pembinaan olahraga jangka panjang (Desain Besar Olahraga Daerah)	1. Pembentukan sentra pembinaan olahragawan di daerah (SPOBDA tingkat provinsi dan PPLP di tingkat kab/kota) 2. Pendataan tenaga keolahragaan yang potensial dan memenuhi standar	1. Melaksanakan pembinaan 2. penyelenggaraan kejuaraan 3. keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga 4. Pengawasan dan evaluasi	1. Melaksanakan pembinaan 2. penyelenggaraan kejuaraan 3. keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga 4. Pengawasan dan evaluasi	1. Melaksanakan pembinaan 2. penyelenggaraan kejuaraan 3. keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga 4. Pengawasan dan evaluasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		Penyusunan regulasi tentang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Perda tentang keolahragaan)	1. Pendataan kejuaraan olahraga yang dapat dijadikan <i>sport tourism</i> 2. Mendata potensi kerja sama dengan <i>stakeholder</i> terkait	1. Melaksanakan dan mengembangkan kejuaraan / <i>event</i> olahraga berbasis <i>sport tourism</i> 2. Pengawasan dan evaluasi	1. melaksanakan dan mengembangkan kejuaraan / <i>event</i> olahraga berbasis <i>sport tourism</i> 2. Pengawasan dan evaluasi	1. melaksanakan dan mengembangkan kejuaraan / <i>event</i> olahraga berbasis <i>sport tourism</i> 2. Pengawasan dan evaluasi
	Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Dasar yang Layak Krama Bali	Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi	Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi	Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi	Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi	Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi
Tujuan 3 : Meningkatnya Laju Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi <i>Kerthi</i> Bali.	Sasaran 1 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali	Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha) : - Pupuk (10.000 Ton) - Pendampingan (10 Kelompok) - Sertifikat (5 Buah)	Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha) : - Pupuk (10.000 Ton) - Pendampingan (10 Kelompok) - Sertifikat (5 Buah)	Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha) : - Pupuk (10.000 Ton) - Pendampingan (10 Kelompok) - Sertifikat (5 Buah)	Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha) : - Pupuk (10.000 Ton) - Pendampingan (10 Kelompok) - Sertifikat (5 Buah)	Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha) : - Pupuk (10.000 Ton) - Pendampingan (10 Kelompok) - Sertifikat (5 Buah)
		Identifikasi potensi produksi kelautan dan perikanan	Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan	Optimalisasi produksi kelautan dan perikanan	Pengawasan dan Evaluasi Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan	Intensifikasi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan
		Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha)	Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha)	Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha)	Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha)	Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha)
		- Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll	- Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll	- Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll	- Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll	- Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		Penanaman komoditas pertanian (50 Ha) - <i>Smart Farming</i> - <i>Urban Farming</i> - Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)	Penanaman komoditas pertanian (50 Ha) - <i>Smart Farming</i> - <i>Urban Farming</i> - Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)	Penanaman komoditas pertanian (50 Ha) - <i>Smart Farming</i> - <i>Urban Farming</i> - Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)	Penanaman komoditas pertanian (50 Ha) - <i>Smart Farming</i> - <i>Urban Farming</i> - Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)	Penanaman komoditas pertanian (50 Ha) - <i>Smart Farming</i> - <i>Urban Farming</i> - Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)
		Akselerasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	1. Penyediaan Personil, Prasarana dan Sarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) KKP 2. Optimalisasi Pemberdayaan Petambak Garam	1. Optimalisasi tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan 2. Fasilitasi Penetapan Indikasi Geografis (IG) Petambak Garam	1. Pengawasan dan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan konservasi Perairan 2. Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Garam	1. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang Berkelanjutan (EVIKA kategori Emas) 2. Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Pergaraman
		Inventarisasi Produk Kelautan dan Perikanan	Sosialisasi Penerapan standar produk kelautan dan perikanan bagi produsen dan konsumen	Penerapan Standarisasi Produk Kelautan dan Perikanan	Optimalisasi Akses Pasar Domestik dan Ekspor	Pengawasan dan Evaluasi Produk Kelautan dan Perikanan
		Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok)	Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok)	Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok)	Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok)	Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok)
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Bali	Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah
		Pengawasan dan pemetaan jumlah aset yang potensial	Memperkuat sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan sumber pendapatan baru	Optimalisasi pemasaran aset potensial melalui Sistem Informasi berbasis digital	Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemasaran aset potensial melalui Sistem Informasi berbasis digital	Pengawasan, evaluasi, dan pengembangan Sistem Informasi
	Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi Daerah	Memperkuat Penegakan, dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Berkaitan Langsung Terhadap Investasi	Mendata Peta Potensi Investasi di Kabupaten/Kota	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang RUPM	Implementasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang RUPM	Pengawasan dan Evaluasi
	Sasaran 4 : Terbentuknya Pusat-Pusat Perekonomian Baru Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal di Desa-desa Setiap Kabupaten/Kota di Bali.	Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali	Mendata Potensi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Pembinaan dan fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa terkait Kerja Sama Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pengawasan dan Evaluasi kerja sama Desa yang sudah dilaksanakan
		Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing	Mendata Potensi Desa, Melakukan Sosialisasi	Mendata dan Pengawasan Evaluasi Potensi Desa,	Mendata dan Pengawasan Evaluasi Potensi Desa,	Mendata dan Pengawasan Evaluasi Potensi Desa,

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		produk Ekonomi Kreatif dan Digital	TTG, Melaksanakan Lomba TTG	Melaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna	Melaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna	Melaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna
		Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya	Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya	Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya	Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya	Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya
		▪ Pemetaan potensi ekonomi kreatif desa berbasis unggulan lokal (kerajinan, kuliner, fashion, seni pertunjukan, dll). ▪ Penguatan kelembagaan komunitas kreatif desa. ▪ Peningkatan literasi digital dan kewirausahaan untuk pelaku ekonomi kreatif desa. ▪ Penyusunan standar kualitas dan kemasan produk agar memenuhi kriteria pasar global. ▪ Revitalisasi balai ekonomi desa/inkubator desa kreatif.	▪ Pengembangan platform digital desa kreatif untuk promosi dan penjualan (marketplace lokal). ▪ Penguatan branding produk ekonomi kreatif desa dengan narasi budaya Bali. ▪ Fasilitasi riset dan desain produk berbasis kebutuhan pasar internasional. ▪ Peningkatan akses permodalan (KUR kreatif, dana bergulir BUMDes). ▪ Pelatihan pemasaran digital dan e-commerce untuk UMKM desa kreatif.	▪ Kemitraan strategis dengan pelaku industri kreatif nasional/internasional (desainer, platform digital, buyer). ▪ Promosi produk desa kreatif melalui pameran nasional & festival budaya (offline & virtual). ▪ Pembentukan klaster ekonomi kreatif desa antar kabupaten/kawasan (klaster anyaman, kopi, fesyen etnik, dsb). ▪ Mendorong sertifikasi produk dan merek dagang untuk perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI).	▪ Pendampingan ekspor melalui kurasi produk ekspor dan pelatihan logistik ekspor. ▪ Kampanye promosi internasional melalui kedutaan besar, diaspora Bali, dan forum global (mis. Ubud sebagai "kota kreatif UNESCO"). ▪ Integrasi produk desa kreatif ke ekosistem pariwisata berbasis budaya. ▪ Monitoring dan evaluasi kinerja daya saing global desa kreatif secara berkala.	▪ Penetapan desa kreatif global percontohan di setiap kabupaten/kota. ▪ Penguatan sistem insentif dan penghargaan untuk pelaku ekonomi kreatif berdaya saing global. ▪ Replikasi dan scale-up model desa ekonomi kreatif ke desa adat lain. ▪ Penerapan sistem data terintegrasi untuk pemantauan daya saing produk dan pelaku usaha desa kreatif. ▪ Konsolidasi regulasi daerah untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif desa yang berkelanjutan.
	Sasaran 5 : Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Penelitian dan Pengembangan Produk (Identifikasi tren pasar, dan penentuan fokus produk)	Peningkatan Kualitas Produksi (pelatihan pegawai, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi)	Pemasaran dan <i>Branding</i>	Penguatan keuangan, pelatihan manajerial, dan pembangunan kepemimpinan	Sertifikasi dan standarisasi
		Identifikasi Target Potensial Pasar	Peningkatan Kualitas Produk dan Kemasan	Digitalisasi dan Literasi Digital	Penguatan Branding Produk UMKM dan Perluasan Pasar	Penguatan Branding Produk UMKM dan Perluasan Pasar

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		Pemetaan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kapasitas pelaku usaha	Integrasi UMKM/Koperasi ke ekosistem pariwisata dan pasar domestik	Meningkatkan kontribusi UMKM/Koperasi terhadap PDRB dan ekspor	Meningkatkan kontribusi UMKM/Koperasi terhadap PDRB dan ekspor	Meningkatkan kontribusi UMKM/Koperasi terhadap PDRB dan ekspor
	Sasaran 6 : Meningkatnya Daya Saing, Kualitas, dan Jangkauan Pasar Produk Industri Lokal Bali Melalui Standarisasi, Sertifikasi, serta Ekspansi Ke Pasar Nasional dan Internasional.	- Pelatihan/Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Industri Lokal Bali (Kerajinan dan Olahan Pangan) - Pendampingan <i>Branding</i> terhadap IKM berpedoman <i>Branding</i> Bali ; - pendampingan desain kemasan/desain digital - Penyediaan alat cetak kemasan yang mendukung pendampingan desain kemasan	- Pembentukan Kelembagaan Sentra Industri - Pendampingan dokumen pendaftaran sertifikasi merek/hak cipta/desain industri bagi IKM - Fasilitasi cetak kemasan bagi IKM	Pemberian Bantuan Alat	Sertifikasi Produk (Izin Edar dan SNI)	Pengawasan dan Evaluasi
		Pendaftaran dan Pembinaan Pelaku Usaha	Penjaringan dan Kurasi Pelaku Usaha	Pelaksanaan Pameran Dalam dan Luar Negeri	Pelaksanaan Pameran Dalam dan Luar Negeri	Pengawasan dan Evaluasi
		Identifikasi Produk Unggulan Melalui Evaluasi Perda 8 Tahun 2020 tentang RPIP	Penguatan Kapasitas Produksi Melalui Modernisasi Alat Produk , Fasilitasi Akses Bahan Baku dan Teknologi	Pengembangan Infrastruktur Pendukung pada Kawasan Peruntukan Industri	Akselerasi Pasar dan Kerja sama dengan Sektor Pariwisata	Pengawasan dan Evaluasi
	Sasaran 7 : Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali	1. Memperkuat basis data potensi PAD melalui integrasi sistem informasi pajak dan retribusi daerah. 2. Melakukan intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang sudah ada secara optimal. 3. Menyusun roadmap pengembangan sumber-sumber PAD baru berbasis ekonomi hijau, ekonomi kreatif, dan pariwisata berkelanjutan. 4. Melakukan penguatan tata kelola BUMD dan membentuk BUMD baru	1. Implementasi tahap awal pengembangan sumber PAD baru, seperti pajak daerah berbasis aktivitas ekonomi digital, pariwisata minat khusus, dan green tax. 2. Memperkuat sistem pengawasan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi digital. 3. Memulai reformasi pengelolaan BUMD: restrukturisasi model bisnis dan peningkatan	1. Melakukan ekspansi ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru berbasis ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan green economy secara lebih luas. 2. Memperkuat pengembangan pendapatan melalui pengelolaan aset daerah yang lebih produktif. 3. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD melalui penguatan bisnis baru yang adaptif terhadap pasar dan membentuk BUMD baru.	1. Melakukan optimalisasi semua sumber PAD dengan mendorong inovasi model pemungutan yang ramah layanan publik. 2. Memperkuat kemitraan strategis BUMD dengan sektor swasta dan UMKM untuk penguatan kinerja BUMD dan membentuk BUMD baru. 3. Memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan transfer pusat berbasis kinerja daerah.	1. Mencapai optimalisasi kemandirian fiskal dengan struktur PAD yang semakin seimbang antara pajak tradisional dan sumber-sumber PAD baru. 2. Mewujudkan BUMD sebagai kontributor utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal provinsi. 3. Menyempurnakan sistem tata kelola fiskal daerah yang adaptif, transparan, akuntabel, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. 4. Menyusun kebijakan fiskal jangka menengah dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		untuk meningkatkan PAD.	kompetensi SDM BUMD dan membentuk BUMD baru untuk meningkatkan PAD. 4. Meningkatkan sinergi pemungutan pajak provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurangi kebocoran.	4. Mendorong efisiensi belanja daerah agar kemandirian fiskal semakin berkualitas, bukan hanya kuantitatif.	4. Mendorong penguatan tata kelola fiskal daerah berorientasi <i>value for money</i> .	panjang untuk menjaga kemandirian fiskal yang berkesinambungan.
	Sasaran 8: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepariwisata	▪ Evaluasi regulasi dan kebijakan pariwisata yang ada, dengan penekanan pada prinsip berkelanjutan (lingkungan, sosial, budaya). ▪ Penyusunan dan revisi peraturan daerah/turunan regulasi yang mendukung prinsip <i>green tourism</i>, <i>community-based tourism</i>, dan pariwisata spiritual. ▪ Penyusunan standar minimum layanan pariwisata berbasis lokal, termasuk homestay, pemandu wisata desa, kuliner, dan destinasi non-mainstream. ▪ Identifikasi dan klasifikasi zona/zona wisata prioritas untuk intervensi layanan dan regulasi. ▪ Pelatihan peningkatan kesadaran pelaku wisata terhadap standar berkelanjutan (ekolabel, emisi karbon, pengelolaan sampah).	▪ Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata: hospitality, pemandu wisata, manajemen homestay, pelestarian budaya lokal. ▪ Audit dan sertifikasi usaha pariwisata (akomodasi, agen perjalanan, restoran) berbasis <i>sustainability rating</i>. ▪ Pengembangan modul pelatihan digital dan onsite untuk peningkatan standar layanan. ▪ Penguatan kapasitas desa wisata dan komunitas lokal sebagai pelaku utama layanan wisata yang otentik dan ramah lingkungan. ▪ Implementasi sistem pengaduan dan evaluasi layanan pariwisata berbasis masyarakat dan wisatawan.	▪ Digitalisasi sistem pengawasan dan pemantauan standar layanan wisata melalui dashboard terpadu lintas OPD dan kabupaten/kota. ▪ Penguatan fungsi pengawasan terpadu melalui Satgas Pariwisata Berkelanjutan. ▪ Penerapan penilaian berkala kepatuhan regulasi pariwisata bagi pelaku usaha. ▪ Integrasi pelayanan perizinan, pelaporan, dan sertifikasi ke dalam sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>). ▪ Pemberian insentif dan disinsentif terhadap pelaku usaha berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi dan pencapaian standar layanan.	▪ Penetapan zona/zona pariwisata model berstandar global dengan dukungan infrastruktur, SDM, dan regulasi yang terpadu. ▪ Kampanye Bali Berstandar Dunia untuk menarik wisatawan berkualitas (<i>high value, low impact</i>). ▪ Kemitraan dengan lembaga internasional (UNWTO, GSTC) dalam benchmarking dan pengakuan standar layanan berkelanjutan. ▪ Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan regulasi dan peningkatan standar. ▪ Monitoring dan evaluasi efektivitas regulasi dan layanan terhadap indeks kepuasan wisatawan dan indeks keberlanjutan.	▪ Review menyeluruh dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem regulasi dan layanan. ▪ Pelembagaan lembaga penjamin mutu layanan wisata tingkat provinsi dan kabupaten/kota. ▪ Implementasi penuh eco-standard dan circular economy pada usaha pariwisata di kawasan prioritas. ▪ Penetapan Skema Pariwisata Regeneratif sebagai standar lanjutan bagi pengelolaan destinasi. ▪ Konsolidasi kebijakan dan regulasi sebagai warisan tata kelola pariwisata Bali yang berkelanjutan untuk jangka panjang.
		▪ Penyusunan ulang narasi tunggal (Bali Branding)	▪ Kampanye intensif “Visit Bali 2027”	▪ Promosi aktif di pasar internasional melalui	▪ Penguatan dan promosi produk wisata unggulan	▪ Penetapan Bali sebagai Zona Wisata Berkelanjutan Bertaraf

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		berbasis budaya, spiritualitas, dan sustainability. ▪ Pemetaan segmen pasar utama dan pasar potensial domestik dan internasional (misalnya: wellness, spiritual tourism, digital nomads). ▪ Evaluasi dan harmonisasi program promosi antar-OPD, kabupaten/kota, dan stakeholder pariwisata. ▪ Digitalisasi basis data destinasi dan pelaku pariwisata melalui portal promosi terintegrasi berbasis bahasa multinasional. ▪ Pelatihan digital marketing, story telling budaya, dan promosi berbasis video untuk SDM pariwisata.	melalui media sosial, portal pariwisata nasional, dan kolaborasi dengan travel platform digital. ▪ Kemitraan promosi dengan influencer, content creator, dan diaspora Bali. ▪ Penguatan promosi di 10 kota besar Indonesia dan wilayah perbatasan untuk menarik wisatawan domestik. ▪ Penyelenggaraan event budaya digital seperti konser, virtual festival desa adat, dan live-stream upacara keagamaan. ▪ Penguatan kemitraan dengan maskapai, perhotelan, dan pelaku industri kreatif untuk promosi lintas sektor.	pameran wisata global, trade mission, dan diplomasi budaya (soft power Bali). ▪ Penunjukan Bali Tourism Ambassador untuk wilayah pasar utama (Asia, Eropa, Australia, dan Amerika). ▪ Peluncuran kampanye “Bali: World’s Spiritual & Cultural Destination” secara internasional. ▪ Kerja sama dengan lembaga internasional dan operator tur global untuk paket wisata tematik (heritage, eco-tourism, wellness). ▪ Kolaborasi dengan KBRI dan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) untuk menjadikan Bali sebagai ikon promosi Indonesia.	seperti desa wisata, pariwisata regeneratif, dan ekowisata. ▪ Pemanfaatan teknologi AI dan big data analytics untuk menyusun strategi promosi berbasis perilaku wisatawan. ▪ Peluncuran aplikasi mobile promosi wisata Bali dengan fitur augmented reality (AR) dan itinerary otomatis. ▪ Promosi berbasis testimoni wisatawan global dan penguatan citra Bali melalui review traveler. ▪ Integrasi promosi dengan produk ekspor budaya dan ekonomi kreatif Bali (tari, arsitektur, kuliner, fashion).	Global, sebagai daya tarik utama promosi. ▪ Inisiasi platform diplomasi wisata Bali dengan negara-negara mitra dan asosiasi pariwisata dunia. ▪ Penyusunan strategi jangka panjang pariwisata sebagai backbone ekonomi Bali berbasis data dan transformasi struktural. ▪ Evaluasi menyeluruh dampak promosi terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian budaya. ▪ Pelembagaan Bali Tourism Board independen sebagai lembaga promosi resmi lintas sektor.
Tujuan 4 : Meningkatkan Infrastruktur digital Berkualitas yang Inklusif di Seluruh Wilayah Provinsi Bali	Sasaran 1 : Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Efektif dan Efisien	Penyusunan dan penetapan Masterplan Smart Province	Penyusunan dan penetapan Roadmap Inovasi Smart Province Prangkat Daerah	Penyusunan Roadmap Inovasi Smart City Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Penguatan Smart Province	Sosialisasi dan Penguatan Smart Province
		Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi	Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi	Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi	Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi	Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi
		Perluasan cakupan Transmisi digital	Perluasan cakupan Transmisi digital	Perluasan cakupan Transmisi digital	Perluasan cakupan Transmisi digital	Perluasan cakupan Transmisi digital
		Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital)	Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital)	Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital)	Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital)	Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital)
		1. Penyelenggaraan Bali Digital Festival 2. Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali	1. Penyelenggaraan Bali Digital Festival 2. Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali	1. Penyelenggaraan Bali Digital Festival 2. Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali	1. Penyelenggaraan Bali Digital Festival 2. Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali	1. Penyelenggaraan Bali Digital Festival 2. Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
Tujuan 5 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi, terkoneksi, dan ramah lingkungan mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Sasaran 1 : Terwujudnya Transportasi yang Handal, Berkeselamatan, dan ramah lingkungan	1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran 2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan	1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran 2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan	1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran 2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan	1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran 2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan	1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran 2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan
		1. Studi Kelayakan dan Penetapan Trase 2. Penyiapan Dokumen Teknis berupa Detail Engineering Design (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan 3. Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan	1. Studi Kelayakan dan Penetapan Trase 2. Penyiapan Dokumen Teknis berupa Detail Engineering Design (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan 3. Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan	1. Studi Kelayakan dan Penetapan Trase 2. Penyiapan Dokumen Teknis berupa Detail Engineering Design (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan 3. Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan	1. Studi Kelayakan dan Penetapan Trase 2. Penyiapan Dokumen Teknis berupa Detail Engineering Design (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan 3. Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan	1. Studi Kelayakan dan Penetapan Trase 2. Penyiapan Dokumen Teknis berupa Detail Engineering Design (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan 3. Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan
		Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Pelabuhan Sangsit	Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU)	Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU)	Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU)	Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU)
		1. Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi 2. Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan	1. Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi 2. Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan	1. Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi 2. Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan	1. Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi 2. Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan	1. Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi 2. Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan
		- Penyusunan Rencana Induk Transportasi Rendah Emisi Provinsi Bali. - Pemetaan jalur dan	Pengembangan dan penataan jalur sepeda dan pejalan kaki yang aman dan ramah	Integrasi moda transportasi hijau (bus listrik, sepeda, angkutan sungai, kendaraan kecil listrik)	- Penerapan jaringan transportasi hijau lintas kabupaten/kota di Bali. - Replikasi dan perluasan	Penetapan Provinsi Bali sebagai Zona Transportasi Hijau dan Berkelanjutan berbasis regulasi nasional dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		kawasan prioritas untuk transportasi hijau (kawasan pariwisata, perkotaan, dan pusat keramaian). - Uji coba bus listrik dan kendaraan listrik (EV) untuk layanan transportasi publik di kota/kabupaten prioritas. - Penerapan kawasan bebas emisi terbatas di wilayah heritage atau pusat kota (low emission zone pilot). - Edukasi dan kampanye publik tentang transportasi ramah lingkungan dan gaya hidup rendah karbon.	difabel di kawasan perkotaan dan destinasi wisata. - Penyusunan Peraturan Gubernur tentang transportasi berkelanjutan dan insentif kendaraan listrik. - Pembangunan infrastruktur pengisian daya (EV charging station) di titik strategis (SPBU, terminal, kawasan wisata, dan kantor pemerintah). - Integrasi sistem manajemen transportasi berbasis digital (aplikasi informasi rute, waktu, dan moda ramah lingkungan). - Fasilitasi subsidi dan insentif pajak/retribusi bagi operator transportasi publik yang menggunakan armada listrik atau hibrida.	dalam sistem transportasi publik terjadwal. - Pengembangan hub transportasi terintegrasi (park-and-ride, intermoda) di kawasan urban dan pariwisata. - Perluasan zona kendaraan rendah emisi (Low Emission Zones) di kota-kota dan desa wisata. - Pelibatan sektor swasta dan BUMDes dalam pengoperasian kendaraan listrik skala desa/kampung (misalnya shuttle pariwisata lokal). - Evaluasi dan pemantauan emisi sektor transportasi secara sistematis dan berkala	penggunaan kendaraan listrik untuk ASN, sekolah, dan layanan publik. - Insentif untuk sektor logistik/ekspedisi yang menggunakan kendaraan rendah emisi. - Integrasi sistem pembayaran non-tunai dan tiket digital untuk semua moda transportasi publik. - Pengembangan dashboard digital provinsi untuk pengawasan kualitas udara dan performa sistem transportasi hijau.	lokal. - Penerapan skema carbon credit dan offset emisi untuk sektor transportasi. - Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Transportasi Hijau Provinsi Bali. - Promosi Bali sebagai model nasional/internasional sistem transportasi pariwisata hijau. - Evaluasi jangka panjang dampak transportasi hijau terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan lingkungan.
		Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan provinsi Bali.	Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan provinsi Bali.	Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan provinsi Bali.	Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan provinsi Bali.	Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan provinsi Bali.
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	- Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran - Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan - Pemantauan dan Evaluasi	- Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran - Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan - Pemantauan dan Evaluasi	- Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran - Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan - Pemantauan dan Evaluasi	- Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran - Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan - Pemantauan dan Evaluasi	- Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran - Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan - Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		Kinerja Penyelenggaraan Jalan	3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan	Kinerja Penyelenggaraan Jalan	Kinerja Penyelenggaraan Jalan	Jalan
		1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		1. Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman 2. Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangunan SPALD. 3. Penguatan kebijakan dan regulasi	1. Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman 2. Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangunan SPALD.	1. Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman 2. Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangunan SPALD.	1. Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman 2. Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangunan SPALD.	1. Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman 2. Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangunan SPALD.
		1. Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana 2. Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana. 3. Penetapan Skala Prioritas Penanganan 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan	1. Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana 2. Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana. 3. Penetapan Skala Prioritas Penanganan 4. Perencanaan dan	1. Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana 2. Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana. 3. Penetapan Skala Prioritas Penanganan 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan	1. Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana 2. Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana. 3. Penetapan Skala Prioritas Penanganan 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan	1. Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana 2. Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana. 3. Penetapan Skala Prioritas Penanganan 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
			Pelaksanaan Penanganan			
		Penguatan Fondasi Sistem 1. Audit dan integrasi awal sistem informasi eksisting. 2. Penyusunan road map transformasi digital infrastruktur PU. 3. Pengembangan standar data, meta data, dan interoperabilitas.	Pembangunan dan Pengujian Sistem Terintegrasi 1. Pembangunan platform sistem informasi terpadu berbasis cloud dan AI. 2. Uji coba terbatas pada beberapa proyek infrastruktur strategis. 3. Pelatihan teknis dan literasi digital bagi SDM terkait.	Implementasi Skala Nasional Tahap I 1. Implementasi sistem di seluruh instansi pusat dan sebagian daerah. 2. Integrasi dengan sistem perencanaan dan Pengawasan nasional (mis. <i>e-Planning, e-Monev</i>). 3. Optimalisasi dashboard analitik dan <i>early warning system</i>	Implementasi Skala Nasional Tahap II 1. Perluasan cakupan ke seluruh daerah dan proyek PU. 2. Evaluasi dan penyempurnaan fitur sistem berdasarkan masukan pengguna. 3. Penegakan regulasi dan kebijakan berbasis data digital.	Konsolidasi dan Optimalisasi Berkelanjutan 1. Pemantapan sistem informasi terintegrasi sebagai alat utama perencanaan dan pemeliharaan. 2. Integrasi dengan sistem smart city dan konektivitas antar sektor (transportasi, energi, dll). 3. Pengawasan capaian kinerja dan dampak terhadap efisiensi pembangunan infrastruktur
		Penataan Struktur dan Regulasi 1. Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan bidang infrastruktur. 2. Revisi atau penyusunan regulasi tata kelola yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas. 3. Penetapan indikator kinerja kelembagaan dan mekanisme pengawasan berbasis data	Penguatan Kapasitas SDM dan Sistem Pengelolaan 1. Pelatihan manajerial dan teknis bagi aparaturnya pelaksana infrastruktur. 2. Implementasi sistem manajemen proyek dan pengadaan berbasis digital. 3. Penyusunan pedoman operasional standar (SOP) yang adaptif dan responsif	Integrasi dan Harmonisasi Tata Kelola 1. Integrasi kebijakan dan program antar level pemerintahan (pusat-daerah). 2. Penyelarasan sistem pengendalian dan pelaporan berbasis akuntabilitas kinerja. 3. Pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan melibatkan pemangku kepentingan	Evaluasi dan Penguatan Mekanisme Adaptif 1. Review efektivitas kelembagaan dan tata kelola terhadap dinamika pembangunan. 2. Penyesuaian struktur kelembagaan untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan infrastruktur. 3. Pembentukan unit khusus inovasi dan respon cepat	Konsolidasi Tata Kelola Modern dan Berkelanjutan 1. Penguatan kelembagaan sebagai pusat keunggulan pembangunan infrastruktur. 2. Pengembangan kebijakan berbasis evidence (data dan hasil evaluasi). 3. Penetapan sistem insentif dan reward bagi kelembagaan berkinerja tinggi.
Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Bali Mandiri Energi Bersih	Sasaran 1 : Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan yang berkelanjutan	Melaksanakan pemantauan perlindungan pengamanan hutan	Menyelesaikan konflik tata batas kawasan hutan	Pengembangan kerja sama pemanfaatan kawasan hutan	Pengelolaan berkelanjutan dengan skema Hutan Desa	Pengelolaan berkelanjutan dengan skema Hutan Desa
		Melaksanakan koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan bersama tim terpadu penanganan kerusakan ekosistem Danau, Mata Air, Sungai dan Laut & Gunung	Identifikasi hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi	Memperluas implementasi rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan stakeholder	Melaksanakan Pengawasan evaluasi pelaksanaan RHL	Melaksanakan Pengawasan evaluasi pelaksanaan RHL
		Melaksanakan pemetaan berbagai potensi	Pembinaan pendampingan	Pengembangan objek wisata baru pada kawasan hutan	Melaksanakan promosi	Melaksanakan promosi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		pengembangan kawasan hutan	masyarakat lokal			
		Implementasi Surat Edaran Sekretaris Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2028 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan melaksanakan Tim Percepatan Penggunaan Plastik Sekali Pakai	Kampanye dan edukasi Gerakan Bali Bersih Sampah oleh seluruh elemen masyarakat	Pengembangan alternatif penggunaan tas dan wadah dari bahan lokal dan pengembangan bahan kemasan yang ramah lingkungan	Pengawasan dan evaluasi seluruh kantor, instansi, horeka dan pusat perbelanjaan	Penerapan sanksi di seluruh kantor, instansi, horeka dan pusat perbelanjaan
		Implementasi Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah dengan melaksanakan tugas Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang telah dibentuk	Melaksanakan sosialisasi, edukasi, workshop, pelatihan, pendampingan dan peraturan desa dalam pengelolaan sampah di Desa/Desa Adat/Kelurahan dan komunitas	Melengkapi sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah	Pemanfaatan sampah yang telah terpilah secara berkelanjutan	Evaluasi pelaksanaan kegiatan
	Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Berwawasan Lingkungan	Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali	Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali	Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Badung Provinsi Bali	Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Jembrana dan Tabanan Provinsi Bali	Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Gianyar, Klungkung dan Bangli Provinsi Bali
		Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB).	Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB).	Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB).	Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB).	Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB).
	Sasaran 3 : Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Berkelanjutan	▪ Mengkoordinasikan sekaligus mendorong pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar ramah lingkungan	▪ Terus mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap), untuk perkantoran,	▪ Menjadikan pasokan energi (Kabel Laut/SKLT) sebagai cadangan (reserve sharing) ▪ Mendorong pemanfaatan PLTS tersebar 25 MW ▪ Berkoordinasi dengan PLN	▪ Mengembangkan program transportasi berbasis energi bersih, seperti penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan	▪ Mengkoordinasikan konversi pembangkit listrik berbahan bakar fosil menjadi pembangkit listrik ramah lingkungan ▪ Mendorong pemanfaatan PLTS

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		- Berkoordinasi dengan PLN terhadap pembangunan PLTB 10 MW + BESS 7,5 MW - Berkoordinasi dengan PLN terkait dengan pembangunan PLTS Nusa Penida 4,5 MW + BESS 4,5 MW - Mendorong PLN untuk PLTS Bali tersebar 197,73 MW - Berkoordinasi dengan PLN terkait pemanfaatan POC Smart PVR 9 MW - Melakukan kaji ulang terhadap RUED dan RUKD	perumahan, hotel, pasar swalayan, dan penerangan jalan umum serta fasilitas umum - Mendorong pemanfaatan PLTS Tersebar 25 MW - Mendorong pemanfaatan PLTS oleh Kepco 3,5 MW - Mendorong PLTS Bali tersebar 193,66 MW - Menyusun RUED dan RUKD	terkait pembangunan PLTMH Tamblang 1,4 MW	infrastruktur serta pengelolaan limbah baterainya - Mendorong pemanfaatan PLTS Tersebar 25 MW - Berkoordinasi dengan PLN terkait penambahan pembangkit 200 MW *PLTMH Sidan 0,7 MW	Tersebar 25 MW Berkoordinasi dengan PLN terkait penambahan pembangkit 200 MW
		- Melaksanakan strategi untuk mendorong adopsi solar atap yang masif - Mendorong penggunaan PLTS Atap sebagai salah satu persyaratan dalam PBG baru - Pemasangan PLTS Atap sebesar 14.443 kWp - Berkoordinasi dengan PLN terkait pemanfaatan POC Smart PVR 9 MW	- Mendorong investasi pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Energi Baru Terbarukan - Sosialisasi dalam rangka peningkatan pemanfaatan PLTS Atap di Bali	Mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap), untuk perkantoran, perumahan, hotel, pasar swalayan, dan penerangan jalan umum serta fasilitas umum	Sosialisasi dalam rangka peningkatan pemanfaatan PLTS Atap di Bali	Mendorong masyarakat dalam penggunaan energi listrik secara efisien untuk berbagai kebutuhan rumah tangga dan industri guna mendukung penurunan emisi karbon
		- Mendorong penggunaan PLTS Atap sebagai salah satu persyaratan dalam PBG baru - Mendorong peningkatan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU penggunaan sepeda motor listrik	Mengembangkan program transportasi berbasis energi bersih, seperti penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan infrastruktur serta pengelolaan limbah baterainya	*Sertifikasi Desa Wisata Hijau, *Expo - Touring - Event - Festival dalam rangka Transisi Energi	Mendorong pemanfaatan lahan krisis di Bali untuk investasi pembangunan PLTS dan danau di Bali untuk PLTS Terapung	Mendorong pemanfaatan lahan krisis di Bali untuk investasi pembangunan PLTS dan danau di Bali untuk PLTS Terapung
		- Melaksanakan strategi untuk mendorong adopsi solar atap yang masif untuk segmen yang berbeda - Mendorong Rasio EBT 18,32%	- Optimalisasi PLTS skala utilitas dan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) yang sudah ada - Mendorong Rasio EBT	- Pengembangan kawasan untuk tanaman biomassa untuk pembangkit listrik biomassa - Mendorong Rasio EBT 23,29%	Pengakhiran Masa Kerja PLTD, Implementasi ET 100% dengan <i>load shifting</i> dan integrasi sistem penyimpanan energi (Energy Storage System - ESS)	- Pengakhiran Masa Kerja PLTD, Implementasi ET 100% dengan <i>load shifting</i> dan integrasi sistem penyimpanan energi (Energy Storage System - ESS) - Mendorong Rasio EBT 18,32%

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
			25,33%		ESS) ▪ Mendorong Rasio EBT 18,32%	
Tujuan 7 : Terwujudnya Stabilitas Keamanan Masyarakat, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Sasaran 1 : Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat	Menyusun dan menetapkan Regulasi Sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat Berbasis Digital	Membangun sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat Berbasis Digital	Pengembangan Sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat berbasis digital	Mengintegrasikan sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat Berbasis Digital	Terselenggaranya Bali <i>Trepti</i> (Tertib, Tenteram, Aman dan Nyaman)
		1. Menyusun dan menetapkan PKS (perjanjian kerja sama) lintas sektor dan antar daerah 2. Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan <i>stakeholder</i> terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah	1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mendukung pemantapan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian. 2. Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan <i>stakeholder</i> terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah	1. mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian. 2. Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan <i>stakeholder</i> terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah	1. Mengembangkan pelaksanaan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian. 2. Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan <i>stakeholder</i> terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah	1. Terselenggaranya pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian. 2. Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan <i>stakeholder</i> terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah
		1. membangun sinergi dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat 2. Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat.	1. Peningkatan kapasitas satuan pelindungan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat 2. Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk	1. Mengoptimalkan kapasitas Satuan pelindungan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat 2. Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan	1. Kolaborasi satuan pelindungan masyarakat dengan Pihak Terkait untuk meningkatkan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat 2. Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan	1. Terselenggaranya keamanan oleh Negara dan satuan pelindungan masyarakat sebagai unsur Sipandu Beradat 2. Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
			meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat.	Sipandu Beradat.	Sipandu Beradat.	
		1. Membangun sarana dan prasarana serta Menyiapkan SDM untuk mendukung penyelenggaraan keamanan berbasis digital (bidang 3) 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini	1. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung penyelenggaraan keamanan berbasis digital 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini	3. Mengintegrasikan serta mengkoneksikan seluruh perangkat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan berbasis digital 4. 2.Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini	5. Mengoptimalkan operasional layanan penyelenggaraan keamanan berbasis digital 7. 2.Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini	8. Terselenggaranya 9. sistem layanan Keamanan berbasis digital. 10.2.Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini
		Melaksanakan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali 1. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah. 2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda. 3. Penyusunan Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali 4. Pemutakhiran data Ormas yang sudah tercatat 5. Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat	Kolaborasi dengan pihak terkait dalam optimalisasi menumbuhkan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali 1. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah. 2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda. 3. Sosialisasi Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali 4. Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas yang sudah tercatat. 5. Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama	Optimalisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali 1. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah. 2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda. 3. Pelaksanaan Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali 4. Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas yang sudah tercatat. 5. Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali	Mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan berbagai media untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali 1. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah. 2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda. 3. Pelaksanaan Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali dengan melibatkan berbagai Stakeholder terkait. 4. Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas yang sudah tercatat 5. Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta	Terbangunnya kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali 1. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah. 2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda. 3. Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali 4. Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas yang sudah tercatat 5. Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		Ibadah di Provinsi Bali	serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali		mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali	
		Menyediakan layanan pengaduan masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan 1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem. 2. Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota	Mengintegrasikan layanan pengaduan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah bali melalui Command Centre Bali Trepti 1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem. 2. Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota	Membangun sinergitas Melalui perjanjian kerja sama lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan keamanan diseluruh wilayah bali 1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem. 2. Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota	Mengembangkan dan mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah bali 1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem. 2. Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan 1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem. 2. Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat	1. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak untuk perbaikan pelaksanaan PILKADA di masa depan 2. Melaksanakan pendidikan politik yang lebih masif dengan menyasar daerah dengan partisipasi rendah. 3. Meningkatkan peran Partai Politik dalam pendidikan politik bagi kader	1. Merencanakan pengembangan sistem informasi pendidikan politik yang mandiri dan bermanfaat 2. Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader	1. Pengembangan sistem informasi pendidikan politik yang terkait Substansi dan materi. 2. Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader	1. Pelaksanaan sistem informasi pendidikan politik yang mandiri, kredibel dan bermanfaat 2. Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader	1. Evaluasi penerapan sistem informasi pendidikan politik yang mandiri, kredibel dan bermanfaat 2. Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Terpadu	1. Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana 2. Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor,	1. Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana, 2. Kolaborasi penanggulangan	1. Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana, 2. Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor, 3. Pengembangan sistem	1. Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana, 2. Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor,	1. Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana, 2. Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor, 3. Pengembangan sistem

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		3. Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini, 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana	bencana multi sektor, 3. Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini, 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana	informasi kebencanaan dan peringatan dini, 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana	3. Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini, 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana	informasi kebencanaan dan peringatan dini, 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana
Tujuan 8 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Mengidentifikasi ASN berpotensi tinggi (<i>high-potential</i>) melalui penilaian berbasis merit	Peluncuran Program Pelatihan dan sertifikasi untuk ASN yang berpotensi tinggi	Melaksanakan Pelatihan dan sertifikasi untuk ASN berpotensi tinggi yang terpilih	Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan Pelatihan untuk ASN berpotensi tinggi yang dilaksanakan	Pengawasan dan pengembangan pelaksanaan Pelatihan untuk ASN berpotensi tinggi yang dilaksanakan
		Penyempurnaan konseptual, meliputi evaluasi sistem eksisting	Pengembangan dan Integrasi antar aplikasi terkait dengan sistem eksisting	Pemantauan, evaluasi dan pengembangan lanjutan	<i>Coaching clinic</i> , Pengawasan dan evaluasi serta penguatan <i>helpdesk</i> sistem evaluasi kinerja	<i>Coaching clinic</i> , Pengawasan dan evaluasi serta penguatan <i>helpdesk</i> sistem evaluasi kinerja
	Sasaran 2 : Meningkatnya Manajemen Sektor Publik	Pengolahan data penganggaran dan pelaksanaan sinkronisasi antara perencanaan dan evaluasi	Pengembangan dan integrasi dengan sistem eksisting	Pemantauan dan Pengawasan evaluasi pelaksanaan	Pengembangan dan Pengawasan serta Evaluasi lanjutan	Pengembangan dan Pengawasan serta Evaluasi lanjutan
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Pengumpulan dan Pengolahan Data yang akurat	Fokus pada Hasil Kinerja (berorientasi hasil)	Peninjauan Kembali dan Evaluasi	Transparansi dan Akuntabilitas	Transparansi dan Akuntabilitas
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	▪ Pemetaan dan integrasi seluruh layanan publik provinsi dan kabupaten/kota dalam satu peta jalan digitalisasi pelayanan publik. ▪ Audit dan konsolidasi sistem informasi OPD yang tumpang tindih atau belum terintegrasi. ▪ Penyusunan arsitektur sistem layanan digital terpadu (GovTech Bali). ▪ Penguatan infrastruktur jaringan, pusat data, dan	▪ Pengembangan dashboard layanan publik terpadu berbasis big data: pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kependudukan, izin, dan pajak. ▪ Penguatan data analytic unit di masing-masing OPD dengan pelatihan data science dasar. ▪ Uji coba penerapan AI sederhana untuk pemetaan kebutuhan layanan publik (misal	▪ Penerapan layanan publik otomatis berbasis AI dan machine learning (misalnya chatbot izin usaha, notifikasi layanan, klasifikasi aduan publik). ▪ Integrasi sistem pengambilan keputusan berbasis AI untuk sektor tertentu (misal prediksi kemiskinan, penyaluran bantuan, beban layanan rumah sakit). ▪ Pengembangan sistem AI deteksi kebutuhan darurat	▪ Implementasi model layanan publik presisi (precision public service) berdasarkan profil warga (umur, domisili, pekerjaan, kebutuhan layanan). ▪ Penguatan algoritma AI untuk pengambilan keputusan dalam sistem pelayanan adaptif (misal pengalokasian bantuan, pendidikan vokasi). ▪ Evaluasi berkala sistem berbasis feedback otomatis dari pengguna untuk	▪ Pelembagaan Smart Province Bali dengan standar keamanan, transparansi, dan etika AI. ▪ Pengembangan AI etis dan akuntabel dalam kebijakan publik melalui regulasi lokal dan sistem evaluasi risiko teknologi. ▪ Penetapan indeks layanan publik digital berbasis kepuasan pengguna dan efisiensi waktu-biaya. ▪ Transformasi layanan publik menjadi platform digital

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		keamanan siber. ▪ Pengembangan regulasi perlindungan data pribadi dan interoperabilitas layanan publik digital. ▪ Inisiasi basis data induk pelayanan publik (terhubung dengan NIK dan OSS daerah).	prediksi lonjakan permintaan layanan). ▪ Penerapan single sign-on (SSO) untuk akses seluruh layanan publik daring daerah. ▪ Pelatihan ASN dalam bidang big data governance, pengambilan keputusan berbasis data, dan AI publik.	atau respons cepat (misal analisis banjir, penyakit, kemacetan). ▪ Interoperabilitas sistem lintas sektor melalui API layanan publik daerah. ▪ Monitoring real-time layanan publik berbasis sistem sensor dan data spasial.	peningkatan layanan secara agile. ▪ Kolaborasi dengan startup dan universitas dalam inkubasi inovasi layanan publik digital dan AI.	terbuka dengan ekosistem partisipatif (masyarakat, desa adat, swasta). ▪ Integrasi sistem dengan smart city/smart regency di seluruh kabupaten/kota di Bali.
		▪ Pemetaan kapasitas ASN secara menyeluruh melalui assessment kompetensi dan indeks kinerja layanan publik. ▪ Penyusunan dan pelaksanaan kode etik pelayanan publik berbasis budaya kerja Bali (Sad Kerthi). ▪ Pelatihan dasar dan lanjutan tentang etika pelayanan publik, komunikasi empatik, dan anti-korupsi. ▪ Penerapan sistem absensi dan evaluasi kinerja berbasis integritas dan akuntabilitas. ▪ Peluncuran program internal “ASN Melayani dengan Hati” sebagai gerakan budaya kerja pelayanan prima.	▪ Penyesuaian kurikulum pelatihan teknis ASN berbasis kompetensi layanan dan inovasi publik. ▪ Penilaian kinerja ASN berdasarkan output layanan dan kepuasan masyarakat, bukan sekadar kehadiran. ▪ Implementasi pelatihan blended learning (daring-luring) berbasis kebutuhan aktual tiap OPD. ▪ Pembentukan fasilitator internal/mentor ASN teladan di tiap instansi untuk berbagi praktik baik layanan publik. ▪ Pelatihan manajemen keluhan dan penanganan cepat aduan masyarakat	▪ Penguatan sistem merit dalam rekrutmen, rotasi, dan promosi ASN secara transparan dan berbasis kinerja nyata. ▪ Penetapan standar kompetensi jabatan layanan publik berbasis digital dan customer experience. ▪ Peluncuran platform karier ASN Bali yang terbuka, informatif, dan akuntabel. ▪ Pengembangan talent pool ASN unggulan untuk kebutuhan pimpinan masa depan. ▪ Pelatihan kepemimpinan strategis bagi ASN muda untuk mendorong inovasi di lini pelayanan.	▪ Penerapan Indeks Profesionalisme ASN yang mengukur kinerja layanan berbasis data dan feedback masyarakat. ▪ Audit mutu layanan publik secara berkala (mystery shopper, survei kepuasan). ▪ Penyempurnaan digital dashboard monitoring kinerja layanan ASN lintas sektor dan instansi. ▪ Penguatan Sistem Penghargaan dan Disinsentif ASN berbasis kinerja layanan dan pengaduan masyarakat. ▪ Penegakan disiplin dan kode etik ASN secara tegas namun berkeadilan.	▪ Pelembagaan “Pusat Kompetensi dan Etika ASN Bali” sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. ▪ Adopsi standar global layanan publik prima (ISO, CAF) dalam manajemen ASN dan organisasi. ▪ Integrasi budaya kerja ASN ke dalam pembangunan karakter Bali era digital (Sad Kerthi Digital ASN). ▪ Penetapan Bali sebagai Provinsi Teladan Reformasi ASN Berbasis Pelayanan di tingkat nasional. ▪ Konsolidasi regulasi dan sistem untuk menjaga keberlanjutan profesionalisme aparatur dalam jangka panjang.
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	▪ Audit dan konsolidasi data sektoral dan spasial dari seluruh PD, termasuk integrasi dengan data BPS dan desa adat. ▪ Penguatan SDM perencanaan melalui pelatihan statistik	▪ Pelibatan aktif akademisi, komunitas, dan pelaku usaha dalam penilaian isu strategis pembangunan. ▪ Penguatan peran desa adat dan kecamatan	▪ Pengembangan model perencanaan tematik-spasial (misal: perencanaan kawasan agrowisata atau wilayah rawan bencana). ▪ Penyusunan template standar dokumen	▪ Pelaksanaan perencanaan terpadu lintas sektor berbasis dokumen tematik (pangan, stunting, infrastruktur hijau). ▪ Evaluasi pelibatan masyarakat dan pemangku	▪ Pelembagaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah Bali Terintegrasi (SIPD-Bali) berbasis spasial-statistik dan partisipatif. ▪ Revisi total kerangka perencanaan ke dalam format

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		pembangunan, analisis spasial, dan manajemen data. ▪ Pengembangan Forum Koordinasi Data Perencanaan Daerah lintas PD dan kabupaten/kota.	dalam menyampaikan isu lokal dan aspirasi dalam RKPD. ▪ Penetapan protokol koordinasi lintas sektor dan antar level pemerintahan dalam penyusunan dokumen perencanaan.	perencanaan yang terintegrasi dengan data dan indikator kinerja. ▪ Penilaian kualitas dokumen RKPD berdasarkan indikator komprehensifitas data, partisipasi, dan akurasi kebijakan.	kepentingan melalui. ▪ Implementasi rapat koordinasi tahunan perencanaan terintegrasi Provinsi-Kabupaten/Kota berbasis kinerja. ▪ Integrasi evaluasi kinerja dokumen perencanaan dengan insentif fiskal berbasis capaian RPJMD.	berbasis hasil, risiko, dan keberlanjutan. ▪ Penetapan standar nasional/percontohan Bali sebagai provinsi dengan praktik terbaik perencanaan inklusif dan berbasis data. ▪ Penyusunan dokumen perencanaan berbasis data, foresight, dan partisipasi lintas generasi. ▪ Konsolidasi regulasi dan kelembagaan perencanaan untuk kesinambungan sistem lintas periode pemerintahan.
	Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum	▪ Identifikasi dan evaluasi regulasi daerah yang tumpang tindih, tidak implementatif, atau bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. ▪ Pembentukan Tim Harmonisasi dan Evaluasi Regulasi Daerah lintas perangkat daerah dan lembaga pendukung DPRD. ▪ Pelatihan teknis bagi perancang peraturan perundang-undangan tentang penyusunan naskah akademik, RIA, dan pemetaan regulasi. ▪ Penguatan mekanisme konsultasi publik dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah	▪ Penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) secara pilot pada Raperda strategis (misalnya perda tata ruang, investasi, pariwisata). ▪ Pengembangan Sistem Informasi Regulasi Daerah untuk menyimpan, meninjau, dan mengintegrasikan regulasi lintas sektor. ▪ Penguatan peran akademisi dan ahli hukum tata negara dalam penyusunan naskah akademik dan justifikasi regulasi. ▪ Penataan perencanaan program legislasi daerah (Prolegda) secara terbuka, berbasis urgensi dan keterhubungan dengan RPJMD/RKP. ▪ Penandatanganan pakta kerja sama eksekutif-	▪ Digitalisasi seluruh proses legislasi daerah mulai dari penyusunan, konsultasi publik, pembahasan hingga evaluasi efektivitas. ▪ Pengembangan indeks harmonisasi dan efektivitas regulasi daerah untuk mengukur kualitas implementasi. ▪ Pelibatan pelaku usaha, komunitas adat, dan organisasi masyarakat sipil dalam RIA untuk memastikan keterhubungan dengan kebutuhan riil. ▪ Implementasi mekanisme evaluasi pasca-regulasi (post legislative scrutiny) terhadap Perda eksisting. ▪ Penyesuaian regulasi daerah terhadap kebijakan nasional lingkungan hidup, dan pelayanan publik.	▪ Integrasi proses legislasi dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD-RKPD-Prolegda). ▪ Evaluasi regulasi berdasarkan dampaknya terhadap investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan sosial. ▪ Pengembangan dashboard pemantauan pelaksanaan Perda dan outputnya terhadap masyarakat dan dunia usaha. ▪ Penetapan mekanisme perencanaan regulasi berbasis hasil (outcome-based legal planning). ▪ Replikasi praktik baik dari kabupaten/kota lain terkait perencanaan regulasi dan koordinasi legislatif-eksekutif.	▪ Pelembagaan Unit Regulasi Adaptif Daerah di bawah Biro Hukum atau Bagian Hukum Provinsi/Kabupaten. ▪ Revisi menyeluruh terhadap regulasi prioritas berbasis evaluasi 5 tahunan dan foresight isu-isu masa depan. ▪ Konsolidasi regulasi tematik untuk menciptakan regulasi yang ramping, efisien, dan tidak saling bertentangan. ▪ Penetapan standar penyusunan dan harmonisasi regulasi daerah Provinsi Bali sebagai model nasional. ▪ Penyusunan dokumen Strategi Legislasi Daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
			legislatif untuk perencanaan regulasi berbasis sinergi dan evidence-based.			
		- Penyusunan Pedoman Audit Regulasi Daerah (ARD) sesuai kaidah evaluasi peraturan perundang-undangan. - Identifikasi awal regulasi daerah yang berdampak signifikan terhadap: - Investasi - Pelayanan publik - Lingkungan hidup - Ketahanan sosial-budaya - Pembentukan Tim Audit Regulasi Daerah lintas sektor melibatkan Biro Hukum, Bappeda, DPMPTSP, dan PD teknis. - Pelatihan SDM audit regulasi: analisis regulasi, harmonisasi, dan regulatory simplification. - Penetapan prioritas evaluasi Perda/Perkada berdasarkan urgensi dan dampaknya.	- Pelaksanaan Audit Regulasi Tahap I untuk bidang strategis seperti perizinan, investasi, dan tata ruang. - Pemetaan regulasi tumpang tindih secara horizontal dan vertikal (antar PD dan dengan kebijakan nasional). - Pembuatan Matriks Deregulasi yang berisi rekomendasi: - Dicabut - Direvisi - Diharmonisasi - Digabung - Pengembangan dashboard digital pemetaan regulasi (live map regulasi daerah). - Konsultasi publik awal dengan dunia usaha, desa adat, dan masyarakat sipil terkait hasil audit.	- Pencabutan atau revisi regulasi daerah hasil audit dengan dampak tinggi terhadap dunia usaha dan layanan dasar. - Integrasi hasil audit ke dalam penyusunan Prolegda berbasis harmonisasi dan simplifikasi. - Evaluasi ulang regulasi teknis (Perkada/Perbup) yang menjadi hambatan administratif pelayanan. - Penyusunan Laporan Kinerja Deregulasi Daerah secara publik dan transparan.	- Pelaksanaan audit lanjutan (Tahap II) untuk sektor layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur). - Evaluasi dampak deregulasi terhadap: - Waktu dan biaya layanan publik - Jumlah investasi yang masuk - Kepuasan masyarakat dan pelaku usaha - Penguatan peran Biro Hukum dan DPMPTSP sebagai simpul deregulasi berkelanjutan. - Integrasi indikator kualitas regulasi daerah ke dalam sistem evaluasi kinerja pembangunan. - Pemberian penghargaan bagi PD dan kabupaten/kota yang berhasil melakukan deregulasi berdampak tinggi.	- Pelebagaan Sistem Deregulasi Daerah Berbasis Risiko dan Dampak (risk & impact-based deregulation). - Penetapan Prosedur Evaluasi Reguler Perda/Perkada setiap 3–5 tahun berbasis siklus pembangunan daerah. - Integrasi regulasi daerah ke dalam sistem OSS dan smart regulation platform. - Penerbitan Laporan Deregulasi Provinsi Bali sebagai dokumen strategis tahunan yang terbuka untuk publik.
		- Pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM perancang peraturan perundang-undangan dan analisis kebijakan di daerah. - Penyusunan kurikulum pelatihan perancang regulasi dan analisis dampak regulasi (RIA) berbasis hukum tata negara dan prinsip good governance.	- Pelaksanaan sertifikasi teknis legislasi dan RIA bagi ASN di Biro Hukum, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat DPRD. - Pembentukan Tim Teknis Legislasi dan Evaluasi Peraturan lintas PD (legal drafter, analis kebijakan, ekonom, akademisi).	- Pelatihan lanjutan tentang: - Simulasi penyusunan Raperda lengkap dengan RIA dan public hearing - Kajian harmonisasi vertikal dan horizontal - Penilaian kelayakan regulasi dari sisi biaya-manfaat sosial - Penguatan peran SDM hukum dalam evaluasi dan deregulasi regulasi eksisting.	- Penilaian berkala atas kompetensi legislasi ASN, termasuk pembaruan kompetensi legal drafting dan RIA. - Implementasi evaluasi kinerja individu dan tim dalam proses legislasi berbasis output dan kualitas dokumen. - Integrasi sistem pembinaan, promosi, dan	- Pelebagaan Pusat Pembelajaran Legislasi dan Kebijakan Daerah berbasis kemitraan antara pemerintah dan perguruan tinggi. - Penetapan standar kompetensi SDM legislasi dan RIA sebagai acuan pengembangan karier fungsional.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	STRATEGI II (2027)	STRATEGI III (2028)	STRATEGI IV (2029)	STRATEGI V (2030)
		▪ Pelatihan teknis dasar: 1. Penyusunan naskah akademik dan Raperda 2. Prinsip konsistensi norma hukum dan asas pembentukan peraturan ▪ Penguatan etika legislasi dan nilai-nilai pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, partisipasi). ▪ Pembentukan jejaring perancang regulasi daerah antar provinsi dan kabupaten/kota.	▪ Peningkatan kapasitas penyusunan regulasi berbasis hasil evaluasi pembangunan (evidence-based legal drafting). ▪ Penguatan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari regulasi tidak sinkron atau tidak implementatif. ▪ Pengembangan modul daring dan aplikasi pelatihan legislasi interaktif.	▪ Kemitraan dengan fakultas hukum, lembaga riset, dan pusat studi kebijakan publik. ▪ Penyusunan prototipe kebijakan daerah inklusif dan partisipatif sebagai model praktik legislasi adaptif.	rotasi jabatan hukum berdasarkan spesialisasi legislasi. ▪ Penguatan forum diskusi lintas OPD dan DPRD untuk penguatan sinergi perumusan peraturan daerah. ▪ Penerbitan laporan kinerja kelembagaan legislasi daerah, termasuk capaian pelatihan dan kualitas regulasi.	
	Sasaran 6 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi	1. Pendataan Hasil Riset dan Inovasi yang akan dikerjasamakan dengan akademisi, industri dan pemerintah dalam pengembangan ekosistem inovasi 2. Fasilitasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal	1. Penyiapan Kerja Sama dengan akademisi, industri dan pemerintah dalam pengembangan ekosistem inovasi 2. Fasilitasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal	1. Implementasi kerja sama pengembangan inovasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah 2. Fasilitasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal	1. Pengawasan dan Evaluasi kerja sama pengembangan inovasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah 2. Fasilitasi dan Pengawasan serta Evaluasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal	1. Pengawasan dan Evaluasi serta Pengembangan kerja sama inovasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah 2. Fasilitasi serta Pengawasan dan Evaluasi Dampak KI bagi masyarakat
		Pendataan Kerja sama dengan PT dalam pengembangan riset dan inovasi	Penyempurnaan Pedoman Kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pengembangan riset dan inovasi	Implementasi Pelaksanaan Kerja sama dalam pengembangan riset dan inovasi	Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama dalam Pengembangan riset dan inovasi	Pengawasan dan Evaluasi dan Pengembangan Pelaksanaan Kerja sama dalam Pengembangan riset dan inovasi

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

4.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Bali tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.5.
Arah Kebijakan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

No (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan (3)
1	Misi 1 : Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala-Sakala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i> , yaitu: <i>Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi</i> , dan <i>Jagat Kerthi</i> .	▪ Menggali dan melestarikan warisan adiluhung budaya Bali. ▪ Memperkuat dan memajukan Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal. ▪ Mengembangkan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. ▪ Memperkuat Kelembagaan dan Tata Kelola Desa Adat ▪ Melestarikan pelaku kebudayaan Bali.
2	Misi 2 : Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi <i>Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan</i>	
3	Misi 3 : Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, membentuk keadaban kehidupan <i>Krama</i> Bali.	
4	Misi 4 : Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.	▪ Meningkatkan akses, jangkauan, pemerataan, dan keadilan layanan kesehatan ▪ Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ▪ Meningkatkan edukasi kesehatan tradisional kepada masyarakat ▪ Mempercepat layanan kesehatan tradisional ▪ Meningkatkan akses, perluasan, pemerataan, dan keadilan layanan pendidikan formal dan nonformal ▪ Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan ▪ Mengembangkan pendidikan karakter, jati diri, dan budi pekerti siswa sesuai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bali. ▪ Keberpihakan secara nyata dengan menyiapkan wahana/ekosistem untuk mengembangkan potensi generasi muda/milenial dan Gen-Z ▪ Menciptakan harapan dan kesempatan kerja bagi generasi muda/milenial dan Gen-Z ▪ Menyiapkan generasi muda/milenial dan Gen-Z untuk
5	Misi 5 : Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.	
6	Misi 6 : Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif,berkualitas, dan berdaya saing tinggi.	
7	Misi 7 : Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.	
8	Misi 8 : Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk <i>Widyalaya</i> dan <i>Pasraman</i> di Desa Adat.	

No (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan (3)
9	Misi 9 : Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali	berperan aktif sebagai pelaku utama penentu peradaban masa depan Bali ▪ Memajukan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. ▪ Meningkatkan pencapaian olahraga prestasi dalam event nasional dan internasional ▪ Mengembangkan olahraga sebagai bagian dari strategi pariwisata/pariwisata berbasis olahraga (sport tourism) ▪ Membantu fakir miskin, anak terlantar, dan kelompok difabel ▪ Memberi perlindungan tenaga kerja Krama Bali ▪ Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga kerja Krama Bali ▪ Meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan tenaga kerja Krama Bali ▪ Menurunkan tingkat kemiskinan dengan target angka kemiskinan ekstrem menjadi 0%
10	Misi 10 : Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional	
11	Misi 11 : Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan <i>Krama</i> Bali	
12	Misi 12 : Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan <i>Krama</i> Bali.	
13	Misi 13 : Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi <i>Kerthi</i> Bali	▪ Menuntaskan sistem pertanian organik ▪ Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian ▪ Mengendalikan alih fungsi lahan produktif dan menekan alih fungsi lahan sawah bukan peruntukannya ▪ Memberdayakan lahan tidak produktif/lahan tidur menjadi lahan produktif sesuai potensi alam dengan menerapkan teknologi tepat guna ▪ Melindungi dan memberdayakan wilayah kelautan dan perikanan ▪ Mempercepat hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan perikanan ▪ Meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk pendirian beberapa BUMD seperti BUMD Air, Pangan, Energi, dan Transportasi, serta BUMD lainnya
14	Misi 14 : Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan <i>Krama</i> Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.	

No	Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
15	Misi 15 : Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.	sesuai dengan kajian dan kebutuhan daerah. ▪ Mengidentifikasi dan mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif menjadi sumber pendapatan baru ▪ Memberikan Kepastian dan Keamanan Investasi Melalui Konsistensi Penegakan Regulasi
16	Misi 17 : Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.	▪ Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk UMKM dan Koperasi ▪ Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk UMKM dan Koperasi ▪ Menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai penopang utama perekonomian Bali ▪ Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali ▪ Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk Ekonomi Kreatif dan Digital ▪ Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital ▪ Menjadikan Ekonomi Kreatif dan Digital sebagai penopang utama perekonomian Bali ▪ Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk industri lokal Bali ▪ Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk industri lokal Bali ▪ Menjadikan produk industri lokal Bali sebagai penopang utama perekonomian Bali ▪ Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing pariwisata Bali ▪ Meningkatkan dan perluasan promosi pariwisata Bali ditingkat nasional dan internasional ▪ Menjadikan Pariwisata sebagai penopang perekonomian Bali
17	Misi 16 : Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital	▪ Membangun kebijakan Bali Pulau Digital dari hulu sampai hilir ▪ Mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan jangkauan wilayah dan kecepatan internet ▪ Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari

No	Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
		▪ Meningkatkan keterampilan digital masyarakat agar lebih siap mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari ▪ Memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali
18	Misi 18 : Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan	▪ Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan antar Kota/Kabupaten se-Bali ▪ Membangun infrastruktur jalan baru yang menghubungkan antar Kota/Kabupaten se-Bali ▪ Membangun/mengembangkan pelabuhan/dermaga Bali timur, Bali utara, Bali barat, dan Bali Selatan ▪ Mengembangkan kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ▪ Mengintegrasikan infrastruktur darat, laut, dan udara ▪ Membangun sarana transportasi ramah lingkungan yang menghubungkan wilayah padat penduduk dan pariwisata Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan ▪ Menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas wilayah padat penduduk, jalur pariwisata, dan Pusat perekonomian
19	Misi 19 : Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.	▪ Menjadikan Bali sebagai Pulau bebas sampah plastik sekali pakai ▪ Membudayakan pengelolaan sampah berbasis Desa/Desa Adat/Kelurahan dan komunitas ▪ Membudayakan perlindungan danau, mata air, sungai, dan laut secara Niskala – Sakala
20	Misi 20 : Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih	▪ Meningkatkan luasan hutan melalui penghijauan untuk meningkatkan kualitas udara Bali ▪ Mempercepat penurunan emisi karbon dalam rangka pencapaian <i>Net Zero Emission</i> (NZE) ▪ Melindungi dan merawat hutan di seluruh wilayah Bali ▪ Memberdayakan kawasan hutan sebagai destinasi ekowisata ▪ Mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih ▪ Menjadikan Bali bebas dari polusi untuk mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon/<i>Net Zero Emission</i> (NZE) ▪ Menjadikan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru

No (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan (3)
		Terbarukan (EBT) ▪ Melakukan upaya promosi investasi dan promosi dan potensi investasi daerah ▪ Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi investor daerah
21	Misi 21 : Memperkuat Penyelenggaraan Keamanan Bali Oleh Negara dan Masyarakat Dengan Sistem Keamanan Terpadu.	▪ Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh wilayah Bali ▪ Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian ▪ Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat
22	Misi 22 : Memantapkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, dan Bersih, serta Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Cepat, Pasti, dan Murah.	▪ Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan ▪ Membangun kesadaran masyarakat bertanggung jawab bersama menjaga keamanan Bali ▪ Mengintegrasikan penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah Bali ▪ Meningkatkan kesadaran politik generasi muda melalui program diskusi publik, seminar, dan simulasi pemilu di sekolah dan kampus. ▪ Meningkatkan manajemen pengurangan risiko bencana melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi multi sektor ▪ Memastikan sistem pengembangan karier ASN berbasis meritokrasi dan <i>talent pool</i>. ▪ Meningkatkan sistem evaluasi kinerja ASN berbasis <i>outcome</i> dan teknologi digital. ▪ Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis kinerja. ▪ Menerapkan e-Pengawasan dan e-Evaluasi untuk mengawasi efektivitas program pembangunan daerah. ▪ Meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

No	Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
		Daerah ▪ Mendorong inovasi teknologi AI dan <i>big data</i> dalam analisis serta pengelolaan layanan publik. ▪ Memastikan budaya kerja ASN yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. ▪ Penguatan kualitas dokumen perencanaan dengan memanfaatkan data sektoral, spasial, dan statistik daerah secara komprehensif ▪ Peningkatan partisipasi masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan desa adat dalam proses perencanaan pembangunan ▪ Penguatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota) dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan. ▪ Penyusunan regulasi daerah yang berbasis data, kajian akademik, dan analisis dampak regulasi (<i>regulatory impact assessment</i>/RIA). ▪ Peningkatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembentukan peraturan daerah. ▪ Pelaksanaan audit regulasi secara berkala untuk mengidentifikasi regulasi yang tumpang tindih, tidak efektif, atau tidak efisien. ▪ Peningkatan kapasitas aparatur dan perangkat hukum daerah dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik berbasis norma hukum dan prinsip <i>good governance</i>. ▪ Mengembangkan ekosistem inovasi yang mendukung kerja sama akademisi, industri, dan pemerintah ▪ Meningkatkan kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi dalam pengembangan riset dan inovasi

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

4.5. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur berdasarkan kinerja pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Pada tahun 2025, IKU dan IKD Pemerintah Provinsi Bali mengalami perubahan dengan telah tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 (induk), kinerja pemerintahan daerah diukur berdasarkan penetapan IKU dan IKD sesuai RPD Tahun 2024-2026 untuk implementasi tahun 2025, sedangkan dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 akan mengakomodir IKU dan IKD yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Persandingan antara IKU dalam RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 dengan IKU dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.6. Adapun IKU dan IKD Pemerintah Provinsi Bali sesuai Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 untuk implementasi tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8.

Tabel 4.6.

Persandingan IKU dalam RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 terhadap IKU dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025

RKPD SB Provinsi Bali Tahun 2025				Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025			
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025
1	Angka Kemiskinan	Persen	4,06	1	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	72,15 – 73,85
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,75 (5,25-6,25)	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,78
3	Angka Pengangguran	Persen	2,01	3	Angka Kemiskinan	Persen (%)	3,57-3,93
4	Indek Gini	Nilai	0,364	4	Indeks Pendidikan	Indeks	1,409
5	Laju Inflasi	Persen	3±1	5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,48
6	Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	55,33	6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	1,78-2,35
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	76,58	7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	5,50-6,00
8	Angka umur harapan hidup	Tahun	72,70	8	Gini Ratio	Indeks	0,343 – 0,347
9	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10	9	Indeks Ekonomi Biru	Indeks	64,00
10	Indeks Daya Saing Krama Bali	Nilai	64,887	10	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	76
11	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	68,47	11	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen (%)	7,77
12	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Nilai	71,93	12	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	76,19
13	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	13,26	13	Porsi EBT Dalam Bauran Energi Daerah	Persen (%)	3,3
14	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Persen	94,34	14	Indeks Risiko Bencana	Indeks	104
15	Persentase Energi Baru Terbarukan	Persen	10,65	15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	92,8
16	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	100	16	Indeks Demokrasi	Indeks	84,55
17	Persentase Desa Adat Mandiri	Persen	15,07	17	Opini BPK	Status	WTP

RKPD SB Provinsi Bali Tahun 2025				Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025			
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025
18	Indeks Pemajuan Tradisi	Persen	15,00				
19	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Nilai	66				
20	Indeks Provinsi Hijau	Nilai	67,57				
21	Indeks Infrastruktur	Nilai	76,27				
22	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	78,34				
23	Rasio Konektivitas Transportasi	Nilai	0,88				
24	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	82,07				
25	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Nilai	90,00				
26	Indeks demokrasi	Nilai	77,00				
27	Indeks resiko bencana	Nilai	111,69				
28	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	75				
29	Indeks Merit Sistem	Nilai	0,83				
30	Nilai AKIP	Nilai	81				
31	Opini BPK	Opini	WTP				
32	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	89				
33	Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	Nilai	83				
34	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	66,75				

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Tabel 4.7.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun
			2025
1	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	72,15 – 73,85
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,78
3	Angka Kemiskinan	Persen (%)	3,57-3,93
4	Indeks Pendidikan	Indeks	1,409
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,48
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	1,78-2,35
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	5,50-6,00
8	Gini Ratio	Indeks	0,343 – 0,347
9	Indeks Ekonomi Biru	Indeks	64,00
10	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	76
11	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen (%)	7,77
12	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	76,19
13	Porsi EBT Dalam Bauran Energi Daerah	Persen (%)	3,3
14	Indeks Risiko Bencana	Indeks	104
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	92,8
16	Indeks Demokrasi	Indeks	84,55
17	Opini BPK	Status	WTP

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Tabel 4.8.
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
(1)	(2)	(3)	(5)	(12)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	80,00	Distanpangan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	6,5	Distanpangan
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/Kapita/Tahun	1.260	
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	88,50	PUPRPerkim
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,25	DLHK
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	92	PUPRPerkim
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	73	DLHK
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	96,20	DLHK
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	14	DLHK
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	104	BPBD
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,64	BPBD
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,67	Disdukcapil
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,50-6,00	Bappeda
2	PDRB per kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	71.021,25 - 71.357,843	Bappeda

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
3	Indeks Gini	Persen	0,343-0,347	Bappeda
4	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	Persen	3,57 - 3,93	Bappeda
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	78,78	Bappeda
6	Angka Melek Huruf	Persen	99,93	Disdikpora
7	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9,73	Disdikpora
8	Angka usia harapan hidup	tahun	73,49	Dinas Kesehatan
9	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,09	Dinas Kesehatan
10	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	1,5	Dinas Kesehatan
11	Angka partisipasi angkatan kerja	Jumlah	2.755.954	DisnakerESDM
12	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	1,78-2,35	DisnakerESDM
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85.6	Biro Organisasi
14	Opini BPK	Status	WTP	Inspektorat
15	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	92,36	Distanpangan
16	Penguatan cadangan pangan	Persen	20,00	Distanpangan
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	77,0	
18	Indeks Pembangunan Gender	Angka	95,40	
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	35	
20	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,235	
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Nilai Tukar Petani	Persen	100,00	Distanpangan
2	Angka kriminalitas	Kasus	80	BPS
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	21,50	DisPariwisata
4	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	13,45	Distanpangan
5	Angka Ketergantungan	Persen		Disdukcapil
6	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	6,30	Disperindag
7	Rasio Kewirausahaan	Persen	4,5	Diskop UKM
8	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	77,50	DisnakerESDM
9	Indeks Inovasi Daerah	Angka	69	BRIDA
10	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	55	
11	Indeks Ekonomi Biru	Angka	58	
12	Porsi Bauran EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	3,3	Disnaker ESDM
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	100	PUPRPerkim
14	Tingkat Inflasi	Persen	1,5-2,5 ±1	Bappeda
ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	64	
2	Indeks SPBE	Angka	4,15	Diskominfo
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	94,50	DPMPSTP
4	Persentase Penegakan Perda	Persen	100	Satpol PP
5	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,95	BRIDA
Layanan Urusan Wajib Dasar				

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
1	Pendidikan			
1.1	Angka Partisipasi Kasar			
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Persen	95,20	Disdikpora
1.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan			
1.2.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	32,73	Disdikpora
1.3	Angka Partisipasi Murni			
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	75,30	Disdikpora
1.4	Angka Partisipasi Sekolah			
1.4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	86,24	Disdikpora
1.5	Angka Putus Sekolah			
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen	0,06	Disdikpora
1.6	Angka Kelulusan			
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	100	Disdikpora
1.7	Angka Transisi (AT)			
1.7.1	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	Persen	95,91	Disdikpora
1.8	Fasilitas Pendidikan			
1.8.1	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	82,07	Disdikpora
1.9	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persen	18,25	Disdikpora
1.10	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah			Disdikpora
	- SMA/MA (per 1000 murid)	Persen	70,42	Disdikpora
	- SMK (per 1000 murid)	Persen	66,51	Disdikpora
1.11	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata			
1.11.1	SMA/SMK/MA	Persen	0,10	Disdikpora
1.12	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki- laki	Persen	99,93	Disdikpora
1.13	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	95,80	Disdikpora
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV			Disdikpora
1.14.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	Persen	95,83	Disdikpora
2	Kesehatan			
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	10,48	Dinas Kesehatan
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	12,08	Dinas Kesehatan
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	7,4	Dinas Kesehatan
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	98,02	Dinas Kesehatan
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Persen	2,6	Dinas Kesehatan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
2.6	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	Persen	0,027	Dinas Kesehatan
2.7	Rasio klinik	Persen	0,083	Dinas Kesehatan
2.8	Rasio Puskesmas Pembantu	Persen	0,117	Dinas Kesehatan
2.9	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persen	0,019	Dinas Kesehatan
2.10	Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 pddk	0,96	Dinas Kesehatan
2.11	Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	/1000 pddk	2,92	Dinas Kesehatan
2.12	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	/1000 pddk	1,28	Dinas Kesehatan
2.13	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	Persen	91,50	Dinas Kesehatan
2.14	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	91	Dinas Kesehatan
2.15	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	99	Dinas Kesehatan
2.16	Cakupan Penemuan kasus TBC / Treatment Coverage (TC)	Persen	90%	Dinas Kesehatan
2.17	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	Persen	90%	Dinas Kesehatan
2.18	Penurunan angka kematian Dengue	Persen	0,50%	Dinas Kesehatan
2.19	Kab/kota yg melaksanakan Pencegahan Dengue	persen	40%	Dinas Kesehatan
2.20	Pemberian oralit dan zinc pada kasus anak balita dengan diare	Persen	85%	Dinas Kesehatan
2.21	Angka kematian Malaria	Persen	0	Dinas Kesehatan
2.22	Annual Parasite Incidence (API)	/1000 penduduk	<1/1.000 pddk	Dinas Kesehatan
2.23	Odhiv baru yg ditemukan yg mendapat pengobatan ART	Persen	90%	Dinas Kesehatan
2.24	Cakupan Puskesmas	Persen	2,12	Dinas Kesehatan
2.25	Cakupan puskesmas pembantu	Persen	0,816	Dinas Kesehatan
2.26	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	90,50%	Dinas Kesehatan
2.27	Cakupan Pelayanan nifas	Persen	90	Dinas Kesehatan
2.28	Cakupan pelayanan anak balita yang dilayani SDIDTK	Persen	92,5	Dinas Kesehatan
2.29	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persen	93,5	Dinas Kesehatan
2.30	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	99,9	Dinas Kesehatan
2.31	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	Persen	100	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam	Persen	82,04	PUPR

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
	kondisi baik			
3.2	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Persen	48,74	PUPR
3.4	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	82,65	PUPR
3.5	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	Persen	76	PUPR
3.6	Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat	Persen	7,21	PUPR
3.7	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	Persen	100	PUPR
3.8	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	Persen	100	PUPR
3.9	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota	Persen	44	PUPR
3.10.1	Persentase cakupan layanan Air Minum Aman	Persen	35	PUPR
3.10.2	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Persen	92	PUPR
3.11	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	Persen	94,34	PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
4,5	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Persen	100	PUPR
4,6	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persen	6,96	PUPR
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	35.5	Satpol PP
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	Satpol PP
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	48.8	Satpol PP
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	46.88	Satpol PP
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100	Satpol PP
6	Sosial			
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	21.30%	DSP3A
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	1.22	DSP3A
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan	Persen	1.42	DSP3A

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
	kebutuhan dasar			
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	14.89	DSP3A
6.5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	N/A	DSP3A
6.6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	DSP3A
6.7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	DSP3A
6.8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	6.19	DSP3A
Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	Tenaga Kerja			
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per 1000 Perusahaan	0.000: 1000 perusahaan	DisnakerESDM
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	100	DisnakerESDM
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	72	DisnakerESDM
1.4	Keselamatan dan perlindungan	Persen	2.79	DisnakerESDM
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	53.39	DisnakerESDM
1.6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persen	2.79	DisnakerESDM
1.7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Persen	100	DisnakerESDM
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	23.53	DisnakerESDM
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	100	DisnakerESDM
1:10	Rasio lulusan S1/S2/S3	Per 10.000 Penduduk	30	DisnakerESDM
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	53.56	DSP3A
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	18.18	DSP3A
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	50.36	DSP3A
2.4	Rasio KDRT	Persen	0.00028	DSP3A
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	70.5	DSP3A

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	DSP3A
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	DSP3A
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	DSP3A
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	DSP3A
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	DSP3A
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	DSP3A
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	DSP3A
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	99.04	DSP3A
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	104.09	DSP3A
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	100.6	DSP3A
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persen	105.54	DSP3A
2.17	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	97.17	DSP3A
3	Pangan			
3.1	Ketersediaan Pangan Utama			
3.1.1	Padi	Ton	458.936	Distanpangan
3.1.2	Jagung	Ton	46.000	Distanpangan
3.1.3	Kedelai	Ton	2.759	Distanpangan
3.1.4	Kacang Tanah	Ton	3.311	Distanpangan
3.1.5	Ubi Kayu	Ton	30.233	Distanpangan
3.1.6	Kacang Hijau	Ton	2611	Distanpangan

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
3.1.7	Ubi Jalar	Ton	25.674	Distanpangan
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/ Kap/ Hari	2.410	Distanpangan
		Gram/ Kap/ Hari	63,00	Distanpangan
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	70,00	Distanpangan
4	Pertanahan			
4.1	Persentase data informasi pertanahan yang handal	Persen		PUPR
5	Lingkungan Hidup			
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	DKLH
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	DKLH
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	DKLH
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	DKLH
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/ tidak ada	Tidak ada	DKLH
5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	80,34	DKLH
5.7	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	73,20	DKLH
5.8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	63,07	DKLH
5.9	Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	86,16	DKLH
5.10	Laporan Inventarisasi GRK	Ada/ tidak ada	Ada	DKLH
5.11	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Jumlah		DKLH
5.12	Jumlah limbah B3 yag dikelola	Ton/ tahun	28.621,63	DKLH
5.13	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Jumlah	6	DKLH
5.14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	60	DKLH
5.15	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	Orang	0	DKLH
5.16	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah	1493	DKLH
5.17	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Jumlah	0	DKLH
5.18	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah	0	DKLH
5.19	Penetapan hak MHA	Jumlah	1493	DKLH
5.20	Terfasilitasi kegiatan	Persen	0	DKLH

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
	peningkatan pengetahuan dan keterampilan			
5.21	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	90	DKLH
5.22	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/tidak ada	Ada	DKLH
5.23	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Persen	100	DKLH
5.24	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Ada/tidak ada	Ada	DKLH
5.25	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Persen	70	DKLH
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
6.1	Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk	Persen	99,05%	DPMD DUKCAPIL
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	99,60%	DPMD DUKCAPIL
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	62,00%	DPMD DUKCAPIL
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	Tidak	DPMD DUKCAPIL
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	DPMD DUKCAPIL
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	99,60%	DPMD DUKCAPIL
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	55%	DPMD DUKCAPIL
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	96,23	DPMD DUKCAPIL
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	Persen	39,8	DPMD DUKCAPIL
7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persen	24,27	DPMD DUKCAPIL
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	Persen	100	DPMD DUKCAPIL
7.5	Persentase Posyandu aktif	Persen	78,4	DPMD DUKCAPIL
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	337,25	DPMD DUKCAPIL
7.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	99,69	DPMD DUKCAPIL

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,67	DPMD DUKCAPIL
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,05	DPMD DUKCAPIL
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	100	DPMD DUKCAPIL
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	100	DPMD DUKCAPIL
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	1	DPMD DUKCAPIL
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	4	DPMD DUKCAPIL
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	3	DPMD DUKCAPIL
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	2,05	DPMD DUKCAPIL
8.9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	63,6	DPMD DUKCAPIL
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persen	19,5	DPMD DUKCAPIL
8.11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	10,3	DPMD DUKCAPIL
8.12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	50,3	DPMD DUKCAPIL
8.13	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	13	DPMD DUKCAPIL
8.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	63,00	DPMD DUKCAPIL
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	73,1	DPMD DUKCAPIL
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	83,9	DPMD DUKCAPIL

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
8.17	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	83,5	DPMD DUKCAPIL
8.18	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	100	DPMD DUKCAPIL
8.19	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	DPMD DUKCAPIL
8.20	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	71,6	DPMD DUKCAPIL
8.21	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1	DPMD DUKCAPIL
8.22	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	DPMD DUKCAPIL
8.23	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100	DPMD DUKCAPIL
8.24	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	22,7	DPMD DUKCAPIL
9	Perhubungan			
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum			Dishub
9.1.1	Angkutan Darat	Jumlah	1.912.670	Dishub
9.1.2	Angkutan Laut	Jumlah	26.582.764	Dishub
9.1.3	Angkutan Udara	Jumlah		Dishub
9.2	Jumlah ijin trayek	Jumlah	197	Dishub
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	111	Dishub
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis			
9.4.1	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	37	Dishub
9.4.2	Jumlah Bandara	Jumlah	1	Dishub
9.4.3	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	20	Dishub
9.5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	3	Dishub
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	43.74	Dishub
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	627,18	Dishub
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum			
9.9.1	Angkutan Darat			
	- Orang	Jumlah	1.912.670	Dishub
	- Barang	Jumlah	200.626	Dishub
9.9.2	Angkutan Laut			
	- Orang	Jumlah	26.582.764	Dishub
	- Barang	Jumlah	3.661.710	Dishub
9.9.3	Angkutan Udara			
	- Orang	Jumlah		Dishub
	- Barang	Jumlah		Dishub
9.10	Jumlah orang/ barang melalui			

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
	dermaga/bandara/terminal per tahun			
9.10.1	Dermaga			
	- Orang	Jumlah	26.582.764	Dishub
	- Barang	Jumlah	3.661.710	Dishub
9.10.2	Bandara			
	- Orang	Jumlah		Dishub
	- Barang	Jumlah		Dishub
9.10.3	Terminal			
	- Orang / Barang	Jumlah	1912670/200626	Dishub
10	Komunikasi dan Informatika			
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	KIM	120	Diskominfo
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	100	Diskominfo
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telepon			
10.3.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	Persen	97,92	Diskominfo
10.3.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	Persen	1,8	Diskominfo
10.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	Persen	95,97	Diskominfo
10.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	26,53	Diskominfo
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	68,60	Koperasi UKM
11.2	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	0,20	Koperasi UKM
11.3	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	4,76	Koperasi UKM
	Penanaman Modal			
12	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	6.000	DPMPSTP
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Triliun)	13,25	DPMPSTP
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	5,00%	DPMPSTP
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Persen	17,25%	DPMPSTP
12.5	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	89	DPMPSTP
13	Kepemudaan dan Olah Raga			
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	81,41	Disdikpora
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persen	28,14	Disdikpora
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	63,57	Disdikpora
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	51,08	Disdikpora
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persen	17,17	Disdikpora
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	231	Disdikpora

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Cabor	39	Disdikpora
14	Statistik			
14.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Jumlah	9	Diskominfos
14.2	Buku "PDRB"	Jumlah	1	Diskominfos
15	Persandian			
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100	Diskominfos
16	Kebudayaan			
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	6	DisBud
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			DisBud
16.2.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	75	DisBud
16.2.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	2	DisBud
16.2.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	10	DisBud
16.2.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	0	DisBud
16.2.5	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	12	DisBud
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu			
16.3.1	Situs Cagar Budaya	Jumlah	29	DisBud
16.3.2	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	0	DisBud
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	18	DisBud
17	Perpustakaan			
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	10%	Biro Organisasi
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	114.900	Biro Organisasi
17.3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Jumlah	419	Biro Organisasi
17.4	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	54.150	Biro Organisasi
17.5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	100	Biro Organisasi
18	Kearsipan			
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	75%	Biro Umum
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	100%	Biro Umum
LAYANAN URUSAN PILIHAN				
1	Pariwisata			
1.1	Kunjungan Wisatawan			
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Orang	10 juta	DisPariwisata
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Orang	6 juta	DisPariwisata
1.2	Lama Tinggal Wisatawan			
1.2.1	Wisatawan Nusantara	hari	2	DisPariwisata
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	hari	3	DisPariwisata
1.3	PAD Sektor Pariwisata	Persen	20	DisPariwisata
2	Pertanian			
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar			
2.5.1	Padi	Ku/ Ha	61,99	Distanpangan
2.5.2	Jagung	Ku/ Ha	48,15	Distanpangan
2.5.3	Kedelai	Ku/ Ha	17,16	Distanpangan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen		Distanpangan
3	Kehutanan			
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persen	6,82	DKLH
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	0,00	DKLH
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen	73,71	DKLH
4	Energi dan Sumber Daya Mineral			
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	100	DisnakerESDM
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persen	1.43	DisnakerESDM
5	Perdagangan			
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Persen	74	Disperindag
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persen	21,56	Disperindag
6	Perindustrian			
6.1	Cakupan Bina Perajin	Persen	6,3	Disperindag
7	Transmigrasi			
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa	Persen	0	Disnaker ESDM
8	Kelautan dan Perikanan			
8.1	Produksi Perikanan	Ton	150.000	DKP
8.2	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/tahun	45	DKP
8.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	100	DKP
PENUNJANG URUSAN				
1	Perencanaan Pembangunan			
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Bappeda
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Bappeda
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Bappeda
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak		PUPR
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	90- 100	Bappeda
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	90- 100	Bappeda
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	90- 100	Bappeda
2	Kuangan			
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	BPKAD
2.2	Persentase SiLPA	Persen	6 %	BPKAD
2.3	Persentase SiLPA terhadap	Persen	6 %	BPKAD

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
	APBD			
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persen	0	BPKAD
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	20 %	BPKAD
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	10 %	BPKAD
2.7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah	582.188.016.684	BPKAD
2.8	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	BPKAD
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			
3.1	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	20	BKDPSDM
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	100%	BKDPSDM
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	100%	BKDPSDM
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	42	BKDPSDM
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Orang	7.921	BKDPSDM
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Orang	12.673	BKDPSDM
4	Penelitian dan Pengembangan			
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100%	Brida
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100%	Brida
	Penerapan SIDA:			Brida
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100%	Brida
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persen	100%	Brida
5	Pengawasan			
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100%	Inspektorat
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen		Inspektorat
5.3	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	-	Inspektorat
6	Sekretariat Dewan			
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat- Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/ Kota	Ada/Tidak	ada	Sekwan
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program- program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima	Ada/Tidak	ada	Sekwan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Perangkat Daerah
			2025	
	Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)			
6.3	Terintegrasi Program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	ada	Sekwan

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Secara menyeluruh, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025, maka disusun berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2025. Program-program diatas akan di *break down* ke dalam berbagai kegiatan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Perubahan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

		KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENCANA TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							1.235.382.318.916,00	2.055.664.893.457,00	2.066.630.413.479,00	831.248.094.563,00								1.266.183.278.020,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.198.804.783.616,00	1.967.787.362.425,00	1.981.907.902.179,00	783.103.118.563,00							1.224.533.278.020,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.198.804.783.616,00	1.967.787.362.425,00	1.981.907.902.179,00	783.103.118.563,00							1.224.533.278.020,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				81.75 Nilai	81.75 Nilai	938.587.442.860,00	1.336.384.678.703,00	1.339.185.266.202,00	53.861.796.320,00							992.449.239.180,00		
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu				8 Dokumen	8 Dokumen	319.106.000,00	319.855.900,00	193.750.900,00	-125.355.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	142.512.600,00	150.331.500,00	85.979.500,00	-56.533.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	176.593.400,00	169.524.400,00	107.771.400,00	-68.822.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu				59 Laporan	59 Laporan	923.691.458.800,00	1.319.237.313.513,00	1.322.423.300.012,00	398.731.841.212,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		975.290.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10680 Orang/ Bulan	10680 Orang/ Bulan	923.421.461.000,00	1.317.702.881.213,00	1.320.993.293.712,00	397.571.832.712,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TAMSI L GURU PNSD DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TUNJANGAN PROFESI GURU	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			975.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	60 Dokumen	109.997.800,00	1.284.575.800,00	1.284.575.800,00	1.174.578.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				60 Dokumen	60 Dokumen	160.000.000,00	249.856.500,00	145.430.500,00	-14.569.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah</i>				4 Jenis	4 Jenis	43.025.000,00	766.145.000,00	766.145.000,00	723.120.000,00			-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				3 Laporan	3 Laporan	43.025.000,00	766.145.000,00	766.145.000,00	723.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik</i>				100 Persen	100 Persen	43.713.400,00	68.193.400,00	68.193.400,00	24.480.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	43.713.400,00	68.193.400,00	68.193.400,00	24.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	1.402.331.400,00	1.449.194.510,00	1.189.900.510,00	-212.430.890,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		2.857.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				47 Paket	47 Paket	419.917.800,00	467.715.560,00	459.411.560,00	39.493.760,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	10.840.000,00	10.840.000,00	10.840.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	31.526.250,00	31.526.250,00	31.526.250,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	608.350.000,00	608.350.000,00	389.802.000,00	-218.548.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			675.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia				100 Persen	100 Persen	11.202.987.810,00	11.144.511.380,00	11.144.511.380,00	-58.476.430,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		11.369.239.180,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.033.492.150,00	978.222.150,00	978.222.150,00	-55.270.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.075.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.888.302.900,00	8.869.139.322,00	8.869.139.322,00	-19.163.578,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			8.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan				100 Persen	100 Persen	1.884.820.450,00	3.399.465.000,00	3.399.465.000,00	1.514.644.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		2.463.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				24 Unit	24 Unit	596.585.000,00	954.685.000,00	954.685.000,00	358.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			775.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	5 Unit	792.285.950,00	1.977.200.000,00	1.977.200.000,00	1.184.914.050,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				8 Unit	8 Unit	287.189.500,00	268.530.000,00	268.530.000,00	-18.659.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16 - 18 tahun				100 Persen	86.24 Persen	259.932.341.656,00	631.110.920.522,00	642.515.434.777,00	-28.358.302.816,00							231.574.038.840,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<i>Iklim Keamanan SMA Iklim Kebinekaan SMA Inklusivitas SMA Kemampuan Literasi SMA Kemampuan Numerasi SMA</i>				60.75 Nilai 75.00 Nilai 88.50 Indeks 93.50 Indeks 98.50 Indeks	64.71 Indeks 68.26 Nilai 75.75 Indeks 80.61 Nilai 86.19 Indeks	145.720.725.240,00	296.711.998.118,00	304.547.234.328,00	158.826.509.088,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Guru dan Peserta Didik SMA		146.480.703.700,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																		
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>				8 Unit	8 Unit	68.000.000.000,00	68.000.000.000,00	68.000.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			70.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			<i>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	1 Ruang	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			3.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>				-	10 Paket	4.497.000.000,00	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	-2.517.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>				-	5 Paket	0,00	382.366.000,00	382.366.000,00	382.366.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan,	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.900,00	85.899.900,00	76.299.900,00	-23.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	44.690.000,00	44.690.000,00	-5.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				14 Ruang	14 Ruang	5.503.000.000,00	8.871.116.400,00	8.871.116.400,00	3.368.116.400,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			7.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				900 Orang	900 Orang	104.996.800,00	104.996.800,00	86.942.800,00	-18.054.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar</i>				90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	12.083.933.000,00	12.027.637.000,00	10.919.377.000,00	-1.164.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			2.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklim Inklusivitas SMK Iklim Keamanan SMK Iklim Kebinekaan SMK Skor Kemampuan Literasi SMK Skor Kemampuan Numerasi SMK Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK</i>				56.85 Nilai 69.55 Nilai 79.50 Persen 85.50 Indeks 73.74 Indeks 90.85 Persen 93.00 Indeks 97.00 Indeks	62.48 Indeks 64.28 Nilai 72.12 Indeks 73.74 Indeks 76.59 Nilai 80.06 Persen 93.40 Persen	99.797.982.396,00	308.521.018.724,00	312.029.224.717,00	212.231.242.321,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Guru dan Peserta Didik SMK		73.758.917.220,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																		
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>				4 Unit	4 Unit	34.000.000.000,00	22.212.384.000,00	22.212.384.000,00	-11.787.616.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				4 Unit	4 Unit	2.300.000.000,00	11.150.616.000,00	11.150.616.000,00	8.850.616.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	3.450.000.000,00	3.914.925.900,00	3.914.925.900,00	464.925.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	32 Paket	0,00	47.370.185.000,00	47.370.185.000,00	47.370.185.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				360 Peserta didik	360 Peserta didik	7.920.000.000,00	5.393.781.500,00	5.338.581.500,00	-2.581.418.500,00	Kab. Buleleng, Kubutambahan, Kubutambahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			9.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				680 Peserta Didik	680 Peserta Didik	1.600.000.000,00	2.955.825.000,00	2.418.875.000,00	818.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1325 Orang	1325 Orang	35.848.916.696,00	20.272.868.244,00	20.272.868.244,00	-15.576.048.452,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			35.848.917.220,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	105.000.000,00	105.000.000,00	88.862.000,00	-16.138.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				172 Satuan Pendidikan	172 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	522.432.000,00	460.992.000,00	210.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				-	175 Satuan Pendidikan	0,00	180.529.850.000,00	184.860.785.993,00	184.860.785.993,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				172 Orang	172 Orang	100.000.000,00	64.000.000,00	45.760.000,00	-54.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	56.800.000,00	37.600.000,00	-62.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	112.160.000,00	68.960.000,00	-131.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				10 Ruang	10 Ruang	1.750.000.000,00	4.012.000.000,00	4.012.000.000,00	2.262.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	11.526.805.900,00	9.211.539.880,00	9.211.539.880,00	-2.315.266.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				900 Orang	900 Orang	104.996.800,00	104.628.200,00	86.574.200,00	-18.422.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus</i>				3 Laporan	3 Laporan	39.999.700,00	39.999.700,00	34.239.700,00	-5.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							36.577.535.300,00	87.877.531.032,00	84.722.511.300,00	48.144.976.000,00							41.650.000.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							36.577.535.300,00	87.877.531.032,00	84.722.511.300,00	48.144.976.000,00							41.650.000.000,00	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan				72 Persen	72 Persen	1.949.999.300,00	1.949.998.400,00	1.255.080.400,00	1.350.000.700,00							3.300.000.000,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah pemuda yang berprestasi</i>				91 Orang	91 Orang	1.949.999.300,00	1.949.998.400,00	1.255.080.400,00	-694.918.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Pemuda		3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			<i>Jumlah yang menerima penghargaan pemuda</i>				75 Orang	75 Orang	399.999.900,00	648.324.000,00	36.390.000,00	-363.609.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi																		
			<i>Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.900,00	199.999.900,00	148.051.900,00	-51.948.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi																		
			<i>Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda</i>				100 Persentase	100 Persentase	199.999.700,00	199.900.000,00	193.722.000,00	-6.277.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi																		
			<i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>				90 Orang	90 Orang	899.999.900,00	788.299.500,00	775.739.500,00	-124.260.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi																		
			<i>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</i>				90 Orang	90 Orang	249.999.900,00	113.475.000,00	101.177.000,00	-148.822.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	<i>Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan</i>				5 Kejuaraan	5 Kejuaraan	17.952.536.000,00	24.076.132.632,00	21.650.590.900,00	3.698.054.900,00			-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Atlet dan Tenaga Keolahragaan		26.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			<i>Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga</i>				250 Orang	250 Orang	10.000.000.000,00	15.823.596.500,00	13.526.517.500,00	3.526.517.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			12.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi																		
			<i>Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara</i>				5 Kegiatan	5 Kegiatan	7.952.536.000,00	8.252.536.132,00	8.124.073.400,00	171.537.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			14.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	<i>Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional</i>				180 Orang	180 Orang	175.000.000,00	351.400.000,00	316.840.000,00	141.840.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Atlet dan Tenaga Keolahragaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi																		
			<i>Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	351.400.000,00	316.840.000,00	141.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	<i>Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan</i>				59 Organisasi	59 Organisasi	15.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	45.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Organisasi Keolahragaan		9.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	45.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			9.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	<i>Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan</i>				53 Persen	53 Persen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00							2.000.000.000,00	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	<i>Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka</i>				53 Persen	53 Persen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Organisasi Kepramukaan		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi																		
			<i>Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi milenial	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.198.804.783.616,00	1.967.787.362.425,00	1.981.907.902.179,00	783.103.118.563,00							1.224.533.278.020,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.198.804.783.616,00	1.967.787.362.425,00	1.981.907.902.179,00	783.103.118.563,00							1.224.533.278.020,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				81.75 Nilai	81.75 Nilai	938.587.442.860,00	1.336.384.678.703,00	1.339.185.266.202,00	53.861.796.320,00							992.449.239.180,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.402.331.400,00	1.449.194.510,00	1.189.900.510,00	-212.430.890,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		2.857.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	141.096.750,00	140.162.500,00	140.162.500,00	-934.250,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.499.600,00	3.499.600,00	3.499.600,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			7.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	49.994.000,00	49.994.000,00	27.218.000,00	-22.776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia				100 Persen	100 Persen	11.202.987.810,00	11.144.511.380,00	11.144.511.380,00	-58.476.430,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		11.369.239.180,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	753.642.800,00	755.752.266,00	755.752.266,00	2.109.466,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			829.007.080,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan				100 Persen	100 Persen	1.884.820.450,00	3.399.465.000,00	3.399.465.000,00	1.514.644.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		2.463.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				91 Satuan Pendidikan	91 Satuan Pendidikan	562.961.000,00	562.961.000,00	545.681.000,00	-17.280.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			640.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK				58 Sekolah	58 Sekolah	99.797.982.396,00	308.521.018.724,00	312.029.224.717,00	212.231.242.321,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Guru dan Peserta Didik SMK		73.758.917.220,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				600 Orang	600 Orang	84.000.000,00	84.000.000,00	77.760.000,00	-6.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				10 Konten Digital	10 Konten Digital	45.186.000,00	40.386.000,00	13.950.000,00	-31.236.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				120 Orang	120 Orang	43.086.000,00	37.646.000,00	31.374.000,00	-11.712.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				59 Satuan Pendidikan	59 Satuan Pendidikan	369.991.000,00	369.991.000,00	354.631.000,00	-15.360.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN							1.235.382.318.916,00	2.055.664.893.457,00	2.066.630.413.479,00	831.248.094.563,00							1.266.183.278.020,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.198.804.783.616,00	1.967.787.362.425,00	1.981.907.902.179,00	783.103.118.563,00							1.224.533.278.020,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.198.804.783.616,00	1.967.787.362.425,00	1.981.907.902.179,00	783.103.118.563,00							1.224.533.278.020,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				81.75 Nilai	81.75 Nilai	938.587.442.860,00	1.336.384.678.703,00	1.339.185.266.202,00	53.861.796.320,00							992.449.239.180,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu				100 Persen	100 Persen	1.402.331.400,00	1.449.194.510,00	1.189.900.510,00	-212.430.890,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		2.857.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	<i>Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah</i>				1 Kurikulum	1 Kurikulum	80.000.000,00	87.100.800,00	60.376.800,00	-19.623.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Guru Bahasa Bali SMA/SMK		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			<i>Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya</i>				72 Orang	72 Orang	80.000.000,00	87.100.800,00	60.376.800,00	-19.623.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	<i>Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan</i>				1 Kurikulum	1 Kurikulum	40.000.000,00	39.663.300,00	27.365.300,00	-12.634.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Guru Bahasa Bali SLB		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		
			<i>Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya</i>				20 Orang	20 Orang	40.000.000,00	39.663.300,00	27.365.300,00	-12.634.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan				70.60 Nilai	70.60 Nilai	85.000.000,00	85.000.000,00	59.140.000,00	15.000.000,00							100.000.000,00	
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali</i>				87.30 Persen	87.30 Persen	85.000.000,00	85.000.000,00	59.140.000,00	-25.860.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi																		
			<i>Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi</i>				225 Peserta Didik	225 Peserta Didik	85.000.000,00	85.000.000,00	59.140.000,00	-25.860.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82,5 Nilai	82,5 Nilai	700.287.000.450,00	669.673.590.802,00	716.945.375.153,00	26.961.006.894,00							727.248.007.344,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu</i>				7 Dokumen	7 Dokumen	302.479.600,00	336.035.010,00	97.402.210,00	-205.077.390,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		302.479.700,00	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.546.833.440,00	5.894.558.346,00	5.894.558.346,00	-3.652.275.094,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			9.650.459.580,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	4.436.777.600,00	5.578.172.540,00	6.350.072.540,00	1.913.294.940,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		5.468.801.310,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				44 Unit	44 Unit	584.600.000,00	515.400.000,00	515.400.000,00	-69.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			584.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	78.929.500,00	81.769.500,00	81.769.500,00	2.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			84.190.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	879.602.000,00	893.602.000,00	759.602.000,00	-120.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			879.602.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Faskes yang Terakreditasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Desa UCI Cakupan Kepesertaan JKN				-	100 89 96 97 98,3 Persen Nilai Persen Persen Persen	31.663.771.517,00	110.015.978.059,00	113.857.203.159,00	31.919.741.616,00							63.583.513.133,00	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal				100 Persen	100 Persen	30.873.449.176,00	33.535.926.174,00	32.895.583.974,00	2.022.134.798,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Masyarakat		29.964.705.946,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				4380824 Orang	4380824 Orang	167.893.500,00	267.525.580,00	208.365.580,00	40.472.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			167.894.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				130000 Orang	130000 Orang	61.610.000,00	141.542.800,00	109.857.800,00	48.247.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			61.610.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	153.291.500,00	288.757.730,00	198.797.730,00	45.506.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			302.432.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	1 Dokumen	69.620.000,00	174.231.520,00	137.301.520,00	67.681.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			69.620.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	166.020.000,00	270.631.520,00	204.191.520,00	38.171.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			166.020.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	98.106.200,00	138.072.600,00	109.976.400,00	11.870.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			98.106.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	99.960.000,00	140.026.492,00	88.276.492,00	-11.683.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			109.956.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	3 Dokumen	1.422.335.136,00	2.536.062.498,00	2.434.272.498,00	1.011.937.362,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.172.335.136,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				-	1 Dokumen	0,00	53.127.000,00	53.127.000,00	53.127.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			53.123.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	85.600.000,00	-14.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			611.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 80% posyandu aktif</i>				77,78 Persen	77,78 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	21.125.000,00	-28.875.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Masyarakat		77.636.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	21.125.000,00	-28.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			77.636.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82,5 Nilai	82,5 Nilai	700.287.000.450,00	669.673.590.802,00	716.945.375.153,00	26.961.006.894,00							727.248.007.344,00	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP</i>				100 Persen	100 Persen	4.359.649.194,00	4.109.879.914,00	4.989.879.114,00	630.229.920,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		5.568.974.814,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	17.924.000,00	17.924.000,00	17.924.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			6.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	128.584.400,00	128.584.400,00	128.584.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			144.107.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	155.458.100,00	155.458.100,00	155.458.100,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			146.369.900,00	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	6.134.000,00	6.134.000,00	6.134.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			5.205.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			11.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP</i>				100 persen	100 persen	63.323.941.241,00	54.876.381.983,00	55.713.414.983,00	-7.610.526.258,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		64.294.433.685,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	363.900.000,00	363.900.000,00	363.900.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			363.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	3 Laporan	1.017.417.780,00	810.685.512,00	810.685.512,00	-206.732.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.017.417.780,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP</i>				100 Persen	100 Persen	4.436.777.600,00	5.578.172.540,00	6.350.072.540,00	1.913.294.940,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		5.468.801.310,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	2 Unit	39.175.000,00	39.175.000,00	39.175.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			39.175.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				7 Unit	42 Unit	93.420.000,00	56.520.000,00	56.520.000,00	-36.900.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			99.660.000,00	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas				82 Nilai	82 Nilai	304.956.078.983,00	304.956.078.983,00	347.931.078.983,00	42.975.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Seluruh lapisan masyarakat		325.370.489.183,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			2.914.410.200,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan				100 persen	100 persen	369.660.800,00	755.220.894,00	571.067.294,00	394.835.200,00							764.496.000,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peserta pelatihan yang lulus sesuai standar				100 persen	100 persen	305.862.800,00	553.772.434,00	394.172.834,00	88.310.034,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		700.698.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				150 Orang	150 Orang	121.273.000,00	369.183.034,00	295.385.034,00	174.112.034,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			121.286.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				-	82,5 Nilai	700.287.000.450,00	669.673.590.802,00	716.945.375.153,00	26.961.006.894,00							727.248.007.344,00	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP				-	100 Persen	4.359.649.194,00	4.109.879.914,00	4.989.879.114,00	630.229.920,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		5.568.974.814,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	83.201.920,00	82.895.200,00	82.895.200,00	-306.720,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				16 Paket	16 Paket	521.754.800,00	410.045.300,00	410.045.300,00	-111.709.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			521.754.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP</i>				100 persen	100 persen	63.323.941.241,00	54.876.381.983,00	55.713.414.983,00	-7.610.526.258,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		64.294.433.685,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	36 Laporan	644.000.000,00	644.000.000,00	644.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			644.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				62 Laporan	48 Laporan	1.331.252.340,00	1.102.835.086,00	1.102.835.086,00	-228.417.254,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.331.252.340,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP</i>				100 persen	100 persen	4.436.777.600,00	5.578.172.540,00	6.350.072.540,00	1.913.294.940,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		5.468.801.310,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	8 Unit	108.100.000,00	108.100.000,00	108.100.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			118.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				13 Unit	89 Unit	161.970.000,00	144.270.000,00	144.270.000,00	-17.700.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			162.370.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi milenial	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			93.000.000,00	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali				-	82 Nilai	304.956.078.983,00	304.956.078.983,00	347.931.078.983,00	42.975.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		325.370.489.183,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	6.956.078.983,00	6.956.078.983,00	6.956.078.983,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			6.956.078.983,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan				-	89 Nilai	31.663.771.517,00	110.015.978.059,00	113.857.203.159,00	31.919.741.616,00							63.583.513.133,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase tersedianya pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar				-	70 Persen	555.573.141,00	76.076.471.555,00	80.675.373.855,00	80.119.800.714,00			-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Seluruh lapisan masyarakat		33.051.031.287,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center																		
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan				1 Unit	1 Unit	177.120.000,00	292.517.120,00	195.077.120,00	17.957.120,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PAJAK ROKOK	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			178.410.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00					793.441.839.077,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82,5 Nilai	82,5 Nilai	700.287.000.450,00	669.673.590.802,00	716.945.375.153,00	26.961.006.894,00							727.248.007.344,00	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP				100 persen	100 persen	4.359.649.194,00	4.109.879.914,00	4.989.879.114,00	630.229.920,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		5.568.974.814,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.015.500,00	5.015.500,00	5.015.500,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	16 Paket	350.766.420,00	651.780.020,00	651.780.020,00	301.013.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			228.638.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	76.295.800,00	202.695.800,00	202.695.800,00	126.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			133.177.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	3 Paket	17.978.800,00	19.790.800,00	19.790.800,00	1.812.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			12.318.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	34.358.000,00	34.358.000,00	21.798.000,00	-12.560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			32.154.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP</i>				100 Persen	100 Persen	63.323.941.241,00	54.876.381.983,00	55.713.414.983,00	-7.610.526.258,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		64.294.433.685,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	98.500.000,00	98.500.000,00	98.500.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			96.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				13 Laporan	13 Laporan	1.996.793.400,00	988.375.510,00	988.375.510,00	-1.008.417.890,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.937.033.720,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP</i>				100 persen	100 persen	4.436.777.600,00	5.578.172.540,00	6.350.072.540,00	1.913.294.940,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		5.468.801.310,00	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</i>				1 Unit	1 Unit	2.496.147.680,00	1.794.227.018,00	1.742.387.018,00	-753.760.662,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.056.517.300,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD BALI MANDARA							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82,5 Nilai	82,5 Nilai	700.287.000.450,00	669.673.590.802,00	716.945.375.153,00	26.961.006.894,00							727.248.007.344,00	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP</i>				100 Persen	100 Persen	63.323.941.241,00	54.876.381.983,00	55.713.414.983,00	-7.610.526.258,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		64.294.433.685,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	32.937.846.599,00	30.686.107.309,00	30.686.107.309,00	-2.251.739.290,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			33.459.255.883,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara</i>				-	82 Nilai	304.956.078.983,00	304.956.078.983,00	347.931.078.983,00	42.975.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Seluruh lapisan masyarakat		325.370.489.183,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	180.000.000.000,00	180.000.000.000,00	200.000.000.000,00	20.000.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			180.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan				89 Nilai	89 Nilai	31.663.771.517,00	110.015.978.059,00	113.857.203.159,00	31.919.741.616,00							63.583.513.133,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Laporan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit</i>				1 Laporan	1 Laporan	555.573.141,00	76.076.471.555,00	80.675.373.855,00	80.119.800.714,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Masyarakat		33.051.031.287,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan</i>				-	3 Unit	0,00	45.978.212.000,00	45.978.212.000,00	45.978.212.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PAJAK ROKOK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi milenial	Kesehatan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.852.712.000,00	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				9 Paket	6 Paket	407.686.200,00	408.786.200,00	408.786.200,00	1.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			449.664.820,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	3 Paket	3.970.300,00	3.970.300,00	3.720.300,00	-250.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			4.367.330,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	-11.700.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			12.870.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	53.836.000,00	53.836.000,00	4.320.000,00	-49.516.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			59.219.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP</i>				-	100 Persen	961.984.000,00	906.126.200,00	2.495.972.100,00	1.533.988.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		4.296.738.820,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	111.984.000,00	56.126.200,00	56.126.200,00	-55.857.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			61.738.820,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			935.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP</i>				100 persen	100 persen	63.323.941.241,00	54.876.381.983,00	55.713.414.983,00	-7.610.526.258,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		64.294.433.685,00	DINAS KESEHATAN

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							6 Unit	6 Unit	489.000.000,00	492.000.000,00	492.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			541.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan				89 Nilai	89 Nilai	31.663.771.517,00	110.015.978.059,00	113.857.203.159,00	31.919.741.616,00							63.583.513.133,00		
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sediaan farmasi, bahan laboratorium, dan alkes yang diadakan				1 Laporan	1 Laporan	555.573.141,00	76.076.471.555,00	80.675.373.855,00	80.119.800.714,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		33.051.031.287,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	195.000.000,00	360.783.000,00	360.783.000,00	165.783.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			214.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	5 Paket	183.453.141,00	4.490.490.960,00	4.490.490.960,00	4.307.037.819,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			503.035.082,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi				9 Produk	9 Produk	30.873.449.176,00	33.535.926.174,00	32.895.583.974,00	2.022.134.798,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		29.964.705.946,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				9 Dokumen	2 Dokumen	899.950.800,00	1.178.775.794,00	1.023.669.794,00	123.718.994,00	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.308.529.470,00	DINAS KESEHATAN	
		RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA								732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00						793.441.839.077,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	700.287.000.450,00	669.673.590.802,00	716.945.375.153,00	26.961.006.894,00							727.248.007.344,00		
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.359.649.194,00	4.109.879.914,00	4.989.879.114,00	630.229.920,00			-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	-		5.568.974.814,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	4 Paket	0,00	0,00	992.955.200,00	992.955.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.051.178.000,00	DINAS KESEHATAN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				10 Laporan	1 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			13.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				10 Laporan	1 Laporan	11.520.000,00	11.520.000,00	5.760.000,00	-5.760.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			11.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>				1 Layanan	1 Layanan	640.950.900,00	666.018.500,00	662.507.600,00	21.556.700,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		652.100.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				65 Paket	65 Paket	70.166.700,00	70.010.800,00	70.010.800,00	-155.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			157.318.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	5 Unit	15.000.000,00	51.126.400,00	47.615.500,00	32.615.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							399.202.234.725,00	454.622.299.177,20	505.296.684.615,00	106.094.449.890,00							687.282.002.960,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							393.305.755.745,00	448.787.822.747,20	495.628.996.185,00	102.323.240.440,00							680.864.207.660,00	
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi</i>				1 Tahun	1 Tahun	1.263.933.080,00	1.263.649.240,00	1.263.649.240,00	-283.840,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		1.178.632.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							399.202.234.725,00	454.622.299.177,20	505.296.684.615,00	106.094.449.890,00							687.282.002.960,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							393.305.755.745,00	448.787.822.747,20	495.628.996.185,00	102.323.240.440,00							680.864.207.660,00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				-	1 Laporan	0,00	1.193.200,00	1.193.200,00	1.193.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			53.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi</i>				1 Tahun	1 Tahun	3.487.706.294,00	3.219.594.324,00	3.219.594.324,00	-268.111.970,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		3.846.935.855,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	6 Unit	345.582.800,00	329.075.880,00	329.075.880,00	-16.506.920,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			345.331.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	36 Unit	24.420.000,00	23.960.000,00	23.960.000,00	-460.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			24.420.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	407.836.840,00	349.521.050,00	349.521.050,00	-58.315.790,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			407.836.840,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat				-	25.9 Persen	4.393.185.138,00	4.300.654.522,00	4.037.764.522,00	-649.999.444,00							3.743.185.694,00		
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang- undangan jasa konstruksi				-	4 Kegiatan	3.475.207.078,00	3.392.672.300,00	3.218.334.300,00	-256.872.778,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		2.612.890.154,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				12 Paket Pekerjaan	12 Paket Pekerjaan	2.919.170.718,00	2.873.776.610,00	2.785.872.610,00	-133.298.108,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			2.019.170.718,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM							399.509.430.425,00	455.005.026.877,20	511.417.864.315,00	111.908.433.890,00						687.589.198.660,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							399.202.234.725,00	454.622.299.177,20	505.296.684.615,00	106.094.449.890,00							687.282.002.960,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							393.305.755.745,00	448.787.822.747,20	495.628.996.185,00	102.323.240.440,00							680.864.207.660,00		
1.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak				95.5 %	95.5 %	64.833.671.172,00	72.704.109.161,00	69.672.151.161,00	-24.608.671.172,00							40.225.000.000,00		
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan				5 Unit	5 Unit	64.833.671.172,00	72.704.109.161,00	69.672.151.161,00	4.838.479.989,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		40.225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																			
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara				5 Unit	5 Unit	41.803.049.560,00	41.269.710.452,00	38.269.710.452,00	-3.533.339.108,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			32.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH							399.509.430.425,00	455.005.026.877,20	511.417.864.315,00	111.908.433.890,00						687.589.198.660,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							399.202.234.725,00	454.622.299.177,20	505.296.684.615,00	106.094.449.890,00							687.282.002.960,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							393.305.755.745,00	448.787.822.747,20	495.628.996.185,00	102.323.240.440,00							680.864.207.660,00		
1.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah				100 %	100 %	18.333.565.712,00	17.877.409.952,00	19.862.329.952,00	-1.920.926.509,00							16.412.639.203,00		
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara				1 SPALD	1 SPALD	18.333.565.712,00	17.877.409.952,00	19.862.329.952,00	1.528.764.240,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		16.412.639.203,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	66.734.300,00	66.734.000,00	66.734.000,00	-300,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			85.009.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	16.260.000,00	15.816.000,00	15.816.000,00	-444.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			16.260.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	52.250.000,00	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			52.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	458.910.000,00	458.880.000,00	229.003.000,00	-229.907.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			464.820.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu				1 Layanan	1 Layanan	640.950.900,00	666.018.500,00	662.507.600,00	21.556.700,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		652.100.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	87.676.200,00	82.638.800,00	82.638.800,00	-5.037.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	468.108.000,00	462.242.500,00	462.242.500,00	-5.865.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			279.781.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu				4 Layanan	4 Layanan	1.263.933.080,00	1.263.649.240,00	1.263.649.240,00	-283.840,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		1.178.632.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.200.000,00	7.190.600,00	7.190.600,00	-9.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			3.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	436.600.000,00	436.600.000,00	436.600.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			562.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	50.000.000,00	49.770.000,00	49.770.000,00	-230.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	548.933.080,00	548.895.440,00	548.895.440,00	-37.640,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			377.932.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu				3 Layanan	3 Layanan	3.487.706.294,00	3.219.594.324,00	3.219.594.324,00	-268.111.970,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		3.846.935.855,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	1.564.610.700,00	1.568.132.460,00	1.568.132.460,00	3.521.760,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			1.564.610.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				119 Unit	119 Unit	205.846.420,00	192.696.230,00	192.696.230,00	-13.150.190,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			205.846.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	939.409.534,00	756.208.704,00	756.208.704,00	-183.200.830,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			1.298.890.795,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik				48.74 %	48.74 %	16.449.000.000,00	27.492.573.554,00	27.568.323.054,00	48.311.209.387,00							64.760.209.387,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani				6 Unit	6 Unit	7.107.030.120,00	6.774.201.220,00	12.603.641.220,00	5.496.611.100,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		44.734.252.392,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0 KM	0 KM	35.900.000,00	0,00	0,00	-35.900.000,00	Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			9.061.090.951,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.215 KM	0.215 KM	241.073.500,00	228.593.500,00	217.073.500,00	-24.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			2.697.183.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0,16 KM	0,16 KM	5.040.000.000,00	5.310.000.000,00	11.293.200.000,00	6.253.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			14.143.795.837,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	406.543.300,00	334.833.300,00	310.353.300,00	-96.190.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			3.304.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	46.088.400,00	0,00	0,00	-46.088.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			11.061.090.951,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	215.996.300,00	215.996.200,00	210.236.200,00	-5.760.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			461.090.953,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	1.121.428.620,00	684.778.220,00	572.778.220,00	-548.650.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			4.006.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya				14 D.I	14 D.I	9.341.969.880,00	20.718.372.334,00	14.964.681.834,00	5.622.711.954,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		20.025.956.995,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				1,3 KM	4,981 KM	3.769.601.620,00	15.177.630.830,00	9.575.918.330,00	5.806.316.710,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-LAYANAN DASAR	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			11.308.400.688,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Diooperasikan dan Dipelihara</i>				172.972 KM	172.972 KM	3.842.183.180,00	3.827.973.634,00	3.799.225.634,00	-42.957.546,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			5.359.424.371,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i>				7 Dokumen	9 Dokumen	1.730.185.080,00	1.712.767.870,00	1.589.537.870,00	-140.647.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUGASAN DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-LAYANAN DASAR	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			3.358.131.936,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak				95.5 %	95.5 %	64.833.671.172,00	72.704.109.161,00	69.672.151.161,00	-24.608.671.172,00							40.225.000.000,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya kapasitas layanan SPAM</i>				5 SPAM	5 SPAM	64.833.671.172,00	72.704.109.161,00	69.672.151.161,00	4.838.479.989,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		40.225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>				5 Dokumen	3 Dokumen	2.138.810.320,00	1.868.839.454,00	1.859.117.454,00	-279.692.866,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			1.679.199.232,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				15 Liter/Detik	15 Liter/Detik	20.891.811.292,00	29.565.559.255,00	29.543.323.255,00	8.651.511.963,00	Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-LAYANAN DASAR	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			6.395.800.768,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak				92 %	92 %	18.333.565.712,00	17.877.409.952,00	19.862.329.952,00	-1.920.926.509,00							16.412.639.203,00	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat				300 Rumah Tangga	300 Rumah Tangga	18.333.565.712,00	17.877.409.952,00	19.862.329.952,00	1.528.764.240,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		16.412.639.203,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun				300 Rumah Tangga M ² /Hari	300 Rumah Tangga M ² /Hari	3.182.090.552,00	3.182.090.552,00	3.167.010.552,00	-15.080.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			2.682.090.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	258.946.400,00	258.946.400,00	258.946.400,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan air minum layak				75 %	75 %	2.678.074.300,00	2.778.074.300,00	2.762.994.300,00	136.925.700,00							2.815.000.000,00	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional				285 SR	285 SR	2.678.074.300,00	2.778.074.300,00	2.762.994.300,00	84.920.000,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		2.815.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi				285 SR	285 SR	2.678.074.300,00	2.778.074.300,00	2.762.994.300,00	84.920.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			2.815.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik				76 %	76 %	171.691.924.300,00	126.606.924.300,00	164.638.342.300,00	111.402.022.500,00							283.093.946.800,00	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik				8 Kawasan	8 Kawasan	171.691.924.300,00	126.606.924.300,00	164.638.342.300,00	-7.053.582.000,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		283.093.946.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				8 Kawasan	5 Kawasan	169.498.313.100,00	126.219.455.800,00	158.161.555.800,00	-11.336.757.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			269.093.946.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				4 Dokumen	18 Dokumen	587.468.500,00	387.468.500,00	6.476.786.500,00	5.889.318.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan</i>				8 Dokumen	8 Dokumen	1.606.142.700,00	0,00	0,00	-1.606.142.700,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap				82.65 %	82.65 %	77.418.795.022,00	138.124.183.048,00	149.152.544.485,00	153.756.588.178,00							231.175.383.200,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	<i>Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap</i>				649,89 Km	649,89 Km	77.418.795.022,00	138.124.183.048,00	149.152.544.485,00	71.733.749.463,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		231.175.383.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi																		
			<i>Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi</i>				6,72 KM	0 KM	2.349.657.120,00	0,00	0,00	-2.349.657.120,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			7.625.724.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
			<i>Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya</i>				805,35 KM	805,35 KM	154.752.000,00	140.646.000,00	79.206.000,00	-75.546.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan																		
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				1,00 KM	1,921 KM	8.392.009.482,00	14.761.601.205,00	16.726.643.413,00	8.334.633.931,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			26.412.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dibangun				- KM	- KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			32.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				805.35 KM	805.35 KM	1.461.756.000,00	1.839.949.608,00	1.720.715.608,00	258.959.608,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-				-	-	4.393.185.138,00	4.300.654.522,00	4.037.764.522,00	-649.999.444,00							3.743.185.694,00	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-				-	-	917.978.060,00	907.982.222,00	819.430.222,00	-98.547.838,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		1.080.295.540,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				270 Orang	270 Orang	917.978.060,00	907.982.222,00	819.430.222,00	-98.547.838,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			1.080.295.540,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan rapat pembahasan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi				5 Kegiatan	5 Kegiatan	3.475.207.078,00	3.392.672.300,00	3.218.334.300,00	-256.872.778,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		2.612.890.154,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				15 Paket Pekerjaan	15 Paket Pekerjaan	258.126.460,00	241.619.540,00	191.515.540,00	-66.610.920,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			295.808.856,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	297.909.900,00	277.276.150,00	240.946.150,00	-56.963.750,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			297.910.580,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
8.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang				94.34 %	94.34 %	2.201.420.580,00	2.137.776.552,00	1.488.214.952,00	239.580.988,00							2.441.001.568,00		
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan				1 Perda	1 Perda	90.705.800,00	90.705.400,00	59.292.100,00	-31.413.700,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		284.226.141,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang																			
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				1 Publikasi	1 Publikasi	90.705.800,00	90.705.400,00	59.292.100,00	-31.413.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			284.226.141,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Raperda RTRW/RRTR Kabupaten/Kota yang dievaluasi				9 Dokumen	9 Dokumen	854.468.980,00	825.581.870,00	702.511.870,00	-151.957.110,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		607.629.933,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				9 Dokumen	9 Dokumen	854.468.980,00	825.581.870,00	702.511.870,00	-151.957.110,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			607.629.933,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	556.611.300,00	535.977.350,00	335.639.550,00	-220.971.750,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat			755.834.523,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																			
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Laporan	1 Laporan	391.100.600,00	370.466.750,00	296.306.950,00	-94.793.650,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			471.608.382,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																			
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	165.510.700,00	165.510.600,00	39.332.600,00	-126.178.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			284.226.141,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali				2 Dokumen	2 Dokumen	699.634.500,00	685.511.932,00	390.771.432,00	-308.863.068,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat			793.310.971,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan																			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				1 Dokumen	1 Dokumen	371.250.300,00	371.250.300,00	140.220.800,00	-231.029.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			359.179.038,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																			
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	328.384.200,00	314.261.632,00	250.550.632,00	-77.833.568,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			434.131.933,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							5.896.478.980,00	5.834.476.430,00	9.667.688.430,00	3.771.209.450,00							6.417.795.300,00		
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi				100 %	100 %	1.898.675.980,00	1.857.401.380,00	1.838.837.380,00	-175.965.380,00							1.722.710.600,00		
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan				1 Paket	1 Paket	320.824.400,00	300.183.450,00	281.619.450,00	-39.204.950,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		323.704.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																			
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	295.790.700,00	175.149.750,00	169.869.750,00	-125.920.950,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			297.230.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	25.033.700,00	125.033.700,00	111.749.700,00	86.716.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			26.473.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni kewenangan provinsi yang dibangun				1 Paket	1 Paket	1.577.851.580,00	1.557.217.930,00	1.557.217.930,00	-20.633.650,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat			1.399.006.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi																			
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	1.577.851.580,00	1.557.217.930,00	1.557.217.930,00	-20.633.650,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi				1.399.006.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh				4.89 %	4.89 %	2.605.998.300,00	2.605.998.300,00	6.523.090.300,00	455.761.700,00								3.061.760.000,00	
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi				6.77 %	6.77 %	2.605.998.300,00	2.605.998.300,00	6.523.090.300,00	3.917.092.000,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat			3.061.760.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																			
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				30 Unit Rumah	223 Unit Rumah	1.579.678.300,00	1.579.678.300,00	5.531.654.300,00	3.951.976.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi				1.582.560.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																			
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar				1.98 Ha	1.98 Ha	1.026.320.000,00	1.026.320.000,00	991.436.000,00	-34.884.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi				1.479.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU				71 %	71 %	1.391.804.700,00	1.371.076.750,00	1.305.760.750,00	241.520.000,00								1.633.324.700,00	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman				7.82 %	7.82 %	1.391.804.700,00	1.371.076.750,00	1.305.760.750,00	-86.043.950,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat			1.633.324.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman																			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	114.412.000,00	15.718.400,00	8.518.400,00	-105.893.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			131.612.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman																			
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				1 Lokasi	1 Lokasi	1.223.310.700,00	1.301.363.350,00	1.255.283.350,00	31.972.650,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			1.446.190.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	54.082.000,00	53.995.000,00	41.959.000,00	-12.123.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			55.522.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							307.195.700,00	382.727.700,00	6.121.179.700,00	5.813.984.000,00							307.195.700,00		
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							307.195.700,00	382.727.700,00	6.121.179.700,00	5.813.984.000,00							307.195.700,00		
1.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan				8.7 Ha	1.23 Ha	0,00	75.876.000,00	5.882.758.000,00	0,00							0,00		
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	75.876.000,00	5.882.758.000,00	5.882.758.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																			
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	75.876.000,00	5.882.758.000,00	5.882.758.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	86.847.700,00	86.847.700,00	31.221.700,00	-55.626.000,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		36.847.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.				1 Berita Acara	1 Berita Acara	86.847.700,00	86.847.700,00	31.221.700,00	-55.626.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			36.847.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
3.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase data informasi pertanahan yang handal				50 %	50 %	220.348.000,00	220.004.000,00	207.200.000,00	50.000.000,00							270.348.000,00		
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	220.348.000,00	220.004.000,00	207.200.000,00	-13.148.000,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		270.348.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	220.348.000,00	220.004.000,00	207.200.000,00	-13.148.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			270.348.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								53.379.955.947,00	58.799.817.568,00	57.071.537.968,00	3.691.582.021,00							59.141.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							53.379.955.947,00	58.799.817.568,00	57.071.537.968,00	3.691.582.021,00							59.141.000.000,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							53.379.955.947,00	58.799.817.568,00	57.071.537.968,00	3.691.582.021,00							59.141.000.000,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				83.6 Nilai	83.6 Nilai	26.257.062.410,00	30.227.937.233,00	30.165.536.233,00	-556.062.410,00							25.701.000.000,00		
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Dokumen	24 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	11 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	21.000.000.000,00	24.998.328.311,00	24.998.328.311,00	3.998.328.311,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		22.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	100 Orang/ Bulan	21.000.000.000,00	24.998.328.311,00	24.998.328.311,00	3.998.328.311,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				5 Jenis	5 Jenis	848.682.790,00	857.983.690,00	795.582.690,00	-53.100.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		395.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.380.900,00	40.706.800,00	40.706.800,00	325.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	9 Paket	552.061.600,00	551.436.600,00	551.436.600,00	-625.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	93.335.290,00	106.033.390,00	106.033.390,00	12.698.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	25.000.000,00	12.301.900,00	12.301.900,00	-12.698.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	137.905.000,00	147.505.000,00	85.104.000,00	-52.801.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah				1 Paket	1 Paket	103.985.300,00	103.985.300,00	103.985.300,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	2 Paket	103.985.300,00	103.985.300,00	103.985.300,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	1.172.744.000,00	1.140.116.342,00	1.140.116.342,00	-32.627.658,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.288.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.998.700,00	2.998.700,00	2.998.700,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			175.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	5 Laporan	48.720.000,00	48.720.000,00	48.720.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	956.025.300,00	923.397.642,00	923.397.642,00	-32.627.658,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.050.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>				-	12 Bulan	3.110.650.320,00	3.106.523.590,00	3.106.523.590,00	-4.126.730,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.875.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				48 Unit	49 Unit	2.845.650.320,00	2.841.523.590,00	2.841.523.590,00	-4.126.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	5 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	27.122.893.537,00	28.571.880.335,00	26.906.001.735,00	6.317.106.463,00							33.440.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</i>				170 Pelang garan	170 Pelang garan	25.034.747.517,00	26.350.233.577,00	25.171.533.677,00	136.786.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		31.050.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	77.681.740,00	73.554.610,00	58.998.610,00	-18.683.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat																		
			<i>Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				50 Orang	50 Orang	29.999.900,00	29.999.900,00	29.999.900,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia</i>				50 Unit	50 Unit	19.013.008.957,00	20.450.348.273,00	20.450.348.273,00	1.437.339.316,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			23.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	334.999.700,00	367.849.300,00	81.949.400,00	-253.050.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada</i>				2 Laporan	2 Laporan	19.993.200,00	19.993.200,00	19.993.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			<i>Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				2 Laporan	14 Laporan	107.681.840,00	103.555.110,00	103.555.110,00	-4.126.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			335.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</i>				36 laporan	36 laporan	5.092.335.760,00	4.955.245.872,00	4.207.317.872,00	-885.017.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia																		
			<i>Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja</i>				192 Orang	192 Orang	359.046.420,00	349.687.312,00	219.371.312,00	-139.675.108,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	<i>Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi</i>				195 Kasus	195 Kasus	2.088.146.020,00	2.221.646.758,00	1.734.468.058,00	-353.677.962,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Badan Hukum		2.390.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>				4 Laporan	4 Laporan	99.999.900,00	99.999.900,00	12.181.200,00	-87.818.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.688.146.340,00	1.742.662.038,00	1.419.622.038,00	-268.524.302,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PUNGUTAN BAGI WISATAWAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.980.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP</i>				4 Laporan	4 Laporan	299.999.780,00	378.984.820,00	302.664.820,00	2.665.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda</i>				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							35.472.000.000,00	36.640.929.623,00	34.480.653.947,00	-991.346.053,00							35.111.930.672,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							35.472.000.000,00	36.640.929.623,00	34.480.653.947,00	-991.346.053,00							35.111.930.672,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							35.472.000.000,00	36.640.929.623,00	34.480.653.947,00	-991.346.053,00							35.111.930.672,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPBD)				83.85 Persen	83.85 Persen	26.301.747.631,00	27.422.423.254,00	27.018.784.578,00	857.464.541,00							27.159.212.172,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun</i>				100 Persen	100 Persen	204.079.000,00	204.092.000,00	88.922.000,00	-115.157.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	Aparatur Pemerintah		325.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	3 Dokumen	97.050.000,00	97.051.000,00	34.621.000,00	-62.429.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			168.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	107.029.000,00	107.041.000,00	54.301.000,00	-52.728.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			157.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu</i>				100 Persen	100 Persen	14.321.714.887,00	15.676.945.478,00	15.676.945.478,00	1.355.230.591,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	Aparatur Pemerintah		14.834.756.225,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				80 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	14.321.714.887,00	15.676.945.478,00	15.676.945.478,00	1.355.230.591,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			14.834.756.225,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah				1 Paket	1 Paket	172.000.000,00	168.104.200,00	73.504.200,00	-98.495.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	Aparatur Pemerintah		300.825.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	172.000.000,00	168.104.200,00	73.504.200,00	-98.495.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			300.825.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu				100 Persen	100 Persen	683.247.224,00	721.099.724,00	486.428.724,00	-196.818.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	Aparatur Pemerintah		807.450.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.984.800,00	9.982.800,00	9.982.800,00	-2.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			10.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	112.712.800,00	116.047.800,00	116.047.800,00	3.335.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			47.250.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	86.229.424,00	86.229.424,00	86.229.424,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			78.750.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.131.100,00	20.258.600,00	20.258.600,00	127.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			10.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			25.200.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana</i>				160 Orang	145 Orang	496.545.600,00	490.898.900,00	380.257.800,00	-116.287.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			281.060.850,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran</i>				9 Kabupate n/Kota	9 Kabupate n/Kota	1.214.251.200,00	1.214.183.200,00	1.000.069.200,00	-214.182.000,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		1.680.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				900 Orang	900 Orang	752.037.200,00	752.027.200,00	752.027.200,00	-10.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			840.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana</i>				1 Laporan	1 Laporan	462.214.000,00	462.156.000,00	248.042.000,00	-214.172.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			840.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu				100 Persen	100 Persen	683.247.224,00	721.099.724,00	486.428.724,00	-196.818.500,00			Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	Aparatur Pemerintah		807.450.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.846.800,00	16.846.800,00	16.846.800,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			15.750.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.992.300,00	25.992.300,00	25.992.300,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			31.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			63.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara				1 Tahun	1 Tahun	2.431.287.000,00	2.518.099.100,00	2.517.396.700,00	86.109.700,00			Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	Aparatur Pemerintah		714.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				101 Unit	106 Unit	1.526.141.500,00	1.648.730.000,00	1.648.730.000,00	122.588.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			105.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu				100 Persen	100 Persen	2.966.844.520,00	2.808.465.352,00	2.808.465.352,00	-158.379.168,00			Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	Aparatur Pemerintah		2.061.477.734,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			256.410.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.223.071.320,00	1.124.078.904,00	1.124.078.904,00	-98.992.416,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			184.758.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara				1 Tahun	1 Tahun	5.522.575.000,00	5.325.617.400,00	5.367.122.124,00	-155.452.876,00			Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	Aparatur Pemerintah		8.115.203.213,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	140.800.000,00	140.800.000,00	140.800.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			4.601.806.992,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			174.506.063,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				120 Unit	118 Unit	312.835.200,00	312.657.600,00	312.657.600,00	-177.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			220.830.225,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat bencana Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana				100 3 Persen Persen	100 3 Persen Persen	9.170.252.369,00	9.218.506.369,00	7.461.869.369,00	-1.217.533.869,00							7.952.718.500,00	
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana				100 Persen	100 Persen	3.133.258.200,00	3.194.171.100,00	2.378.336.500,00	-754.921.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		3.458.882.375,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	953.198.200,00	953.192.000,00	751.322.000,00	-201.876.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			1.067.321.525,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				70 Orang	70 Orang	212.230.800,00	212.209.900,00	209.259.900,00	-2.970.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana				5 Jenis	5 Jenis	4.637.294.969,00	4.628.484.069,00	3.974.188.669,00	-663.106.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		2.446.336.125,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	3.450.060.069,00	3.450.000.069,00	3.375.620.069,00	-74.440.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi		1.500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK							39.668.756.488,00	44.592.460.351,00	46.155.147.728,00	6.486.391.240,00							40.317.466.211,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00	2.068.324.662,00							37.754.929.711,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00	2.068.324.662,00							37.754.929.711,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				A Nilai	A Nilai	30.135.182.688,00	30.527.198.551,00	32.203.062.428,00	771.334.523,00							30.906.517.211,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase layanan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu				100 persen	100 persen	52.864.600,00	52.864.600,00	34.904.600,00	-17.960.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur Pemerintahan		7.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	27.907.600,00	27.907.600,00	5.717.600,00	-22.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.952.200,00	4.952.200,00	4.952.200,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			7.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.004.800,00	20.004.800,00	24.234.800,00	4.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu</i>				100 persen	100 persen	20.170.802.108,00	20.681.909.121,00	20.681.909.121,00	511.107.013,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur Pemerintahan		20.640.450.104,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				119 Orang/ Bulan	148 Orang/ Bulan	20.170.802.108,00	20.681.909.121,00	20.681.909.121,00	511.107.013,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			20.640.450.104,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	NON URUSAN							37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00	2.068.324.662,00							37.754.929.711,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00	2.068.324.662,00							37.754.929.711,00	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia</i>				100 persen	100 persen	623.380.300,00	622.956.600,00	738.741.892,00	115.361.592,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur Pemerintahan		988.731.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	7.508.200,00	0,00	0,00	-7.508.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00	2.068.324.662,00							37.754.929.711,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00	2.068.324.662,00							37.754.929.711,00	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				-	1 Paket	0,00	7.508.200,00	7.508.200,00	7.508.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			17.400.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	NON URUSAN							37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00	2.068.324.662,00							37.754.929.711,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00	2.068.324.662,00							37.754.929.711,00	
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	79.649.600,00	0,00	0,00	-79.649.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00	2.068.324.662,00							37.754.929.711,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00	2.068.324.662,00							37.754.929.711,00	
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang</i>				-	2 Paket	0,00	79.649.600,00	140.310.892,00	140.310.892,00	Semua Kota/Kab	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			85.246.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	96.022.700,00	96.022.700,00	96.022.700,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			119.085.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	5.647.200,00	5.647.200,00	5.647.200,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			14.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	3.660.000,00	3.660.000,00	11.250.000,00	7.590.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			6.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	172.163.000,00	172.163.000,00	87.505.000,00	-84.658.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			105.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia</i>				-	100 persen	1.178.419.140,00	1.211.783.828,00	1.226.783.828,00	48.364.688,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur Pemerintahan		1.055.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			245.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	471.772.020,00	488.462.484,00	488.462.484,00	16.690.464,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			165.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia</i>				-	100 persen	8.109.716.540,00	7.957.684.402,00	9.520.722.987,00	1.411.006.447,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Barang Milik Daerah		8.214.836.107,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	<i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota</i>				15 Orang	0 Orang	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	-1.175.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Warga negara migran korban tindak kekerasan		45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal																		
			<i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota</i>				2 Orang	2 Orang	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	-1.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya				19.65 persen	19.65 persen	7.442.198.500,00	7.441.584.300,00	7.534.056.800,00	-531.346.000,00							6.910.852.500,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TeriAntar di dalam Panti	<i>Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>				675 Orang	872 Orang	2.778.624.600,00	2.778.648.900,00	2.833.805.500,00	55.180.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		2.318.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				55 Orang	155 Orang	28.624.600,00	28.624.600,00	57.784.600,00	29.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			28.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi</i>				10 Orang	107 Orang	30.000.000,00	30.024.300,00	120.504.300,00	90.504.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	30 Orang	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				580 Orang	580 Orang	220.000.000,00	220.000.000,00	155.516.600,00	-64.483.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	<i>Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>				827 Orang	1202 Orang	2.607.286.000,00	2.607.285.000,00	2.756.429.500,00	149.143.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Anak Terlantar di dalam Panti		2.942.202.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				722 Orang	1087 Orang	403.782.600,00	403.782.600,00	600.647.100,00	196.864.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	40 Orang	236.941.200,00	236.941.200,00	226.861.200,00	-10.080.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	30 Orang	38.120.000,00	38.120.000,00	12.960.000,00	-25.160.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	<i>Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>				135 Orang	731 Orang	1.872.088.500,00	1.871.531.000,00	1.764.982.400,00	-107.106.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		1.354.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				100 Orang	321 Orang	203.890.000,00	203.812.500,00	151.012.500,00	-52.877.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			56.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				260 Orang	260 Orang	24.500.800,00	24.500.800,00	14.352.200,00	-10.148.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	50 Orang	44.970.600,00	44.970.600,00	30.570.600,00	-14.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Keluarga	192 Keluarga	119.791.500,00	119.791.100,00	29.142.000,00	-90.649.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			155.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				100 Keluarga	100 Keluarga	5.640.000,00	5.640.000,00	9.480.000,00	3.840.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			153.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani				100 persen	100 persen	351.413.100,00	351.411.800,00	341.811.800,00	142.336.900,00							493.750.000,00	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terfasilitasi				720 Orang	695 Orang	351.413.100,00	351.411.800,00	341.811.800,00	-9.601.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Kelompok rentan		493.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				2 Unit	2 Unit	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			13.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			130.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				620 Orang	595 Orang	344.933.100,00	344.931.800,00	335.331.800,00	-9.601.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Penanganan TMP sesuai standar				-	100 Persen	309.258.400,00	309.258.400,00	329.238.400,00	-194.258.400,00							115.000.000,00	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara				-	1 TMP	309.258.400,00	309.258.400,00	329.238.400,00	19.980.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Taman Makam		115.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				898 Makam	898 Makam	309.258.400,00	309.258.400,00	329.238.400,00	19.980.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			115.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.802.720.860,00	6.337.626.086,00	6.220.787.438,00	4.418.066.578,00							2.562.536.500,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.802.720.860,00	6.337.626.086,00	6.220.787.438,00	4.418.066.578,00							2.562.536.500,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG				-	100 Persen	114.967.700,00	114.967.700,00	169.369.300,00	2.365.800,00							117.333.500,00	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)				40 Lembaga	40 Lembaga	37.634.200,00	37.634.200,00	37.085.800,00	-548.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi				100 Orang	100 Orang	37.634.200,00	37.634.200,00	37.085.800,00	-548.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				47 Lembaga	47 Lembaga	77.333.500,00	77.333.500,00	132.283.500,00	54.950.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga		77.333.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/duni a usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				250 Orang	250 Orang	77.333.500,00	77.333.500,00	132.283.500,00	54.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			77.333.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan				11.89 Nilai	11.89 Nilai	193.146.100,00	4.656.445.300,00	4.520.485.300,00	201.539.000,00							394.685.100,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan				4 Dokumen	2 Dokumen	85.466.100,00	186.953.300,00	155.313.300,00	69.847.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga		84.546.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	59.546.100,00	59.546.100,00	27.906.100,00	-31.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi milenial	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			59.546.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga				-	73.14 Nilai	11.891.000,00	11.878.600,00	9.958.600,00	23.109.000,00							35.000.000,00	
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan				5 Lembaga	5 Lembaga	11.891.000,00	11.878.600,00	9.958.600,00	-1.932.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				45 Orang	45 Orang	11.891.000,00	11.878.600,00	9.958.600,00	-1.932.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah				35 Persen	35 Persen	9.996.400,00	9.996.400,00	2.732.700,00	30.003.600,00							40.000.000,00	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan				2 Dokumen	1 Dokumen	9.996.400,00	9.996.400,00	2.732.700,00	-7.263.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	9.996.400,00	9.996.400,00	2.732.700,00	-7.263.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)				76.20 Nilai	76.20 Nilai	817.082.900,00	817.082.900,00	780.620.100,00	-292.082.900,00							525.000.000,00	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA				20 Lembaga	20 Lembaga	45.325.700,00	45.325.700,00	36.685.700,00	-8.640.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				20 perangkat daerah	20 perangkat daerah	45.325.700,00	45.325.700,00	36.685.700,00	-8.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak				2 Dokumen	2 Dokumen	771.757.200,00	771.757.200,00	743.934.400,00	-27.822.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Lembaga penyediaan layanan anak		425.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				200 Orang	200 Orang	650.611.600,00	650.611.600,00	648.691.600,00	-1.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			325.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				4 Kegiatan	4 Kegiatan	121.145.600,00	121.145.600,00	95.242.800,00	-25.902.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan				1.28 Nilai	1.28 Nilai	24.243.500,00	93.260.600,00	84.860.600,00	50.274.400,00							74.517.900,00	
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga				1 Laporan	1 Laporan	24.243.500,00	93.260.600,00	84.860.600,00	60.617.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Anak yang memerlukan perlindungan khusus		74.517.900,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	19.743.600,00	19.743.600,00	13.743.600,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		UPTD PELAYANAN SOSIAL							39.668.756.488,00	44.592.460.351,00	46.155.147.728,00	6.486.391.240,00								40.317.466.211,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00	2.068.324.662,00							37.754.929.711,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00	2.068.324.662,00							37.754.929.711,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				A Nilai	A Nilai	30.135.182.688,00	30.527.198.551,00	32.203.062.428,00	771.334.523,00							30.906.517.211,00	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia				100 persen	100 persen	623.380.300,00	622.956.600,00	738.741.892,00	115.361.592,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur Pemerintahan		988.731.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.824.000,00	9.813.400,00	9.813.400,00	-10.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			170.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	159.941.800,00	159.941.800,00	159.941.800,00	0,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.415.000,00	17.415.000,00	3.015.000,00	-14.400.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia				100 persen	100 persen	1.178.419.140,00	1.211.783.828,00	1.226.783.828,00	48.364.688,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur Pemerintahan		1.055.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	201.100.000,00	201.100.000,00	216.100.000,00	15.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	320.547.120,00	337.221.344,00	337.221.344,00	16.674.224,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia				100 persen	100 persen	8.109.716.540,00	7.957.684.402,00	9.520.722.987,00	1.411.006.447,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Barang Milik Daerah		8.214.836.107,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				45 Orang	45 Orang	21.680.300,00	21.680.300,00	21.680.300,00	0,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				45 Orang	45 Orang	125.760.400,00	125.759.400,00	125.759.400,00	-1.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			175.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				45 Orang	45 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			318.952.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				15 Orang	15 Orang	21.600.000,00	21.600.000,00	9.120.000,00	-12.480.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				494 Orang	731 Orang	1.872.088.500,00	1.871.531.000,00	1.764.982.400,00	-107.106.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		1.354.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	996.450.000,00	996.450.000,00	996.450.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			738.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar,	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			130.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	6 Paket	1.528.800,00	1.528.800,00	1.528.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	26.680.000,00	26.266.900,00	26.266.900,00	-413.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	43.340.000,00	43.340.000,00	19.932.000,00	-23.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			51.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia</i>				100 persen	100 persen	1.178.419.140,00	1.211.783.828,00	1.226.783.828,00	48.364.688,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		1.055.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia</i>				100 persen	100 persen	8.109.716.540,00	7.957.684.402,00	9.520.722.987,00	1.411.006.447,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		8.214.836.107,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	4 Unit	164.439.280,00	129.131.492,00	129.131.492,00	-35.307.788,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	2 Unit	38.961.340,00	41.345.692,00	83.519.944,00	44.558.604,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			450.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	351.443.840,00	387.381.702,00	387.381.702,00	35.937.862,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			450.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan				11.89 Nilai	11.89 Nilai	193.146.100,00	4.656.445.300,00	4.520.485.300,00	201.539.000,00							394.685.100,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan</i>				4 Dokumen	18 Dokumen	85.466.100,00	186.953.300,00	155.313.300,00	69.847.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga		84.546.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				4 Dokumen	18 Dokumen	25.920.000,00	127.407.200,00	127.407.200,00	101.487.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tahun layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar				1 Tahun	1 Tahun	7.680.000,00	4.369.492.000,00	4.365.172.000,00	4.357.492.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perempuan Korban Kekerasan		295.139.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				80 Orang	80 Orang	7.680.000,00	7.680.000,00	3.360.000,00	-4.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				-	80 Layanan	0,00	4.361.812.000,00	4.361.812.000,00	4.361.812.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG P ERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PER LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			230.139.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan				-	1.28 Nilai	24.243.500,00	93.260.600,00	84.860.600,00	50.274.400,00							74.517.900,00	
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga				15 Laporan	4 Laporan	24.243.500,00	93.260.600,00	84.860.600,00	60.617.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		74.517.900,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	4.499.900,00	4.499.000,00	2.099.000,00	-2.400.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			4.499.900,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi				-	100 Orang	0,00	69.018.000,00	69.018.000,00	69.018.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			69.018.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA							41.181.843.560,00	43.428.115.058,00	43.264.724.738,00	2.082.881.178,00								40.654.768.038,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							41.041.459.260,00	43.287.730.758,00	43.173.754.438,00	2.132.295.178,00							39.906.768.038,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							41.041.459.260,00	43.287.730.758,00	43.173.754.438,00	2.132.295.178,00							39.906.768.038,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)				86.82 Nilai	86.82 Nilai	33.181.843.510,00	35.500.542.008,00	35.534.558.688,00	4.303.801.808,00							37.485.645.318,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan</i>				100 Persen	100 Persen	402.728.962,00	389.658.462,00	263.294.462,00	-139.434.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Pelayanan Perkantoran		588.072.400,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	3.252.600,00	3.252.600,00	3.252.600,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			3.903.900,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	6.117.700,00	6.117.700,00	6.117.700,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			9.229.300,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	12.899.394,00	12.899.394,00	12.899.394,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			14.300.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	986.500,00	986.500,00	986.500,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			3.850.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				2 Laporan	2 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.320.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	12.298.000,00	12.298.000,00	6.280.000,00	-6.018.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			26.721.200,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan</i>				100 Persen	100 Persen	95.487.000,00	144.064.000,00	144.064.000,00	48.577.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana		613.733.300,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			30.800.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan</i>				100 Persen	100 Persen	1.353.970.579,00	1.353.970.579,00	1.517.944.671,00	163.974.092,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Pelayanan Perkantoran		1.665.344.273,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			26.400.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	200.728.560,00	200.728.560,00	233.489.192,00	32.760.632,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			265.471.888,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai</i>				100 Persen	100 Persen	2.762.426.929,00	2.691.859.465,00	2.691.866.053,00	-70.560.876,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana		3.194.542.345,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	2 Unit	80.770.000,00	80.770.000,00	80.770.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			92.675.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	35.131.673,00	35.131.673,00	35.131.673,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			49.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	14.944.274,00	14.944.274,00	14.944.274,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			18.150.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	2.884.000,00	2.884.000,00	2.884.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			5.258.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan</i>				100 Persen	100 Persen	1.353.970.579,00	1.353.970.579,00	1.517.944.671,00	163.974.092,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Pelayanan Perkantoran		1.665.344.273,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	957.700,00	957.700,00	957.700,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.100.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			13.200.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	102.839.896,00	102.839.896,00	119.220.212,00	16.380.316,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			113.123.885,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai</i>				100 Persen	100 Persen	2.762.426.929,00	2.691.859.465,00	2.691.866.053,00	-70.560.876,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana		3.194.542.345,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				3 Unit	3 Unit	127.182.140,00	129.559.904,00	129.566.492,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			156.162.800,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			22.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	27 Unit	269.793.040,00	268.692.636,00	268.692.636,00	-1.100.404,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			282.854.800,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3				100 Persen	100 Persen	436.150.050,00	436.150.050,00	426.550.050,00	86.578.850,00							522.728.900,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku				90 Perusahaan	90 Perusahaan	436.150.050,00	436.150.050,00	426.550.050,00	-9.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Perusahaan		522.728.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				90 Perusahaan	90 Perusahaan	415.850.050,00	415.850.050,00	406.250.050,00	-9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			478.555.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL							41.181.843.560,00	43.428.115.058,00	43.264.724.738,00	2.082.881.178,00							40.654.768.038,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							41.041.459.260,00	43.287.730.758,00	43.173.754.438,00	2.132.295.178,00							39.906.768.038,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							41.041.459.260,00	43.287.730.758,00	43.173.754.438,00	2.132.295.178,00							39.906.768.038,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)				86.82 Nilai	86.82 Nilai	33.181.843.510,00	35.500.542.008,00	35.534.558.688,00	4.303.801.808,00							37.485.645.318,00	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	28.567.230.040,00	30.920.989.502,00	30.917.389.502,00	2.350.159.462,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		31.423.953.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/Bulan	140 Orang/Bulan	28.567.230.040,00	30.920.989.502,00	30.917.389.502,00	2.350.159.462,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			31.423.953.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan				100 Persen	100 Persen	402.728.962,00	389.658.462,00	263.294.462,00	-139.434.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Pelayanan Perkantoran			588.072.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.992.900,00	14.992.900,00	14.992.900,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan				18.148.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	41.179.800,00	41.179.800,00	41.179.800,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan				64.068.600,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.683.994,00	65.133.994,00	65.133.994,00	-4.550.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan				84.590.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.645.100,00	15.124.600,00	15.124.600,00	-8.520.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan				32.292.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.614.000,00	8.614.000,00	8.614.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan				9.900.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan				6.600.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	167.104.000,00	167.104.000,00	46.758.000,00	-120.346.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			254.570.800,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan</i>				100 Persen	100 Persen	95.487.000,00	144.064.000,00	144.064.000,00	48.577.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana		613.733.300,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	7 Unit	67.487.000,00	116.064.000,00	116.064.000,00	48.577.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			582.933.300,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan</i>				100 Persen	100 Persen	1.353.970.579,00	1.353.970.579,00	1.517.944.671,00	163.974.092,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Pelayanan Perkantoran		1.665.344.273,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.873.100,00	2.873.100,00	2.873.100,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			2.200.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	384.000.000,00	384.000.000,00	384.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			528.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	626.571.323,00	626.571.323,00	741.404.467,00	114.833.144,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			715.848.500,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai</i>				100 Persen	100 Persen	2.762.426.929,00	2.691.859.465,00	2.691.866.053,00	-70.560.876,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana		3.194.542.345,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja				40 Perusah aan	40 Perusah aan	436.150.050,00	436.150.050,00	426.550.050,00	-9.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Perusahaan dan Tenaga Kerja		522.728.900,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				40 Perusah aan	40 Perusah aan	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			44.173.900,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							140.384.300,00	140.384.300,00	90.970.300,00	-49.414.000,00							748.000.000,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							115.499.500,00	115.499.500,00	66.085.500,00	-49.414.000,00							660.000.000,00	
1.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan				65.00 Persen	65.00 Persen	8.000.000,00	8.000.000,00	4.160.000,00	58.000.000,00							66.000.000,00	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan				65.00 Persen	65.00 Persen	8.000.000,00	8.000.000,00	4.160.000,00	-3.840.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Masyarakat		66.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	4.160.000,00	-3.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			66.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan				61.00 Persen	61.00 Persen	12.500.000,00	12.500.000,00	10.100.000,00	372.500.000,00							385.000.000,00	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan				15 Dokumen	15 Dokumen	12.500.000,00	12.500.000,00	10.100.000,00	-2.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Masyarakat		385.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				15 Dokumen	15 Dokumen	12.500.000,00	12.500.000,00	10.100.000,00	-2.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			385.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan				75 MW	75 MW	94.999.500,00	94.999.500,00	51.825.500,00	114.000.500,00							209.000.000,00	
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah				4.8 Persen	4.8 Persen	94.999.500,00	94.999.500,00	51.825.500,00	-43.174.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Masyarakat		209.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi																		
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi				1 Laporan	1 Laporan	94.999.500,00	94.999.500,00	51.825.500,00	-43.174.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			209.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00	0,00							88.000.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi vann sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00	63.115.200,00							88.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target</i>				100 Persen	100 Persen	24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Transmigran		88.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi																		
			<i>Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi</i>				1 Lokasi	1 Lokasi	24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkalkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			88.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							23.202.974.946,00	22.984.549.537,00	24.521.921.537,00	1.318.946.591,00							26.809.772.499,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.202.974.946,00	22.984.549.537,00	24.521.921.537,00	1.318.946.591,00							26.809.772.499,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							647.999.224,00	589.682.750,00	408.031.750,00	-239.967.474,00							1.000.000.000,00	
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target				100 Persen	100 Persen	365.999.520,00	353.619.030,00	252.790.030,00	134.000.480,00							500.000.000,00	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	<i>Rasio penduduk ber-KTP-ei per satuan penduduk</i>				100 Persen	100 Persen	365.999.520,00	353.619.030,00	252.790.030,00	-113.209.490,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	365.999.520,00	353.619.030,00	252.790.030,00	-113.209.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target				100 Persen	100 Persen	281.999.704,00	236.063.720,00	155.241.720,00	218.000.296,00							500.000.000,00	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil</i>				81 Persen	81 Persen	281.999.704,00	236.063.720,00	155.241.720,00	-126.757.984,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	281.999.704,00	236.063.720,00	155.241.720,00	-126.757.984,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							22.051.376.482,00	21.716.072.927,00	23.541.511.927,00	1.490.135.445,00							24.806.565.208,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82.85 Nilai	82.85 Nilai	16.987.275.842,00	15.572.756.285,00	15.296.384.285,00	1.734.816.626,00							18.722.092.468,00	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja</i>				0.12 Persen	0.12 Persen	358.149.192,00	351.660.012,00	205.480.012,00	-152.669.180,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Pemerintah Desa		440.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	3 Dokumen	15.715.300,00	88.455.000,00	15.715.000,00	-300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	342.433.892,00	263.205.012,00	189.765.012,00	-152.668.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			415.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan</i>				100 Persen	100 Persen	14.377.410.384,00	12.951.889.701,00	12.951.889.701,00	-1.425.520.683,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		14.377.413.864,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				48 Orang/ Bulan	95 Orang/ Bulan	14.236.963.864,00	12.823.823.571,00	12.823.823.571,00	-1.413.140.293,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBLUAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			14.236.963.864,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	140.446.520,00	128.066.130,00	128.066.130,00	-12.380.390,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			140.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum</i>				12 Bulan	12 Bulan	504.452.950,00	373.902.950,00	243.710.950,00	-260.742.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		1.280.826.406,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	5.992.400,00	5.992.400,00	5.992.400,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			56.345.521,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	352.708.600,00	25.523.100,00	25.523.100,00	-327.185.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			825.645.247,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	3 Paket	75.738.750,00	75.738.750,00	75.738.750,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			87.400.688,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	5.979.600,00	6.048.100,00	6.048.100,00	68.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.539.076,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	2 Dokumen	4.626.600,00	4.626.600,00	4.626.600,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.862.025,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	4 Laporan	5.850.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-4.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.769.009,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	3 Laporan	53.557.000,00	254.624.000,00	124.432.000,00	70.875.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			291.264.840,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang terselesaikan</i>				100 Persen	100 Persen	6.439.600,00	6.439.600,00	6.439.600,00	0,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor		258.496.968,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	6.439.600,00	6.439.600,00	6.439.600,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			258.496.968,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan				100 Persen	100 Persen	694.613.780,00	690.670.594,00	690.670.594,00	-3.943.186,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		714.005.939,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	174.800.000,00	174.800.000,00	174.800.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			159.057.675,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	519.813.780,00	515.870.594,00	515.870.594,00	-3.943.186,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			554.948.264,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan				100 Persen	100 Persen	1.046.209.936,00	1.198.193.428,00	1.198.193.428,00	151.983.492,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor		1.651.349.291,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				19 Unit	17 Unit	1.004.929.936,00	1.098.383.428,00	1.098.383.428,00	93.453.492,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.550.272.285,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	51 Unit	41.280.000,00	99.810.000,00	99.810.000,00	58.530.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			101.077.006,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
2.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa				29 Desa	29 Desa	116.966.120,00	135.878.612,00	123.878.612,00	35.985.074,00							152.951.194,00	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan				4,56 Persen	4,56 Persen	116.966.120,00	135.878.612,00	123.878.612,00	6.912.492,00			-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Desa yang melakukan kerja sama di lintas kabupaten/kota/ pihak ketiga		152.951.194,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	116.966.120,00	135.878.612,00	123.878.612,00	6.912.492,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			152.951.194,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa cepat berkembang				93.87 Persen	93.87 Persen	613.538.580,00	666.251.370,00	554.639.370,00	402.913.208,00							1.016.451.788,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa				93.87 Persen	93.87 Persen	613.538.580,00	666.251.370,00	554.639.370,00	-58.899.210,00			-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan		1.016.451.788,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	117.943.020,00	187.162.830,00	144.337.830,00	26.394.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			358.451.788,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	457.999.760,00	441.492.840,00	394.020.840,00	-63.978.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			498.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	37.595.800,00	37.595.700,00	16.280.700,00	-21.315.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	1.130.000.000,00	996.034.840,00	731.986.000,00	-398.014.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			950.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	75.600.000,00	75.600.000,00	-4.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.253.700,00	9.253.700,00	253.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	770.000.000,00	938.788.000,00	461.086.000,00	-308.914.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			375.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran</i>				1 Tahun	1 Tahun	603.650.800,00	1.308.740.000,00	1.165.459.200,00	561.808.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		833.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	105.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	895.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			280.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	168.273.400,00	80.478.600,00	-269.521.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran</i>				1 Tahun	1 Tahun	842.597.080,00	969.273.020,00	819.473.020,00	-23.124.060,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		1.267.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	3.663.813.452,00	2.005.698.760,00	1.919.434.760,00	-1.744.378.692,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Masyarakat dan Aparatur		3.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	330.000.000,00	311.703.542,00	297.783.542,00	-32.216.458,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	95.000.000,00	94.844.000,00	22.500.000,00	-72.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				3 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	544.852.000,00	73.926.000,00	28.926.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Masyarakat dan Aparatur		90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	529.972.000,00	66.726.000,00	36.726.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin																		
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	14.880.000,00	7.200.000,00	-7.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan				1 Dokumen	1 Dokumen	301.664.700,00	301.664.400,00	70.876.000,00	-230.788.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Masyarakat dan Aparatur		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	301.664.700,00	301.664.400,00	70.876.000,00	-230.788.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berisaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				380 Unit	380 Unit	440.332.980,00	411.437.370,00	327.035.370,00	-113.297.610,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Masyarakat dan Aparatur		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				380 Unit	380 Unit	440.332.980,00	411.437.370,00	327.035.370,00	-113.297.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Aksesibilitas Pelayaran				80 Persen	80 Persen	706.519.040,00	784.178.850,00	524.910.250,00	543.480.960,00							1.250.000.000,00	
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Sangsit				1 Laporan	1 Laporan	566.952.040,00	644.638.650,00	454.226.050,00	-112.725.990,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Masyarakat dan Aparatur		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Dokumen	1 Dokumen	566.952.040,00	644.638.650,00	454.226.050,00	-112.725.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase lintasan kereta api yang terbangun				35 Persen	35 Persen	671.694.840,00	646.933.460,00	598.942.460,00	1.328.305.160,00							2.000.000.000,00	
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapiian	Jumlah Dokumen Pra Studi Kelayakan Angkutan Umum Massal Berbasis Kereta Api Lintasan Canggü-Mengwi				1 Dokumen	1 Dokumen	671.694.840,00	646.933.460,00	598.942.460,00	-72.752.380,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Masyarakat dan Aparatur		2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapiian																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapiian				1 Dokumen	1 Dokumen	671.694.840,00	646.933.460,00	598.942.460,00	-72.752.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ							42.989.972.308,00	49.702.791.659,00	104.545.449.620,00	61.555.477.312,00							69.696.622.739,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							42.989.972.308,00	49.702.791.659,00	104.545.449.620,00	61.555.477.312,00							69.696.622.739,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							42.989.972.308,00	49.702.791.659,00	104.545.449.620,00	61.555.477.312,00							69.696.622.739,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				83,90 Nilai	83,90 Nilai	25.913.844.930,00	33.025.006.400,00	31.633.608.164,00	1.962.777.809,00							27.876.622.739,00	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				1 Laporan 1 Paket	1 Laporan 1 Paket	3.124.682.460,00	3.108.706.688,00	2.063.061.252,00	-1.061.621.208,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		2.739.648.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.248.000,00	4.244.400,00	4.244.400,00	-3.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			5.248.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	155.251.500,00	153.153.300,00	70.987.700,00	-84.263.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	222.444.000,00	222.164.000,00	114.346.000,00	-108.098.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			232.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	842.597.080,00	969.273.020,00	819.473.020,00	-23.124.060,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		1.267.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.193.200,00	1.193.200,00	-6.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			1.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	207.660.000,00	57.860.000,00	56.660.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	41.034.940,00	42.765.792,00	42.765.792,00	1.730.852,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			43.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				-	10 Unit 12 Unit	3.054.001.440,00	2.944.668.376,00	2.912.708.376,00	-141.293.064,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		3.428.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				10 Unit	10 Unit	166.498.600,00	167.299.600,00	167.299.600,00	801.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				18 Unit	18 Unit	18.480.000,00	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			19.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional				66 Persen	66 Persen	15.697.913.498,00	15.246.672.949,00	71.787.988.746,00	22.872.086.502,00							38.570.000.000,00	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>				14 Unit	14 Unit	3.183.653.193,00	4.045.016.260,00	3.957.060.260,00	773.407.067,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Masyarakat		4.180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpellihara</i>				14 Unit	14 Unit	397.000.000,00	596.800.000,00	596.800.000,00	199.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			1.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>				-	1 Laporan	3.663.813.452,00	2.005.698.760,00	1.919.434.760,00	-1.744.378.692,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Masyarakat		3.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi																		
			<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>				1 Laporan	1 Laporan	3.238.813.452,00	1.599.151.218,00	1.599.151.218,00	-1.639.662.234,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			2.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	54.500.000,00	54.491.000,00	31.633.000,00	-22.867.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			52.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah gedung kantor yang tersedia Jumlah mebel yang tersedia</i>				2 Unit 3 Paket	2 Unit 3 Paket	603.650.800,00	1.308.740.000,00	1.165.459.200,00	561.808.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		833.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	25.000.000,00	23.685.000,00	23.685.000,00	-1.315.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			57.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia Jumlah jasa pelayanan umum kantor (jasa kebersihan) yang tersedia Jumlah jasa surat menyurat berupa materai yang tersedia</i>				-	1 Tahun	842.597.080,00	969.273.020,00	819.473.020,00	-23.124.060,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		1.267.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	480.000,00	471.000,00	471.000,00	-9.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			34.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	43.682.140,00	40.910.892,00	40.910.892,00	-2.771.248,00	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pemeliharaan AC, Laptop, PC dan printer yang tersedia Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas, tenaga administrasi, tenaga supir, pajak kendaraan yang tersedia</i>				1 Tahun	1 Tahun	3.054.001.440,00	2.944.668.376,00	2.912.708.376,00	-141.293.064,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		3.428.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				15 Laporan	15 Laporan	34.066.400,00	34.066.400,00	16.966.400,00	-17.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	5 Unit	603.650.800,00	1.308.740.000,00	1.165.459.200,00	561.808.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		833.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	5 Unit	100.650.800,00	100.650.800,00	61.295.600,00	-39.355.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			116.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>				16 Unit 2 Unit	16 Unit 2 Unit	3.054.001.440,00	2.944.668.376,00	2.912.708.376,00	-141.293.064,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		3.428.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				3 Unit	3 Unit	0,00	150.654.492,00	150.654.492,00	150.654.492,00	-	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	NON URUSAN							42.989.972.308,00	49.702.791.659,00	104.545.449.620,00	61.555.477.312,00							69.696.622.739,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							42.989.972.308,00	49.702.791.659,00	104.545.449.620,00	61.555.477.312,00							69.696.622.739,00	
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							42.989.972.308,00	49.702.791.659,00	104.545.449.620,00	61.555.477.312,00							69.696.622.739,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							42.989.972.308,00	49.702.791.659,00	104.545.449.620,00	61.555.477.312,00							69.696.622.739,00	
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				16 Unit	16 Unit	11.160.000,00	11.160.000,00	9.050.000,00	-2.110.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik</i>				-	43,75 Person	15.697.913.498,00	15.246.672.949,00	71.787.988.746,00	22.872.086.502,00							38.570.000.000,00	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	<i>Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang tersedia Jumlah perlengkapan jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				-	450 Unit 700 Unit	3.183.653.193,00	4.045.016.260,00	3.957.060.260,00	773.407.067,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Masyarakat dan Aparatur		4.180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia</i>				300 Unit	300 Unit	2.435.925.033,00	2.503.995.020,00	2.454.737.020,00	18.811.987,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			1.710.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>				246 Unit	246 Unit	350.728.160,00	944.221.240,00	905.523.240,00	554.795.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			770.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN							42.989.972.308,00	49.702.791.659,00	104.545.449.620,00	61.555.477.312,00							69.696.622.739,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							42.989.972.308,00	49.702.791.659,00	104.545.449.620,00	61.555.477.312,00							69.696.622.739,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							42.989.972.308,00	49.702.791.659,00	104.545.449.620,00	61.555.477.312,00							69.696.622.739,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				83,90 Nilai	83,90 Nilai	25.913.844.930,00	33.025.006.400,00	31.633.608.164,00	1.962.777.809,00							27.876.622.739,00	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia</i>				1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	3.124.682.460,00	3.108.706.688,00	2.063.061.252,00	-1.061.621.208,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		2.739.648.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	78.323.500,00	78.321.056,00	37.460.060,00	-40.863.440,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	381.452.260,00	347.493.444,00	314.401.444,00	-67.050.816,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Mebel yang Tersedia Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia</i>				-	1 Paket	603.650.800,00	1.308.740.000,00	1.165.459.200,00	561.808.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		833.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	23.000.000,00	16.130.800,00	0,00	-23.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Paket Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan</i>				1 Paket	1 Paket	842.597.080,00	969.273.020,00	819.473.020,00	-23.124.060,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		1.267.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	486.700,00	486.700,00	-13.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia</i>				1 Paket 2 Unit	1 Paket 2 Unit	3.054.001.440,00	2.944.668.376,00	2.912.708.376,00	-141.293.064,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		3.428.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	2 Unit	121.000.000,00	120.984.000,00	120.984.000,00	-16.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	8 Unit	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			9.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM				50 Persen	50 Persen	706.519.040,00	784.178.850,00	524.910.250,00	543.480.960,00							1.250.000.000,00	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersedia</i>				19 Laporan	19 Laporan	139.567.000,00	139.540.200,00	70.684.200,00	-68.882.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			<i>Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</i>				19 Laporan	19 Laporan	139.567.000,00	139.540.200,00	70.684.200,00	-68.882.800,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK							139.638.708.630,00	391.563.686.845,00	248.580.772.845,00	108.942.064.215,00								215.280.943.180,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							139.638.708.630,00	391.563.686.845,00	248.580.772.845,00	108.942.064.215,00							215.280.943.180,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							138.712.634.890,00	390.721.502.885,00	247.848.907.885,00	109.136.272.995,00							213.740.371.180,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS)				82.80 Nilai	82.80 Nilai	19.994.299.045,00	32.917.975.065,00	32.984.603.065,00	5.248.422.135,00							25.242.721.180,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia				16 Dokumen	15 Dokumen	47.714.900,00	83.976.000,00	50.368.000,00	2.653.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	34.441.700,00	67.685.700,00	36.477.700,00	2.036.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			37.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	13.273.200,00	16.290.300,00	13.890.300,00	617.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			14.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia				75 Dokumen	75 Dokumen	16.130.179.925,00	26.971.628.217,00	26.969.708.217,00	10.839.528.292,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		18.293.655.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/ Bulan	216 Orang/ Bulan	16.081.128.225,00	25.526.326.517,00	25.526.326.517,00	9.445.198.292,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			16.589.675.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11 Dokumen	11 Dokumen	49.051.700,00	1.445.301.700,00	1.443.381.700,00	1.394.330.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			1.703.980.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia				12 bulan	12 bulan	311.136.700,00	887.658.800,00	509.814.800,00	198.678.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		766.804.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.487.900,00	15.443.000,00	15.443.000,00	10.955.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			6.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	10 Paket	40.006.800,00	42.914.800,00	42.914.800,00	2.908.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			323.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	87.500.000,00	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			105.875.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.670.400,00	13.670.400,00	13.670.400,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			26.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13505 Dokumen	7649 Dokumen	31.522.600,00	31.522.600,00	31.522.600,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			48.279.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.630.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			13.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	6 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			242.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai</i>				674 Unit	674 Unit	2.839.454.860,00	3.508.972.008,00	3.508.972.008,00	669.517.148,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		5.032.641.180,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				28 Unit	29 Unit	1.237.189.960,00	2.151.128.888,00	2.151.128.888,00	913.938.928,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			2.588.866.180,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				489 Unit	80 Unit	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				99 Unit	89 Unit	99.510.000,00	99.490.000,00	99.490.000,00	-20.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			219.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				7 Unit	7 Unit	1.411.874.900,00	1.164.773.120,00	1.164.773.120,00	-247.101.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			2.050.110.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				51 Unit	24 Unit	84.480.000,00	87.180.000,00	87.180.000,00	2.700.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			165.165.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi yang disebarluaskan				94.10 persen	94.10 persen	13.218.105.160,00	12.609.073.172,00	10.858.076.172,00	14.164.194.840,00							27.382.300.000,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi</i>				83.00 Indeks	83.00 Indeks	13.218.105.160,00	12.609.073.172,00	10.858.076.172,00	-2.360.028.988,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		27.382.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten																		
			<i>Jumlah Konten Informasi Publik</i>				120 Konten	120 Konten	1.498.987.520,00	1.381.642.780,00	1.056.490.780,00	-442.496.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			2.110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi																		
			<i>Persentase khlayak yang terpapar informasi publik</i>				90 Persentase	90 Persentase	1.400.000.200,00	1.484.001.282,00	1.002.349.282,00	-397.650.918,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			1.677.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																		
			<i>Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.593.884.980,00	1.687.524.460,00	1.687.524.460,00	93.639.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			1.576.773.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>				29 perangkat daerah	29 perangkat daerah	18.559.739.640,00	18.466.602.192,00	18.230.838.192,00	-328.901.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			20.428.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							460.728.560,00	431.471.640,00	346.958.640,00	-113.769.920,00							717.772.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik				4.20 Nilai	4.20 Nilai	460.728.560,00	431.471.640,00	346.958.640,00	257.043.440,00							717.772.000,00	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	<i>Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi</i>				11 Sektor	11 Sektor	460.728.560,00	431.471.640,00	346.958.640,00	-113.769.920,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		717.772.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>				50 Orang	50 Orang	145.328.240,00	138.351.510,00	108.715.510,00	-36.612.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			210.448.040,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu</i>				100 Persentase	100 Persentase	150.743.840,00	142.417.110,00	114.495.110,00	-36.248.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			251.353.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			<i>Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	164.656.480,00	150.703.020,00	123.748.020,00	-40.908.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			255.970.660,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							465.345.180,00	410.712.320,00	384.906.320,00	-80.438.860,00							822.800.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan				76 Nilai	76 Nilai	465.345.180,00	410.712.320,00	384.906.320,00	357.454.820,00							822.800.000,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan</i>				29 OPD	29 OPD	330.632.840,00	289.327.110,00	281.525.110,00	-49.107.730,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		633.160.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	34.024.900,00	34.024.900,00	34.024.900,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			89.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	184.380.940,00	172.677.410,00	172.677.410,00	-11.703.530,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			236.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	39.915.000,00	10.312.800,00	10.312.800,00	-29.602.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			175.010.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	72.312.000,00	72.312.000,00	64.510.000,00	-7.802.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			132.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun				29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	134.712.340,00	121.385.210,00	103.381.210,00	-31.331.130,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		189.640.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	134.712.340,00	121.385.210,00	103.381.210,00	-31.331.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			189.640.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL								139.638.708.630,00	391.563.686.845,00	248.580.772.845,00	108.942.064.215,00						215.280.943.180,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							139.638.708.630,00	391.563.686.845,00	248.580.772.845,00	108.942.064.215,00							215.280.943.180,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							138.712.634.890,00	390.721.502.885,00	247.848.907.885,00	109.136.272.995,00							213.740.371.180,00	
1.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika				82.07 Nilai	93.10 %	105.500.230.685,00	345.194.454.648,00	204.006.228.648,00	55.615.119.315,00							161.115.350.000,00	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi				100 persen	100 persen	105.500.230.685,00	345.194.454.648,00	204.006.228.648,00	98.505.997.963,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		161.115.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				25 Aplikasi	25 Aplikasi	4.293.218.360,00	4.293.218.250,00	4.099.398.250,00	-193.820.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			4.043.380.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				2 Laporan	2 Laporan	4.224.027.125,00	3.849.887.240,00	3.414.422.240,00	-809.604.885,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			4.026.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		UPTD TURYPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI								139.638.708.630,00	391.563.686.845,00	248.580.772.845,00	108.942.064.215,00						215.280.943.180,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							138.712.634.890,00	390.721.502.885,00	247.848.907.885,00	109.136.272.995,00							213.740.371.180,00	
1.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika				82.07 Nilai	93.10 %	105.500.230.685,00	345.194.454.648,00	204.006.228.648,00	55.615.119.315,00							161.115.350.000,00	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi				100 Persen	100 Persen	105.500.230.685,00	345.194.454.648,00	204.006.228.648,00	98.505.997.963,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		161.115.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas																		
			Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas				9 unit	9 unit	14.575.363.980,00	11.514.213.894,00	11.075.241.894,00	-3.500.122.086,00	Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			14.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				9 kabupate n/kota	9 kabupate n/kota	49.519.999.700,00	6.628.233.150,00	6.237.986.150,00	-43.282.013.550,00	Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			99.899.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							18.327.335.849,00	24.807.715.448,00	26.819.981.678,00	8.492.645.829,00						31.193.000.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.327.335.849,00	24.807.715.448,00	26.819.981.678,00	8.492.645.829,00							31.193.000.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.327.335.849,00	24.807.715.448,00	26.819.981.678,00	8.492.645.829,00							31.193.000.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)				82.38 Nilai	82.38 Nilai	16.422.964.489,00	20.456.497.902,00	20.417.119.902,00	3.300.035.511,00							19.723.000.000,00	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	158.046.420,00	152.362.212,00	143.164.212,00	-14.882.208,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, Dokumen Perencanaan		160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	148.046.420,00	142.177.312,00	134.899.312,00	-13.147.108,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.184.900,00	8.264.900,00	-1.735.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	13.007.778.019,00	16.437.269.734,00	16.437.269.734,00	3.429.491.715,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		14.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/ Bulan	67 Orang/ Bulan	13.007.778.019,00	16.437.269.734,00	16.437.269.734,00	3.429.491.715,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			14.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	278.975.244,00	295.887.244,00	285.707.244,00	6.732.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		441.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	10.997.800,00	10.997.800,00	-2.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>				10 Unit Usaha	230 Unit Usaha	223.046.420,00	288.686.994,00	796.202.994,00	573.156.574,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan</i>				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	20.000.000,00	19.999.600,00	9.919.600,00	-10.080.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	20.000.000,00	19.999.600,00	9.919.600,00	-10.080.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas				7.00 Persen	7.00 Persen	187.682.140,00	183.432.810,00	93.674.810,00	62.317.860,00							250.000.000,00	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi</i>				90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	50.000.000,00	49.934.000,00	26.908.000,00	-23.092.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>				90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	50.000.000,00	49.934.000,00	26.908.000,00	-23.092.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	50.000.000,00	49.999.600,00	26.149.600,00	-23.850.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha				6.00 Persen	6.00 Persen	678.585.680,00	635.576.002,00	537.661.002,00	471.414.320,00							1.150.000.000,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				205 Unit Usaha	205 Unit Usaha	678.585.680,00	635.576.002,00	537.661.002,00	-140.924.678,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok, UMKM		1.150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				205 Unit Usaha	205 Unit Usaha	602.185.680,00	559.176.002,00	471.821.002,00	-130.364.678,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			950.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				100 Orang	100 Orang	76.400.000,00	76.400.000,00	65.840.000,00	-10.560.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-				-	-	419.328.560,00	415.843.504,00	400.443.504,00	600.671.440,00							1.020.000.000,00		
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				145 Unit Usaha	145 Unit Usaha	419.328.560,00	415.843.504,00	400.443.504,00	-18.885.056,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok, UMKM			1.020.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																			
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	219.328.560,00	215.843.804,00	207.163.804,00	-12.164.756,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM																			
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				35 Orang	35 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			270.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																			
			Wirausaha yang Difasilitasi				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	99.999.700,00	97.119.700,00	-2.880.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i>				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	46.160.000,00	-3.840.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH							18.327.335.849,00	24.807.715.448,00	26.819.981.678,00	8.492.645.829,00							31.193.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.327.335.849,00	24.807.715.448,00	26.819.981.678,00	8.492.645.829,00							31.193.000.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.327.335.849,00	24.807.715.448,00	26.819.981.678,00	8.492.645.829,00							31.193.000.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)				82.38 Nilai	82.38 Nilai	16.422.964.489,00	20.456.497.902,00	20.417.119.902,00	3.300.035.511,00							19.723.000.000,00	
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	278.975.244,00	295.887.244,00	285.707.244,00	6.732.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		441.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	700.000,00	699.600,00	699.600,00	-400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	2.800.000,00	13.146.100,00	13.146.100,00	10.346.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	56.904.050,00	56.904.050,00	56.904.050,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	999.700,00	999.700,00	-300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	990.000,00	990.000,00	-10.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	-80.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	1.372.735.640,00	1.353.008.224,00	1.353.008.224,00	-19.727.416,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		1.781.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	989.100,00	989.100,00	-10.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	158.228.560,00	160.265.968,00	160.265.968,00	2.037.408,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	1.460.429.166,00	1.497.518.288,00	1.497.518.288,00	37.089.122,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		2.310.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.599.100,00	5.073.400,00	5.073.400,00	-7.525.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	NON URUSAN							17.755.928.560,00	20.171.142.940,00	19.793.937.440,00	2.038.008.880,00							22.161.696.700,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							17.755.928.560,00	20.171.142.940,00	19.793.937.440,00	2.038.008.880,00							22.161.696.700,00	
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.473.244,00	0,00	0,00	-72.473.244,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.755.928.560,00	20.171.142.940,00	19.793.937.440,00	2.038.008.880,00							22.161.696.700,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							17.755.928.560,00	20.171.142.940,00	19.793.937.440,00	2.038.008.880,00							22.161.696.700,00	
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	73.134.300,00	73.134.300,00	73.134.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			72.471.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	NON URUSAN							17.755.928.560,00	20.171.142.940,00	19.793.937.440,00	2.038.008.880,00							22.161.696.700,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							17.755.928.560,00	20.171.142.940,00	19.793.937.440,00	2.038.008.880,00							22.161.696.700,00	
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.755.928.560,00	20.171.142.940,00	19.793.937.440,00	2.038.008.880,00							22.161.696.700,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							17.755.928.560,00	20.171.142.940,00	19.793.937.440,00	2.038.008.880,00							22.161.696.700,00	
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	NON URUSAN							17.755.928.560,00	20.171.142.940,00	19.793.937.440,00	2.038.008.880,00							22.161.696.700,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							17.755.928.560,00	20.171.142.940,00	19.793.937.440,00	2.038.008.880,00							22.161.696.700,00	
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.225.300,00	0,00	0,00	-25.225.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.755.928.560,00	20.171.142.940,00	19.793.937.440,00	2.038.008.880,00							22.161.696.700,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							17.755.928.560,00	20.171.142.940,00	19.793.937.440,00	2.038.008.880,00							22.161.696.700,00	
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	25.516.200,00	24.133.700,00	24.133.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.225.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	327.395.000,00	327.386.000,00	216.523.000,00	-110.872.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.481.471.980,00	1.475.820.930,00	1.475.820.930,00	-5.651.050,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.659.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.464.900,00	3.846.500,00	3.846.500,00	1.381.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan				2 Laporan	2 Laporan	160.000.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00	8.000.000,00	Kota Denpasar	PENDAPATAN		Tata Kelola			154.000.000,00	DINAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.319.007.080,00	1.319.974.430,00	1.319.974.430,00	967.350,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara				20 Unit	20 Unit	611.260.700,00	1.579.743.950,00	1.579.743.950,00	968.483.250,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	549.440.700,00	1.336.436.050,00	1.336.436.050,00	786.995.350,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	61.820.000,00	243.307.900,00	243.307.900,00	181.487.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)				12650 Proyek	12650 Proyek	259.998.420,00	215.186.230,00	189.266.230,00	140.001.580,00							400.000.000,00		
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha				2 Dokumen	2 Dokumen	259.998.420,00	215.186.230,00	189.266.230,00	-70.732.190,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	259.998.420,00	215.186.230,00	189.266.230,00	-70.732.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor Yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali				33.5 Persen	33.5 Persen	277.600.560,00	151.553.520,00	136.193.520,00	122.399.440,00							400.000.000,00		
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Publikasi Promosi Penanaman Modal				2 Dokumen	1 Dokumen	277.600.560,00	151.553.520,00	136.193.520,00	-141.407.040,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	277.600.560,00	151.553.520,00	136.193.520,00	-141.407.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				100 persen	100 persen	609.629.960,00	818.735.740,00	640.175.740,00	490.370.040,00							1.100.000.000,00		
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang Terbit sesuai Kewenangan Provinsi				100 Persen	100 Persen	609.629.960,00	818.735.740,00	640.175.740,00	30.545.780,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		1.100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	456.021.400,00	667.234.100,00	498.754.100,00	42.732.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																			
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	153.608.560,00	151.501.640,00	141.421.640,00	-12.186.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi				12,3 Triliun	12,3 Triliun	331.846.141,00	223.606.230,00	182.326.230,00	268.153.859,00							600.000.000,00		
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal				92 Persen	92 Persen	331.846.141,00	223.606.230,00	182.326.230,00	-149.519.911,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				100 Kegiatan usaha	18 Kegiatan usaha	49.575.000,00	34.560.000,00	17.280.000,00	-32.295.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya																		
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya</i>				321 Kegiatan usaha	13 Kegiatan usaha	232.505.941,00	150.146.230,00	126.146.230,00	-106.359.711,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				325 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	49.765.200,00	38.900.000,00	38.900.000,00	-10.865.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan				100 Persen	100 Persen	90.724.280,00	74.790.820,00	70.950.820,00	109.275.720,00							200.000.000,00	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	90.724.280,00	74.790.820,00	70.950.820,00	-19.773.460,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	90.724.280,00	74.790.820,00	70.950.820,00	-19.773.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEBUDAYAAN							127.483.882.407,00	218.972.308.088,00	159.701.415.828,00	32.217.533.421,00								245.322.450.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							127.483.882.407,00	218.972.308.088,00	159.701.415.828,00	32.217.533.421,00							245.322.450.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							127.483.882.407,00	218.972.308.088,00	159.701.415.828,00	32.217.533.421,00							245.322.450.000,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82 Poin	82 Poin	75.851.865.867,00	152.344.200.120,00	95.646.925.036,00	94.350.584.133,00							170.202.450.000,00	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	225.903.760,00	209.396.840,00	159.476.840,00	-66.426.920,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		261.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	202.529.260,00	186.022.340,00	155.302.340,00	-47.226.920,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			226.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	23.374.500,00	23.374.500,00	4.174.500,00	-19.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			35.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi Keuangan perangkat daerah</i>				100 Persen	100 Persen	21.534.322.467,00	59.971.149.617,00	59.971.149.617,00	38.436.827.150,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		65.605.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				116 Orang/ Bulan	849 Orang/ Bulan	20.962.831.667,00	59.409.471.111,00	59.409.471.111,00	38.446.639.444,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			65.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Dokumen	1000 Dokumen	569.490.800,00	559.678.506,00	559.678.506,00	-9.812.294,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				48 Dokumen	48 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			5.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	775.647.700,00	1.077.668.360,00	2.146.555.460,00	1.370.907.760,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		2.239.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				35 Paket	26 Paket	27.085.500,00	27.085.500,00	27.085.500,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			35.875.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	32.000.000,00	331.754.660,00	1.442.876.760,00	1.410.876.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			512.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			117.875.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	22.915.200,00	22.915.200,00	22.915.200,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			25.650.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			23.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	5 Laporan	56.455.000,00	55.488.000,00	46.240.000,00	-10.215.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			410.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	8.239.409.980,00	6.574.150.826,00	6.851.695.802,00	-1.387.714.178,00			Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		10.127.850.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.495.000,00	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			6.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	36 Laporan	500.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00	220.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	2 Laporan	24.950.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				9 Laporan	12 Laporan	618.579.300,00	1.104.242.068,00	1.144.587.568,00	526.008.268,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			1.250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	44.977.933.960,00	84.413.278.177,00	26.219.713.017,00	-18.758.220.943,00			Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		91.379.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				14 Unit	14 Unit	822.857.700,00	834.287.460,00	871.787.460,00	48.929.760,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				41 Unit	21 Unit	14.950.000,00	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	1.167.417.780,00	743.912.888,00	1.732.790.788,00	565.373.008,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			1.800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Terkelolanya Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>				2500 Orang	2500 Orang	27.031.884.140,00	28.516.164.616,00	29.128.298.416,00	2.096.414.276,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Lembaga/Masyarakat		39.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan</i>				40 Objek	20 Objek	384.746.980,00	750.509.552,00	1.495.511.752,00	1.110.764.772,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			7.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>				2000 Orang	1000 Orang	26.647.137.160,00	24.865.155.064,00	24.945.024.064,00	-1.702.113.096,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			29.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</i>				5 Persen	5 Persen	12.127.066.820,00	10.298.468.176,00	16.905.030.676,00	4.777.963.856,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Lembaga/Masyarakat		22.350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				320 Objek	320 Objek	10.317.208.480,00	8.948.586.970,00	15.514.685.970,00	5.197.477.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			20.450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			<i>Jumlah Orang/Lembaga yang Diben Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan</i>				23 Sertifikat	23 Sertifikat	1.809.858.340,00	1.349.881.206,00	1.390.344.706,00	-419.513.634,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			1.900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>				100 Lembaga	100 Lembaga	482.477.400,00	10.126.210.100,00	10.080.530.100,00	9.598.052.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Lembaga/Masyarakat		900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi</i>				250 Unit	150 Unit	482.477.400,00	10.126.210.100,00	10.080.530.100,00	9.598.052.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan				5 Persen	5 Persen	840.137.740,00	845.299.070,00	1.477.712.594,00	1.104.862.260,00							1.945.000.000,00	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				518 Lembaga	518 Lembaga	840.137.740,00	845.299.070,00	1.477.712.594,00	637.574.854,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Lembaga/Masyarakat		1.945.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i>				1110 Orang	153 Orang	486.616.700,00	483.986.700,00	1.129.840.224,00	643.223.524,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			1.600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				270 Orang	225 Orang	90.611.300,00	90.610.900,00	90.610.900,00	-400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			625.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		UPTD TAMAN BUDAYA							127.483.882.407,00	218.972.308.088,00	159.701.415.828,00	32.217.533.421,00							245.322.450.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							127.483.882.407,00	218.972.308.088,00	159.701.415.828,00	32.217.533.421,00							245.322.450.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							127.483.882.407,00	218.972.308.088,00	159.701.415.828,00	32.217.533.421,00							245.322.450.000,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				81 Poin	81 Poin	75.851.865.867,00	152.344.200.120,00	95.646.925.036,00	94.350.584.133,00							170.202.450.000,00	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD Taman Budaya</i>				100 Persen	100 Persen	775.647.700,00	1.077.668.360,00	2.146.555.460,00	1.370.907.760,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		2.239.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	69.999.000,00	69.997.000,00	69.997.000,00	-2.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	49.999.300,00	49.998.700,00	49.998.700,00	-600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	8.340.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	24.994.000,00	24.994.000,00	24.994.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			43.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	98.648.000,00	98.556.300,00	298.334.300,00	199.686.300,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		589.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	2 Unit	42.500.000,00	42.470.000,00	242.248.000,00	199.748.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			280.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	8.239.409.980,00	6.574.150.826,00	6.851.695.802,00	-1.387.714.178,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		10.127.850.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	985.600.000,00	985.600.000,00	985.600.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	14.930.000,00	14.930.000,00	-70.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			325.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	994.732.240,00	1.147.368.058,00	1.147.368.058,00	152.635.818,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			1.250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	44.977.933.960,00	84.413.278.177,00	26.219.713.017,00	-18.758.220.943,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		91.379.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3 Unit	20.000.000,00	19.480.000,00	3.519.480.000,00	3.499.480.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	1.230.828.480,00	1.066.728.792,00	2.128.428.792,00	897.600.312,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Taman Budaya				75 Persen	75 Persen	39.641.428.360,00	48.940.842.892,00	56.113.859.192,00	22.608.571.640,00							62.250.000.000,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memadai				-	2000 orang	27.031.884.140,00	28.516.164.616,00	29.128.298.416,00	2.096.414.276,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Lembaga/Masyarakat		39.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				-	2000 Orang	0,00	2.529.984.000,00	2.317.246.600,00	2.317.246.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN RI DAYA-TAMAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	-			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara				-	4 Unit	0,00	370.516.000,00	370.516.000,00	370.516.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
		UPTD MUSEUM BALI								127.483.882.407,00	218.972.308.088,00	159.701.415.828,00	32.217.533.421,00							245.322.450.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							127.483.882.407,00	218.972.308.088,00	159.701.415.828,00	32.217.533.421,00							245.322.450.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							127.483.882.407,00	218.972.308.088,00	159.701.415.828,00	32.217.533.421,00							245.322.450.000,00		
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				81 Poin	81 Poin	75.851.865.867,00	152.344.200.120,00	95.646.925.036,00	94.350.584.133,00							170.202.450.000,00		
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	775.647.700,00	1.077.668.360,00	2.146.555.460,00	1.370.907.760,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		2.239.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	61.517.500,00	61.517.500,00	61.517.500,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			72.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			118.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	25.472.000,00	25.472.000,00	8.301.000,00	-17.171.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			26.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3 Dokumen	5.402.000,00	5.402.000,00	5.402.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			6.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	13.713.000,00	13.713.000,00	5.175.000,00	-8.538.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			77.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	98.648.000,00	98.556.300,00	298.334.300,00	199.686.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		589.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	4 Unit	21.148.000,00	21.086.300,00	21.086.300,00	-61.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			257.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	8.239.409.980,00	6.574.150.826,00	6.851.695.802,00	-1.387.714.178,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		10.127.850.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.386.400,00	2.386.400,00	2.386.400,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			3.100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	206.000.000,00	206.000.000,00	206.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			212.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	4 Laporan	25.273.200,00	19.264.840,00	19.264.840,00	-6.008.360,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			51.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.596.155.240,00	1.002.640.136,00	1.002.640.136,00	-593.515.104,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			1.800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	44.977.933.960,00	84.413.278.177,00	26.219.713.017,00	-18.758.220.943,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		91.379.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				3 Unit	3 Unit	107.795.000,00	101.600.000,00	101.600.000,00	-6.195.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			143.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	6 Unit	34.840.000,00	38.080.000,00	38.080.000,00	3.240.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			41.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	1 Unit	41.324.330.000,00	79.387.966.013,00	15.606.322.953,00	-25.718.007.047,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			85.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Museum Bali				75 Persen	75 Persen	0,00	5.796.891.000,00	5.570.810.000,00	7.325.000.000,00							7.325.000.000,00	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	<i>Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali</i>				-	25000 Orang	0,00	5.796.891.000,00	5.570.810.000,00	5.570.810.000,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Lembaga/Masyarakat		7.325.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan</i>				-	700 Unit	0,00	909.890.300,00	879.170.300,00	879.170.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			1.250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum																		
			<i>Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum</i>				-	10 Unit	0,00	1.609.445.400,00	1.463.387.400,00	1.463.387.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia</i>				-	6 Unit	0,00	168.749.300,00	168.749.300,00	168.749.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI							127.483.882.407,00	218.972.308.088,00	159.701.415.828,00	32.217.533.421,00							245.322.450.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							127.483.882.407,00	218.972.308.088,00	159.701.415.828,00	32.217.533.421,00							245.322.450.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							127.483.882.407,00	218.972.308.088,00	159.701.415.828,00	32.217.533.421,00							245.322.450.000,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				81 Poin	81 Poin	75.851.865.867,00	152.344.200.120,00	95.646.925.036,00	94.350.584.133,00							170.202.450.000,00	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</i>				100 Persen	100 Persen	775.647.700,00	1.077.668.360,00	2.146.555.460,00	1.370.907.760,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		2.239.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	29.995.300,00	29.995.300,00	29.995.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	49.821.400,00	53.057.000,00	53.057.000,00	3.235.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	51.593.100,00	51.593.100,00	51.593.100,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	6.777.400,00	6.777.400,00	6.777.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			52.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				3 Laporan	1 Laporan	7.278.000,00	7.278.000,00	0,00	-7.278.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	98.648.000,00	98.556.300,00	298.334.300,00	199.686.300,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		589.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			52.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	8.239.409.980,00	6.574.150.826,00	6.851.695.802,00	-1.387.714.178,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		10.127.850.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.491.500,00	1.491.500,00	1.491.500,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			375.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	42.930.000,00	42.930.000,00	42.930.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	2.870.817.100,00	946.852.824,00	1.184.052.300,00	-1.686.764.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			2.850.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	44.977.933.960,00	84.413.278.177,00	26.219.713.017,00	-18.758.220.943,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Organisasi		91.379.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	4 Unit	144.945.000,00	123.975.000,00	123.975.000,00	-20.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	14.970.000,00	14.970.000,00	14.970.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	2.002.328.024,00	2.002.328.024,00	1.972.328.024,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			525.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali				75 Persen	78,5 Persen	0,00	5.796.891.000,00	5.570.810.000,00	7.325.000.000,00							7.325.000.000,00			
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi yang memadai				-	51 Unit	0,00	5.796.891.000,00	5.570.810.000,00	5.570.810.000,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Lembaga/Masyaraka t		7.325.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																				
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				-	33 Unit	0,00	756.260.200,00	756.260.200,00	756.260.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			875.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum																				
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				-	10 Unit	0,00	2.087.713.200,00	2.038.410.200,00	2.038.410.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			2.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				-	8 Unit	0,00	264.832.600,00	264.832.600,00	264.832.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
		DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT								481.841.162.990,00	482.464.120.708,00	482.164.038.708,00	322.875.718,00								533.432.370.294,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							481.841.162.990,00	482.464.120.708,00	482.164.038.708,00	322.875.718,00							533.432.370.294,00			
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							481.841.162.990,00	482.464.120.708,00	482.164.038.708,00	322.875.718,00							533.432.370.294,00			
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	15.043.281.450,00	15.777.621.884,00	15.639.383.884,00	3.707.157.656,00							18.750.439.106,00			
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun				-	7 Dokumen	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur		40.700.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT		
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			28.600.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT		
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			12.100.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di proses</i>				-	44 Orang/Bulan	11.500.412.296,00	12.131.795.722,00	12.131.795.722,00	631.383.426,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur		12.650.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				52 Orang/Bulan	44 Orang/Bulan	11.500.412.296,00	12.131.795.722,00	12.131.795.722,00	631.383.426,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			12.650.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang di Proses</i>				847 Dokumen	847 Dokumen	654.730.234,00	480.753.100,00	342.515.100,00	-312.215.134,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur		725.175.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	10.934.200,00	10.934.200,00	10.934.200,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			7.425.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	36.145.200,00	36.145.200,00	36.145.200,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			39.050.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				720 Dokumen	720 Dokumen	19.243.700,00	19.243.700,00	19.243.700,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			18.700.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				125 Laporan	125 Laporan	588.407.134,00	414.430.000,00	276.192.000,00	-312.215.134,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			660.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai</i>				15 Unit	15 Unit	269.007.960,00	267.604.080,00	267.604.080,00	-1.403.880,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur		550.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	15 Unit	269.007.960,00	267.604.080,00	267.604.080,00	-1.403.880,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			550.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai				35 Laporan	35 Laporan	374.202.600,00	548.179.734,00	548.179.734,00	173.977.134,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur		385.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				35 Laporan	35 Laporan	374.202.600,00	548.179.734,00	548.179.734,00	173.977.134,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			385.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai				35 Laporan	12 Laporan	2.207.928.360,00	2.312.289.248,00	2.312.289.248,00	104.360.888,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur		4.399.564.106,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	9 Unit	553.336.340,00	566.441.852,00	566.441.852,00	13.105.512,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			990.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	1.654.592.020,00	1.745.847.396,00	1.745.847.396,00	91.255.376,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			3.409.564.106,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
2.	2.22.09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Indeks Membangun Desa Adat				-	0,8025 Nilai	466.797.881.540,00	466.686.498.824,00	466.524.654.824,00	47.884.049.648,00							514.681.931.188,00	
	2.22.09.8.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina				-	600 Desa Adat	466.021.060.580,00	465.927.285.188,00	465.844.815.188,00	-176.245.392,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Desa Adat se Bali		512.866.931.188,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.01.0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat																		
			Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya				300 Desa	300 Desa	465.758.014.160,00	465.670.107.876,00	465.625.077.876,00	-132.936.284,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			511.904.431.188,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.01.0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Produk Hukum Desa Adat</i>				300 Dokumen	300 Dokumen	263.046.420,00	257.177.312,00	219.737.312,00	-43.309.108,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			962.500.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.02	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	<i>Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses</i>				200 Dokumen 45 undefined	75 Desa Adat	376.092.840,00	370.865.706,00	327.491.706,00	-48.601.134,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Desa Adat se Bali		1.155.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.02.0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat																		
			<i>Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya</i>				200 Desa	30 Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	65.266.000,00	-34.734.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			495.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.02.0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat																		
			<i>Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya</i>				45 Desa	45 Desa	276.092.840,00	270.865.706,00	262.225.706,00	-13.867.134,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			660.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.09.8.03	Penyelenggaraan Desa Adat	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Parahyangan, Pawongan, dan Palembang</i>				4 Dokumen	6 Dokumen	400.728.120,00	388.347.930,00	352.347.930,00	-48.380.190,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Desa Adat dan Subak se Bali		660.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.03.0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palembang																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palembang</i>				6 Laporan	6 Laporan	400.728.120,00	388.347.930,00	352.347.930,00	-48.380.190,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal			660.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							31.397.331.624,00	36.174.908.553,00	36.111.610.553,00	4.714.278.929,00							36.621.221.983,00	
	3	NON URUSAN							31.397.331.624,00	36.174.908.553,00	36.111.610.553,00	4.714.278.929,00							36.621.221.983,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							31.397.331.624,00	36.174.908.553,00	36.111.610.553,00	4.714.278.929,00							36.621.221.983,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)				82 Nilai	82 Nilai	30.022.623.924,00	33.523.890.869,00	33.379.598.869,00	-265.763.393,00							29.756.860.531,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>				100 Persen	100 Persen	58.414.400,00	76.748.000,00	36.018.000,00	-22.396.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		78.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	58.414.400,00	0,00	0,00	-58.414.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							31.397.331.624,00	36.174.908.553,00	36.111.610.553,00	4.714.278.929,00							36.621.221.983,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							31.397.331.624,00	36.174.908.553,00	36.111.610.553,00	4.714.278.929,00							36.621.221.983,00	
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				-	4 Dokumen	0,00	76.748.000,00	36.018.000,00	36.018.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			78.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN</i>				60 Dokumen	60 Dokumen	23.748.340.878,00	25.447.615.889,00	25.447.615.889,00	1.699.275.011,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		23.748.340.878,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				1610 Orang/ Bulan	1610 Orang/ Bulan	23.748.340.878,00	25.447.615.889,00	25.447.615.889,00	1.699.275.011,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			23.748.340.878,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu				100 Persen	100 Persen	1.454.355.986,00	1.348.447.500,00	1.266.627.500,00	-187.728.486,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		551.703.080,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.477.500,00	7.459.500,00	7.459.500,00	-18.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	827.763.586,00	728.957.900,00	728.957.900,00	-98.805.686,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	194.542.400,00	189.642.400,00	189.642.400,00	-4.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			124.712.380,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18.923.500,00	18.923.500,00	18.923.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	162.820.000,00	162.820.000,00	94.100.000,00	-68.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik				100 Persen	100 Persen	650.857.560,00	375.637.100,00	375.637.100,00	-275.220.460,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		370.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	533.503.960,00	279.565.620,00	279.565.620,00	-253.938.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik				100 Persen	100 Persen	393.751.700,00	393.751.700,00	393.751.700,00	0,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		270.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.611.000,00	3.611.000,00	3.611.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	131.050.000,00	131.050.000,00	131.050.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	3.716.903.400,00	5.881.690.680,00	5.859.948.680,00	2.143.045.280,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan	Aparatur		4.738.816.573,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	916.713.980,00	950.364.936,00	950.364.936,00	33.650.956,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			571.337.984,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	615.185.680,00	2.828.924.074,00	2.828.924.074,00	2.213.738.394,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			776.080.172,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	110.230.000,00	90.230.000,00	90.230.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil				46 Persen	46 Persen	287.681.540,00	154.596.492,00	275.031.492,00	712.829.660,00							1.000.511.200,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				102575.33 Ha	102575.33 Ha	214.780.000,00	84.495.000,00	219.235.000,00	4.455.000,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Provinsi Bali		910.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				57,862.83 Ha	57,862.83 Ha	129.890.000,00	0,00	0,00	-129.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru																		
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	34.890.000,00	34.495.000,00	17.475.000,00	-17.415.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi																		
			Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan				5 Kelompok	5 Kelompok	72.901.540,00	70.101.492,00	55.796.492,00	-17.105.048,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Provinsi Bali		90.511.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				40 Orang	40 Orang	72.901.540,00	70.101.492,00	55.796.492,00	-17.105.048,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			90.511.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				2 Persen	2 Persen	211.897.520,00	472.272.902,00	423.017.402,00	613.949.627,00							825.847.147,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap				105770.02 Ton	105770.02 Ton	130.275.520,00	390.850.902,00	382.301.902,00	252.026.382,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok Nelayan		500.847.147,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				2 Unit	1 Unit	130.275.520,00	390.850.902,00	382.301.902,00	252.026.382,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			500.847.147,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							31.397.331.624,00	36.174.908.553,00	36.111.610.553,00	4.714.278.929,00							36.621.221.983,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)				82 Nilai	82 Nilai	30.022.623.924,00	33.523.890.869,00	33.379.598.869,00	-265.763.393,00							29.756.860.531,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu				100 Persen	100 Persen	1.454.355.986,00	1.348.447.500,00	1.266.627.500,00	-187.728.486,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		551.703.080,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.664.000,00	4.664.000,00	4.664.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	7.117.200,00	7.117.200,00	7.117.200,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	35.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.996.000,00	1.996.000,00	1.996.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik				100 Persen	100 Persen	650.857.560,00	375.637.100,00	375.637.100,00	-275.220.460,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		370.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	39.377.600,00	38.554.200,00	38.554.200,00	-823.400,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik				100 Persen	100 Persen	393.751.700,00	393.751.700,00	393.751.700,00	0,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		270.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	471.000,00	471.000,00	471.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	128.599.200,00	128.599.200,00	128.599.200,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			140.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	3.716.903.400,00	5.881.690.680,00	5.859.948.680,00	2.143.045.280,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		4.738.816.573,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perzinannya				2 Unit	5 Unit	124.047.140,00	166.497.984,00	166.497.984,00	42.450.844,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	287.138.560,00	265.346.476,00	265.346.476,00	-21.792.084,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya				2 Persen	2 Persen	399.416.060,00	1.023.918.104,00	1.000.690.604,00	3.982.999.397,00							4.382.415.457,00	
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas				1300000 Ekor	1300000 Ekor	200.368.560,00	824.870.604,00	824.870.604,00	624.502.044,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	3 Unit	49.640.000,00	824.870.604,00	824.870.604,00	775.230.604,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	150.728.560,00	0,00	0,00	-150.728.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN							31.397.331.624,00	36.174.908.553,00	36.111.610.553,00	4.714.278.929,00							36.621.221.983,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							31.397.331.624,00	36.174.908.553,00	36.111.610.553,00	4.714.278.929,00							36.621.221.983,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							31.397.331.624,00	36.174.908.553,00	36.111.610.553,00	4.714.278.929,00							36.621.221.983,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)				82 Nilai	82 Nilai	30.022.623.924,00	33.523.890.869,00	33.379.598.869,00	-265.763.393,00							29.756.860.531,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu				100 Persen	100 Persen	1.454.355.986,00	1.348.447.500,00	1.266.627.500,00	-187.728.486,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		551.703.080,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	8.433.000,00	8.433.000,00	8.433.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			2.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>				100 Persen	100 Persen	650.857.560,00	375.637.100,00	375.637.100,00	-275.220.460,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		370.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	4 Unit	56.749.680,00	37.072.080,00	37.072.080,00	-19.677.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>				100 Persen	100 Persen	393.751.700,00	393.751.700,00	393.751.700,00	0,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		270.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1 Laporan	1.020.500,00	1.020.500,00	1.020.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>				100 Persen	100 Persen	3.716.903.400,00	5.881.690.680,00	5.859.948.680,00	2.143.045.280,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		4.738.816.573,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	2 Unit	92.232.000,00	92.232.000,00	92.232.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	22 Unit	14.780.000,00	0,00	0,00	-14.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	422.373.240,00	349.457.188,00	349.457.188,00	-72.916.052,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	22 Unit	0,00	14.780.000,00	14.780.000,00	14.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			20.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan				2 Persen	2 Persen	375.712.480,00	818.720.302,00	882.480.302,00	104.105.368,00							479.817.848,00	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	<i>Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan</i>				2600 Reko mendasi	2600 Reko mendasi	375.712.480,00	818.720.302,00	882.480.302,00	506.767.822,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi;	Unit Pengolahan Ikan skala UMKM, dan Menengah Besar		479.817.848,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</i>				7 Kegiatan	7 Kegiatan	49.296.000,00	53.241.000,00	46.041.000,00	-3.255.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			90.314.425,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		
			<i>Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko</i>				7 Kegiatan	7 Kegiatan	699.600,00	441.520.800,00	491.000.800,00	490.301.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI							31.397.331.624,00	36.174.908.553,00	36.111.610.553,00	4.714.278.929,00							36.621.221.983,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							31.397.331.624,00	36.174.908.553,00	36.111.610.553,00	4.714.278.929,00							36.621.221.983,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							31.397.331.624,00	36.174.908.553,00	36.111.610.553,00	4.714.278.929,00							36.621.221.983,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)				82 Nilai	82 Nilai	30.022.623.924,00	33.523.890.869,00	33.379.598.869,00	-265.763.393,00							29.756.860.531,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>				100 Persen	100 Persen	1.454.355.986,00	1.348.447.500,00	1.266.627.500,00	-187.728.486,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		551.703.080,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	24.858.100,00	24.848.100,00	21.748.100,00	-3.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	41.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			38.181.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>				100 Persen	100 Persen	3.716.903.400,00	5.881.690.680,00	5.859.948.680,00	2.143.045.280,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		4.738.816.573,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	2 Unit	172.570.000,00	172.510.000,00	150.768.000,00	-21.802.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			83.211.113,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	790.960.660,00	784.146.692,00	784.146.692,00	-6.813.968,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			962.687.304,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah				73 Persen	73 Persen	287.681.540,00	154.596.492,00	275.031.492,00	712.829.660,00							1.000.511.200,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	<i>Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan</i>				5 Kawasan	5 Kawasan	214.780.000,00	84.495.000,00	219.235.000,00	4.455.000,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kawasan konservasi		910.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			<i>Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola</i>				46,838.10 Ha	46,838.10 Ha	50.000.000,00	50.000.000,00	31.760.000,00	-18.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan			850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN							31.397.331.624,00	36.174.908.553,00	36.111.610.553,00	4.714.278.929,00							36.621.221.983,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							31.397.331.624,00	36.174.908.553,00	36.111.610.553,00	4.714.278.929,00							36.621.221.983,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							31.397.331.624,00	36.174.908.553,00	36.111.610.553,00	4.714.278.929,00							36.621.221.983,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)				82 Nilai	82 Nilai	30.022.623.924,00	33.523.890.869,00	33.379.598.869,00	-265.763.393,00							29.756.860.531,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu				100 Persen	100 Persen	1.454.355.986,00	1.348.447.500,00	1.266.627.500,00	-187.728.486,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		551.703.080,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	26.510.700,00	26.835.900,00	26.835.900,00	325.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			23.506.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			36.053.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10 Laporan	26.750.000,00	26.750.000,00	16.750.000,00	-10.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			26.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik				100 Persen	100 Persen	650.857.560,00	375.637.100,00	375.637.100,00	-275.220.460,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		370.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	21.226.320,00	20.445.200,00	20.445.200,00	-781.120,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik				100 Persen	100 Persen	393.751.700,00	393.751.700,00	393.751.700,00	0,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		270.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			1.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	3.716.903.400,00	5.881.690.680,00	5.859.948.680,00	2.143.045.280,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		4.738.816.573,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	130.110.000,00	127.800.000,00	127.800.000,00	-2.310.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	37.682.140,00	39.401.330,00	39.401.330,00	1.719.190,00	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.880.000,00	0,00	0,00	-2.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				2 Persen	2 Persen	211.897.520,00	472.272.902,00	423.017.402,00	613.949.627,00							825.847.147,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan				8500 Ton	8500 Ton	47.899.000,00	47.699.000,00	23.854.000,00	-24.045.000,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Pelabuhan Perikanan		270.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				1 Layanan	1 Layanan	47.899.000,00	47.699.000,00	23.854.000,00	-24.045.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			270.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA							22.441.808.866,00	24.438.350.368,00	23.772.668.250,00	1.330.859.384,00							23.598.881.557,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							22.441.808.866,00	24.438.350.368,00	23.772.668.250,00	1.330.859.384,00							23.598.881.557,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							22.441.808.866,00	24.438.350.368,00	23.772.668.250,00	1.330.859.384,00							23.598.881.557,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISPAR)				85 Persen	85 Persen	14.355.008.902,00	16.245.740.294,00	16.981.868.176,00	717.750.444,00							15.072.759.346,00	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				23 Dokumen	23 Dokumen	125.118.104,00	122.996.812,00	122.996.812,00	-2.121.292,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Dinas Pariwisata Provinsi Bali		131.374.009,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	7 Dokumen	125.118.104,00	122.996.812,00	122.996.812,00	-2.121.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			131.374.009,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan				80 Dokumen	86 Dokumen	11.862.914.778,00	13.168.970.608,00	13.168.970.608,00	1.306.055.830,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	-		12.456.060.516,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/ Bulan	77 Orang/ Bulan	11.862.914.778,00	13.168.970.608,00	13.168.970.608,00	1.306.055.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			12.456.060.516,00	DINAS PARIWISATA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				6 Jenis	6 Jenis	589.429.300,00	594.427.794,00	536.894.354,00	-52.534.946,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	-		618.900.765,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.216.600,00	7.216.600,00	7.216.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			7.577.430,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	327.201.700,00	327.714.100,00	356.550.660,00	29.348.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			343.561.785,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	67.500.000,00	69.617.494,00	69.617.494,00	2.117.494,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			70.875.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.924.000,00	9.882.600,00	9.882.600,00	-41.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			10.420.200,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	177.587.000,00	179.997.000,00	93.627.000,00	-83.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			186.466.350,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan				3 Jenis	3 Jenis	1.207.929.720,00	1.494.728.080,00	2.120.381.428,00	912.451.708,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	-		1.268.326.206,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	182.008.200,00	182.008.200,00	182.008.200,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			191.108.610,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	1.025.921.520,00	1.312.719.880,00	1.938.373.228,00	912.451.708,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			1.077.217.596,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				3 Jenis	3 Jenis	569.617.000,00	864.617.000,00	1.032.624.974,00	463.007.974,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	-		598.097.850,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				9 Unit	9 Unit	551.217.000,00	551.217.000,00	551.217.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			578.777.850,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	213.797.480,00	305.544.020,00	276.946.020,00	63.148.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			224.487.254,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	376.278.560,00	372.793.804,00	322.393.804,00	-53.884.756,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			395.092.488,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.348.131.420,00	5.242.262.312,00	4.392.901.312,00	-955.230.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			5.615.537.991,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				3 Persentase	3 Persentase	150.100.836,00	157.368.084,00	140.088.084,00	7.505.041,00							157.605.877,00	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	<i>Jumlah Pembinaan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</i>				9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	107.614.136,00	114.881.384,00	97.601.384,00	-10.012.752,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	-		112.994.842,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula</i>				24 Laporan	24 Laporan	107.614.136,00	114.881.384,00	97.601.384,00	-10.012.752,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			112.994.842,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	42.486.700,00	42.486.700,00	42.486.700,00	0,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	-		44.611.035,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	42.486.700,00	42.486.700,00	42.486.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			44.611.035,00	DINAS PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan				47 Persentase	47 Persentase	921.098.880,00	1.063.121.698,00	894.950.698,00	46.054.524,00							967.153.404,00	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	<i>Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan</i>				235 Orang	235 Orang	921.098.880,00	1.063.121.698,00	894.950.698,00	-26.148.182,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	-		967.153.404,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>				35 Orang	95 Orang	286.245.740,00	288.630.092,00	267.634.092,00	-18.611.648,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			300.558.027,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			<i>Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata</i>				100 Orang	220 Orang	304.554.260,00	301.069.504,00	250.391.504,00	-54.162.756,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			319.781.973,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>				20 Orang	20 Orang	330.298.880,00	473.422.102,00	376.925.102,00	46.626.222,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			346.813.404,00	DINAS PARIWISATA

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	7 Dokumen	494.101.920,00	469.849.162,00	410.577.162,00	-83.524.758,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			358.949.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	343.090.180,00	301.514.152,00	286.154.152,00	-56.936.028,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			365.521.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	43.209.753.020,00	59.543.237.002,00	59.539.397.002,00	16.329.643.982,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		47.606.479.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				293 Orang/ Bulan	293 Orang/ Bulan	42.879.400.000,00	59.247.337.822,00	59.247.337.822,00	16.367.937.822,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			47.167.340.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	330.353.020,00	295.899.180,00	292.059.180,00	-38.293.840,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			439.139.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	635.044.510,00	694.460.460,00	645.565.100,00	10.520.590,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		444.160.444,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.263.000,00	19.263.000,00	19.263.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			14.932.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	220.836.250,00	220.882.300,00	212.818.940,00	-8.017.310,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			57.513.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57.987.800,00	67.003.400,00	67.003.400,00	9.015.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			63.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.300.000,00	19.125.000,00	19.125.000,00	12.825.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			5.940.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	70.780.000,00	107.840.000,00	67.008.000,00	-3.772.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			15.272.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun	1 Tahun	2.160.869.120,00	2.105.966.563,00	2.105.966.563,00	-54.902.557,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		2.233.246.708,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	417.000.000,00	417.000.000,00	417.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			349.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	322.614.220,00	296.109.662,00	296.109.662,00	-26.504.558,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			350.521.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun	1 Tahun	4.514.534.080,00	4.665.005.012,00	4.665.005.012,00	150.470.932,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		5.129.542.568,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				58 Unit	58 Unit	1.545.044.960,00	1.845.842.822,00	1.845.842.822,00	300.797.862,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			1.770.730.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	3 Unit	772.642.800,00	742.110.364,00	742.110.364,00	-30.532.436,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			848.807.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				380 Unit	314 Unit	192.445.000,00	180.800.000,00	180.800.000,00	-11.645.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			225.304.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian				90 Persen	90 Persen	12.894.195.880,00	14.937.925.066,00	23.618.623.366,00	1.683.982.120,00							14.578.178.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				3 Laporan	3 Laporan	5.159.525.180,00	5.203.591.720,00	10.170.151.720,00	5.010.626.540,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kios Pengecer dan Kelompok Tani		3.111.970.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	3 Laporan	5.159.525.180,00	5.203.591.720,00	10.170.151.720,00	5.010.626.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			3.111.970.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian				80 Persen	80 Persen	4.994.730.460,00	4.574.538.164,00	7.664.898.864,00	2.670.168.404,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok Masyarakat		5.673.201.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani				3 Kasus	3 Kasus	80.740.140,00	76.613.410,00	58.853.410,00	-21.886.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			52.670.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan dan Produk Unggulan				-	60 Persen	145.453.820,00	133.073.630,00	177.113.630,00	100.867.180,00							246.321.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina				-	102 Kelompok	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok Tani		62.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	10 Orang	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			62.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina				102 Kelom pok/Unit	102 Kelom pok/Unit	145.453.820,00	133.073.630,00	120.113.630,00	-25.340.190,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok Tani		183.621.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				102 Kelompok	102 Kelompok	145.453.820,00	133.073.630,00	120.113.630,00	-25.340.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			183.621.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN							70.702.559.670,00	97.247.128.009,00	106.653.159.049,00	35.950.599.379,00					94.882.350.318,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.330.189.300,00	2.201.538.334,00	2.903.894.734,00	573.705.434,00							9.322.198.012,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							2.330.189.300,00	2.201.538.334,00	2.903.894.734,00	573.705.434,00							9.322.198.012,00	
1.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Produk Bersertifikat Organik Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi				1,10 95,9 Persen Persen	1,10 95,9 Persen Persen	615.567.140,00	607.358.002,00	576.868.002,00	205.378.860,00							820.946.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang Bersertifikat Organik				3 Sertifikat	3 Sertifikat	615.567.140,00	607.358.002,00	576.868.002,00	-38.699.138,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Pelaku Usaha Pertanian Organik		820.946.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan																		
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				5 Sertifikat	5 Sertifikat	341.573.140,00	316.812.760,00	298.322.760,00	-43.250.380,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			506.846.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				12 Dokumen	12 Dokumen	151.046.220,00	145.177.112,00	145.177.112,00	-5.869.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			206.538.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				81,60 Nilai	81,60 Nilai	51.357.392.830,00	67.780.032.351,00	67.652.664.991,00	4.780.505.890,00							56.137.898.720,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	635.044.510,00	694.460.460,00	645.565.100,00	10.520.590,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		444.160.444,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	3.927.800,00	3.927.800,00	3.927.800,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			4.598.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	32.579.860,00	32.579.860,00	32.579.860,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			16.463.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			36.173.280,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				1 Tahun	1 Tahun	2.160.869.120,00	2.105.966.563,00	2.105.966.563,00	-54.902.557,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		2.233.246.708,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	127.230.000,00	127.230.000,00	127.230.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			153.153.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	117.101.420,00	104.721.230,00	104.721.230,00	-12.380.190,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			129.786.932,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				1 Tahun	1 Tahun	4.514.534.080,00	4.665.005.012,00	4.665.005.012,00	150.470.932,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		5.129.542.568,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				7 Unit	7 Unit	181.171.280,00	172.908.820,00	172.908.820,00	-8.262.460,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			195.929.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	80.364.280,00	72.110.820,00	72.110.820,00	-8.253.460,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			88.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				38 Unit	38 Unit	42.060.000,00	42.060.000,00	42.060.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			43.274.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
1.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis				-	5 Persen	1.956.193.024,00	10.400.607.072,00	9.559.647.072,00	10.053.585.774,00							12.009.778.798,00	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	<i>Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji</i>				-	1000 Unit 75 Dokumen	585.088.604,00	532.326.060,00	532.326.060,00	-52.762.544,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha		693.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi				1000 Unit	1000 Unit	256.728.260,00	233.221.240,00	233.221.240,00	-23.507.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			322.287.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																			
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				75 Dokumen	75 Dokumen	328.360.344,00	299.104.820,00	299.104.820,00	-29.255.524,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			371.013.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN							70.702.559.670,00	97.247.128.009,00	106.653.159.049,00	35.950.599.379,00						94.882.350.318,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00		
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				81,60 Nilai	81,60 Nilai	51.357.392.830,00	67.780.032.351,00	67.652.664.991,00	4.780.505.890,00							56.137.898.720,00		
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	635.044.510,00	694.460.460,00	645.565.100,00	10.520.590,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		444.160.444,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	599.900,00	599.900,00	599.900,00	0,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			1.349.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.056.000,00	5.056.000,00	5.056.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			7.203.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun	1 Tahun	2.160.869.120,00	2.105.966.563,00	2.105.966.563,00	-54.902.557,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		2.233.246.708,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	239.360.000,00	220.520.000,00	220.520.000,00	-18.840.000,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			164.296.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	191.633.900,00	178.320.332,00	178.320.332,00	-13.313.568,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			210.953.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				1 Tahun	1 Tahun	4.514.534.080,00	4.665.005.012,00	4.665.005.012,00	150.470.932,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		5.129.542.568,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				78 Unit	78 Unit	232.146.420,00	232.277.312,00	232.277.312,00	130.892,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			215.095.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	5 Unit	610.414.240,00	561.897.642,00	561.897.642,00	-48.516.598,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			751.606.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				148 Unit	148 Unit	3.370.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	1.830.000,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			3.201.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)				82,91 Persen	82,91 Persen	1.375.141.416,00	1.251.181.194,00	1.330.406.594,00	399.750.584,00							1.774.892.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	<i>Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)</i>				4 Ha	9 Kabupate n/Kota	1.375.141.416,00	1.251.181.194,00	1.330.406.594,00	-44.734.822,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok Tani/Subak		1.774.892.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>				4 Ha	4 Ha	450.962.700,00	423.615.100,00	505.720.500,00	54.757.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			595.795.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			<i>Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani</i>				2 Ha	2 Ha	557.029.256,00	492.402.740,00	490.482.740,00	-66.546.516,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi;			735.433.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	367.149.460,00	335.163.354,00	334.203.354,00	-32.946.106,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			443.664.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK							70.702.559.670,00	97.247.128.009,00	106.653.159.049,00	35.950.599.379,00						94.882.350.318,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				-	81,60 Nilai	51.357.392.830,00	67.780.032.351,00	67.652.664.991,00	4.780.505.890,00							56.137.898.720,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	635.044.510,00	694.460.460,00	645.565.100,00	10.520.590,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		444.160.444,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.095.200,00	6.095.200,00	6.095.200,00	0,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			13.846.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.126.500,00	11.126.500,00	11.126.500,00	0,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			17.661.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			35.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.160.869.120,00	2.105.966.563,00	2.105.966.563,00	-54.902.557,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		2.233.246.708,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			54.120.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	272.324.680,00	262.970.816,00	262.970.816,00	-9.353.864,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			301.538.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun	1 Tahun	4.514.534.080,00	4.665.005.012,00	4.665.005.012,00	150.470.932,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		5.129.542.568,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	217.796.420,00	238.971.640,00	238.971.640,00	21.175.220,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			229.512.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	308.957.120,00	275.943.280,00	275.943.280,00	-33.013.840,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			337.102.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				7 Unit	7 Unit	4.870.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			7.722.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak				0,82 Persen	0,82 Persen	12.894.195.880,00	14.937.925.066,00	23.618.623.366,00	1.683.982.120,00							14.578.178.000,00	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</i>				3 Laporan	3 Laporan	2.692.574.040,00	5.112.600.982,00	5.736.378.582,00	3.043.804.542,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		5.729.207.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		
			<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>				3 laporan	3 laporan	2.189.658.780,00	2.030.315.210,00	2.357.702.810,00	168.044.030,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			2.464.429.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN							70.702.559.670,00	97.247.128.009,00	106.653.159.049,00	35.950.599.379,00								94.882.350.318,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				81,60 Nilai	81,60 Nilai	51.357.392.830,00	67.780.032.351,00	67.652.664.991,00	4.780.505.890,00							56.137.898.720,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				1 Paket	1 Paket	635.044.510,00	694.460.460,00	645.565.100,00	10.520.590,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		444.160.444,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	3.197.300,00	3.197.300,00	3.197.300,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			3.836.760,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	6.798.400,00	7.269.200,00	7.269.200,00	470.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			8.723.404,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			39.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				1 Tahun	1 Tahun	2.160.869.120,00	2.105.966.563,00	2.105.966.563,00	-54.902.557,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		2.233.246.708,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	90.409.000,00	135.109.000,00	135.109.000,00	44.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			162.130.800,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	80.327.480,00	72.074.020,00	72.074.020,00	-8.253.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			96.392.976,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				1 Tahun	1 Tahun	4.514.534.080,00	4.665.005.012,00	4.665.005.012,00	150.470.932,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		5.129.542.568,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				39 Unit	23 Unit	111.782.140,00	127.155.410,00	127.155.410,00	15.373.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			167.618.568,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	5 Unit	34.928.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	-14.978.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			44.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				65 Unit	17 Unit	7.060.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	4.790.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			14.220.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan				0,70 Persen	0,70 Persen	12.894.195.880,00	14.937.925.066,00	23.618.623.366,00	1.683.982.120,00							14.578.178.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<i>Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</i>				3 Jenis	3 Jenis	4.994.730.460,00	4.574.538.164,00	7.664.898.864,00	2.670.168.404,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Petani, Penangkar, BBP/BBU		5.673.201.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			<i>Jumlah Sertifikat Benih</i>				75 Sertifikat	75 Sertifikat	368.616.260,00	330.785.372,00	327.905.372,00	-40.710.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			405.477.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>				125 laporan	120 laporan	409.654.220,00	331.592.852,00	307.592.852,00	-102.061.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			423.133.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN							70.702.559.670,00	97.247.128.009,00	106.653.159.049,00	35.950.599.379,00							94.882.350.318,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				81,50 Nilai	81,60 Nilai	51.357.392.830,00	67.780.032.351,00	67.652.664.991,00	4.780.505.890,00							56.137.898.720,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				1 Paket	1 Paket	635.044.510,00	694.460.460,00	645.565.100,00	10.520.590,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		444.160.444,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	1.996.900,00	1.996.900,00	1.996.900,00	0,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			2.100.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.999.600,00	5.998.100,00	5.998.100,00	-1.500,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Lulus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			6.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Lulus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			38.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun	1 Tahun	2.160.869.120,00	2.105.966.563,00	2.105.966.563,00	-54.902.557,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		2.233.246.708,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	123.000.000,00	117.912.191,00	117.912.191,00	-5.087.809,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Lulus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			135.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	113.868.420,00	107.999.312,00	107.999.312,00	-5.869.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Lulus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			125.255.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun	1 Tahun	4.514.534.080,00	4.665.005.012,00	4.665.005.012,00	150.470.932,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		5.129.542.568,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				39 Unit	25 Unit	127.379.280,00	85.570.410,00	85.570.410,00	-41.808.870,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Lulus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			140.122.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	39.182.140,00	42.566.492,00	42.566.492,00	3.384.352,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			43.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	4 Unit	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Lulus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			3.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura				0,70 Persen	0,70 Persen	12.894.195.880,00	14.937.925.066,00	23.618.623.366,00	1.683.982.120,00							14.578.178.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				125 Laporan 75 Sertifikat	1 Laporan	4.994.730.460,00	4.574.538.164,00	7.664.898.864,00	2.670.168.404,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Petani, Penangkar, BBP/BBU		5.673.201.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				44000 Batang	37500 Batang	600.224.540,00	554.830.310,00	763.221.710,00	162.997.170,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Lulus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			754.271.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	109.960.200,00	109.960.000,00	25.080.000,00	-84.880.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			142.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				100 Persen	100 Persen	73.266.000,00	73.261.000,00	40.041.000,00	808.734.000,00							882.000.000,00	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	73.266.000,00	73.261.000,00	40.041.000,00	-33.225.000,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	DKLH Provinsi Bali		882.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Unit	1 Unit	73.266.000,00	73.261.000,00	40.041.000,00	-33.225.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			882.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ijin pengumpulan limbah B3				100 Persen	100 Persen	58.056.600,00	58.056.300,00	37.816.300,00	101.333.400,00							159.390.000,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	58.056.600,00	58.056.300,00	37.816.300,00	-20.240.300,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	DKLH Provinsi Bali		159.390.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	58.056.600,00	58.056.300,00	37.816.300,00	-20.240.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			159.390.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan				70 Persen	70 Persen	20.000.000,00	19.999.700,00	10.399.700,00	79.225.000,00							99.225.000,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	19.999.700,00	10.399.700,00	-9.600.300,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	DKLH Provinsi Bali		99.225.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	20.000.000,00	19.999.700,00	10.399.700,00	-9.600.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			99.225.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga				30 70 Persen Persen	30 70 Persen Persen	222.535.665,00	1.117.590.230,00	1.083.910.230,00	164.441.835,00							386.977.500,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Adat/Desa/Kelurahan yang dibina dan dimonitoring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber				9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	222.535.665,00	1.117.590.230,00	1.083.910.230,00	861.374.565,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	DKLH Provinsi Bali		386.977.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	222.535.665,00	1.117.590.230,00	1.083.910.230,00	861.374.565,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			386.977.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				35 Persen	35 Persen	58.000.000,00	57.999.700,00	34.399.700,00	41.225.000,00							99.225.000,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembag a/pendidikan dalam PPLH				100 Persen	100 Persen	58.000.000,00	57.999.700,00	34.399.700,00	-23.600.300,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	DKLH Provinsi Bali		99.225.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu				100 Persen	100 Persen	37.695.000,00	37.694.200,00	37.694.200,00	-800,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	DKLH Provinsi Bali		39.579.750,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	37.695.000,00	37.694.200,00	37.694.200,00	-800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			39.579.750,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu				100 Persen	100 Persen	36.423.802.432,00	40.212.598.846,00	40.205.398.846,00	3.781.596.414,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	DKLH Provinsi Bali		39.294.992.554,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				194 Orang/ Bulan	194 Orang/ Bulan	36.380.122.432,00	40.168.919.046,00	40.168.919.046,00	3.788.796.614,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			39.249.128.554,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	43.680.000,00	43.679.800,00	36.479.800,00	-7.200.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			45.864.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu				100 Persen	100 Persen	844.224.955,00	1.116.275.300,00	814.394.600,00	-29.830.355,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	DKLH Provinsi Bali		864.969.419,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.097.000,00	17.097.000,00	17.097.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			17.970.750,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.571.400,00	47.975.000,00	47.975.000,00	12.403.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			37.356.444,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	97.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			101.981.250,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.096.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	-5.746.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			40.792.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	65.100.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	-45.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			68.355.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	280.516.000,00	593.922.000,00	294.640.000,00	14.124.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			197.347.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	1.705.074.639,00	1.501.652.424,00	1.501.652.424,00	-203.422.215,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	DKLH Provinsi Bali		1.021.692.591,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	196.560.000,00	196.560.000,00	196.560.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			206.388.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	399.355.463,00	413.283.344,00	413.283.344,00	13.927.881,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			419.323.236,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	DKLH Provinsi Bali		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				47 Unit	46 Unit	1.100.454.577,00	840.290.360,00	840.290.360,00	-260.164.217,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			1.424.980.134,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				6 Unit	44 Unit	495.813.540,00	472.289.248,00	472.289.248,00	-23.524.292,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			645.277.859,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan				3.16 Persen	3.16 Persen	210.780.420,00	198.400.230,00	152.398.230,00	122.836.080,00							333.616.500,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	<i>Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>				100 Persen	100 Persen	210.780.420,00	198.400.230,00	152.398.230,00	-58.382.190,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	DKLH Provinsi Bali		333.616.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	210.780.420,00	198.400.230,00	152.398.230,00	-58.382.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			333.616.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kelas kelompok				4.23 Persen	4.23 Persen	30.000.500,00	30.000.500,00	16.520.500,00	-30.000.500,00							0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	<i>Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>				100 Persen	100 Persen	30.000.500,00	30.000.500,00	16.520.500,00	-13.480.000,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	DKLH Provinsi Bali		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan																		
			<i>Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas</i>				25 Orang	25 Orang	30.000.500,00	30.000.500,00	16.520.500,00	-13.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Indeks Kualitas Lahan Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan				42.16 6.82 Nilai Persen	42.16 6.82 Nilai Persen	93.681.640,00	89.554.810,00	64.074.810,00	121.174.663,00							214.856.303,00	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				100 Persen	100 Persen	93.681.640,00	89.554.810,00	64.074.810,00	-29.606.830,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	DKLH Provinsi Bali		214.856.303,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS																		
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	93.681.640,00	89.554.810,00	64.074.810,00	-29.606.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			214.856.303,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Utara)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara</i>				100 Persen	100 Persen	844.224.955,00	1.116.275.300,00	814.394.600,00	-29.830.355,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD KPH Bali Utara		864.969.419,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	3.212.370,00	3.205.900,00	3.205.900,00	-6.470,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			3.372.989,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	10.033.535,00	10.025.900,00	10.025.900,00	-7.635,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			7.385.211,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	34.650.000,00	34.650.000,00	34.650.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			36.382.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	14.028.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00	-108.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			14.729.400,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara</i>				100 Persen	100 Persen	1.705.074.639,00	1.501.652.424,00	1.501.652.424,00	-203.422.215,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD KPH Bali Utara		1.021.692.591,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			33.075.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	41.376.875,00	43.753.592,00	43.753.592,00	2.376.717,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			43.445.719,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara</i>				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD KPH Bali Utara		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	8 Unit	153.844.220,00	149.705.410,00	149.705.410,00	-4.138.810,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			164.686.431,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	11 Unit	685.788.520,00	657.084.954,00	657.084.954,00	-28.703.566,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			629.527.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Timur)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur				100 Persen	100 Persen	844.224.955,00	1.116.275.300,00	814.394.600,00	-29.830.355,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD KPH Bali Timur		864.969.419,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.131.520,00	3.129.800,00	3.129.800,00	-1.720,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			3.288.096,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.450.185,00	13.443.900,00	13.443.900,00	-6.285,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			14.122.694,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.012.500,00	37.000.000,00	37.000.000,00	-12.500,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			38.863.125,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.698.100,00	3.698.100,00	3.698.100,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			3.883.005,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur				100 Persen	100 Persen	1.705.074.639,00	1.501.652.424,00	1.501.652.424,00	-203.422.215,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD KPH Bali Timur		1.021.692.591,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.050.000,00	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			16.096.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	42.052.622,00	44.434.092,00	44.434.092,00	2.381.470,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			44.155.253,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD KPH Bali Timur		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	508.546.273,00	488.554.597,00	488.554.597,00	-19.991.676,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			533.973.587,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	10 Unit	7.260.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	-120.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			11.002.950,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Selatan)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			16.586.846,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	116.266.420,00	110.397.312,00	110.397.312,00	-5.869.108,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			129.855.475,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD KPH Bali Selatan		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	220.770.140,00	223.154.492,00	223.154.492,00	2.384.352,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			199.109.513,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			11.013.975,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT							56.842.949.200,00	60.984.144.527,00	73.143.656.756,00	16.300.707.556,00							59.314.808.687,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Barat)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat				100 Persen	100 Persen	844.224.955,00	1.116.275.300,00	814.394.600,00	-29.830.355,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD KPH Bali Barat		864.969.419,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.140.130,00	3.137.000,00	3.137.000,00	-3.130,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			3.297.137,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.814.475,00	10.811.900,00	10.811.900,00	-2.575,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			11.355.199,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			35.831.250,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.503.100,00	2.502.800,00	2.502.800,00	-300,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			2.628.977,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.960.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			8.379.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat				100 Persen	100 Persen	1.705.074.639,00	1.501.652.424,00	1.501.652.424,00	-203.422.215,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD KPH Bali Barat		1.021.692.591,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	23.940.000,00	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			25.137.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	41.996.315,00	44.379.792,00	44.379.792,00	2.383.477,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			44.067.639,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD KPH Bali Barat		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	12 Unit	123.425.000,00	123.425.000,00	123.425.000,00	0,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			193.931.730,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	81.714.280,00	86.382.984,00	86.382.984,00	4.668.704,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			93.550.318,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI							56.842.949.200,00	60.984.144.527,00	73.143.656.756,00	16.300.707.556,00							59.314.808.687,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Tahura Ngurah Rai)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai				100 Persen	100 Persen	844.224.955,00	1.116.275.300,00	814.394.600,00	-29.830.355,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD Tahura Ngurah Rai		864.969.419,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.548.800,00	2.530.500,00	2.530.500,00	-18.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			2.669.483,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.922.400,00	6.920.800,00	6.920.800,00	-1.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			23.628.560,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			16.537.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	2.598.900,00	2.598.700,00	0,00	-2.598.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			2.728.908,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai				100 Persen	100 Persen	1.705.074.639,00	1.501.652.424,00	1.501.652.424,00	-203.422.215,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD Tahura Ngurah Rai		1.021.692.591,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	420.000.000,00	324.000.000,00	324.000.000,00	-96.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	365.976.944,00	243.354.292,00	243.354.292,00	-122.622.652,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			43.561.923,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD Tahura Ngurah Rai		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	112.142.740,00	112.130.000,00	112.130.000,00	-12.740,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			97.064.377,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	884.133.673,00	600.823.635,00	-399.176.365,00	Kota Denpasar,	PENDAPATAN	-	Lingkungan,			1.610.794.021,00	DINAS KEHUTANAN

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	17 Unit	11.970.000,00	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			17.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP							56.842.949.200,00	60.984.144.527,00	73.143.656.756,00	16.300.707.556,00							59.314.808.687,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.059.072.424,00	13.802.616.799,00	26.639.481.766,00	13.580.409.342,00							11.996.317.675,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							13.059.072.424,00	13.802.616.799,00	26.639.481.766,00	13.580.409.342,00							11.996.317.675,00	
1.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan				94.85 Persen	94.85 Persen	513.381.155,00	520.210.725,00	331.289.692,00	51.103.845,00							564.485.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi				27 Persen	27 Persen	513.381.155,00	520.210.725,00	331.289.692,00	-182.091.463,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD Laboratorium LH		564.485.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	245.927.000,00	252.757.125,00	235.876.092,00	-10.050.908,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			263.120.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH				100 Persen	100 Persen	844.224.955,00	1.116.275.300,00	814.394.600,00	-29.830.355,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD Laboratorium LH		864.969.419,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.729.600,00	4.866.500,00	4.866.500,00	1.136.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			8.820.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	852.000,00	935.500,00	935.500,00	83.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			2.205.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH				-	100 Persen	39.999.300,00	31.914.540,00	31.914.540,00	-8.084.760,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD Laboratorium LH	110.250.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	39.999.300,00	31.914.540,00	31.914.540,00	-8.084.760,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			110.250.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD Laboratorium LH		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	106.254.286,00	97.970.820,00	97.970.820,00	-8.283.466,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			279.373.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH							56.842.949.200,00	60.984.144.527,00	73.143.656.756,00	16.300.707.556,00							59.314.808.687,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.059.072.424,00	13.802.616.799,00	26.639.481.766,00	13.580.409.342,00							11.996.317.675,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							13.059.072.424,00	13.802.616.799,00	26.639.481.766,00	13.580.409.342,00							11.996.317.675,00	
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional				100 Persen	100 Persen	11.188.173.848,00	11.068.408.590,00	24.254.822.590,00	-2.775.966.548,00							8.412.207.300,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana				100 Persen	100 Persen	11.188.173.848,00	11.068.408.590,00	24.254.822.590,00	13.066.648.742,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD Pengelolaan Sampah		8.412.207.300,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional																		
			Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				1 Unit	1 Unit	11.188.173.848,00	11.068.408.590,00	24.254.822.590,00	13.066.648.742,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			8.412.207.300,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Pengelolaan Sampah)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah				100 Persen	100 Persen	844.224.955,00	1.116.275.300,00	814.394.600,00	-29.830.355,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD Pengelolaan Sampah		864.969.419,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	5.232.000,00	5.229.000,00	5.229.000,00	-3.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			5.512.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	11.701.500,00	11.701.300,00	11.701.300,00	-200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			8.820.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			44.100.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	3.917.000,00	3.917.000,00	3.917.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			7.717.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.670.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-3.420.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			5.953.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah</i>				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	UPTD Pengelolaan Sampah		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	4 Unit	342.669.190,00	330.930.974,00	330.930.974,00	-11.738.216,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			358.795.175,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				27 Unit	27 Unit	118.270.000,00	118.270.000,00	118.270.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			131.285.700,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							24.110.090.686,00	24.005.253.513,00	26.861.405.213,00	2.751.314.527,00								35.832.896.230,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							24.110.090.686,00	24.005.253.513,00	26.861.405.213,00	2.751.314.527,00							35.832.896.230,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							21.445.882.826,00	21.094.346.865,00	20.730.726.565,00	-715.156.261,00							26.326.196.230,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,00 Indeks	82,00 Indeks	322.947.320,00	302.955.644,00	296.235.644,00	227.052.680,00							550.000.000,00	
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>				14000 Dokumen	14000 Dokumen	322.947.320,00	302.955.644,00	296.235.644,00	-26.711.676,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Eksportir / Pelaku Usaha		550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																		
			<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>				14000 Dokumen	14000 Dokumen	322.947.320,00	302.955.644,00	296.235.644,00	-26.711.676,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI				1 Pasar	1 Pasar	24.968.600,00	24.968.600,00	13.448.600,00	125.031.400,00							150.000.000,00	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	<i>Jumlah Pasar yang dibina Jumlah Toko Swalayan yang dibina</i>				2 Pasar	18 Pasar 18 Toko Swalayan	24.968.600,00	24.968.600,00	13.448.600,00	-11.520.000,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Pasar Rakyat dan Toko Swalayan		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi</i>				2 Laporan	36 Laporan	24.968.600,00	24.968.600,00	13.448.600,00	-11.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang Pokok				<7 Persen	<7 Persen	244.884.500,00	243.576.100,00	147.251.600,00	-69.884.500,00							175.000.000,00	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	<i>Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah</i>				18 Kali	18 Kali	244.884.500,00	243.576.100,00	147.251.600,00	-97.632.900,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barana</i>				5 Laporan	5 Laporan	244.884.500,00	243.576.100,00	147.251.600,00	-97.632.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan;			175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif				55 Persen	55 Persen	99.999.600,00	99.999.600,00	48.499.200,00	200.000.400,00							300.000.000,00	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	99.999.600,00	99.999.600,00	48.499.200,00	-51.500.400,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Eksportir / Pelaku Usaha		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				50 Produk	50 Produk	99.999.600,00	99.999.600,00	48.499.200,00	-51.500.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen				49,72 Indeks	49,72 Indeks	838.606.200,00	834.014.578,00	777.968.578,00	1.486.197.050,00							2.324.803.250,00	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses				100 %	100 %	465.990.200,00	465.992.200,00	461.672.200,00	-4.318.000,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha / BPSK / LPKSM		1.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen																		
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				1 BPSK	1 BPSK	456.000.000,00	456.000.000,00	456.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen																		
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif				3 LPKSM	3 LPKSM	9.990.200,00	9.992.200,00	5.672.200,00	-4.318.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan				100 %	100 %	125.363.980,00	123.621.202,00	102.501.202,00	-22.862.778,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha		174.803.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				100 Laporan	100 Laporan	125.363.980,00	123.621.202,00	102.501.202,00	-22.862.778,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			174.803.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali				30 Persen	30 Persen	292.078.580,00	300.832.962,00	289.312.962,00	55.519.500,00							347.598.080,00	
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal Bali				100 Toko	35 Pelaku Usaha	292.078.580,00	300.832.962,00	289.312.962,00	-2.765.618,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	UKM / Pelaku Usaha		347.598.080,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer				5 Laporan	5 Laporan	292.078.580,00	300.832.962,00	289.312.962,00	-2.765.618,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			347.598.080,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)				82,50	82,50	19.819.524.866,00	19.483.383.843,00	19.848.328.943,00	2.988.970.034,00							22.808.494.900,00	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	62.743.600,00	66.082.800,00	41.290.800,00	-21.452.800,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	62.743.600,00	66.082.800,00	41.290.800,00	-21.452.800,00	Semua	PENDAPATAN	-	Tata Kelola			105.000.000,00	DINAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	16.000.000.000,00	15.665.986.223,00	15.665.986.223,00	-334.013.777,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		17.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				81 Orang/ Bulan	81 Orang/ Bulan	16.000.000.000,00	15.665.986.223,00	15.665.986.223,00	-334.013.777,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>				100 % 1 Sub Kegiatan	100 % 1 Sub Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				3 Orang	3 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan</i>				6 Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	1.083.287.894,00	1.106.541.494,00	1.496.278.594,00	412.990.700,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.771.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	14.899.100,00	18.267.000,00	18.267.000,00	3.367.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				20 Paket	20 Paket	550.895.100,00	588.087.400,00	557.763.600,00	6.868.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.050.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	102.483.394,00	67.483.394,00	67.483.394,00	-35.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			102.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	14.840.500,00	14.840.000,00	14.840.000,00	-500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				24 Dokumen	24 Dokumen	6.424.000,00	6.424.000,00	6.424.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				28 Laporan	28 Laporan	302.345.000,00	316.901.000,00	193.047.000,00	-109.298.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			335.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan</i>				5 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	1.384.335.560,00	1.359.156.346,00	1.359.156.346,00	-25.179.214,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.572.194.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	596.469.960,00	576.131.150,00	576.131.150,00	-20.338.810,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			670.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	227.194.900,00	227.194.900,00	227.194.900,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			227.194.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	<i>Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik</i>				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	1.214.157.812,00	1.210.616.980,00	1.210.616.980,00	-3.540.832,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan	Aparatur		2.260.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	822.120.700,00	834.042.460,00	834.042.460,00	11.921.760,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.050.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	171.785.280,00	151.553.984,00	151.553.984,00	-20.231.296,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							2.664.207.860,00	2.910.906.648,00	6.130.678.648,00	3.466.470.788,00							9.506.700.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh				1,5 Persen	1,5 Persen	2.417.081.120,00	2.665.522.286,00	5.413.399.786,00	6.159.918.880,00							8.577.000.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina				1.5 %	1.5 %	2.417.081.120,00	2.665.522.286,00	5.413.399.786,00	2.996.318.666,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Industri di Bali		8.577.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				9 Dokumen	9 Dokumen	137.682.000,00	137.682.000,00	126.162.000,00	-11.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	1.452.185.620,00	1.700.626.786,00	4.563.816.286,00	3.111.630.666,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			6.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri				100 Persen	100 Persen	49.999.900,00	49.999.900,00	26.959.900,00	550.000.100,00							600.000.000,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Industri yang terkumpul				100 %	100 %	49.999.900,00	49.999.900,00	26.959.900,00	-23.040.000,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Industri di Bali		600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				150 Dokumen	150 Dokumen	49.999.900,00	49.999.900,00	26.959.900,00	-23.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPTD RUMAH KREATIF							24.110.090.686,00	24.005.253.513,00	26.861.405.213,00	2.751.314.527,00							35.832.896.230,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							24.110.090.686,00	24.005.253.513,00	26.861.405.213,00	2.751.314.527,00							35.832.896.230,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							2.664.207.860,00	2.910.906.648,00	6.130.678.648,00	3.466.470.788,00							9.506.700.000,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)				82,50	82,50	19.819.524.866,00	19.483.383.843,00	19.848.328.943,00	2.988.970.034,00							22.808.494.900,00	
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	1.083.287.894,00	1.106.541.494,00	1.496.278.594,00	412.990.700,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.771.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	33.436.060,00	33.435.060,00	533.435.060,00	499.999.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.239.500,00	2.450.500,00	1.225.000,00	-1.014.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.212.000,00	3.212.000,00	3.212.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.200.000,00	7.680.000,00	3.840.000,00	-3.360.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1.384.335.560,00	1.359.156.346,00	1.359.156.346,00	-25.179.214,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.572.194.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	49.372.140,00	44.555.410,00	44.555.410,00	-4.816.730,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1.214.157.812,00	1.210.616.980,00	1.210.616.980,00	-3.540.832,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.260.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	2 Unit	101.667.140,00	104.051.492,00	104.051.492,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh				1,5 Persen	1,5 Persen	2.417.081.120,00	2.665.522.286,00	5.413.399.786,00	6.159.918.880,00							8.577.000.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<i>Persentase Industri yang dibina</i>				1.5 %	1.5 %	2.417.081.120,00	2.665.522.286,00	5.413.399.786,00	2.996.318.666,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Industri di Bali		8.577.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	827.213.500,00	827.213.500,00	723.421.500,00	-103.792.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			1.077.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG							24.110.090.686,00	24.005.253.513,00	26.861.405.213,00	2.751.314.527,00							35.832.896.230,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							24.110.090.686,00	24.005.253.513,00	26.861.405.213,00	2.751.314.527,00							35.832.896.230,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							21.445.882.826,00	21.094.346.865,00	20.730.726.565,00	-715.156.261,00							26.326.196.230,00	
1.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen				49,72 Indeks	49,72 Indeks	838.606.200,00	834.014.578,00	777.968.578,00	1.486.197.050,00							2.324.803.250,00	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan</i>				45 Sertifikat	45 Sertifikat	247.252.020,00	244.401.176,00	213.795.176,00	-33.456.844,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Pelaku Usaha / Eksportir / Konsumen		1.050.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian																		
			<i>Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan</i>				45 laporan	45 laporan	247.252.020,00	244.401.176,00	213.795.176,00	-33.456.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			1.050.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)				82.50	82.50	19.819.524.866,00	19.483.383.843,00	19.848.328.943,00	2.988.970.034,00							22.808.494.900,00	
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				5 Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan	1.083.287.894,00	1.106.541.494,00	1.496.278.594,00	412.990.700,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.771.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	1.455.700,00	1.455.700,00	1.455.700,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	19.922.500,00	21.887.400,00	77.147.800,00	57.225.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	16.038.040,00	16.038.040,00	16.038.040,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.797.000,00	6.280.000,00	0,00	-5.797.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)</i>				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	1.384.335.560,00	1.359.156.346,00	1.359.156.346,00	-25.179.214,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.572.194.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	159.298.560,00	159.274.886,00	159.274.886,00	-23.674,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1.214.157.812,00	1.210.616.980,00	1.210.616.980,00	-3.540.832,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.260.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	118.584.692,00	120.969.044,00	120.969.044,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		BIRO HUKUM								201.117.447.935,00	251.164.695.219,00	251.145.642.578,00	50.028.194.643,00						244.209.821.324,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				81 Nilai	81 Nilai	165.206.336.435,00	180.207.586.384,00	177.926.163.443,00	30.449.786.530,00							195.656.122.965,00		
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan				4 Unit	5 Paket	27.107.802.939,00	26.517.421.186,00	20.162.880.515,00	-6.944.922.424,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		26.770.242.649,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.663.650,00	17.606.100,00	13.740.700,00	-3.922.950,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			19.430.015,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	793.615.375,00	781.324.534,00	774.135.334,00	-19.480.041,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			872.976.913,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.000.000,00	10.990.900,00	10.990.900,00	-9.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1 Laporan	229.530.000,00	229.491.000,00	88.260.000,00	-141.270.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			240.064.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan				97 Unit	117 Unit	16.768.043.736,00	17.016.121.606,00	16.862.996.606,00	94.952.870,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		18.963.295.956,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	431.081.420,00	468.823.394,00	468.823.394,00	37.741.974,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			474.189.562,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	793.478.520,00	766.752.790,00	766.752.790,00	-26.725.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			872.826.372,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.760.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	82 Unit	58.850.000,00	58.290.000,00	58.290.000,00	-560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			64.735.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum				100 %	100 %	5.659.430.240,00	4.578.799.210,00	4.350.928.210,00	-534.056.976,00							5.125.373.264,00		
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum				1220 Dokumen	1220 Dokumen	2.380.491.180,00	1.811.067.474,00	1.754.241.474,00	-626.249.706,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat		2.618.540.298,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																			
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				45 Dokumen	45 Dokumen	1.400.607.560,00	936.594.722,00	945.050.722,00	-455.556.838,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.540.668.316,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																			
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				1000 Dokumen	1000 Dokumen	178.217.560,00	161.709.540,00	161.709.540,00	-16.508.020,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			196.039.316,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																			

	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				125 Dokumen	125 Dokumen	510.932.420,00	443.463.170,00	384.423.170,00	-126.509.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			562.025.662,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan				65 Kasus	65 Kasus	3.278.939.060,00	2.767.731.736,00	2.596.686.736,00	-682.252.324,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali, Aparatur, dan Masyarakat		2.506.832.966,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																			
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				33 Kasus	33 Kasus	2.998.728.700,00	2.504.028.296,00	2.336.823.296,00	-661.905.404,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.198.601.570,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																			
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				24 Kasus	24 Kasus	280.210.360,00	263.703.440,00	259.863.440,00	-20.346.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			308.231.396,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		SEKRETARIAT DAERAH							201.117.447.935,00	251.164.695.219,00	251.145.642.578,00	50.028.194.643,00							244.209.821.324,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali				83 Nilai	83 Nilai	165.206.336.435,00	180.207.586.384,00	177.926.163.443,00	30.449.786.530,00							195.656.122.965,00		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	62.819.228.860,00	79.389.224.238,00	79.389.224.238,00	16.569.995.378,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		63.105.697.064,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2 Orang/ Bulan	262 Orang/ Bulan	62.106.610.000,00	78.743.344.494,00	78.743.344.494,00	16.636.734.494,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			62.253.946.442,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil				100 Persen	100 Persen	9.499.984.510,00	8.360.366.918,00	8.915.650.544,00	-584.333.966,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.933.661.631,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2.988.309.510,00	2.988.309.510,00	2.988.309.510,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK AIR PERMUKAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			247.336.742,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							201.117.447.935,00	251.164.695.219,00	251.145.642.578,00	50.028.194.643,00							244.209.821.324,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82 Nilai	82 Nilai	165.206.336.435,00	180.207.586.384,00	177.926.163.443,00	30.449.786.530,00							195.656.122.965,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	965.515.120,00	885.030.110,00	885.030.110,00	-80.485.010,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		1.317.948.490,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	351.457.120,00	332.213.362,00	332.213.362,00	-19.243.758,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.976.600,00	15.976.600,00	15.976.600,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	419.289.920,00	416.282.320,00	416.282.320,00	-3.007.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	31.727.000,00	31.727.000,00	6.727.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	339.683.000,00	339.429.000,00	170.675.000,00	-169.008.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertata				100 %	100 %	16.768.043.736,00	17.016.121.606,00	16.862.996.606,00	94.952.870,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		18.963.295.956,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	903.572.140,00	905.956.492,00	905.956.492,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				110 Unit	124 Unit	86.820.000,00	86.160.000,00	86.160.000,00	-660.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	160 Unit	27.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	-15.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali				75 %	75 %	2.500.210.780,00	2.474.593.012,00	1.834.911.012,00	-185.210.780,00							2.315.000.000,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan				100 %	100 %	651.639.420,00	636.020.590,00	522.296.590,00	-129.342.830,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		770.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				6 Dokumen	3 Dokumen	451.640.920,00	451.157.990,00	410.877.990,00	-40.762.930,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				2 Dokumen	2 Dokumen	199.998.500,00	184.862.600,00	111.418.600,00	-88.579.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	549.995.500,00	549.992.800,00	373.114.800,00	-176.880.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		720.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	399.995.800,00	399.993.300,00	262.095.300,00	-137.900.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				2 Dokumen	1 Dokumen	149.999.700,00	149.999.500,00	111.019.500,00	-38.980.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi				100 %	100 %	1.298.575.860,00	1.288.579.622,00	939.499.622,00	-359.076.238,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																			
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	349.905.360,00	339.909.422,00	257.041.422,00	-92.863.938,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																			
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	1 Laporan	948.670.500,00	948.670.200,00	682.458.200,00	-266.212.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
3.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Tindakanjutt Kebijakan Strategis yang mendukung Pengembangan Budaya Spiritual				100 %	100 %	12.404.153.120,00	29.340.774.424,00	33.034.524.424,00	24.270.846.880,00							36.675.000.000,00		
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual				100 %	100 %	3.536.006.880,00	3.475.162.748,00	7.241.424.748,00	3.705.417.868,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		6.175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				100 Unit	100 Unit	2.872.232.100,00	2.834.763.996,00	6.687.143.996,00	3.814.911.896,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																			
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				6 Lembaga	6 Lembaga	663.774.780,00	640.398.752,00	554.280.752,00	-109.494.028,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			675.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				100 %	100 %	8.868.146.240,00	25.865.611.676,00	25.793.099.676,00	16.924.953.436,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		30.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	8.868.146.240,00	25.865.611.676,00	25.793.099.676,00	16.924.953.436,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO UMUM								201.117.447.935,00	251.164.695.219,00	251.145.642.578,00	50.028.194.643,00						244.209.821.324,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.333.047.660,00	1.362.201.454,00	1.273.900.754,00	-59.146.906,00							1.646.125.095,00		
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							743.908.500,00	751.603.126,00	722.619.826,00	-21.288.674,00							748.125.095,00		
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	- Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang tertib arsip - Nilai Evaluasi Kearsipan				100 64 Persentase Nilai	100 64 Persentase Nilai	743.908.500,00	751.603.126,00	722.619.826,00	4.216.595,00							748.125.095,00		
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip				100 Persen	100 Persen	378.193.000,00	372.965.866,00	367.563.066,00	-10.629.934,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		378.193.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis																			
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				1000 Arsip	1000 Arsip	378.193.000,00	372.965.866,00	367.563.066,00	-10.629.934,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			378.193.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik				22 Persen	22 Persen	365.715.500,00	378.637.260,00	355.056.760,00	-10.658.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		369.932.095,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN																			
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				150 Pengguna	150 Pengguna	60.757.500,00	60.757.500,00	49.957.500,00	-10.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.757.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				45 Laporan	45 Laporan	304.958.000,00	317.879.760,00	305.099.260,00	141.260,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			309.174.595,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali				83 Nilai	83 Nilai	165.206.336.435,00	180.207.586.384,00	177.926.163.443,00	30.449.786.530,00							195.656.122.965,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	965.515.120,00	885.030.110,00	885.030.110,00	-80.485.010,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.317.948.490,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	600.058.000,00	538.866.748,00	538.866.748,00	-61.191.252,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			801.948.490,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	62.819.228.860,00	79.389.224.238,00	79.389.224.238,00	16.569.995.378,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		63.105.697.064,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	712.618.860,00	645.879.744,00	645.879.744,00	-66.739.116,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			851.750.622,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	100 Persen	375.436.860,00	320.620.172,00	320.620.172,00	-54.816.688,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		584.201.156,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				21 Laporan	21 Laporan	375.436.860,00	320.620.172,00	320.620.172,00	-54.816.688,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			584.201.156,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	27.107.802.939,00	26.517.421.186,00	20.162.880.515,00	-6.944.922.424,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		26.770.242.649,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	701.629.360,00	685.137.840,00	685.137.840,00	-16.491.520,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			774.375.764,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.766.767.920,00	2.647.671.358,00	2.647.671.358,00	-119.096.562,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.946.623.326,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7.506.488.700,00	7.336.554.462,00	7.336.554.462,00	-169.934.238,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.024.226.998,00	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.268.558.584,00	10.194.377.134,00	4.465.579.684,00	-5.802.978.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.651.177.366,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	590.665.000,00	520.540.874,00	520.540.874,00	-70.124.126,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			711.268.267,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	18.006.262.976,00	18.137.609.788,00	17.456.678.900,00	-549.584.076,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		25.347.982.149,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	2.292.764.360,00	2.069.469.360,00	2.069.469.360,00	-223.295.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.328.394.831,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.115.678.116,00	10.176.844.128,00	10.056.844.128,00	-58.833.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.320.183.377,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				106 Laporan	106 Laporan	5.597.820.500,00	5.891.296.300,00	5.330.365.412,00	-267.455.088,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.699.403.941,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>				100 Persen	100 Persen	16.768.043.736,00	17.016.121.606,00	16.862.996.606,00	94.952.870,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		18.963.295.956,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				136 Unit	136 Unit	6.956.498.580,00	6.876.182.652,00	6.876.182.652,00	-80.315.928,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.359.537.582,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				24 Unit	24 Unit	5.982.591.136,00	6.296.368.226,00	6.101.393.226,00	118.802.090,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.957.247.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil</i>				100 Persen	100 Persen	9.499.984.510,00	8.360.366.918,00	8.915.650.544,00	-584.333.966,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.933.661.631,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	6.511.675.000,00	5.372.057.408,00	5.927.341.034,00	-584.333.966,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.686.324.889,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<i>Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	27.019.667.714,00	26.955.707.242,00	26.235.707.234,00	-783.960.480,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.882.399.506,00	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				47 Paket	47 Paket	16.587.955.616,00	16.540.186.296,00	16.340.186.288,00	-247.769.328,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.120.668.769,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				40 Paket	40 Paket	10.152.215.000,00	10.011.023.848,00	9.491.023.848,00	-661.191.152,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.404.825.218,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	279.497.098,00	404.497.098,00	404.497.098,00	125.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			356.905.519,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	<i>Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</i>				100 Persen	100 Persen	541.115.000,00	541.115.000,00	5.930.365.000,00	5.389.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		16.935.706.389,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				12 Laporan	12 Laporan	541.115.000,00	541.115.000,00	229.115.000,00	-312.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			835.706.389,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	<i>Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan</i>				100 Persen	100 Persen	2.098.302.720,00	2.079.394.124,00	1.762.034.124,00	-336.268.596,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.808.987.975,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																		
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</i>				12 Laporan	12 Laporan	2.098.302.720,00	2.079.394.124,00	1.562.034.124,00	-536.268.596,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.808.987.975,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ORGANISASI							201.117.447.935,00	251.164.695.219,00	251.145.642.578,00	50.028.194.643,00							244.209.821.324,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.333.047.660,00	1.362.201.454,00	1.273.900.754,00	-59.146.906,00							1.646.125.095,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							589.139.160,00	610.598.328,00	551.280.928,00	-37.858.232,00							898.000.000,00	
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik				58 %	58 persen	483.774.880,00	500.465.344,00	453.187.944,00	326.225.120,00							810.000.000,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik</i>				12 %	22.35 persen	290.728.460,00	300.265.868,00	266.769.168,00	-23.959.292,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perpustakaan		535.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			<i>Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>				50 Perpust akan	50 Perpust akan	67.682.140,00	70.066.492,00	55.666.492,00	-12.015.648,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			<i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan</i>				500 Eksemplar	500 Eksemplar	97.682.040,00	100.066.392,00	100.066.392,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			<i>Jumlah Data dan informasi Perpustakaan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	125.364.280,00	130.132.984,00	111.036.284,00	-14.327.996,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.052.000,00	310.342.000,00	160.476.000,00	-139.576.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.				1 Laporan	1 Laporan	16.768.043.736,00	17.016.121.606,00	16.862.996.606,00	94.952.870,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali		18.963.295.956,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	775.001.940,00	789.308.052,00	769.808.052,00	-5.193.888,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				131 Unit	117 Unit	90.750.000,00	80.450.000,00	80.450.000,00	-10.300.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik				89 %	89 %	933.366.700,00	945.287.760,00	692.615.760,00	636.633.300,00							1.570.000.000,00	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran				89 %	89 %	287.682.140,00	290.065.792,00	222.545.792,00	-65.136.348,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		555.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	54.880.000,00	-25.120.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	55.560.000,00	-14.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				29 Dokumen	29 Dokumen	137.682.140,00	140.065.792,00	112.105.792,00	-25.576.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik				89 %	89 %	645.684.560,00	655.221.968,00	470.069.968,00	-175.614.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		1.015.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	187.671.540,00	190.055.892,00	136.243.892,00	-51.427.648,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				3 Dokumen	3 Dokumen	167.653.040,00	170.037.392,00	116.325.392,00	-51.327.648,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	1 Laporan	14.997.000,00	14.997.000,00	14.997.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	137.681.140,00	140.065.492,00	101.993.492,00	-35.687.648,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	137.681.840,00	140.066.192,00	100.510.192,00	-37.171.648,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN							201.117.447.935,00	251.164.695.219,00	251.145.642.578,00	50.028.194.643,00							244.209.821.324,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali				82.5 Nilai	82.5 Nilai	165.206.336.435,00	180.207.586.384,00	177.926.163.443,00	30.449.786.530,00							195.656.122.965,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	965.515.120,00	885.030.110,00	885.030.110,00	-80.485.010,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		1.317.948.490,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	14.000.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	-50.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	27.107.802.939,00	26.517.421.186,00	20.162.880.515,00	-6.944.922.424,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		26.770.242.649,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.162.829.660,00	2.015.493.836,00	2.015.493.836,00	-147.335.824,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	45.464.000,00	30.666.300,00	-9.333.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			43.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	9 Laporan	285.000.000,00	284.960.000,00	148.460.000,00	-136.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			290.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				12 Bulan	12 Bulan	16.768.043.736,00	17.016.121.606,00	16.862.996.606,00	94.952.870,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		18.963.295.956,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				37 Unit	37 Unit	530.000.000,00	543.480.000,00	543.480.000,00	13.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				292 Unit	292 Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	185 Unit	0,00	129.950.000,00	91.300.000,00	91.300.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			133.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	543.228.000,00	796.859.800,00	457.739.800,00	109.972.000,00							653.200.000,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	369.987.000,00	231.620.000,00	-18.380.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	369.987.000,00	231.620.000,00	-18.380.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Dokumen	2 Dokumen	150.028.000,00	251.865.000,00	131.620.000,00	-18.408.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Dokumen	2 Dokumen	150.028.000,00	251.865.000,00	131.620.000,00	-18.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	143.200.000,00	175.007.800,00	94.499.800,00	-48.700.200,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		163.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	143.200.000,00	175.007.800,00	94.499.800,00	-48.700.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			163.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa				85 Persen	85 Persen	12.477.675.000,00	31.369.793.175,00	31.531.284.175,00	-11.974.675.000,00							503.000.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				12 Laporan	12 Laporan	12.187.675.000,00	31.067.261.175,00	31.317.925.175,00	19.130.250.175,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		196.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	29.970.000,00	21.330.000,00	-8.670.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Laporan	1 Laporan	12.127.675.000,00	30.959.306.175,00	31.254.130.175,00	19.126.455.175,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	77.985.000,00	42.465.000,00	12.465.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	<i>Jumlah Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik</i>				12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	139.981.000,00	99.271.000,00	-40.729.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		146.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik</i>				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	69.981.000,00	51.105.000,00	-18.895.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			73.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			<i>Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	48.166.000,00	-21.834.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			73.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				4 Level	4 Level	150.000.000,00	162.551.000,00	114.088.000,00	-35.912.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		161.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa																		
			<i>Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa</i>				90 Orang	90 Orang	100.000.000,00	99.996.000,00	73.948.000,00	-26.052.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.995.000,00	10.140.000,00	-9.860.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			23.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	42.560.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku				87 Persen	87 Persen	60.000.000,00	88.800.000,00	43.575.000,00	6.000.000,00							66.000.000,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku</i>				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	44.400.000,00	20.910.000,00	-9.090.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD</i>				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	44.400.000,00	20.910.000,00	-9.090.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku</i>				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	44.400.000,00	22.665.000,00	-7.335.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	44.400.000,00	22.665.000,00	-7.335.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO HUMAS DAN PROTOKOL							201.117.447.935,00	251.164.695.219,00	251.145.642.578,00	50.028.194.643,00								244.209.821.324,00
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							199.784.400.275,00	249.802.493.765,00	249.871.741.824,00	50.087.341.549,00							242.563.696.229,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	165.206.336.435,00	180.207.586.384,00	177.926.163.443,00	30.449.786.530,00							195.656.122.965,00	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	16.768.043.736,00	17.016.121.606,00	16.862.996.606,00	94.952.870,00			-	-	-		18.963.295.956,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				-	20 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	8.785.757.720,00	12.509.487.682,00	8.595.466.382,00	-190.291.338,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		10.126.417.820,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	169.070.300,00	149.002.100,00	149.002.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			190.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	NON URUSAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	899.275.600,00	460.016.000,00	439.034.000,00	-460.241.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			989.275.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.358.543.300,00	1.834.120.446,00	1.734.090.446,00	375.547.146,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.458.543.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	168.631.600,00	137.117.600,00	137.117.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			165.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	NON URUSAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.062.108.000,00	1.075.320.000,00	1.075.320.000,00	13.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.562.108.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.161.250.920,00	8.802.329.336,00	5.060.902.236,00	-100.348.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.761.250.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	4.562.944.000,00	12.511.975.500,00	12.508.990.500,00	7.946.046.500,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		4.962.944.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	4.562.944.000,00	12.511.975.500,00	12.508.990.500,00	7.946.046.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.962.944.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas				100 Persen	100 Persen	2.523.742.864,00	2.073.024.042,00	2.543.024.042,00	19.281.178,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.634.242.864,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	NON URUSAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	380.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			910.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	1.613.742.864,00	1.677.324.042,00	1.677.324.042,00	63.581.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		1.713.742.864,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik					100 Persen	100 Persen	25.594.604.710,00	28.798.342.450,00	28.798.342.450,00	3.203.737.740,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	26.164.604.710,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					61 Unit	61 Unit	3.610.132.060,00	3.750.756.238,00	3.750.756.238,00	140.624.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		3.910.132.060,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit	4 Unit	21.368.892.650,00	24.404.546.212,00	24.404.546.212,00	3.035.653.562,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		21.568.892.650,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					22 Unit	22 Unit	0,00	643.040.000,00	643.040.000,00	643.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		685.580.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	NON URUSAN								259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00						286.742.921.162,00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00						286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD					100 Persen	100 Persen	60.513.985.118,00	61.741.728.634,00	61.568.152.634,00	1.054.167.516,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	63.923.985.118,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD					55 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	57.682.611.078,00	59.732.867.624,00	59.732.867.624,00	2.050.256.546,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		60.682.611.078,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan					729 Paket	729 Paket	0,00	1.694.242.500,00	1.579.698.500,00	1.579.698.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		2.909.994.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	NON URUSAN								259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00						286.742.921.162,00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00						286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD					55 Orang	55 Orang	321.379.540,00	314.618.510,00	255.586.510,00	-65.793.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		331.379.540,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD					100 Persen	100 Persen	6.111.589.240,00	1.116.764.640,00	1.247.320.640,00	-4.864.268.600,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	7.811.589.240,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD					30 Laporan	30 Laporan	0,00	184.444.240,00	184.444.240,00	184.444.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		2.904.342.880,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	NON URUSAN								259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00						286.742.921.162,00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00						286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					48 Laporan	48 Laporan	0,00	932.320.400,00	1.062.876.400,00	1.062.876.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		4.907.246.360,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	NON URUSAN								259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00						286.742.921.162,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
1.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)				100 Persen	100 Persen	139.119.141.664,00	144.401.979.722,00	147.773.376.222,00	8.984.449.320,00							148.103.590.984,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD				100 Persen	100 Persen	19.998.271.680,00	22.948.289.160,00	11.868.172.860,00	-8.130.098.820,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		20.163.721.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.939.550.680,00	1.931.295.420,00	1.030.112.520,00	-909.438.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				21 Dokumen	21 Dokumen	17.264.544.320,00	20.090.198.230,00	10.196.314.330,00	-7.068.229.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.264.544.320,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	794.176.680,00	926.795.510,00	641.746.010,00	-152.430.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			899.176.680,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD				100 Persen	100 Persen	8.277.959.200,00	8.805.586.632,00	2.787.061.132,00	-5.490.898.068,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		9.077.959.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	1.649.331.340,00	1.765.207.192,00	75.911.892,00	-1.573.419.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.749.331.340,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	1.662.496.040,00	1.685.902.010,00	64.867.710,00	-1.597.628.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.762.496.040,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.655.956.040,00	1.839.257.410,00	895.785.110,00	-760.170.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.655.956.040,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.654.204.040,00	1.702.591.710,00	872.174.410,00	-782.029.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.954.204.040,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.655.971.740,00	1.812.628.310,00	878.322.010,00	-777.649.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.955.971.740,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD				100 Persen	100 Persen	37.595.503.616,00	40.337.963.464,00	22.191.813.064,00	-15.403.690.552,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		40.095.503.616,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	9.295.573.080,00	9.602.197.714,00	5.347.460.414,00	-3.948.112.666,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.995.573.080,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	12 Laporan	9.216.366.500,00	9.599.763.250,00	5.044.255.800,00	-4.172.110.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.316.366.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	8.454.536.920,00	8.786.622.980,00	5.017.200.830,00	-3.437.336.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.954.536.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	9.011.091.116,00	10.684.155.020,00	6.051.103.820,00	-2.959.987.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.911.091.116,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.617.936.000,00	1.665.224.500,00	731.792.200,00	-886.143.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.917.936.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas	Persentase Peningkatan Kapasitas				100 Persen	100 Persen	17.113.601.008,00	17.683.884.420,00	12.328.427.020,00	-4.785.173.988,00				Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			19.233.601.008,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				11 Dokumen	11 Dokumen	235.592.600,00	227.981.114,00	203.909.114,00	-31.683.486,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			262.401.310,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	11.474.400,00	11.474.400,00	11.474.400,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			18.706.406,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	11.444.900,00	11.444.900,00	11.444.900,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.294.748,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				15 Laporan	20 Laporan	35.221.600,00	35.221.600,00	4.869.600,00	-30.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			52.794.993,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				3 Jenis	3 Jenis	16.852.532.834,00	16.671.010.143,00	16.671.010.143,00	-181.522.691,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		18.599.278.730,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				62 Orang/ Bulan	120 Orang/ Bulan	16.520.870.414,00	16.365.850.481,00	16.365.850.481,00	-155.019.933,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			18.172.957.455,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1000 Dokumen	900 Dokumen	197.567.800,00	176.934.150,00	176.934.150,00	-20.633.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			264.657.025,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				14 Dokumen	14 Dokumen	134.094.620,00	128.225.512,00	128.225.512,00	-5.869.108,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			161.664.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				48 Jenis	48 Jenis	1.571.810.772,00	1.887.106.486,00	1.646.669.686,00	74.858.914,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		1.487.250.262,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	68.127.540,00	64.000.810,00	64.000.810,00	-4.126.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			63.104.238,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	16 Paket	397.243.220,00	730.788.232,00	870.779.432,00	473.536.212,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			323.989.422,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	126.678.652,00	129.063.004,00	129.063.004,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			139.636.871,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.245.940,00	66.119.210,00	56.483.210,00	-13.762.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			93.784.853,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	67.310.140,00	63.183.410,00	63.183.410,00	-4.126.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			99.713.792,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	103.382.140,00	99.255.410,00	59.805.410,00	-43.576.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			113.824.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	738.823.140,00	734.696.410,00	403.354.410,00	-335.468.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			653.196.993,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan				3 Jenis	3 Jenis	120.606.140,00	411.144.692,00	411.144.692,00	290.538.552,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		118.191.152,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	73.835.400,00	361.989.600,00	361.989.600,00	288.154.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	46.770.740,00	49.155.092,00	49.155.092,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			63.191.152,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8 Laporan	8 Laporan	890.695.920,00	960.658.584,00	960.658.584,00	69.962.664,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		1.081.791.938,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	40.743.640,00	36.616.910,00	36.616.910,00	-4.126.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			44.854.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	194.882.140,00	197.266.492,00	197.266.492,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			381.784.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	655.070.140,00	726.775.182,00	726.775.182,00	71.705.042,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			655.153.752,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				227 Unit	227 Unit	2.401.578.260,00	3.024.731.264,00	3.242.713.429,00	841.135.169,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		3.436.799.221,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				31 Unit	31 Unit	761.208.980,00	771.388.362,00	771.388.362,00	10.179.382,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.302.110.128,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				190 Unit	190 Unit	203.287.140,00	192.660.410,00	192.660.410,00	-10.626.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			204.189.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	1.437.082.140,00	2.060.682.492,00	2.278.664.657,00	841.582.517,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.930.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku				100 Persen	100 Persen	3.536.912.840,00	3.549.418.406,00	2.544.619.206,00	2.807.876.521,00							6.344.789.361,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	1.817.484.840,00	1.808.235.542,00	1.305.487.542,00	-511.997.298,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat		2.875.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	84.497.500,00	84.497.500,00	15.570.300,00	-68.927.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				2 Berita Acara	2 Berita Acara	164.767.400,00	164.767.400,00	93.767.400,00	-71.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	1.568.219.940,00	1.558.970.642,00	1.196.149.842,00	-372.070.098,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	567.561.600,00	553.439.032,00	449.420.232,00	-118.141.368,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota		996.217.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				6 Dokumen	6 Dokumen	536.452.400,00	522.329.832,00	424.005.332,00	-112.447.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			961.889.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	31.109.200,00	31.109.200,00	25.414.900,00	-5.694.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			34.327.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku				41 Dokumen	41 Dokumen	1.060.496.700,00	1.096.374.132,00	735.504.132,00	-324.992.568,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota		2.059.865.901,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				8 Laporan	8 Laporan	274.355.700,00	274.355.700,00	95.827.700,00	-178.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			722.009.069,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 Laporan	6 Laporan	546.584.200,00	582.461.632,00	483.609.632,00	-62.974.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			931.243.786,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				27 Dokumen	27 Dokumen	239.556.800,00	239.556.800,00	156.066.800,00	-83.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			406.613.046,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data SIPD				1 Dokumen	1 Dokumen	91.369.700,00	91.369.700,00	54.207.300,00	-37.162.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota		413.706.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	91.369.700,00	91.369.700,00	54.207.300,00	-37.162.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			413.706.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah				100 Persen	100 Persen	2.368.144.240,00	2.266.259.738,00	1.998.814.538,00	1.077.615.195,00							3.445.759.435,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				1 Dokumen	1 Dokumen	776.821.100,00	748.575.764,00	673.332.564,00	-103.488.536,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.202.678.933,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	140.567.980,00	132.314.520,00	102.227.320,00	-38.340.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			173.030.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	120.321.240,00	116.194.510,00	101.187.310,00	-19.133.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			140.360.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	285.843.460,00	275.847.622,00	260.580.422,00	-25.263.038,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			557.047.785,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	230.088.420,00	224.219.112,00	209.337.512,00	-20.750.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			332.241.148,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA				4 Dokumen	4 Dokumen	776.820.700,00	748.575.564,00	671.759.564,00	-105.061.136,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.266.075.702,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	250.076.860,00	240.081.022,00	220.637.022,00	-29.439.838,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			309.182.443,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	235.080.920,00	229.211.812,00	202.925.812,00	-32.155.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			554.453.860,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	89.999.840,00	85.873.110,00	82.993.110,00	-7.006.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			158.577.455,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	201.663.080,00	193.409.620,00	165.203.620,00	-36.459.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			243.861.944,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratraktur dan Wilayah				1 Dokumen	1 Dokumen	814.502.440,00	769.108.410,00	653.722.410,00	-160.780.030,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		977.004.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	351.013.340,00	326.252.960,00	295.770.960,00	-55.242.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			406.378.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	78.929.700,00	78.929.700,00	50.477.700,00	-28.452.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			107.085.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	305.645.800,00	285.012.150,00	256.286.150,00	-49.359.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			356.473.264,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 1 03 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	78.913.600,00	78.913.600,00	51.187.600,00	-27.726.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			107.068.036,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							861.387.648.311,00	983.522.472.624,00	1.308.207.872.732,00	446.820.224.421,00							1.022.740.288.950,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							861.387.648.311,00	983.522.472.624,00	1.308.207.872.732,00	446.820.224.421,00							1.022.740.288.950,00	
	5.02	KEUANGAN							861.387.648.311,00	983.522.472.624,00	1.308.207.872.732,00	446.820.224.421,00							1.022.740.288.950,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)				87.5 Nilai	87.5 Nilai	25.962.146.568,00	34.457.109.992,00	29.410.923.083,00	2.941.279.332,00							28.903.425.900,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu				9 dokumen	9 dokumen	38.855.250,00	75.487.200,00	44.873.000,00	6.017.750,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		45.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	38.855.250,00	75.487.200,00	44.873.000,00	6.017.750,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu				2244 dokumen	2244 dokumen	20.854.689.314,00	28.780.753.984,00	22.568.190.303,00	1.713.500.989,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		21.960.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				119 Orang/ Bulan	119 Orang/ Bulan	20.409.610.400,00	20.152.321.982,00	21.608.826.901,00	1.199.216.501,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			21.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2200 Dokumen	2200 Dokumen	445.078.914,00	8.628.432.002,00	959.363.402,00	514.284.488,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			960.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu				1 tahun	1 tahun	2.163.629.795,00	2.246.792.310,00	3.370.866.652,00	1.207.236.857,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		3.435.425.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.225.900,00	18.204.900,00	17.099.400,00	-1.126.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			18.225.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.031.173.395,00	1.050.278.860,00	2.620.551.220,00	1.589.377.825,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.650.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	598.249.785,00	324.675.840,00	239.052.922,00	-359.196.863,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			240.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.060.825,00	12.587.800,00	11.930.200,00	-130.625,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			13.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.650.000,00	7.999.900,00	7.999.900,00	-5.650.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			14.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	90.562.500,00	127.305.410,00	127.305.410,00	36.742.910,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			91.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan				12 Laporan	12 Laporan	238.494.900,00	544.586.000,00	185.083.000,00	-53.411.900,00	Kota Denpasar,	PAJAK	-	Tata Kelola			240.000.000,00	BADAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu</i>				1 tahun	1 tahun	346.500.000,00	348.210.000,00	348.210.000,00	1.710.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		349.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00	1.710.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	285.300.000,00	285.300.000,00	285.300.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			285.300.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu</i>				1 tahun	1 tahun	2.558.472.209,00	3.005.866.498,00	3.078.783.128,00	520.310.919,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		3.113.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				10 Unit	10 Unit	775.638.654,00	844.089.830,00	758.551.076,00	-17.087.578,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			780.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				20 Unit	20 Unit	6.000.000,00	15.520.000,00	6.400.000,00	400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				40 Unit	40 Unit	137.042.325,00	171.456.710,00	174.914.710,00	37.872.385,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			175.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	5 Unit	970.000.000,00	1.175.324.514,00	1.061.441.898,00	91.441.898,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.065.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	831.717.704.650,00	944.883.884.520,00	1.274.804.651.537,00	157.728.158.400,00							989.445.863.050,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu</i>				72 Dokumen	72 Dokumen	1.681.455.783,00	1.942.004.340,00	1.694.665.340,00	13.209.557,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		1.702.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	27.825.000,00	58.287.100,00	42.069.100,00	14.244.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			28.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	23.452.800,00	58.110.300,00	41.892.300,00	18.439.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			24.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD																		
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				32 Dokumen	32 Dokumen	364.616.385,00	40.764.500,00	40.764.500,00	-323.851.885,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			370.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				32 Dokumen	32 Dokumen	84.511.770,00	20.456.000,00	20.456.000,00	-64.055.770,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			85.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	712.675.068,00	1.089.801.740,00	949.618.740,00	236.943.672,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			720.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	468.374.760,00	674.584.700,00	599.864.700,00	131.489.940,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			475.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu</i>				27 SK Gubernur	27 SK Gubernur	1.030.597.470,00	785.994.700,00	514.026.700,00	-516.570.770,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		855.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota</i>				9 Laporan	9 Laporan	212.955.120,00	140.119.200,00	109.226.700,00	-103.728.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang</i>				9 Laporan	9 Laporan	185.405.430,00	118.846.700,00	80.274.200,00	-105.131.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			195.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				9 Laporan	9 Laporan	215.656.665,00	143.127.400,00	63.616.900,00	-152.039.765,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			225.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				9 Dokumen	9 Dokumen	203.625.135,00	194.972.400,00	194.972.400,00	-8.652.735,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			215.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				9 Dokumen	9 Dokumen	212.955.120,00	188.929.000,00	65.936.500,00	-147.018.620,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase laporan perbendaharaan Daerah disusun tepat waktu				6 dokumen	6 dokumen	610.000.000,00	609.999.800,00	491.359.800,00	-118.640.200,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		492.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																			
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	610.000.000,00	609.999.800,00	491.359.800,00	-118.640.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			492.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu				2 dokumen	2 dokumen	487.233.117,00	732.004.706,00	692.692.706,00	205.459.589,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		740.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	383.827.857,00	628.600.306,00	619.640.306,00	235.812.449,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			630.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi																			
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	103.405.260,00	103.404.400,00	73.052.400,00	-30.352.860,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu				4 dokumen	4 dokumen	827.752.277.020,00	940.667.977.474,00	1.271.346.377.491,00	443.594.100.471,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Bali		985.496.863.050,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.026.843.633,00	2.026.843.633,00	2.026.843.633,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.506.377.057,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	194.405.785.945,00	205.265.185.944,00	205.265.185.944,00	10.859.399.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PAJAK ROKOK PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			356.230.322.273,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000.000,00	151.187.931.213,00	55.464.624.677,00	5.464.624.677,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	581.319.647.442,00	582.188.016.684,00	1.008.589.723.237,00	427.270.075.795,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK AIR PERMUKAAN PAJAK ROKOK	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			526.760.163.720,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan implementasi SIPD				12 dokumen	12 dokumen	156.141.260,00	145.903.500,00	65.529.500,00	-90.611.760,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Pemerintah Provinsi Bali		160.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	156.141.260,00	145.903.500,00	65.529.500,00	-90.611.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			160.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah				100 46.00 Persen Persen	100 46.00 Persen Persen	3.707.797.093,00	4.181.478.112,00	3.992.298.112,00	683.202.907,00							4.391.000.000,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah disusun tepat waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah				1 dokumen 46 Persen	1 dokumen 46 Persen	3.707.797.093,00	4.181.478.112,00	3.992.298.112,00	284.501.019,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		4.391.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	118.872.390,00	118.872.300,00	121.715.300,00	2.842.910,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			125.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	44.000.000,00	44.000.000,00	22.166.000,00	-21.834.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			46.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	323.449.370,00	323.449.000,00	214.630.000,00	-108.819.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	821.475.333,00	1.295.156.812,00	1.531.282.812,00	709.807.479,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.550.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							861.387.648.311,00	983.522.472.624,00	1.308.207.872.732,00	446.820.224.421,00							1.022.740.288.950,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							861.387.648.311,00	983.522.472.624,00	1.308.207.872.732,00	446.820.224.421,00							1.022.740.288.950,00	
	5.02	KEUANGAN							861.387.648.311,00	983.522.472.624,00	1.308.207.872.732,00	446.820.224.421,00							1.022.740.288.950,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)				87.5 Nilai	87.5 Nilai	25.962.146.568,00	34.457.109.992,00	29.410.923.083,00	2.941.279.332,00							28.903.425.900,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu				1 tahun	1 tahun	2.163.629.795,00	2.246.792.310,00	3.370.866.652,00	1.207.236.857,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		3.435.425.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.748.780,00	43.748.500,00	43.748.500,00	-280,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			48.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.449.160,00	9.449.100,00	9.449.100,00	-60,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	10.489.500,00	10.485.000,00	10.485.000,00	-4.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				12 Laporan	12 Laporan	93.325.050,00	93.271.000,00	93.962.000,00	636.950,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			95.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu				1 tahun	1 tahun	346.500.000,00	348.210.000,00	348.210.000,00	1.710.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		349.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu				1 tahun	1 tahun	2.558.472.209,00	3.005.866.498,00	3.078.783.128,00	520.310.919,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		3.113.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	154.531.230,00	154.525.000,00	154.525.000,00	-6.230,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			160.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	15.260.000,00	15.260.000,00	15.260.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			16.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	629.690.444,00	907.690.444,00	407.690.444,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			910.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah				100 46.00 Persen Persen	100 46.00 Persen Persen	3.707.797.093,00	4.181.478.112,00	3.992.298.112,00	683.202.907,00							4.391.000.000,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah disusun tepat waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah				1 dokumen 46 Persen	1 dokumen 46 Persen	3.707.797.093,00	4.181.478.112,00	3.992.298.112,00	284.501.019,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		4.391.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				6 Laporan	6 Laporan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	2.102.504.000,00	-297.496.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.450.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	43.878.900,00	47.662.300,00	47.662.300,00	3.783.400,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		49.806.130,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	19.562.100,00	22.721.100,00	22.721.100,00	3.159.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.370.810,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	24.316.800,00	24.941.200,00	24.941.200,00	624.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.435.320,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	107.755.269.287,00	140.831.740.151,00	143.633.709.782,00	35.878.440.495,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		118.530.796.215,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				340 Orang/ Bulan	340 Orang/ Bulan	107.755.269.287,00	140.831.740.151,00	143.633.709.782,00	35.878.440.495,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK AIR PERMUKAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			118.530.796.215,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.932.000,00	7.039.000,00	10.556.000,00	5.624.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.742.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	335.062.500,00	318.006.500,00	318.006.500,00	-17.056.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			318.914.101,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	3 Paket	101.575.894,00	101.575.894,00	101.575.894,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			111.733.483,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	55.013.300,00	54.960.300,00	324.960.300,00	269.947.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.369.577.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.428.800,00	2.428.800,00	2.428.800,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.671.680,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			14.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	471.325.000,00	483.325.000,00	483.325.000,00	12.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			518.511.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	2.618.028.401,00	7.752.675.449,00	9.824.583.949,00	7.206.555.548,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		10.441.911.274,30	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	9 Unit	226.733.625,00	226.733.625,00	226.733.625,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			534.725.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				90 Unit	90 Unit	972.493.671,00	970.874.300,00	1.279.862.900,00	307.369.229,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.267.972.080,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	1.418.801.105,00	6.555.067.524,00	8.317.987.424,00	6.899.186.319,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.639.213.794,30	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.148.700,00	3.148.700,00	6.147.400,00	2.998.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.465.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	387.433.104,00	387.433.104,00	387.433.104,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			426.176.414,40	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	418.053.373,00	420.453.373,00	420.453.373,00	2.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			514.858.710,30	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	120.765.240,00	124.469.592,00	124.469.592,00	3.704.352,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			132.863.434,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	1.362.003.540,00	1.434.609.652,00	1.434.609.652,00	72.606.112,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.498.208.624,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	90 Unit	934.849.220,00	839.934.430,00	839.934.430,00	-94.914.790,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.028.334.142,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	1.440.000.000,00	1.284.252.460,00	1.634.252.460,00	194.252.460,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.297.476.813,10	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				43 Unit	43 Unit	1.188.227.961,00	1.213.538.973,00	1.233.538.973,00	45.311.012,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.367.575.287,10	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				100 persen	100 persen	27.008.900,00	27.008.900,00	0,00	103.061.150,00							130.070.050,00		
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina				100 persen	100 persen	27.008.900,00	27.008.900,00	0,00	-27.008.900,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten/Kota		130.070.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	27.008.900,00	27.008.900,00	0,00	-27.008.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			130.070.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian PAD terhadap target PAD				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	324.466.500,00	238.541.400,00	162.026.400,00	-162.440.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			357.037.560,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	259.290.700,00	259.290.600,00	93.709.600,00	-165.581.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			285.219.880,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	144.804.100,00	143.625.200,00	143.625.200,00	-1.178.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			159.284.510,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	243.995.900,00	378.095.700,00	308.975.700,00	64.979.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			310.635.270,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	47.120.000,00	47.120.000,00	34.960.000,00	-12.160.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			52.580.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30		
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.259.300,00	5.259.300,00	5.259.300,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.372.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	134.450.900,00	134.216.140,00	192.580.600,00	58.129.700,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			209.225.940,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			38.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				9 Paket	7 Paket	10.239.200,00	10.239.200,00	10.239.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.626.840,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	4.854.500,00	4.854.500,00	4.854.500,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.841.030,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	-350.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	77.400.000,00	77.400.000,00	63.000.000,00	-14.400.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			134.640.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia</i>				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.789.800,00	1.789.800,00	1.789.800,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.980.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	261.000.000,00	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			336.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			297.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan</i>				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	46.450.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	550.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			62.955.640,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	10 Unit	171.910.540,00	175.714.492,00	175.714.492,00	3.803.952,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			279.484.774,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				30 Unit	30 Unit	21.180.000,00	21.180.000,00	21.180.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			41.954.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	655.549.960,00	643.353.314,00	643.353.314,00	-12.196.646,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			721.104.956,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				21 Unit	21 Unit	16.723.800,00	16.723.800,00	16.723.800,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			28.303.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)</i>				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.899.996.300,00	1.753.359.942,00	1.741.959.942,00	-158.036.358,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.130.387.930,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak</i>				5000 Dokumen SSPD	5000 Dokumen SSPD	1.817.436.300,00	1.715.377.516,00	1.686.877.516,00	-130.558.784,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.035.281.930,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	23 Unit	20.625.800,00	20.625.800,00	13.435.800,00	-7.190.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			26.477.990,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	391.489.260,00	360.859.772,00	370.929.772,00	-20.559.488,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			430.638.186,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				14518 Dokumen SSPD	14518 Dokumen SSPD	714.195.680,00	671.186.002,00	633.186.002,00	-81.009.678,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			785.651.644,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00						181.954.158.775,30		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.949.800,00	6.949.800,00	6.949.800,00	0,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			13.282.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	136.874.500,00	136.866.890,00	142.850.490,00	5.975.990,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			157.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.783.700,00	6.783.700,00	6.783.700,00	0,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.712.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.393.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	-18.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.445.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	17.460.000,00	21.285.000,00	21.285.000,00	3.825.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.373.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.978.200,00	1.978.200,00	1.978.200,00	0,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	184.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	294.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			323.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.855.000,00	45.855.000,00	45.855.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			53.680.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	220.767.640,00	225.937.992,00	225.937.992,00	5.170.352,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			270.254.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	21.460.000,00	21.460.000,00	21.460.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			24.054.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	378.321.400,00	533.098.428,00	533.098.428,00	154.777.028,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			458.419.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	17 Unit	20.388.200,00	16.250.000,00	16.250.000,00	-4.138.200,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			34.967.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	488.503.540,00	449.620.592,00	449.620.592,00	-38.882.948,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			602.584.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12620 Dokumen SSPD	12620 Dokumen SSPD	541.685.680,00	498.676.002,00	507.226.002,00	-34.459.678,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			665.241.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00								181.954.158.775,30
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.037.600,00	5.037.600,00	8.925.600,00	3.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			13.103.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	134.005.000,00	133.993.390,00	174.517.890,00	40.512.890,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			219.997.690,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	17.228.800,00	17.186.050,00	17.186.050,00	-42.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.984.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.744.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.596.600,00	10.575.000,00	10.575.000,00	-21.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan				12 Laporan	12 Laporan	18.120.000,00	18.120.000,00	20.320.000,00	2.350.000,00	Kab. Badung	PENDAPATAN		Tata Kelola			24.815.000,00	BADAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.978.200,00	1.978.200,00	1.978.200,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.640.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	378.000.000,00	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			439.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	437.230.947,00	437.230.947,00	437.230.947,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			550.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Panunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.272.000,00	36.265.000,00	36.265.000,00	-7.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			58.543.760,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	185.962.040,00	188.338.992,00	188.338.992,00	2.376.952,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			294.476.314,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	19.920.000,00	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.875.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	656.857.697,00	664.194.297,00	816.055.844,00	159.198.147,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			740.250.721,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	27.840.000,00	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			52.855.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	2.321.488.440,00	2.140.725.352,00	1.635.525.352,00	-685.963.088,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.553.637.284,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				288 Dokumen SSPD	288 Dokumen SSPD	749.787.820,00	665.703.576,00	624.473.576,00	-125.314.244,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			824.766.602,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.435.800,00	4.435.800,00	4.435.800,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.043.020,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	127.167.600,00	199.920.870,00	404.761.770,00	277.594.170,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			219.912.957,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	57.122.194,00	57.122.194,00	57.122.194,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			62.834.413,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.529.500,00	65.536.700,00	65.536.700,00	7.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			92.974.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.424.000,00	6.424.000,00	6.424.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.666.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	20.880.000,00	20.875.000,00	20.875.000,00	-5.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			41.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	12 Laporan	13.365.000,00	13.365.000,00	13.365.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			29.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.491.500,00	1.491.500,00	1.491.500,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	474.550.000,00	474.550.000,00	474.550.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			550.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	505.918.462,00	391.923.894,00	391.923.894,00	-113.994.568,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			556.510.308,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	47.925.000,00	47.895.800,00	51.270.800,00	3.345.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			61.173.640,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzinannya				6 Unit	6 Unit	148.644.780,00	203.989.104,00	226.489.104,00	77.844.324,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			208.098.360,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	17.040.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.671.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	782.765.751,00	751.906.893,00	901.906.893,00	119.141.142,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			943.574.610,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	21 Unit	33.306.900,00	33.026.900,00	49.764.600,00	16.457.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			138.260.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				154572 Dokumen SSPD	154572 Dokumen SSPD	489.903.540,00	490.087.084,00	547.087.084,00	57.183.544,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			695.466.613,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.931.000,00	16.931.000,00	16.931.000,00	0,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.856.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	145.969.900,00	145.966.580,00	145.966.580,00	-3.320,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			203.336.870,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56.718.634,00	56.718.634,00	56.718.634,00	0,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			62.390.497,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.475.000,00	22.463.600,00	22.463.600,00	-11.400,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			23.864.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.212.500,00	8.212.500,00	8.212.500,00	0,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.274.650,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.397.500,00	12.375.000,00	15.600.000,00	3.202.500,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			28.512.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.600.000,00	20.040.000,00	18.120.000,00	-9.480.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			36.828.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.826.000,00	2.826.000,00	2.826.000,00	0,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.168.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			261.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	310.000.000,00	310.000.000,00	337.094.457,00	27.094.457,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			363.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			62.363.840,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	127.897.500,00	147.497.500,00	147.497.500,00	19.600.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			171.849.920,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	41 Unit	38.990.000,00	38.300.000,00	38.300.000,00	-690.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			42.801.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	562.185.680,00	551.731.412,00	560.762.898,00	-1.422.782,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			681.588.021,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				29 Unit	29 Unit	35.910.000,00	35.020.000,00	35.020.000,00	-890.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.534.710,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	1.257.299.920,00	1.154.773.644,00	1.154.773.644,00	-102.526.276,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.410.089.912,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				13119 Dokumen SSPD	13119 Dokumen SSPD	644.552.100,00	590.206.150,00	590.131.150,00	-54.420.950,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			791.776.018,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.009.700,00	7.009.700,00	7.009.700,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.675.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	116.789.300,00	116.788.300,00	116.788.300,00	-1.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			128.467.130,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			33.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.399.700,00	3.399.700,00	3.399.700,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.255.000,00	3.250.800,00	3.250.800,00	-4.200,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.742.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	-25.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.040.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			39.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.789.800,00	1.789.800,00	1.789.800,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.376.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	130.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			132.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan				1 Laporan	1 Laporan	359.849.487,00	359.849.487,00	359.849.487,00	0,00	Kab. Bangli,	PENDAPATAN	-	Tata Kelola			395.834.436,00	BADAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	47.995.000,00	47.995.000,00	-5.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			52.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	61.318.700,00	104.518.700,00	104.518.700,00	43.200.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			115.197.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.100.000,00	7.100.000,00	14.290.000,00	7.190.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			16.423.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	418.503.540,00	412.176.002,00	412.176.002,00	-6.327.538,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			460.353.894,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	8.099.200,00	8.099.200,00	8.099.200,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			14.619.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	544.049.960,00	492.786.822,00	492.786.822,00	-51.263.138,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			598.454.956,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				10000 Dokumen SSPD	10000 Dokumen SSPD	649.732.100,00	594.342.232,00	577.622.232,00	-72.109.868,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			714.705.310,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00								181.954.158.775,30
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.660.400,00	2.660.400,00	2.660.400,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.260.960,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.056.200,00	110.050.400,00	110.050.400,00	-5.800,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			174.172.240,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.280.000,00	30.280.000,00	30.280.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			33.308.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.674.000,00	3.674.000,00	3.674.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			11.464.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.452.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi				12 Laporan	12 Laporan	4.332.600,00	4.325.000,00	4.325.000,00	-7.600,00	Kab. Klungkung,	PENDAPATAN	-	Tata Kelola			5.808.000,00	BADAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	3.827.100,00	3.827.100,00	3.827.100,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.379.760,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				15 Paket	15 Paket	122.252.000,00	122.245.980,00	122.245.980,00	-6.020,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			166.352.670,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	8 Paket	27.837.000,00	27.837.000,00	27.837.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.620.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	5.182.900,00	5.182.900,00	5.182.900,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				24 Dokumen	24 Dokumen	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.392.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	-25.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.752.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	27.780.000,00	55.410.000,00	61.650.000,00	33.870.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			33.561.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia</i>				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.193.200,00	1.193.200,00	1.193.200,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.191.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			181.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	237.000.000,00	237.000.000,00	289.060.356,00	52.060.356,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			260.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan</i>				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	52.498.000,00	52.490.000,00	52.490.000,00	-8.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			57.910.380,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	5 Unit	101.863.740,00	123.835.592,00	129.435.592,00	27.571.852,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			134.875.114,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	20 Unit	14.200.000,00	14.200.000,00	34.200.000,00	20.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			18.744.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	352.092.840,00	333.843.542,00	433.843.542,00	81.750.702,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			554.062.124,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang</i>				16 Unit	16 Unit	11.902.600,00	16.020.500,00	16.020.500,00	4.117.900,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.622.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)					100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00		-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.					12 Laporan	12 Laporan	516.385.680,00	491.616.002,00	496.176.002,00	-20.209.678,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		579.310.248,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.					13155 Dokumen SSPD	13155 Dokumen SSPD	497.703.540,00	458.820.592,00	473.920.592,00	-23.782.948,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		581.023.894,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							360.788.757.284,00	51.534.466.983,00	62.580.439.983,00	-298.208.317.301,00							237.289.156.455,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							360.788.757.284,00	51.534.466.983,00	62.580.439.983,00	-298.208.317.301,00							237.289.156.455,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							359.132.131.864,00	50.015.636.589,00	61.419.625.589,00	-297.712.506.275,00							235.632.531.035,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemén Kinerja					86,5 Nilai	86,5 Nilai	352.672.510.688,00	43.560.217.737,00	55.988.268.737,00	-123.499.600.829,00						229.172.909.859,00	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana					4 jenis	4 jenis	225.621.025,00	244.340.600,00	102.382.600,00	-123.238.425,00		-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		225.621.025,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	65.646.000,00	65.646.000,00	10.200.000,00	-55.446.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		65.646.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		3.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	75.075.025,00	75.074.600,00	37.042.600,00	-38.032.425,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		75.075.025,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	4 Laporan	81.300.000,00	100.020.000,00	51.540.000,00	-29.760.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		81.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	341.666.515.063,00	31.401.080.353,00	31.401.080.353,00	-310.265.434.710,00		-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		217.126.746.234,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					137 Orang/ Bulan	137 Orang/ Bulan	341.666.515.063,00	31.401.080.353,00	31.401.080.353,00	-310.265.434.710,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		217.126.746.234,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana					6 Jenis	6 Jenis	612.466.100,00	627.503.034,00	497.712.034,00	-114.754.066,00		-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		612.466.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	17.766.000,00	17.762.400,00	17.762.400,00	-3.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		17.766.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	153.768.400,00	153.768.400,00	153.768.400,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		153.768.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	3 Paket	98.891.000,00	85.079.034,00	85.079.034,00	-13.811.966,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		98.891.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakán dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang					2 Paket	2 Paket	8.695.000,00	22.503.400,00	10.280.400,00	1.585.400,00	Kota Denpasar	PENDAPATAN	-	Tata Kelola		8.695.000,00	BADAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				720 Dokumen	720 Dokumen	4.140.000,00	4.137.000,00	4.137.000,00	-3.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.140.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	275.750.000,00	290.593.000,00	197.985.000,00	-77.765.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			275.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana				1 Jenis	1 Jenis	602.790.400,00	601.383.000,00	601.183.000,00	-1.607.400,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		602.790.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	575.839.000,00	575.833.000,00	575.633.000,00	-206.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			575.839.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana				3 Jenis	3 Jenis	1.429.399.200,00	1.364.514.930,00	1.364.514.930,00	-64.884.270,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.429.399.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	2.386.400,00	2.386.400,00	-13.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	253.600.000,00	253.600.000,00	253.600.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			253.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	909.624.220,00	867.129.578,00	867.129.578,00	-42.494.642,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			909.624.220,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana				4 Jenis	4 Jenis	1.175.886.900,00	1.321.395.820,00	1.321.395.820,00	145.508.920,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.175.886.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	890.984.400,00	996.648.320,00	996.648.320,00	105.663.920,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			890.984.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	118.731.000,00	118.731.000,00	38.731.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	117.770.000,00	117.700.000,00	117.700.000,00	-70.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			117.770.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi				60,00 Nilai	60,00 Nilai	6.459.621.176,00	6.455.418.852,00	5.431.356.852,00	0,00							6.459.621.176,00	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana				6 Jenis	6 Jenis	1.713.300.760,00	1.673.304.922,00	1.335.444.922,00	-377.855.838,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.713.300.760,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	74.830.000,00	74.830.000,00	41.856.000,00	-32.974.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			74.830.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	920.904.000,00	890.904.000,00	820.474.000,00	-100.430.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan			920.904.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	71.584.000,00	71.584.000,00	39.368.000,00	-32.216.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			71.584.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	162.320.140,00	150.033.410,00	113.663.410,00	-48.656.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			162.320.140,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																			
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	263.590.500,00	271.750.500,00	154.596.500,00	-108.994.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			263.590.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	220.072.120,00	214.203.012,00	165.487.012,00	-54.585.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			220.072.120,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik				3 Jenis	3 Jenis	432.035.820,00	448.790.930,00	338.628.930,00	-93.406.890,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		432.035.820,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	81.200.240,00	71.793.110,00	50.375.110,00	-30.825.130,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			81.200.240,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																			
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				12 Laporan	12 Laporan	152.502.440,00	187.543.410,00	137.791.410,00	-14.711.030,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			152.502.440,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	198.333.140,00	189.454.410,00	150.462.410,00	-47.870.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			198.333.140,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan				5 Jenis	5 Jenis	3.667.399.056,00	3.713.656.694,00	3.330.968.694,00	-336.430.362,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.667.399.056,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	164.375.140,00	100.730.492,00	73.996.492,00	-90.378.648,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			164.375.140,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.585.222.140,00	1.587.606.492,00	1.492.206.492,00	-93.015.648,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.585.222.140,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.1.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00	27.248.000,00	18.608.000,00	-13.392.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	1 Dokumen	161.447.000,00	280.244.000,00	216.266.000,00	54.819.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			161.447.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				12 Dokumen	12 Dokumen	126.127.176,00	119.600.410,00	78.644.410,00	-47.482.766,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			126.127.176,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana				4 Jenis	4 Jenis	646.885.540,00	619.666.306,00	426.314.306,00	-220.571.234,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		646.885.540,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				5 Dokumen	5 Dokumen	151.958.280,00	150.185.902,00	110.273.902,00	-41.684.378,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			151.958.280,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				3 Orang	3 Orang	162.254.000,00	122.577.100,00	59.545.100,00	-102.708.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			162.254.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				400 Orang	400 Orang	161.898.280,00	177.870.702,00	139.094.702,00	-22.803.578,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			161.898.280,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1500 Orang	1500 Orang	138.090.280,00	136.347.902,00	100.333.902,00	-37.756.378,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			138.090.280,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				2 Laporan	2 Laporan	32.684.700,00	32.684.700,00	17.066.700,00	-15.618.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			32.684.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.656.625.420,00	1.518.830.394,00	1.160.814.394,00	-495.811.026,00							1.656.625.420,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus Pengembangan SDM berbasis Kompetensi				100 Persen	100 Persen	1.656.625.420,00	1.518.830.394,00	1.160.814.394,00	0,00							1.656.625.420,00	
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah jenis kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang dilaksanakan				6 Jenis	6 Jenis	1.656.625.420,00	1.518.830.394,00	1.160.814.394,00	-495.811.026,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.656.625.420,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				2 Dokumen	2 Dokumen	274.167.140,00	273.191.492,00	202.709.492,00	-71.457.648,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			274.167.140,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	265.818.000,00	263.898.000,00	245.776.000,00	-20.042.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			265.818.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				120 Orang	120 Orang	497.161.140,00	499.545.492,00	466.439.492,00	-30.721.648,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			497.161.140,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				2 Laporan	2 Laporan	366.547.500,00	246.566.500,00	116.684.500,00	-249.863.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			366.547.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				3 Dokumen	3 Dokumen	119.773.640,00	114.950.910,00	85.838.910,00	-33.934.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			119.773.640,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				6 Dokumen	6 Dokumen	133.158.000,00	120.678.000,00	43.366.000,00	-89.792.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			133.158.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							360.788.757.284,00	51.534.466.983,00	62.580.439.983,00	-298.208.317.301,00							237.289.156.455,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							360.788.757.284,00	51.534.466.983,00	62.580.439.983,00	-298.208.317.301,00							237.289.156.455,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							359.132.131.864,00	50.015.636.589,00	61.419.625.589,00	-297.712.506.275,00							235.632.531.035,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				8 6 , 5 Nilai	8 6 , 5 Nilai	352.672.510.688,00	43.560.217.737,00	55.988.268.737,00	-123.499.600.829,00							229.172.909.859,00	
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Peranekat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum peranekat daerah				2 Jenis	2 Jenis	612.466.100,00	627.503.034,00	497.712.034,00	-114.754.066,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan	Aparatur		612.466.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.157.700,00	5.361.800,00	5.361.800,00	204.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.157.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	48.298.000,00	48.298.000,00	23.338.000,00	-24.960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			48.298.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang terlaksana				1 layanan	1 layanan	602.790.400,00	601.383.000,00	601.183.000,00	-1.607.400,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		602.790.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	26.951.400,00	25.550.000,00	25.550.000,00	-1.401.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			26.951.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana				1 Jenis	1 Jenis	1.429.399.200,00	1.364.514.930,00	1.364.514.930,00	-64.884.270,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.429.399.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	263.774.980,00	241.398.952,00	241.398.952,00	-22.376.028,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			263.774.980,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana				2 Jenis	2 Jenis	1.175.886.900,00	1.321.395.820,00	1.321.395.820,00	145.508.920,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.175.886.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	78.162.500,00	78.656.500,00	78.656.500,00	494.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			78.162.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	8.970.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	690.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.970.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi				60,00 Nilai	60,00 Nilai	6.459.621.176,00	6.455.418.852,00	5.431.356.852,00	0,00							6.459.621.176,00	
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN				1 Jenis	1 Jenis	3.667.399.056,00	3.713.656.694,00	3.330.968.694,00	-336.430.362,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.667.399.056,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	1.598.227.600,00	1.598.227.300,00	1.451.247.300,00	-146.980.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.598.227.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA								360.788.757.284,00	51.534.466.983,00	62.580.439.983,00	-298.208.317.301,00						237.289.156.455,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							360.788.757.284,00	51.534.466.983,00	62.580.439.983,00	-298.208.317.301,00							237.289.156.455,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							359.132.131.864,00	50.015.636.589,00	61.419.625.589,00	-297.712.506.275,00							235.632.531.035,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manaemen Kinerja				86,5 Nilai	86,5 Nilai	352.672.510.688,00	43.560.217.737,00	55.988.268.737,00	-123.499.600.829,00							229.172.909.859,00	
	5.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia				88 persen	88 persen	6.959.832.000,00	8.000.000.000,00	20.700.000.000,00	13.740.168.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		8.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	6.959.832.000,00	8.000.000.000,00	20.700.000.000,00	13.740.168.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH								19.119.816.620,00	23.285.290.479,00	26.975.192.479,00	7.855.375.859,00						28.092.650.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							19.119.816.620,00	23.285.290.479,00	26.975.192.479,00	7.855.375.859,00							28.092.650.000,00	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							19.119.816.620,00	23.285.290.479,00	26.975.192.479,00	7.855.375.859,00							28.092.650.000,00	
1.	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG IIRUSAN PEMFRINTAHAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				80 Nilai	80 Nilai	15.324.816.620,00	15.856.330.579,00	15.925.775.579,00	1.249.333.380,00							16.574.150.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	23.789.000,00	-31.211.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	35.162.000,00	-14.838.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	10.428.500.000,00	11.284.006.527,00	11.442.366.836,00	1.013.866.836,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		11.471.350.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				51 Orang/ Bulan	46 Orang/ Bulan	10.428.500.000,00	11.284.006.527,00	11.442.366.836,00	1.013.866.836,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			11.471.350.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan</i>				100 Persen	100 Persen	685.568.200,00	935.482.800,00	563.292.800,00	-122.275.400,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		696.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	6 Paket	21.938.000,00	21.938.000,00	21.938.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			23.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				31 Paket	28 Paket	198.907.000,00	198.905.500,00	198.905.500,00	-1.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				9 Paket	8 Paket	107.475.000,00	107.436.400,00	107.436.400,00	-38.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			110.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	6 Paket	24.180.200,00	24.180.200,00	24.180.200,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.998.700,00	14.998.700,00	-1.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			16.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	318.068.000,00	568.024.000,00	195.834.000,00	-122.234.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			320.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan</i>				100 Persen 22 Paket/Unit	100 Persen	1.697.754.884,00	884.819.840,00	1.214.143.531,00	-483.611.353,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.800.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Paket	29 Paket	517.834.600,00	419.204.600,00	551.291.800,00	33.457.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			600.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	30 Unit	1.179.920.284,00	465.615.240,00	662.851.731,00	-517.068.553,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan</i>				100 Persen 38 Laporan	100 Persen	497.015.980,00	513.699.044,00	513.699.044,00	16.683.064,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		518.300.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.992.600,00	4.992.600,00	-7.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	167.200.000,00	167.200.000,00	167.200.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			177.300.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</i>				2 Laporan	2 Laporan	185.000.000,00	185.000.000,00	167.233.000,00	-17.767.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			203.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	139.365.900,00	61.661.400,00	-13.338.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>				4 Laporan	4 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	150.760.000,00	-19.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGHUBUNG							9.757.562.920,00	9.889.203.083,00	10.780.850.683,00	1.023.287.763,00							11.132.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.757.562.920,00	9.889.203.083,00	10.780.850.683,00	1.023.287.763,00							11.132.000.000,00	
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG							9.757.562.920,00	9.889.203.083,00	10.780.850.683,00	1.023.287.763,00							11.132.000.000,00	
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Badan Penghubung)				82 Nilai	82 Nilai	6.434.088.379,00	6.928.728.616,00	7.537.068.316,00	887.911.621,00							7.322.000.000,00	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat</i>				100 persen	100 persen	4.999.300,00	4.999.300,00	4.999.300,00	0,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	4.999.300,00	4.999.300,00	4.999.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.987.398.459,00	3.119.038.696,00	3.119.038.696,00	131.640.237,00			-	-	-		3.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				16 Orang/ Bulan	16 Orang/ Bulan	2.987.398.459,00	3.119.038.696,00	3.119.038.696,00	131.640.237,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	230.640.900,00	230.640.900,00	252.848.600,00	22.207.700,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		299.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	14.989.400,00	14.989.400,00	14.989.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	54.981.200,00	54.981.200,00	67.981.200,00	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	8.499.300,00	8.499.300,00	5.567.000,00	-2.932.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	62.171.000,00	62.171.000,00	74.311.000,00	12.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			110.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	229.503.420,00	229.503.420,00	546.003.420,00	316.500.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung</i>				10 Unit	38 Unit	229.503.420,00	229.503.420,00	546.003.420,00	316.500.000,00	Semua Kota/Kab,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan			350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.474.896.236,00	1.474.896.236,00	1.474.896.236,00	0,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.642.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.989.100,00	8.989.100,00	8.989.100,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	306.800.000,00	306.800.000,00	306.800.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			325.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.159.107.136,00	1.159.107.136,00	1.159.107.136,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.506.650.064,00	1.869.650.064,00	2.139.282.064,00	632.632.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.925.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	969.537.868,00	1.332.537.868,00	1.462.537.868,00	493.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	395.343.000,00	395.343.000,00	534.975.000,00	139.632.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			650.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	141.769.196,00	141.769.196,00	141.769.196,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			175.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta				90 Indeks	90 Indeks	3.323.474.541,00	2.960.474.467,00	3.243.782.367,00	486.525.459,00							3.810.000.000,00	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung				90 Indeks	90 Indeks	3.323.474.541,00	2.960.474.467,00	3.243.782.367,00	-79.692.174,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		3.810.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				12 Laporan	12 Laporan	159.920.561,00	159.928.487,00	113.273.387,00	-46.647.174,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			160.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				12 Laporan	12 Laporan	314.777.196,00	314.769.196,00	364.482.196,00	49.705.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			550.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				12 Laporan	12 Laporan	2.848.776.784,00	2.485.776.784,00	2.766.026.784,00	-82.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
		INSPEKTORAT								38.758.989.954,00	38.664.248.243,00	36.779.683.543,00	-1.979.306.411,00						47.807.050.000,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							38.758.989.954,00	38.664.248.243,00	36.779.683.543,00	-1.979.306.411,00							47.807.050.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							38.758.989.954,00	38.664.248.243,00	36.779.683.543,00	-1.979.306.411,00							47.807.050.000,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				87,5 Persen	87,5 Persen	32.136.713.514,00	31.979.995.651,00	31.955.352.851,00	8.214.336.486,00							40.351.050.000,00	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu				100 Persen	100 Persen	89.999.800,00	89.999.800,00	42.659.000,00	-47.340.800,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		115.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	49.999.800,00	49.999.800,00	18.521.800,00	-31.478.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			70.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	24.137.200,00	-15.862.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu				100 Persen	100 Persen	21.485.658.000,00	26.324.679.033,00	26.324.679.033,00	4.839.021.033,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal				100 Persen	100 Persen	2.529.991.560,00	2.551.448.128,00	1.674.358.128,00	-855.633.432,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.890.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				9 Laporan	9 Laporan	199.999.680,00	204.768.384,00	137.694.384,00	-62.305.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			255.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				15 Laporan	15 Laporan	250.023.080,00	254.791.784,00	205.213.784,00	-44.809.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			255.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				45 Laporan	45 Laporan	79.999.600,00	79.999.500,00	48.013.500,00	-31.986.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				2 Laporan	2 Laporan	250.007.140,00	252.391.492,00	165.394.492,00	-84.612.648,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			355.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				58 Laporan	58 Laporan	899.999.480,00	904.768.184,00	592.736.184,00	-307.263.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			950.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal																			
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	449.962.800,00	449.960.300,00	283.700.300,00	-166.262.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			515.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				55 Dokumen	55 Dokumen	399.999.780,00	404.768.484,00	241.605.484,00	-158.394.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			460.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu				100 Persen	100 Persen	1.110.004.900,00	1.027.561.460,00	679.519.460,00	-430.485.440,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Masyarakat		1.253.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																			
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	109.999.980,00	114.768.684,00	96.452.684,00	-13.547.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			153.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				34 Laporan	34 Laporan	1.000.004.920,00	912.792.776,00	583.066.776,00	-416.938.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.100.000.000,00	INSPEKTORAT	
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	2.982.279.980,00	3.105.243.004,00	2.470.453.104,00	330.720.020,00							3.313.000.000,00		
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	2.037.291.060,00	2.058.751.228,00	1.731.149.328,00	-306.141.732,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.210.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																			
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				54 Rekomendasi	54 Rekomendasi	387.355.220,00	394.509.276,00	324.932.376,00	-62.422.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			510.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																			
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1.649.935.840,00	1.664.241.952,00	1.406.216.952,00	-243.718.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.700.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	944.988.920,00	1.046.491.776,00	739.303.776,00	-205.685.144,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.103.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				12 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	274.994.820,00	282.141.676,00	236.435.676,00	-38.559.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>				33 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	169.995.000,00	169.988.800,00	141.882.800,00	-28.112.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			190.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				3 Kegiatan	3 Kegiatan	399.999.900,00	494.364.900,00	283.068.900,00	-116.931.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			460.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	99.999.200,00	99.996.400,00	77.916.400,00	-22.082.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			153.000.000,00	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				83.5 Nilai	83.5 Nilai	12.394.216.428,00	13.595.343.451,00	13.568.348.027,00	424.738.304,00							12.818.954.732,00	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>				8 Dokumen	8 Dokumen	104.930.400,00	131.164.000,00	80.596.000,00	-24.334.400,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		88.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	74.940.800,00	93.164.000,00	57.956.000,00	-16.984.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			49.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	4 Laporan	29.989.600,00	38.000.000,00	22.640.000,00	-7.349.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			38.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan</i>				100 %	100 %	9.313.377.684,00	10.015.015.243,00	10.015.015.243,00	701.637.559,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		9.546.212.126,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				43 Orang/ Bulan	59 Orang/ Bulan	9.313.377.684,00	10.015.015.243,00	10.015.015.243,00	701.637.559,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.546.212.126,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</i>				6 Laporan	6 Laporan	670.697.724,00	775.903.824,00	601.359.824,00	-69.337.900,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		694.517.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	12.371.000,00	0,00	0,00	-12.371.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				-	3 Paket	0,00	14.921.500,00	14.921.500,00	14.921.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			38.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	NON URUSAN							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00	
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00	
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	138.647.600,00	0,00	0,00	-138.647.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00	
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				-	5 Paket	0,00	240.117.300,00	240.117.300,00	240.117.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			138.647.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	77.229.424,00	0,00	0,00	-77.229.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				-	2 Paket	0,00	77.229.424,00	77.229.424,00	77.229.424,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	34.613.600,00	0,00	0,00	-34.613.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	35.880.500,00	35.880.500,00	35.880.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			34.613.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	4.996.100,00	0,00	0,00	-4.996.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				-	12 Dokumen	0,00	4.996.100,00	4.996.100,00	4.996.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.996.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	402.840.000,00	0,00	0,00	-402.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	12 Laporan	0,00	402.759.000,00	228.215.000,00	228.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			402.760.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	233.807.640,00	606.324.240,00	711.824.240,00	478.016.600,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		207.312.270,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	74.884.900,00	189.401.500,00	294.901.500,00	220.016.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	158.922.740,00	416.922.740,00	416.922.740,00	258.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			207.312.270,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	1.082.591.180,00	1.058.014.344,00	1.144.530.920,00	61.939.740,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		1.312.225.736,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	11.994.800,00	11.994.800,00	11.994.800,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	139.100.000,00	9.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			247.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	940.596.380,00	916.019.544,00	993.436.120,00	52.839.740,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.042.225.736,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	NON URUSAN								43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00	
8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah terpelihara					5 Laporan	5 Laporan	988.811.800,00	1.008.921.800,00	1.015.021.800,00	26.210.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		970.687.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				23 unit Unit	23 unit Unit	772.100.000,00	0,00	0,00	-772.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00	
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				-	23 unit Unit	0,00	790.100.000,00	790.100.000,00	790.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			749.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	17.850.000,00	19.960.000,00	19.960.000,00	2.110.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			31.024.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	181.981.800,00	181.981.800,00	181.981.800,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			173.030.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				13 Unit	13 Unit	16.880.000,00	16.880.000,00	22.980.000,00	6.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan dan			17.532.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila				92 %	92 %	4.382.046.020,00	4.732.046.394,00	4.687.872.394,00	5.339.765.500,00							9.721.811.520,00	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	500 Orang	4.382.046.020,00	4.732.046.394,00	4.687.872.394,00	305.826.374,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		9.721.811.520,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	500 Orang	846.846.320,00	1.196.846.794,00	1.239.752.794,00	392.906.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.669.323.645,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				72 Orang	72 Orang	3.535.199.700,00	3.535.199.600,00	3.448.119.600,00	-87.080.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.052.487.875,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik				85 %	85 %	24.272.226.420,00	24.374.767.294,00	24.195.610.794,00	4.168.675.810,00							28.440.902.230,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1200 Orang	1200 Orang	24.272.226.420,00	24.374.767.294,00	24.195.610.794,00	-76.615.626,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		28.440.902.230,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1200 Orang	1200 Orang	24.272.226.420,00	24.374.767.294,00	24.195.610.794,00	-76.615.626,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			28.440.902.230,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terdata				85 %	85 %	246.649.900,00	681.089.000,00	503.817.000,00	240.850.100,00							487.500.000,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				500 Orang	500 Orang	246.649.900,00	681.089.000,00	503.817.000,00	257.167.100,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		487.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				500 Orang	500 Orang	246.649.900,00	681.089.000,00	503.817.000,00	257.167.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			487.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah				85 %	85 %	897.378.760,00	1.049.045.322,00	836.547.322,00	346.998.500,00							1.244.377.260,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	897.378.760,00	1.049.045.322,00	836.547.322,00	-60.831.438,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		1.244.377.260,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	897.378.760,00	1.049.045.322,00	836.547.322,00	-60.831.438,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.244.377.260,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial				95 %	95 %	1.598.246.320,00	1.676.175.912,00	4.150.316.912,00	3.693.345.350,00							5.291.591.670,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan BidangKewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				40 Orang	40 Orang	1.598.246.320,00	1.676.175.912,00	4.150.316.912,00	2.552.070.592,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		5.291.591.670,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				40 Orang	40 Orang	598.246.420,00	676.176.212,00	3.185.459.212,00	2.587.212.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.070.045.170,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	999.999.900,00	999.999.700,00	964.857.700,00	-35.142.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.221.546.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								5.565.964.462.264,00	6.827.385.005.313,20	7.165.907.488.376,00	1.599.943.026.112,00							6.469.424.736.499,30	

BAB VI

PENUTUP

Dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 diharapkan akan tersusun kegiatan yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat di Provinsi Bali. Selanjutnya Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 ini yang merupakan hasil proses sinkronisasi dari penjarangan dari para pemangku kepentingan, proses teknokratis, *top-down* dan *bottom-up* diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.

Salah satu tujuan dari penyusunan ini adalah menyelaraskan program dan prioritas pembangunan Provinsi Bali dengan kondisi dan dinamika saat ini. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai pembangunan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 yang telah disusun ini memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* yang berperan dalam pembangunan, yaitu:

1. Dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan secara proporsional, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
3. Sesuai ketentuan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 serta selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan RKA-SKPD Tahun 2025 sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.